



UNIVERSITAS INDONESIA

**EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
TINJAUAN KRITIS TENTANG KARAKTERISTIK
DAN IDENTITAS KEILMUAN**

DISERTASI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam bidang Ilmu Pengetahuan Budaya
dengan kekhususan Filsafat,
dan dipertahankan di dalam Sidang Terbuka
Senat Guru Besar Universitas Indonesia
di bawah Pimpinan Rektor Universitas Indonesia
Prof. Dr. der soz Gumilar Rusliwa Somantri
pada hari Sabtu, 28 Juni 2008**

D
00901

Oleh

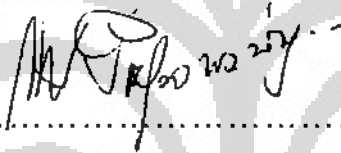
FRANCISCUS VAN YLST

**Program Studi Ilmu Filsafat
Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
Depok
2008**



PROMOTOR

Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo



.....

KO PROMOTOR

Dr. Akhyar Yusuf Lubis



.....

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008, Pukul 13.00 wib dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Vincensius Y. Jolasa, Ph.D.
(Ketua Penguji)

2. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo
(Promotor)

3. Dr. Akhyar Yusuf Lubis
(Kopromotor)

4. Prof. Dr. Alois Agus Nugroho
(Penguji)

5. Dr. V. Irmayanti
(Penguji)

6. Dr. Singkop Boas Boangmanalu
(Penguji)

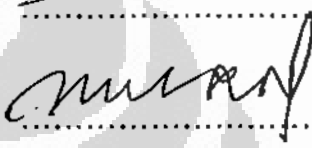
7. Dr. Selu Margaretha Kushendrawati
(Penguji)



.....



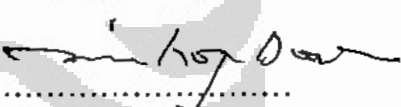
.....



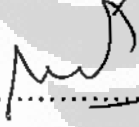
.....



.....



.....



.....

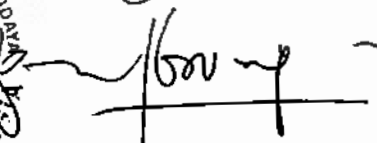
Disahkan oleh:

Ketua Departemen Filsafat
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Vincensius Y. Jolasa, Ph.D.

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 131 882 265

LEMBAR EPIGRAPH

PRIMO VIVERE,

DEINDE PHILOSOPHARI

PERTAMA-TAMA HIDUP DULU,

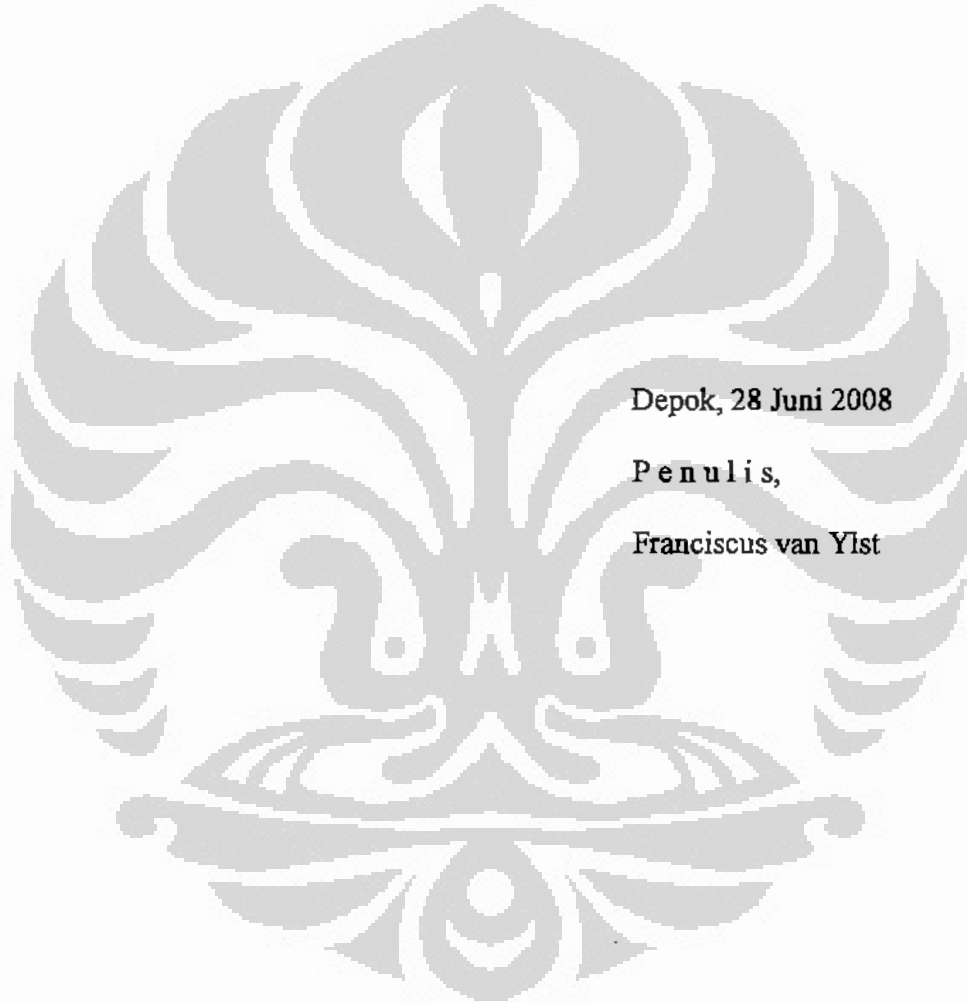
BARU KEMUDIAN BERFILSAFAT

**(Terjemahan bebas: pertama, menjadi orang
yang realis dulu, baru kemudian menjadi
orang yang idealis)**

**Franciscus van Ylst
Bandung
Kamis, 25 Juni 2008**

LEMBAR PERNYATAAN

Seluruh ISI DISERTASI ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.



Depok, 28 Juni 2008

Penulis,

Franciscus van Ylst

KATA PENGANTAR

Untuk sampai pada tahap akhir disertasi ini, penulis telah melampaui beberapa tahapan penting. Setiap tahapan mulai dari persiapan, perkuliahan, seminar, ujian pra promosi dan sampai ujian promosi memiliki suka duka dan kenangan tersendiri. Semua tahapan akhirnya dapat ditempuh meskipun ada kalanya harus berhenti dan ditempuh ulang perjalanannya. Kekurangan yang terjadi berulang kali dalam proses studi untuk menyelesaikan S3, ini adalah bukti bahwa penulis tidaklah sempurna dan memiliki banyak keterbatasan.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan dan keselamatan bagi penulis yang telah memberikan kemurahanNya untuk dapat mengikuti semua proses dengan lama waktu enam tahun. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa untuk kesehatan, kekuatan, keuangan dan kesempatan belajar di Universitas Indonesia.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bambang Wibawarta dan Ketua Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Dr. Vincencius Y. Jolasa dan sekretarisnya Dr. Singkop Boas Boangmanalu atas pengabdian dan pelayanannya kepada para mahasiswa khususnya kepada saya.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H.A. Kartiwa, Drs., SH., MS, dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, Drs., M.S atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

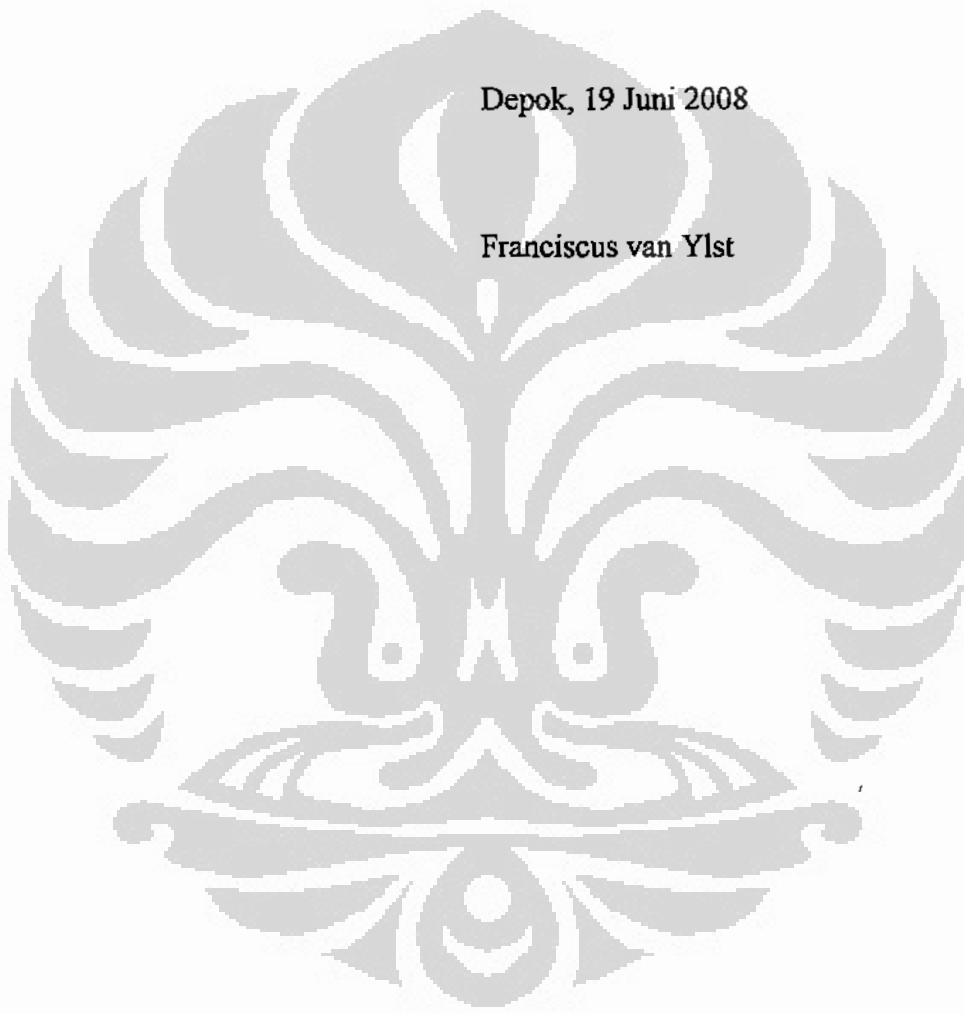
Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada promotor penulis Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo atas kesediaannya membimbing dan menerima penulis baik di rumah maupun di fakultas, untuk kesabaran dan ketelitian dalam membimbing proses penulisan disertasi ini dari awal sampai akhir penulisan. Terima kasih kepada ko promotor penulis Dr. Akhyar Yusuf Lubis yang dengan leluasa dan dukungan serta nasihat-nasihatnya membantu sepenuhnya penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. A. Agus Nugroho sebagai penguji dan sekaligus penasihat penulis dalam memperbaiki dan menyelesaikan bagian terpenting dari disertasi ini. Terima kasih juga kepada Dr. V. Irmayanti atas catatan-catatan dan peringatan yang diberikan kepada penulis agar disertasi ini menjadi lebih baik. Rasa terima kasih saya berikan kepada Dr. S. Margaretha Kushendrawati atas koreksi tertulis dari awal sampai akhir disertasi ini, saran-saran, yang sering mengingatkan agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada isteri saya Marthina Hehakaya terima kasih yang setulus-tulusnya karena telah memberikan yang terbaik dari hidupnya, untuk ikut berkorban dengan sabar dan menyatakan dukungan sepenuhnya dalam membantu serta berperan besar dalam menyelesaikan sekolah dan tugas akhir ini. Untuk anak saya Margrieta Christina terima kasih untuk kesabaranmu dalam hidup bersama, keseharian, suka dan duka. Saya merasa bahagia dengan memiliki mereka dan menjadi bersemangat dalam menyelesaikan sekolah.

Kunjungan dan doa yang diberikan oleh Pdt. Jo Lukas dan ibu ke rumah, beserta tim doa untuk penulis dan keluarga sangat mendukung dalam penyelesaian tugas akhir sekolah. Terima kasih atas pelayanannya dan perhatian kepada saya dan keluarga, kiranya Tuhan yang Mahaesa akan memberkati dan meneguhkan pelayanannya.

Akhirnya kepada rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Jenderal Achmad Yani, Koperasi Bahagia, kerabat dan keluarga yang belum tertulis namanya, saya mengucapkan terima kasih.



Depok, 19 Juni 2008

Franciscus van Ylst

DAFTAR ISI

	HAL.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR <i>EPIGRAPH</i>	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	23
1.3 <i>Thesis Statement</i>	26
1.4 Metode Penelitian	26
1.5 Kerangka Teori dan Konsep	31
1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian	47

BAB II. SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA	51
2.1 Pengantar	51
2.2 Asal Mula Timbulnya Negara	52
2.3 Otokrasi dan Demokrasi	63
2.4 Pengawasan Politik dan Publik	77
2.5 Sentralisasi dan Desentralisasi	86
2.6 <i>Strong Government and Good Governance</i>	96
2.7 Kesimpulan	105
 BAB III. PERUBAHAN PARADIGMA	
ILMU PEMERINTAHAN	107
3.1 Pengantar	107
3.2 Modernisme ke Postmodernisme	108
3.3 Universalisme ke Pluralisme	129
3.4 Positivisme ke Kritisisme	134
3.5 Pemerintahan dan <i>Civil Society</i>	149
3.6 Nasionalisme dan Globalisasi	155
3.7 Kesimpulan	162

BAB IV. EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN	164
4.1 Pengantar	164
4.2 Karakteristik dan Identitas	165
4.3 Dimensi Etika Dalam Pemerintahan	186
4.4 Pendekatan Multiperspektif	190
4.5 Interdisipliner dan Multidisipliner	195
4.6 Kurikulum dan Relevansi.....	201
4.7 Kesimpulan	212
BAB V. PENUTUP	214
5.1 Kesimpulan	214
5.2 Catatan Kritis	229
5.3 Rekomendasi	234
DAFTAR PUSTAKA	242
<i>CURRICULUM VITAE</i>	261

EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN TINJAUAN KRITIS TENTANG KARAKTERISTIK DAN IDENTITAS KEILMUAN

ABSTRAK

Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga saat sekarang ini mengalami proses *anomaly* yang ditandai oleh pemikiran tentang Ilmu Pemerintahan oleh para sarjana dari berbagai bidang kompetensi, seperti: hukum, sosiologi, administrasi, dan bahkan ilmu teknik. Semua berkontribusi dan memberi karakter terhadap Ilmu Pemerintahan yang berakibat timbulnya polemik dan kontroversi.

Disertasi ini merupakan suatu upaya penelitian dari penulis untuk memahami Ilmu Pemerintahan secara epistemologis, dengan menggunakan metodologi hermeneutika yaitu untuk memahami (*verstehen*) dan menjelaskan (*erklären*) tentang paradigma, metodologi, ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan tentang ilmu itu sendiri.

Thesis Statement, penulis dalam disertasi ini adalah: Ilmu Pemerintahan bukanlah ilmu epistemologi positivistik, dan bukan juga ilmu dengan epistemologi pragmatis instrumental, melainkan ilmu dengan epistemologi kritis yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner. Bertolak dari *Thesis Statement* tersebut, penulis menjelaskan tahapan perkembangan epistemologi berdasarkan teori-teori dari: Moritz Schlick, dkk., Karl R. Popper, dkk., Thomas Kuhn dan Habermas, sebagai kerangka pemikiran.

Pengaruh positivisme logis dalam Ilmu Pemerintahan terlihat dengan sangat nyata pada proses kegiatan ilmu pengetahuan, seperti: paradigma, prinsip, metodologi dan analisa yang digunakan untuk melakukan *problem solving*.

Tinjauan kritis tentang karakteristik dan identitas keilmuan yang dilakukan oleh penulis dengan melihat secara kronologis perkembangan epistemologi dari abad pertengahan sampai sekarang ini, dimulai dari: epistemologi positivistik, epistemologi pragmatis dan epistemologi kritis.

Schlick, dkk. melalui Lingkaran Wina mengemukakan konsep demarkasi ilmu pengetahuan. Artinya, garis batas antara wilayah ilmu pengetahuan dan bukan wilayah ilmu pengetahuan. Lingkaran Wina, membagi antara pernyataan yang bermakna (*meaningful*) dan pernyataan yang tidak bermakna (*meaningless*) dengan menggunakan metode verifikasi. Suatu pernyataan yang dapat diverifikasi dan terbukti kebenarannya, maka pernyataan tersebut adalah ilmiah dan sekaligus menunjukkan kebenaran korespondensi. Untuk hal-hal yang tidak bermakna, seperti: Tuhan, jiwa, abadi, dan norma dengan menggunakan metode verifikasi menghasilkan kebenaran yang tidak dapat dibuktikan, karenanya dimasukkan ke dalam wilayah bukan ilmu pengetahuan.

Popper, dalam bukunya *The Logic of Scientific Discovery* lebih menitikberatkan kepada cara kerja ilmu-ilmu pengetahuan alam dan kemudian dikembangkan lebih jauh mengenai ilmu pengetahuan yang objektif dalam bukunya *Objective Knowledge* atau dikenal dengan konsep 'tiga dunia'. Pemikiran Popper mengenai demarkasi ilmu pengetahuan, adalah: suatu pernyataan dapat diuji, apakah ada dalam wilayah ilmu pengetahuan atau bukan? Tidak melalui metode verifikasi melainkan

menggunakan metode falsifikasi. Artinya, suatu teori yang dapat disangkal dengan pengalaman.

Thomas S. Kuhn, dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* menolak pandangan Popper yang dianggapnya tidak sesuai dengan fakta. Menurut Kuhn tidak pernah terjadi upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar atau melalui suatu revolusi ilmiah. Paradigma ilmiah adalah sebuah model untuk pengembangan ilmu pengetahuan normal dan dirasakan memuaskan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Paradigma Kuhn, memiliki kepentingan pragmatis dan bersifat instrumental, dalam pengertian memberi tuntunan model untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya.

Jürgen Habermas, berpendapat kebenaran pernyataan dengan mencari kesesuaian dengan realitas (*the correspondence theory of truth*) dan kebenaran yang diperoleh dengan melihat hubungan (*correspondence*), keteguhan (*coherence*) dan konsistensi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, semuanya amat ditentukan oleh paradigma berpikir tunggal subjek rasio. Inilah yang oleh Habermas, dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*, dikatakan ada kekuasaan lain yang disembunyikan, dan kekuasaan itu adalah bentuk dari paradigma ganda sebagai pemahaman timbal balik melalui kebenaran intersubjektivitas.

Habermas mengatakan untuk mencapai masyarakat komunikatif yaitu masyarakat yang komunikasinya terbuka dan berkedudukan sejajar, dapat mempertahankan dan memiliki sebuah ruang bebas dari diktatur dan pemaksaan, anggota-anggota masyarakatnya toleran serta menghormati martabat semua anggotanya sebagai manusia bersama-sama mewujudkan kemampuan berkomunikasi dengan sejajar disertai bebas dari tekanan-tekanan.

Habermas, berpandangan bahwa tindakan komunikasi (*communicative action*) adalah jalan yang diterima sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang komunikatif. Paradigma timbal balik atau masyarakat komunikasi, dapat terwujud jika semua agen yaitu: ilmu pengetahuan, pemerintah, ilmuwan, dan tokoh-tokoh masyarakat secara sadar menjadi peserta dalam melakukan tindakan komunikasi untuk tidak mengejar kepentingan-kepentingan individual (seperti dalam masyarakat kapitalis) tetapi berupaya untuk mencapai keberhasilan dalam menyeimbangkan semua kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia untuk kurun waktu yang lama tidak jelas ruang lingkup pengetahuannya, konsep – konsep dasar yang digunakan dan penjelasan serta pertanggungjawaban atas pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu Pemerintahan mengalami perkembangan yang sangat kontroversial dalam perjalanannya memasuki abad ke 21 yang disebut juga sebagai era modernisasi ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut tidak lepas dari ilmu – ilmu penunjang lainnya, terutama dari aspek ilmu – ilmu politik, sosial budaya, filsafat dan teknologi informasi.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah peristiwa lahirnya sebuah Negara pada akhir abad ke 20 yang menjadi awal dari segala sesuatu yang menyangkut keindonesiaan, baik itu mengenai nasionalisme, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan salah satu sumber kepustakaan mengenai sejarah perkembangan ilmu politik di Indonesia,¹ terdapat keprihatinan yang mendalam di kalangan para ilmuwan politik sendiri. Keprihatinan itu didasarkan kepada pemikiran dan karya – karya tulis mengenai ilmu politik dan pemerintahan yang dibuat oleh sarjana – sarjana yang memiliki kompetensi di bidang lain, seperti: hukum dan sosiologi bahkan ilmu teknik. Ini semua menjadi dasar yang rapuh bagi Ilmu Politik umumnya dan secara khusus bagi Ilmu Pemerintahan.

¹ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima 1981, hal. 3 – 4.

Bahkan dalam buku *Research di Indonesia 1945 – 1965*, jilid IV (Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya), sarjana yang mendapat tugas kehormatan untuk menulis tentang “Ilmu Politik di Indonesia” yang memuat uraian tentang perkembangan ilmu ini selama 20 tahun ialah Soelaeman Soemardi, SH, MA, yang adalah seorang pengajar sosiologi.² Gambaran ini menunjukkan bagaimana kelahiran Ilmu Politik atau pun Ilmu Pemerintahan khususnya melalui proses *anomaly*,³ yaitu penyimpangan dari apa yang diharapkan oleh tradisi ilmiah. Idealnya, ilmu diciptakan dan dikembangkan oleh orang – orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, dan ilmu pengetahuan tersebut juga dikembangkan oleh orang – orang dengan bakat, minat yang sama pada bidang ilmu itu.

Ada banyak pendapat dan pandangan dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya yang menyangkut hubungan antara subjek dan objek. Ada banyak kontroversi dan polemik tentang hubungan antara subjek dan objek, tetapi semua setuju bahwa terdapat dualisme pandangan tentang Ilmu Pemerintahan terhadap realitas yaitu adanya hubungan subjek dan objek. Hubungan subjek dan objek yang kontroversial ini dapat dibuktikan dengan ketidakjelasan objek Ilmu Pemerintahan jika dibandingkan dengan ilmu – ilmu sosial lainnya khususnya Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara.

Peneliti memilih judul penelitian, “Epistemologi Ilmu Pemerintahan” dengan alasan agar pemahaman terhadap Ilmu Pemerintahan dapat diperoleh dengan lebih dalam, jelas dan menyeluruh. Ilmu Pemerintahan tidak akan mampu secara objektif dan kritis untuk memahami tentang dirinya sendiri, jika tidak mengadakan dialog dengan filsafat. Filsafat melalui cabangnya epistemologi

² *Ibid.* hal. 3 – 4.

³ *Anomaly*, (*anomaly in something*) a thing, situation, etc. that is different from what is normal or expected. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, AS Hornby, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 53.

akan berupaya memahami secara kritis dan objektif terhadap Ilmu Pemerintahan, melalui pertanyaan – pertanyaan yang mendasar, seperti: Dari manakah asalnya pengetahuan? Bagaimanakah pengetahuan tersebut dirumuskan? Bagaimanakah ruang lingkup pengetahuan tersebut? Bagaimanakah metodologi pengetahuannya? Bagaimanakah pengetahuan tersebut dikomunikasikan? Apakah pengalaman indera diperlukan untuk semua pengetahuan? Bagian apa yang diperankan oleh akal budi dalam pengetahuan tersebut ?

Epistemologi menjadi penting dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan, karena metodologi, kebenaran dan kesahihan (*validity*) ilmu yang ditentukan sendiri mengalami proses dikritik dan sekaligus pencarian makna – makna baru secara terus menerus untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang objektif, aktual, pragmatis sebagai hasil dari refleksi⁴.

Pemerintahan, sebagai suatu fakta dan realita di masyarakat telah ada sejak manusia ada, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Ilmu Pemerintahan ada karena objek realitas tentang adanya pemerintahan, ini menunjukkan fakta di masyarakat bahwa pemerintahan sebagai suatu realitas yang berkembang dengan dinamis dan kompleks memerlukan pemahaman yang jelas dan menyeluruh.

Untuk memahami realitas yang dinamis dan kompleks tersebut, maka fenomena pemerintahan melahirkan Ilmu Pemerintahan dengan tujuan agar realitas pemerintahan yang dinamis dan kompleks itu dapat dipahami dan dijelaskan dengan sebaik - baiknya. Pemahaman tersebut selain dilihat dari aspek epistemologi juga akan dilengkapi dari aspek ilmu – ilmu penunjang lainnya, seperti : politik, budaya dan sosial.

⁴ The process of calm reconsideration, which may lead to a better view of things. Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, USA, 1991, pages 198.

Pemahaman *interdisciplinary*⁵ dan *multidisciplinary*⁶ ini adalah tuntutan yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan realitas dan dinamika pemerintahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ilmu pengetahuan diharapkan dapat memahami dan memprediksi realitas yang dinamis bukan dari aspek ilmu pengetahuan itu sendiri saja tetapi juga dari aspek ilmu pengetahuan lain supaya hasilnya menyeluruh dan memuaskan.

Epistemologi adalah “cara memahami secara substansi tentang prinsip, sumber – sumber, ruang lingkup dan batas – batas dari pengetahuan.” Dalam perkembangannya epistemologi banyak dikritik oleh tokoh pragmatis dari Amerika, misalnya Richard Rorty⁷ yang intinya adalah :

Jika kita menerima kritik – kritik, dan menghentikan pemikiran tentang epistemologi sebagai suatu pencarian, sebagaimana yang diprakarsai Descartes, guna menemukan hal – hal yang istimewa dalam wilayah kesadaran yang merupakan batu penjurur kebenaran, kita berada dalam posisi untuk bertanya, apakah masih ada sesuatu untuk epistemologi ? Saya sampaikan, tidak ada. kita memerlukan perubahan untuk melihat keluar dibandingkan dengan melihat ke dalam, menghadapi keadaan sosial untuk memperoleh pembenaran dibandingkan dengan hubungan gambar yang ada di dalam pemikiran. Pendirian tersebut telah dianjurkan dalam beberapa dekade terakhir oleh beberapa filsuf yang maju, terutama sekali mereka adalah Wittgenstein dengan karyanya,

⁵ Involving, or joining, two or more disciplines, or branches of learning. Webster’s New World, *College Dictionary*, Wiley Publishing, USA, 2004, fourth edition, pages 744.

⁶ Of or combining the disciplines of many different branches of learning or research. *Idem*. Webster’s New World, page 946.

⁷ *If we accept these criticisms, and therefore drop the notion of epistemology as the quest, initiated by Descartes, for those privileged items in the field of consciousness which are the touchstones of truth, we are in a position to ask whether there still remains something for epistemology to be. I want to urge that there does not. To understand the matters which Descartes wanted to understand – the superiority of the New Science to Aristotle, the relations between this science and mathematics, common sense, theology, and morality – we need to turn outward rather than inward, toward the social context of justification rather than to the relations between inner representations. This attitude has been encouraged in recent decades by many philosophical developments, particularly those stemming from Wittgenstein’s “Philosophical Investigations” and from Kuhn’s “Structure of Scientific Revolutions.”* Richard Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, second printing with corrections, 1980, pages 209 – 210.

Philosophical Investigations dan dari Kuhn dengan karyanya, *Structure of Scientific Revolutions*.

Substansi epistemologi adalah “pemahaman,” yang oleh Richard Rorty diartikan sebagai “suatu pencarian guna menemukan hal – hal yang istimewa dalam wilayah kesadaran yang merupakan batu penjuruk kebenaran”. Jadi benar atau salahnya pengetahuan, tergantung dari benar atau salahnya hal – hal yang ada dalam wilayah kesadaran subjek. Subjek yang berhadapan dengan objek, adalah satu – satunya penentu kebenaran. Inilah yang dikritik oleh Richard Rorty. Intinya, kebenaran tidaklah tunggal tetapi majemuk ada kebenaran lain di luar wilayah kesadaran subjek.

Persoalan mendasar dalam Ilmu Pemerintahan, adanya ketidakjelasan dalam ruang lingkup dan apa yang disebut dengan objek Ilmu Pemerintahan yang menjadi ciri dari ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi pangkal polemik⁸ dan kontroversi⁹ dalam sejarah kegiatan dan perkembangan Ilmu Pemerintahan yang terjadi di Indonesia.

Tujuan dari ilmu pengetahuan adalah, akhirnya, menangkap realitas, yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan keberhasilan pada kedua sisi, yaitu dengan dunia luar dan dengan diri kita sendiri. Dalam setiap teori ilmu pengetahuan yang sejati terdapat, apa yang dapat kita sebut sebuah ‘ukuran realitas’. Ukuran ini membedakan sebuah teori ilmu pengetahuan yang sejati dari sebuah teori ilmu pengetahuan yang semu, sebagai contoh, astronomi dari astrologi.¹⁰

⁸ Polemic, a fierce attack on or defence of a particular opinion, belief, etc., Collins, *Paperback English Dictionary*, HarperCollins Publishers, Great Britain, latest reprint 2003, pages 631.

⁹ Controversy, argument or debate concerning a matter about which there is strong disagreement. Collins, *idem.*, pages 171.

¹⁰ *The aim of science is, after all, to capture reality, to enable us to deal successfully both with external nature and with ourselves. Implicit in every genuine scientific theory there is, therefore, what we may call a ‘criterion of reality’. This criterion distinguishes a truly scientific theory from a pseudo-scientific theory, for example, astronomy from astrology.*

Ernest H. Hutten, *The Origins of Science*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, reprinted 1978, pages 51 – 52.

Pemahaman terhadap dunia realitas dan dinamika pemerintahan oleh Ilmu Pemerintahan, adalah fakta kesadaran terhadap ruang lingkup dan objek pemerintahan yang belum ada kesepakatan pasti diantara para ilmuwan, yang ada yaitu ketidakjelasan dan keraguan dalam menentukan objek dari Ilmu Pemerintahan. Para ilmuwan lebih mengandalkan metode a priori (*a priori method*)¹¹ dan metode otoritas (*method of authority*)¹², sehingga pemahaman terhadap objek dari Ilmu Pemerintahan menjadi tidak jelas. Keadaan ini telah berlangsung lama, terutama sejak berdirinya Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950 sebagai perintis untuk berdirinya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang pertama di Indonesia.¹³

MacIver dalam bukunya , *The Web Of Government*,¹⁴ merumuskan: Pemerintahan adalah ilmu tertua dari ilmu – ilmu sosial lainnya. MacIver, merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut : “ ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk - bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi – fungsi pemerintahan.”

Inilah pokok pemikiran yang dikemukakan oleh R.M. MacIver untuk dijadikan bahan penelitian tentang Ilmu Pemerintahan berdasarkan pandangan

¹¹ Two different ways in which something might be known to be true (or false). It can be known a priori if it can be known before, or independently of, sense experience of the fact in question. Robert M. Martin, *Op. Cit.*, pages 15.

¹² As individual or group considered to have valid knowledge and /or legitimate power. Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, New York, 1931, pages 21.

¹³ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 170 – 172.

¹⁴ MacIver, R.M., *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, twentieth Printing 1963, page 7.

epistemologi. Pemahaman yang jelas terhadap perumusan Ilmu Pemerintahan beserta objeknya adalah tujuan penelitian ini melalui kajian filosofis. Tulisan tentang pemerintahan secara filosofis telah banyak dilakukan oleh para tokoh lain, seperti : Plato, Aristoteles, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Baron De Montesquieu, J.J. Rousseau, Niccolo Machiavelli, dan lain – lain.

Pemahaman terhadap fenomena¹⁵ pemerintahan melalui Ilmu Pemerintahan dengan berbagai aliran pandangan, metodologi, objek, definisi dan tujuannya adalah bahan kajian filosofis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ilmiah oleh komunitas Ilmu Pemerintahan. Komunitas ilmu yang “*introverted*”¹⁶ dan tidak menganggap perlu untuk berdialog dengan ilmu – ilmu lain merupakan arogansi intelektual dan merupakan kedangkalan wawasan yang berakibat terjadinya “*pengkerdilan ilmu*”¹⁷.

Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang berpredikat “*political sciences*” mengalami sejarah perjalanan yang membingungkan serta mengalami disorientasi terhadap hakekat dan tradisi keilmuannya. Ungkapan ini adalah dari Robert M. MacIver dalam bukunya, *The Web of Government*. Ungkapan bahwa Ilmu Pemerintahan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan seperti pada ilmu pengetahuan yang lainnya, atau Ilmu Pemerintahan belum dapat mewujudkan tujuannya untuk keselamatan umat manusia. Seandainya Ilmu Pemerintahan dapat menjadi ilmu pengetahuan yang tangguh dengan metodologi yang jelas dan teruji; apakah Ilmu Pemerintahan dapat mewujudkan tujuannya dengan mudah dan tepat?

¹⁵ Fenomena = phenomenon, a fact or an event in nature or society, especially one that is not fully understood. Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 1132.

¹⁶ Introverted, adjective (also introvert, noun), more interested in your own thoughts and feelings than in spending time with other people, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford New York, 2005, page 817.

¹⁷ Ilmu yang direduksi

Pertanyaan ini semua adalah ungkapan keraguan dari Robert M. MacIver terhadap kompetensi dan isi dari Ilmu Pemerintahan. Keraguan atas Ilmu Pemerintahan, dituangkannya dalam rumusan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

Sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah? Kita memiliki banyak alasan untuk itu, tetapi itu adalah catatan sejarah dan bukanlah pengetahuan yang sistematis. Sebuah ilmu tentang bagaimana manusia sebaiknya diperintah? Tetapi sebaiknya adalah selalu ungkapan dari para pemikir mitos kompleks sendiri, adalah selalu menjadi subjektif terhadap perkiraannya, dengan demikian berada di luar pengaruh dari ilmu pengetahuan – suatu fakta yang tidaklah mengurangi kepentingan sosialnya, sejak hal itu menjadi sebaiknya dari pemikiran mitos yang penting hal tersebut menjadi jelas. Sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah? Barangkali hal ini dapat lebih memenuhi harapan.¹⁸

Kurangnya pendekatan dari aspek epistemologi serta sikap mengkritisi terhadap ilmu tersebut adalah penyebab utamanya . Tidak ada metodologi yang jelas untuk dipegang oleh setiap anggota dari komunitas Ilmu Pemerintahan, jika dilihat dari aspek epistemologi ilmu. Dari aspek postmodernisme ini adalah kecenderungan anti metode, namun kreatif yang melepaskan diri dari prosedural ilmu yang tradisional. Semua beranggapan dapat membuat definisi dan metodologinya sendiri, serta menafsirkannya tanpa ada yang dapat menghalanginya. Sayangnya, Ilmu Pemerintahan belum memiliki metodologi ilmu pengetahuan yang jelas, layaknya sebagai ilmu pengetahuan yang teruji dan

¹⁸*A science of how men are governed? We have much on that score, but it is historical description and not systematic knowledge. A science of how men should be governed? But the should is always expressive of the thinker's own myth-complex, is always subject to his presuppositions, and so lies outside the ambit of science—a fact that in no wise lessens its social importance, since the it should be of the mythical is as necessary as the it is so of the evidential. A science of how men can be governed? Perhaps this seems more hopeful. R.M. MacIver, idem., page 8.*

mapan. Padahal postmodernisme secara jelas mengkritik metodologi ilmu pengetahuan yang mapan. Oleh karenanya, penelitian ini akan menitikberatkan pembahasan Ilmu Pemerintahan dari aspek epistemologi, dengan tujuan agar diperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi metodologi dari Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan.

Karena terbatasnya bahan mengenai Ilmu Pemerintahan akan ditinjau dari sebanyak mungkin segi. Dengan lain kata di bawah ini akan disajikan sejumlah perumusan Ilmu Pemerintahan. Sekali lagi tidak perlu heran bilamana ada perumusan ilmu lain, misalnya: ilmu negara, ilmu politik, atau ilmu administrasi publik yang sama dengan perumusan Ilmu Pemerintahan.¹⁹

Dari kutipan pernyataan tersebut, terlihat jelas adanya keterbatasan bahan dan tidak jelasnya objek dari Ilmu Pemerintahan, bahkan menerima begitu saja rumusan tentang Ilmu Pemerintahan yang diberikan oleh disiplin ilmu – ilmu lain. Padahal sebuah ilmu harus dapat dibedakan dengan ilmu – ilmu lain melalui '*focus of interest*' nya atau objek formanya. Pertama – tama komunitas Ilmu Pemerintahan yang sebaiknya bekerja keras dan mencari rumusan dan menentukan objek dari ilmunya sendiri secara jelas, yang tidak mungkin diberikan atau meminjam dari disiplin ilmu – ilmu lain. Objek yang jelas sebaiknya menjadi persyaratan utama dari adanya sebuah ilmu untuk memahami realitas dengan mudah dan mendalam.

Pemikiran tentang objek, adalah sebuah langkah epistemologis untuk dapat memahami realitas dan dinamika serta membuktikan adanya keberadaan dari Ilmu Pemerintahan. Epistemologi adalah juga pengetahuan manusia tentang

¹⁹ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 45.

kenyataan. Epistemologi adalah juga “teori tentang pengetahuan khususnya merupakan kajian kritis terhadap keabsahan, metode – metode, dan ruang lingkungannya.”²⁰ Dalam modernisme, filsafat berpusat pada epistemologi modern karena tujuan utama epistemologi adalah dapat membuat “representasi” yang benar atau keserupaan “objektif” dengan “realitas”. Jadi kebenaran objektif adalah kebenaran yang disusun dan direpresentasikan subjek berdasarkan kemampuan subjek untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara intersubjektifitas. Mekanisme ilmu pengetahuan berpangkal pada subjek oleh subjek dan akhirnya keputusan ada pada subjek. Atau dalam peristilahan Merleau-Ponty, manusia menjadi *kosmotheoros*, sebagai penonton murni, dan pada saat yang sama dunia menjadi *le Grand Objet*.²¹

Dalam modernisme, filsafat memang berpusat pada Epistemologi, yang bersandar pada gagasan tentang subjektivitas dan objektivitas murni, yang satu sama lain terpisah tak saling berkaitan. Tugas pokok filsafat adalah mencari metodologi segala pengetahuan (metodologionalisme), dan tugas pokok subjek adalah merepresentasikan kenyataan objektif (representasionalisme). Demikian maka klaim – klaim dari kaum postmodernis tentang “berakhirnya modernisme” biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan berakhirnya anggapan modern tentang “subjek” dan “dunia objektif” tadi, dunia yang seolah sepenuhnya mandiri menanti subjek yang akan membuat representasi mental tentangnya saja.²²

Hubungan antara subjek dan objek dalam Ilmu Pemerintahan adalah pengetahuan utama. Realitas (*world reality*) pemerintahan dengan segala dinamikanya sebagai objek Ilmu Pemerintahan sangat ditentukan oleh subjek yang melihat realitas. Jadi pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan bukanlah

²⁰ *Collins Paperback English Dictionary*, HarperCollins Publishers, Great Britain, Latest reprint 2003, page 264.

²¹ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 33.

²² *Idem*, hal. 33.

salinan realitas yang dilihat oleh subjek, tetapi adalah hasil konstruksi pemikiran subjek terhadap realitas.

Pendapat Auguste Comte tersebut di atas menunjukkan ada dua (2) tahapan metode yang digunakan dalam memahami realitas (*world reality*).

Berawal dari metode subjektif, seperti yang dikutip berikut:

Metode yang terdahulu dimulai dengan manusia dan menafsirkan dunia dalam intuisi cahaya pengertian kemanusiaan sendiri. Hal ini mendorong adanya keyakinan terhadap latarbelakang supranatural atau alam natural yang sesungguhnya, khususnya Tuhan dan alam yang dipercaya dengan pertimbangan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh manusia. Agar supaya fiksi – fiksi tersebut dapat dihindari, pemikiran positivistik dimulai dengan dunia dan mengkaji manusia alamiah dalam hubungannya dengan fenomena yang bukan manusia dan hukum – hukum. Hal itu dilanjutkan atas anggapan bahwa “hukum – hukum dunia menguasai manusia, dan tidak dimodifikasi oleh mereka.” Konsekuensinya, positivisme menolak “introspeksi”, dan setuju untuk suatu posisi mendekati apa yang dinamakan pada hari ini dengan biologi dan *social behaviorism*.²³

Dua metode dasar dari pengetahuan yang dikemukakan oleh Auguste Comte, memperlihatkan dengan jelas pemikiran positivistik terhadap pemisahan subjek dan objek. Hubungan subjek dan objek dalam sejarah modernitas antara abad ke 17 sampai akhir abad ke 20 meletakkan kemanusiaan terpisah dari alam,

²³ *The former method begins with man, and interprets the world in the light of a purported intuition of the human self. This encourages belief in a background of supernatural or natural entities, especially God and Nature, which are credited with considerably more power than their human analogues possess. In order to avoid these fictions, positivistic reasoning begins with the world, and studies human nature in terms on nonhuman phenomena and laws. It proceeds on the premise that “the laws of the world dominate those of man, and are not modified by them.” Consequently, positivism repudiates introspection, in favor of a position that comes close to what would today be called biological and social behaviorism. Collins, James, *Idem.*, page 709. Social behaviorism, the theory that all human behaviour is learnt by adapting to outside conditions and that learning is not influenced by thoughts and feelings. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Op. Cit.* page 127.*

artinya subjek tidak lagi memengaruhi isi dari ilmu pengetahuan. Hukum - hukum alam menguasai manusia dan tidak dapat dimodifikasi oleh mereka. Ilmu pengetahuan menjadi unifikasi dan homogen, karena hukum – hukum alam menguasai manusia dan ilmu pengetahuannya.

Dua metode dasar dari pengetahuan:

- a) Metode objektif: dari dunia ke manusia (kesatuan metode dan kesamaan doktrin dalam ilmu – ilmu positif).
- b) Metode subjektif: dari manusia ke dunia (sintesis organik atau sistematisasi total dari pengetahuan dan perasaan, melalui agama kemanusiaan).²⁴

Sedangkan metode yang terdahulu dimulai dari subjek manusia yang menafsirkan dunia dalam intuisi cahaya pengertian kemanusiaan. Hal ini mendorong adanya keyakinan terhadap latarbelakang supranatural atau alam natural yang sesungguhnya, khususnya Tuhan dan alam yang dipercaya dengan pertimbangan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh manusia. Untuk menghindari fiksi – fiksi tersebut, pemikiran positivistik dimulai dengan dunia dan konsekuensinya hukum – hukum dunia menguasai manusia.

Pengetahuan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Heidegger, adalah *a-letheia*.²⁵ Artinya, pengetahuan adalah pernyataan diri dari ada. Secara tradisional epistemologi cenderung untuk membatasi diri pada persepsi inderawi dan pemahaman intelektual, di mana pemahaman tersebut dimengerti secara sempit. Tetapi hal ini tidak memadai. Pengetahuan adalah peristiwa yang menyebabkan kesadaran manusia memasuki

²⁴ *Two fundamental methods of knowledge:*

- a) *Objective method: from the world to man (unity of method and homogeneity of doctrine in the positive sciences).*
- b) *Subjective method: from man to the world (organic synthesis or total systematization of knowledge and sentiment, through the religion of humanity)* Collins, James, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 4th printing, 1961, page 709.

²⁵ Martin Heidegger, *Being and Time*, transl. by John Macqarrie and Edward Robinson, New York, Harper, pages 256.

terang ada. Kita tidak bisa meramalkan bagaimana ada itu dinyatakan. Sikap awal yang tepat bagi filsuf pengetahuan adalah kerendahan hati di dalam menghadapi pengalaman. Filsuf pengetahuan harus memiliki keterbukaan total.²⁶

Jika, pengetahuan adalah pernyataan diri dari yang ada. Pernyataan dari realitas, maka Ilmu Pemerintahan dengan segala kemampuan dan usahanya diharapkan dapat memahami dengan lebih baik lagi objek realitas dengan segala dinamikanya berdasarkan kesadaran untuk memasuki yang ada. Kesadaran objektif²⁷ untuk memasuki terang yang ada, untuk dapat disimak dan diperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas terhadap realitas dengan segala dinamikanya. Ilmu Pemerintahan secara epistemologis membutuhkan pengendalian hasrat yang terlanjur tidak terkendali dan kembali kepada kesadaran objektif untuk melepaskan diri dari "*a priori method and method of authority*".

Penelitian ini diarahkan pada penemuan karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan. Epistemologi adalah suatu kritik filosofis atas keberadaan, karakteristik dan identitas keilmuan dan menemukan metodologi ilmu pengetahuan. Menjadi suatu tantangan dan tuntutan di tengah – tengah persaingan antar ilmu pengetahuan, agar supaya ilmu pengetahuan menjadi objektif dan memiliki kebenaran yang dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memiliki metodologi ilmu pengetahuan maka fenomena pemerintahan sebagai realitas dengan segala dinamikanya perlu dipelajari dan dimaknai sebagai pernyataan dari yang ada. Ilmu Pemerintahan memerlukan metodologi yang jelas

²⁶ P. Hardono Hadi, *Epistemologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 25.

²⁷ Objektif, objective,

Refers, (a) to the ability to make an evaluation of a situation without being affected by feelings, emotions, and preconceived notions, and (b) to the support of a statement (idea, judgment, knowledge, decision) with proof and evidence based on actual events. Peter A. Angeles, *Op. Cit.* pages 193.

dengan konsep dan definisi yang baik, bermutu serta mempunyai potensi dan peluang untuk lebih maju dan antisipatif dengan relevansi perkembangan masyarakat dan fenomena pemerintahan yang modern. Untuk sampai pada tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menggali dan menemukan metodologi Ilmu Pemerintahan.

Fenomena pemerintahan sebagai realitas dalam Ilmu Pemerintahan akan dipelajari melalui upaya – upaya epistemologis, meskipun dalam penelitian ini akan lebih banyak upaya refleksinya agar apa yang ada dapat dipahami untuk memperoleh makna – makna baru dan membangun ulang metodologi yang telah ada. “Padahal, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan, di mana mungkin, membuktikan keyakinan kita bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri.”²⁸

Polemik dan kontroversi terhadap ruang lingkup dan objek Ilmu Pemerintahan begitu kuat, karena keadaan yang tampak dalam kegiatan praktek pemerintahan sehari – hari adalah problem – problem kongkrit dan praktis. Banyak hal yang tak dapat dijelaskan, bahkan hubungan antara peristiwa dalam realitas pemerintahan tetap menjadi misteri²⁹ dan tidak jelas. Ilmu Pemerintahan lebih banyak mengambil sikap pasif dan tidak berusaha untuk memberikan respons dan alternatif penyelesaian yang kongkrit atas persoalan – persoalan yang terjadi dalam kegiatan pemerintahan sehari – hari.

Ilmu Pemerintahan selain diselenggarakan oleh institusi pendidikan umum juga diselenggarakan oleh institusi pemerintahan, khususnya yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri sebagai penyelenggara

²⁸ P. Hardono Hadi, *Op. Cit.* hal. 53.

²⁹ Mystery, something that is difficult to understand or to explain. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Op.Cit.* page 1009.

pemerintahan. Di sinilah Ilmu Pemerintahan menjadi sarana ideologis³⁰ bagi kepentingan pemerintahan dan terjebak pada predikat ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan sikap ambiguitas³¹. Ilmu Pemerintahan yang diajarkan baik oleh institusi pendidikan maupun institusi pemerintah tidak berkembang secara kreatif berdasarkan layaknya sebuah ilmu yang mengalami proses pertumbuhan pengetahuan. Materi dan metode diajarkan sendiri – sendiri berdasarkan otoritas masing – masing dan sering untuk kepentingan penguasa tertentu. Generasi berganti generasi materi dan penjelasan masih tetap mengandung hal yang sama, kalau pun ada perkembangan baru maka materinya bukan lagi Ilmu Pemerintahan tetapi sudah wilayah dari ilmu – ilmu sosial politik lainnya seperti, “*political sciences*”, dan hal – hal lain yang bersifat teknis.

Ketidaktentuan dan ketidakjelasan orientasi pada kegiatan Ilmu Pemerintahan menyebabkan ilmu tersebut menjadi kerdil, atau terancam eksistensinya. Keadaan ini sebaiknya dibiarkan secara alami dan kemudian mati sendiri atau diupayakan secara kreatif untuk dipulihkan dan dimulai kembali dari awal sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen terakhir. Tantangan luar biasa bagi komunitas Ilmu Pemerintahan untuk dapat mengembangkan Ilmu Pemerintahan secara kreatif, pragmatis, *interdisciplinary* dan *multidisciplinary* serta bersikap terbuka dengan adanya fenomena pemerintahan yang berubah – ubah secara dinamis dan tak terduga – duga, dalam perubahan dunia yang cepat dan tak terukur di abad ke 21.

³⁰ Dalam filsafat dan ilmu – ilmu sosial yang berhaluan positivistik, segala pemikiran yang tidak dapat dites secara matematis logis atau empiris disebut ideologi. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 230 – 231.

³¹ *Ambiguity, the state of having more than one possible meaning. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, AS Hornby, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 45.

Penulisan ini adalah langkah awal untuk menemukan kembali metodologi dan sekaligus dapat memberikan bibit – bibit pertumbuhan pada Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan dengan perspektif dan pemahaman yang baru tentang dunia realitas (*world reality*), melalui analisa kritis, reflektif dan epistemologis, agar metodologi ilmu pengetahuannya dapat dipahami dengan jelas serta mendalam.

Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup dan objeknya memerlukan kritik yang terus menerus dan secara konsisten untuk selalu dipertanyakan kembali secara mendasar. Agar supaya tidak terlanjur salah prosedur dan disorientasi seperti yang telah disinggung di atas. Ilmu Pemerintahan menjadi tidak jelas dan kehilangan orientasi jika rumusan objek Ilmu Pemerintahan belum dapat ditentukan dengan jelas dan tajam dengan alasan – alasan yang menyertainya.

Pengetahuan terbentuk dari dua (2) elemen, yakni adanya subjek dan objek. Ke dua elemen tersebut harus bersifat terbuka dan saling mengadakan interaksi yang setara. Langkah awal yang salah jika kita menjelaskan pengertian ilmu dengan definisi, seharusnya definisi dijelaskan sesudah ditentukan terlebih dahulu objek dari ilmu pengetahuan tersebut. Ini adalah langkah prosedural ilmu pengetahuan sebagai kesadaran manusia untuk membangun pengetahuan sebagai bahan dasar terbentuknya ilmu pengetahuan yang keabsahannya dapat diterima.

Otoritarianisme ilmu pengetahuan tak dapat dihindari jika para insan akademis dengan semangat yang didasarkan kepada "*a priori method and method of authority*" membuat tafsiran, gambaran dengan penjelasan – penjelasan subjektif tentang Ilmu Pemerintahan. Imajinasi dikembangkan

sedemikian rupa sesuai dengan keinginan subjek yang tak terkendali dari masing -- masing insan akademis.

Otoritarianisme merupakan aliran pikiran yang mengandalkan otoritas untuk memperoleh suatu persetujuan bersama mengenai suatu kebenaran. Pandangan ini merupakan salah satu konsekuensi pendekatan subjektif. Popper yang ingin menggantikan pendekatan subjektif dengan pendekatan objektif, tentu saja sangat menentang otoritarianisme. Dengan epistemologi problem solvingnya, Popper memandang kenyataan bahwa kita bisa salah dan bisa belajar dari kesalahan kita, merupakan basis bagi epistemologi dan metodologi. Pandangan fallibilisme Popper mempunyai konsekuensi bahwa setiap "sumber" pengetahuan -- entah tradisi, akal, imaginasi, intuisi atau pengamatan -- boleh dipakai, tetapi tak satu pun mempunyai otoritas. Justeru, karena sadar akan sifatnya yang bisa salah tetapi sekaligus sadar akan kemampuannya untuk maju, menurut pandangan serupa itu manusia harus menganggap segala pernyataan terbuka akan kritik. Itulah sebabnya Popper mengkritik Descartes, dan Bacon yang tak bisa meninggalkan cara berpikir menurut otoritas: yaitu otoritas akal di satu pihak dan otoritas indera di lain pihak.³²

Ilmu Pemerintahan cenderung berpegang kepada sumber -- sumber pengetahuan yang memiliki otoritas seperti yang dikutip di atas. Fallibilisme, yaitu pandangan yang secara sadar mengakui bahwa sumber pengetahuan yang memiliki otoritas dapat salah tetapi juga sadar mempunyai kemampuan untuk benar, adalah epistemologi konsep Popper yang menekankan bahwa apa pun yang menjadi sumber pengetahuan dan memiliki otoritas harus dapat dikritik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan atau mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan sama sekali. Ilmu Pemerintahan tidak dapat bebas dari kritik, dan perubahan paradigma ilmu pengetahuan adalah dinamis dan agar Ilmu

³² Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 168.

Pemerintahan menjadi kuat dan kokoh, maka diperlukan kritik dan fallibilisme dalam mengiringi kegiatan Ilmu Pemerintahan yang kreatif dan eksis.³³

Ilmu Pemerintahan diharapkan untuk dapat menerima perubahan dalam kesadaran akan ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan yang dinamis dan tak terduga. Paradigma perubahan menjadikan Ilmu Pemerintahan berorientasi ke depan dan berani untuk melakukan dialog ilmu pengetahuan dengan paradigma ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian ini merupakan suatu evaluasi dan kritik yang dilakukan melalui epistemologi terhadap Ilmu Pemerintahan dan ruang lingkupnya berdasarkan aktualisasi, relevansi dan upaya kritik untuk memahami realitas dengan jelas dan dalam untuk memperjelas hakikat dan objek Ilmu Pemerintahan dengan pemahaman yang baru.

Subjektivisme adalah “sikap” yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi otoritarian, Popper menjelaskannya sebagai berikut:

Tesis saya yang pertama melibatkan keberadaan dari dua (2) pengertian yang berbeda dari pengetahuan atau pemikiran:

1. Pengetahuan atau pemikiran dalam pengertian subjektif, terdiri dari sebuah pernyataan pikiran atau kesadaran atau sebuah penentuan untuk berkelakuan atau untuk menunjukkan reaksi.
2. Pengetahuan atau pemikiran dalam pengertian yang objektif, terdiri dari persoalan – persoalan, teori – teori, dan sejumlah pembuktian. Pengetahuan dalam pengertian yang objektif adalah bebas secara menyeluruh dari tuntutan seseorang untuk mengetahui; dan juga bebas dari keyakinan seseorang; atau kecenderungan untuk menyetujui; atau untuk menegaskan; atau untuk bertindak. Pengetahuan dalam pengertian objektif adalah pengetahuan tanpa pengenalnya; itu adalah pengetahuan tanpa mengenal seorang subjek³⁴

³³Popper menyebutnya sebagai , “koroborasi”.

³⁴*My first thesis involves the existence of two different senses of knowledge or of thought:*

1. *Knowledge or thought in the subjective sense, consisting of a state of mind or of consciousness or a disposition to behave or to react, and*
2. *Knowledge or thought in an objective sense, consisting of problems, theories, and arguments as such. Knowledge in this objective sense is totally independent of anybody's*

Karl R. Popper berpendapat bahwa Ilmu Pengetahuan yang objektif adalah ilmu pengetahuan tanpa mengenal subjeknya. Peranan subjek terhadap objek ilmu pengetahuan adalah “zero”, yaitu sebuah keadaan “bebas secara menyeluruh dari tuntutan seseorang untuk mengetahui” dalam arti tidak dipengaruhi oleh perasaan, imajinasi dan kepentingan.

Pengertian Karl R. Popper sangat penting tentang memahami objektivitas ilmu pengetahuan. Karl Popper menjelaskan dengan substansi awal, yakni akan keberadaan pendekatan subjektivisme dan objektivisme. Epistemologinya sangat jelas dan substantif. Bahwa kita melakukan proses kegiatan ilmu pengetahuan dengan berawal pada hubungan yang jelas, setara dan objektif antara subjek dan objek. “Heidegger, ... konstruksi dalam filsafat itu dengan sendirinya harus serentak destruksi, yaitu dekonstruksi konsep – konsep tradisional dengan cara justru kembali ke tradisi.”³⁵

Pendekatan objektivis memandang pengetahuan dalam dimensi objektif sebagai suatu solusi tentatif atas suatu problem, dengan selalu dihadapkan pada kritik. Ini berlawanan dengan pendekatan subjektif, yang menurut Popper terkandung dalam pandangan rasionalistis maupun empirisistis. Kedua aliran tersebut melalaikan pembedaan antara pengetahuan subjektif yang merupakan disposisi mental subjektif dan pengetahuan objektif, yaitu pengetahuan dipandang dalam dirinya sendiri.³⁶

claim to know; it is also independent of anybody's belief, or disposition to assent; or to assert; or to act. Knowledge in the objective sense is knowledge without a knower: it is knowledge without a knowing subject. Karl R. Popper, *Objective Knowledge*, Oxford University Press, Great Britain, 1974, page 108 – 109.

³⁵ I. Bambang Sugiharto, *Op.Cit.*, hal. 43.

³⁶ Alfons Taryadi, *Ibid.*, hal. 29.

Posisi Ilmu Pemerintahan yang melihat objek pemerintahan dengan pandangan rasionalistis maupun empirisistis adalah bersumber pada otoritas dan bersifat subjektif. Sumber Otoritas menjadi sangat dominan karena proses disposisi untuk semua sumber – sumber pengetahuan menjadi berawal dan berujung pada kegiatan mental subjektif. Ilmu Pemerintahan, sebagai ilmu pengetahuan, sebaiknya memiliki bahan – bahan pengetahuan hasil kritikan dari komunitasnya dan dari dialog dengan ilmu – ilmu lain yang berbeda “*point of view*” dengan pengetahuan menurut disposisi pada apa yang ada dalam objek Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Pemahaman terhadap objek, adalah proses untuk selalu bersikap terbuka pada kritik. Kritik itu adalah proses pencarian atas disposisi yang ditentukan oleh objek dari ilmu pengetahuan,³⁷ karena pengetahuan ada pada dirinya sendiri.

Kurangnya kritik terhadap sumber – sumber pengetahuan yang memiliki otoritas menjadikan Ilmu Pemerintahan otoritarian dan subjektif, tanpa disadari Ilmu Pemerintahan kehilangan karakteristik dan identitas, metodologi dan kreatifitas ilmu pengetahuan. Dari sejak awal, Ilmu Pemerintahan yang ada pada lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “jalan di tempat”, bahkan statusnya menjadi “*controversial*” kalau dibandingkan dengan Jurusan Ilmu Politik pada fakultas yang sama.

Materi pengetahuan, kurikulum dan buku – buku ajaran diwarnai oleh subjektifitas dan otoritas yang beraneka ragam. Dinamika perkembangan adalah perbedaan dan pertentangan metodologi, orientasi dan kepentingan. Perkembangan yang terjadi dan sangat cepat perubahannya adalah pada bidang

³⁷ Dan paradigma atau skema penafsiran yang mendasari konstruksi itu diterima dan dipercayai oleh komunitas para ilmuwan bukan terutama karena para ilmuwan itu tahu bahwa itu benar, melainkan karena percaya, bahwa itu yang terbaik, yaitu yang paling memberi harapan bila digunakan dalam riset – riset selanjutnya. Dan kepercayaan itu de facto sebagian besarnya juga dibentuk lewat persuasi. I. Bambang Sugiharto, *Op. Cit.*, hal. 39 – 40.

Ilmu Politik sebagai ilmu induk, yang dengan kreatifnya melahirkan teori – teori baru, kegiatan ilmiah, seminar yang dirasakan sangat kontributif terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan serta signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiadaan kritik dalam kegiatan Ilmu Pemerintahan lebih disebabkan karena tidak adanya pemahaman dan dialog secara filosofis dan konstruktif antara Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Filsafat sebagai ilmu yang kritis.

Pemahaman secara filosofis epistemologis adalah salah satu bentuk dialog dengan Ilmu Pemerintahan dan upaya untuk "eksis" dalam ilmu pengetahuan dengan mapan. Memahami secara filosofis terhadap ilmu adalah jalan ke arah pemahaman objek ilmu pengetahuan secara komprehensif dan ilmiah. Kekurangan pada bagian substansi ini menyebabkan penguasaan terhadap Ilmu Pemerintahan tidak utuh dan sebagian tidak menyeluruh cenderung menjadi subjektif dan bersifat "otoritarian". Jalan pintas, serba cepat seolah – olah ingin menyederhanakan dunia realitas tampaknya diterapkan oleh Ilmu Pemerintahan terhadap objeknya, padahal prosedur dan tahapan ilmu yang sebaiknya dilalui secara epistemologis.

Dampak modernisasi ilmu pengetahuan adalah bentuk totalitarianisme dan hilangnya makna, terjadinya alienasi dan sebagainya. Menurut Habermas³⁸ hal itu merupakan bentuk miskin dari rasionalisme barat pada paradigma filsafat kesadaran atau rasio instrumental. Dampak – dampak negatif tersebut dapat diatasi dengan pencerahan lebih lanjut melalui proyek modernitas dalam wawasan rasio komunikatif. Pernyataan itu adalah salah satu pendirian Habermas

³⁸ Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity*, Massachusetts, The MIT Press Cambridge, 1987.

yang paling tegas dan jelas memperlihatkan maksud dan posisi program Teori Kritisnya di tengah – tengah filsafat dan ilmu – ilmu sosial dewasa ini.³⁹

Pada akhirnya harapan dari masyarakat terhadap komunitas Ilmu Pemerintahan agar Ilmu Pemerintahan dapat berperan sebagai sumber pengetahuan yang objektif, pragmatis dan antisipatif terhadap realitas serta dinamika pemerintahan yang tak terduga. Judul yang dipilih memiliki relevansi dengan perkembangan Ilmu Pemerintahan dewasa ini. Mengamati Ilmu Pemerintahan sebagai program studi yang tergolong masih muda di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jika dibandingkan dengan program – program studi lainnya, misalnya Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi menyebabkan adanya keterbatasan dalam “*references*” dan “*literature*”.⁴⁰

Perkembangan di Indonesia dengan keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,⁴¹ bermakna kegiatan pemerintahan akan menjadi semakin kuat seiring dengan perkembangan dan penguatan otonomi daerah, terutama di daerah – daerah yang menyelenggarakan otonomi dengan seluas - luasnya. Dampak akademisnya adalah bertambah pentingnya peran dan tanggung jawab Ilmu Pemerintahan dalam kancah persaingan ilmu – ilmu sosial dan politik untuk dapat ikut terlibat dengan dinamika kegiatan pemerintahan. Harapan masyarakat luas bahwa komunitas ilmuwan dari Ilmu Pemerintahan dapat bertanggung jawab secara akademis untuk keberadaan Ilmu Pemerintahan dan ikut terlibat dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.

³⁹ Francisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, hal. xiv.

⁴⁰ Reference book, a book that contains facts and information, that you look at when you need to find out something particular. Literature, pieces of writing or printed information on a particular subject. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Idem.*, pages 1269 and 898.

⁴¹ UU no. 32 Tahun 2004, sekarang ini dalam pertimbangan di Pemerintah dan DPR untuk direvisi kembali sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi yang seluas – luasnya dan tidak terkendali.

Hampir semua daerah di Indonesia sekarang ini memberikan formasi untuk pengisian tenaga ahli dengan latarbelakang sarjana Ilmu Pemerintahan. Mengingat posisi Ilmu Pemerintahan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, maka penulis mengajukan judul, “Epistemologi Ilmu Pemerintahan” (Tinjauan Kritis tentang Karakteristik dan Identitas Keilmuan), sebagai upaya untuk ikut bertanggung jawab secara kreatif terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan dan ikut menebarkan benih – benih demokrasi.

1.2 PERMASALAHAN

Keberadaan Ilmu Pemerintahan sangat ditentukan oleh adanya kejelasan objek. Ilmu Pemerintahan tanpa berdialog dengan filsafat, dalam perkembangannya tidak dapat menyelesaikan polemik dan kontroversial dalam tubuh Ilmu Pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan keberanian untuk melepaskan paradigma (*paradigm*)⁴² lama, yaitu didasarkan kepada subjektivisme dalam pengertian subjek sebagai yang menentukan mengenai objek dan otoritarianisme dalam pengertian berdasarkan otoritas akal di satu pihak dan otoritas indera di lain pihak atau pun otoritas yang didasarkan kepada tradisi, imaginasi, intuisi atau pengamatan dalam kegiatan ilmu pengetahuan.

Ketidakjelasan objek dan ruang lingkup dari Ilmu Pemerintahan adalah penyebab utama dari banyaknya definisi dan penafsiran yang saling

⁴² Paradigm, (Greek, *paradeigma*, from *para*, “beside”, and *deiknai*, “to show”, meaning “model”, “exemplar”, “archetype”, “ideal”). 1. A way of looking at something. 2. In science, a model, pattern, or ideal theory from which perspective phenomena are explained. 3. An ideal situation or exemplification. Peter A. Angeles, *Op. Cit.* pages 203.

bertentangan satu sama lain. Langkah awal untuk memahami suatu ilmu pengetahuan yaitu menentukan dengan jelas dan tajam objek dari ilmu pengetahuan tersebut dalam hal ini Ilmu Pemerintahan. Peneliti melihat bahwa penentuan, penjelasan, penajaman dan perumusan objek Ilmu Pemerintahan tidak dapat dilihat dari kaca mata Ilmu Pemerintahan sendiri, tetapi melalui pengkajian epistemologis dan dialogis filosofis agar terlihat asal usul, keberadaan ilmu, dan metodologinya.

Ilmu Pemerintahan mengalami disorientasi atau kehilangan arah dalam mengarungi perjalanan dinamika kegiatan keilmuannya. Setiap anggota dari komunitas Ilmu Pemerintahan membuat tafsiran dan definisinya sendiri, secara subjektif berdasarkan hasrat bebas keingintahuannya. Ada yang bertolak dari latarbelakang bidang ilmu yang sama dan juga tidak sama, misalnya ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu politik yang diklaim sebagai pakar dari Ilmu Pemerintahan, dengan bekal hanya sekedar membahas atau menyinggung pemerintahan sebagai objeknya. Timbullah kemudian pandangan masyarakat yang meragukan terhadap kompetensi Ilmu Pemerintahan.

Harapan masyarakat terhadap Ilmu Pemerintahan agar dapat menjawab tantangan – tantangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sehari – hari semakin bertambah, seiring dengan munculnya persoalan – persoalan aktual pemerintahan dengan segala dinamikanya yang tidak pernah diduga. Ketidakmampuan Ilmu Pemerintahan untuk menjawab persoalan – persoalan aktual pemerintahan dengan segala dinamikanya menunjukkan ketidakberdayaan dan keterbatasan Ilmu Pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan dalam proses pengembangannya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum dan lembaga pemerintah sendiri. Dalam proses

penyelenggaraan kurikulum akademisnya, khususnya oleh lembaga pemerintah kemurnian Ilmu Pemerintahan menjadi amat diragukan karena proses pendidikannya akademisnya sarat dengan kepentingan yang melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Sebagai ilmu pengetahuan yang masih tergolong muda dan penuh kontroversi dan polemik khususnya di Indonesia, Ilmu Pemerintahan dapat dikondisikan berada pada tahap pra paradigma.⁴³ Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan Ilmu Pemerintahan. Semua permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi status ontologis dari Ilmu Pemerintahan?
2. Sejauhmanakah Ilmu Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu ?
3. Bagaimanakah metodologi Ilmu Pemerintahan itu ?

Melalui identifikasi masalah tersebut, peneliti merumuskan ada 3 (tiga) masalah substansi dalam Ilmu Pemerintahan. Melalui penelitian ini, diharapkan masalah – masalah tersebut dapat dijelaskan secara mendalam berdasarkan epistemologi dan analisa kritis reflektif, yaitu melalui dialog antara Ilmu Pemerintahan dan filsafat.

⁴³ Istilah Thomas Kuhn, pra paradigma yaitu tahap yang penuh dengan perdebatan – perdebatan tentang prinsip – prinsip filsafat, masalah – masalah dasar. Kemudian muncul heuristik, yaitu cara untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan ilmu.

1.3. *THESIS STATEMENT*

Adapun pemikiran yang menjadi *thesis statement* penulis, adalah sebagai berikut: Ilmu Pemerintahan bukanlah ilmu epistemologi positivistik, dan bukan juga ilmu dengan epistemologi pragmatis instrumental, melainkan ilmu dengan epistemologi kritis yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner.

Pendekatan epistemologi pluralistis, terkait erat dengan ide “*emergence*”, yang artinya “kemunculan” istilah dari Popper, yaitu pentingnya sikap keterbukaan terhadap pertumbuhan yang tak terduga, yang tak teramalkan oleh sarana – sarana ilmiah. Epistemologi dalam penelitian ini adalah sarana ilmiah untuk menganalisa secara kritis dan reflektif terhadap Ilmu Pemerintahan, yang menitikberatkan pada pemahaman atas hakikat ilmu pengetahuan dan metodologi pengetahuan serta dinamika pengetahuan ilmiah dan kritik terhadap ilmu pengetahuan.

Thesis statement tersebut di atas akan menjadi landasan dalam mengkaji Ilmu Pemerintahan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam terhadap eksistensi Ilmu Pemerintahan yang berhubungan erat dengan realitas (*world reality*) dari fenomena pemerintahan yang ada di masyarakat.

1.4 METODE PENELITIAN

Status ontologis dari Ilmu Pemerintahan akan dibahas secara epistemologi, agar Ilmu Pemerintahan dapat dipahami identitas dan karakteristiknya sebagai ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat dapat memahami tentang keberadaan Ilmu Pemerintahan dan terlihat kontribusi yang

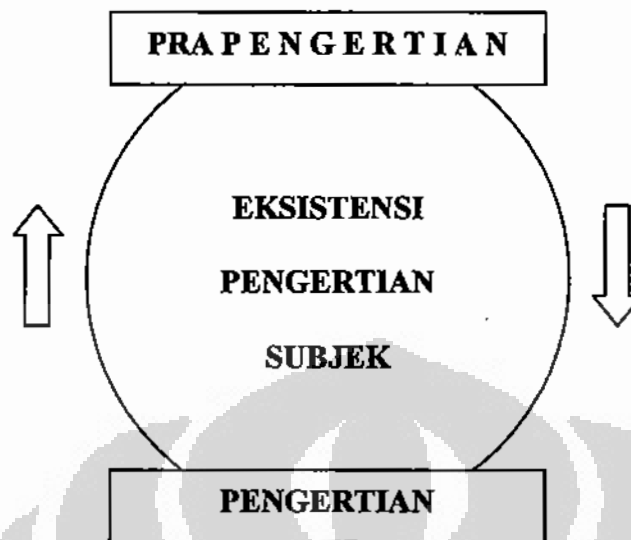
jelas terhadap kepentingan umat manusia. Dialog antara filsafat dengan Ilmu Pemerintahan dalam konteks kritis, introspektif dan reflektif akan menjadi metode pembahasan utama dalam penelitian ini. Peneliti akan melengkapi pengkajian ini dengan menggunakan beberapa metode yang umum dipakai dalam penelitian filsafat, sebagai alat untuk dapat memahami dengan jelas dan mendalam serta memperoleh rekomendasi – rekomendasi aktual terhadap Ilmu Pemerintahan.

1.4.1 Hermeneutik kritis

Istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani dan menunjuk pada akar kata *hermenēutikos* diartikan *to interpret* yang berarti menafsirkan, mengartikan atau menerjemahkan. Dalam perkembangannya, hermeneutika mempunyai berbagai macam pengertian. Meskipun muncul berbagai macam arti, pada pokoknya filsafat hermeneutika ini hendak berefleksi tentang ‘mengerti’ (*verstehen*).⁴⁴

⁴⁴ Kees Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Gramedia, Jakarta, edisi kedua 1983, hal. 224.

LINGKARAN HERMENEUTIS



Gadamer menekankan juga bahwa “mengerti” mempunyai struktur lingkaran. Supaya orang mengerti, sudah harus ada prapengertian. Untuk mencapai pengertian, satu – satunya cara ialah bertolak dari pengertian! Misalnya untuk mengerti suatu teks, sebelumnya sudah mesti ada prapengertian tertentu tentang apa yang dibicarakan dalam teks itu. Kalau tidak, maka sekali – kali tidak pernah akan mungkin memperoleh pengertian tentang teks tersebut.⁴⁵

Hermeneutik menurut Hans-Georg Gadamer, dalam bukunya yang terkenal “*Wahrheit und Methode*” tidak bermaksud menjadikan hermeneutik sebagai metode dan berada jauh dari kebenaran. Gadamer, menekankan pentingnya pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis bukan metodologis.

Sebenarnya ‘prasangka’ (prapengertian) berarti sebuah pertimbangan yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sebuah situasi akhirnya diuji. Dalam terminologi

⁴⁵ Kees Bertens, *Ibid.*, hal. 225.

hukum Jerman sebuah 'prasangka' adalah dalil hukum ketika dalil terakhir belum dicapai. ... jadi, pastinya 'prasangka' tidak berarti sebuah pertimbangan palsu, tetapi bagian dari ide di mana ia mempunyai nilai positif dan negatif.⁴⁶

Sebab, menurut Gadamer, kebenaran menerangi metode – metode individual, sedangkan metode justru merintangi atau menghambat kebenaran. Gadamer ingin mencapai kebenaran bukan melalui metode melainkan melalui dialektika.⁴⁷ 'Prejudice', istilah Gadamer atau prapengertian merupakan sebuah penilaian awal yang ada dalam diri kita tanpa metode tertentu yang ditempuh terlebih dahulu. Ia ada karena idea pemikiran, berawal dari yang ada prapengertian maka pengertian yang sesungguhnya akan tercapai, proses ini mengesampingkan metode karena mencari keterkaitan 'the history of ideas' dan memunculkan 'verstehen' untuk menjadi 'erklaren' sebagai sebuah kebenaran.

Pengalaman hermeneutis dari Gadamer (1) kebenaran sebagai yang tak tersembunyi (2) bahasa dan pemahaman (3) hubungan antara kebenaran dan metode.⁴⁸ Arti (1) kebenaran sebagai yang tak tersembunyi "ada telanjang" jelas terlihat dalam wujud "das sein" untuk diperhatikan dengan seksama supaya dapat ditafsirkan dengan benar dan menemukan kebenaran itu sendiri. Menurut Gadamer, manusia mampu memahami karena ia mempunyai tradisi dan tradisi adalah bagian dari pengalaman kita yang disebut dengan pra pengertian. (2) Bahasa dan pemahaman, prapengertian/prasangka yang mendasar adalah bahasa. Melalui bahasa tradisi berlangsung. Pengalaman terjadi melalui bahasa. Bahasa merupakan sarana dalam dan lewat mana kita dapat hidup dan mengetahui dunia

⁴⁶ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, Crossroad, New York, second revised edition 1989, pages 270. *Kebenaran dan Metode*, terjemahan Ahmad Sahidah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 327.

⁴⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutik*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan pertama 1993, hal. 63.

⁴⁸ Mispan Indarjo, , *Gambaran Pengalaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer*, Driyarkara, Th. XX No. 3, 1993/1994, hal. 3.

kita. Bahasa menjadi pengantar proses pemahaman. “Ada yang dapat dipahami adalah bahasa”, demikianlah Gadamer menegaskan.⁴⁹ (3) Hubungan antara kebenaran dan metode, yaitu upaya untuk memahami kebenaran itu sendiri melampaui batas metodologi dan teori, menurut Gadamer kebenaran bukanlah produk dari metode karena kebenaran justru akan dicapai jika batas – batas metodologis dilampaui.

Bahasa tertulis membutuhkan pemaknaan yang tepat. Dengan pemaknaan yang tepat, keterasingan dengan keadaan tertulis dapat diatasi. Dalam dialog, penafsir menghidupkan kata – kata yang tertulis sehingga kata – kata tersebut mampu berbicara secara baru. Jadi pengalaman hermeneutis sebenarnya bukanlah suatu aturan atau metode tetapi lebih merupakan pengalaman masuk ke dalam peristiwanya itu dalam dialog.⁵⁰

Pengalaman hermeneutis Gadamer adalah pengalaman yang memberikan makna – makna baru dalam kehidupan kita. Hermeneutika tidak sebatas tulisan atau teks, terdapat dialog yang intens antara yang menafsirkan dengan teks. Pemunculan makna-makna baru atas teks adalah pengalaman hermeneutis yang dapat memunculkan kebenaran. Aturan dan metode menurut Gadamer tidaklah memunculkan kebenaran, tetapi kebenaran haruslah melampaui metode dan aturan itu sendiri.

Hermeneutika Gadamer adalah metode filsafat yang dapat memahami realitas dengan sejasnya dan membuka selubung yang terdalam serta menciptakan realitas – realitas baru yang memperkaya pengalaman dan kehidupan kita. Bagi Gadamer interpretasi tidak sama dengan mengambil suatu teks, lalu mencari arti yang oleh si pengarang diletakkan dalam teks itu. Bagi Gadamer arti suatu teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud si

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 5.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 6 – 8.

pengarang dengan teks tersebut. Maka dari itu interpretasi tidak bersifat reproduktif belaka, tetapi juga produktif.⁵¹

1.4.2 Heuristika⁵²

Upaya epistemologi secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang Ilmu Pemerintahan, dengan mempelajari referensi tentang konsep – konsep pemerintahan berdasarkan analisa kritis dan reflektif serta dapat memberikan rumusan tentang karakteristik dan identitas keilmuan. Argumentasi - argumentasi, penilaian – penilaian dan konsep – konsep yang ada akan ditinjau kembali secara kritis dan reflektif, agar dimungkinkan untuk disajikan perubahan tentang konsep pemahaman yang baru serta mendalam. Langkah ini sangat penting dilakukan dalam penelitian filsafat dan hubungannya dengan Ilmu Pemerintahan, sehingga dialog antar ilmu melalui penelitian ini menjadi terbuka dan interaktif.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Pemahaman terhadap Ilmu Pemerintahan dari aspek epistemologi dapat dicapai melalui dialog dengan filsafat. Artinya, pemikiran yang mendalam dan substansial hanya dapat dilakukan melalui pendekatan filosofis. Dialog antara Filsafat dan Ilmu Pemerintahan adalah interaksi yang sejajar dan bersikap

⁵¹ Kees Bertens, *Op.Cit.*, hal. 229. Dalam reproduksi makna, penafsir menciptakan makna kembali sebagaimana dihayati oleh penciptanya. ...Sebaliknya, dalam produksi makna, penafsir berhak dan harus memahami teks dengan jalannya sendiri, tergantung dari bagaimana teks itu sendiri mengungkapkan dirinya kepada penafsir. Mispan Indarjo, *Op.Cit.*, hal. 4.

⁵² Heuristic (Greek, *heuriskein*, "to discover"), providing assistance in discovering (or in presenting) a truth or solving a problem, for example a model or a useful hypothesis. Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, USA, 1981, page 115. Heuristic, teaching or education encourages you to learn by discovering things for yourself. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Op. Cit.*, page 731.

saling terbuka. Ilmu Pemerintahan tidak dapat berjalan menurut kehendaknya sendiri, karena jika hal itu terjadi berarti Ilmu Pemerintahan telah menutup diri terhadap kritik dan sulit berada pada posisi terbuka bagi nilai – nilai objektivitas, kebenaran dan kreatifitas ilmu pengetahuan. Evaluasi kritis secara mendalam dan komprehensif perlu dilakukan terus menerus terhadap Ilmu Pemerintahan dari aspek epistemologi.

Lemahnya kritik dalam kegiatan Ilmu Pemerintahan lebih disebabkan tidak adanya pemahaman secara filosofis terhadap Ilmu Pemerintahan. Fenomena pemerintahan yang ada di masyarakat perlu dikaji berdasarkan epistemologi, dan hasilnya diharapkan dapat merevitalisasi Ilmu Pemerintahan.

Pemahaman secara filosofis, ialah:

Manusia tahu bahwa ia tahu. Ia sadar bahwa ia tahu. Oleh karena itu, dengan kesadarannya, manusia melakukan refleksi tentang apa yang diketahuinya itu. Berkat refleksi ini pula pengetahuan yang semula bersifat langsung dan spontan, kemudian diatur dan dibakukan secara sistematis sedemikian rupa sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat pula dikritik dan dibela.⁵³

Refleksi kritis sebagai bagian dari cara pemahaman filosofis, berbunyi: “*Reflection is the process of calm reconsideration, which may lead to a better view of things*”⁵⁴, atau “melalui proses pertimbangan kembali secara tenang yang dapat memberikan pandangan yang lebih baik mengenai sesuatu.” Persepsi atas objek Ilmu Pemerintahan yang selama ini sudah dianggap benar,

⁵³ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 21.

⁵⁴ Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada, 1991, page 198.

dapat ditinjau ulang sehingga diperoleh pandangan yang lebih baik dan mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pemahaman secara filosofis dengan menggunakan epistemologi adalah awal kegiatan dalam Ilmu Pengetahuan. Memahami terlebih dahulu hubungan antara subjek dan objek dalam ilmu pengetahuan secara lebih lengkap dan mendasar. Kekurangan pada bagian tersebut menyebabkan pemahaman terhadap Ilmu Pemerintahan tidak utuh dan cenderung berada antara “*a priori method and method of authority*”, sebagai bagian dari kegiatan ilmu pengetahuan dan bahkan cenderung menjadi deviasi.⁵⁵ Ada potensi dalam Ilmu Pemerintahan untuk berperan sebagai sumber pengetahuan yang praksis.⁵⁶

Makin lama kita berefleksi tentang ilmu pengetahuan makin sadarliah kita tentang tempat sentral ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan tentang tanggungjawab besar yang berkaitan dengannya. Kesadaran dan tanggung jawab itu bertambah besar bila kita melihat dengan cara jelas dan sering kali pedih betapa tak berdaya ilmu pengetahuan terhadap problem –problem konkrit, karena dengan itu kita dianjurkan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan sekuat tenaga. Dalam pada itu perlu kita tetap teringat bahwa ilmu pengetahuan bagi manusia bukan saja sekedar jalan menuju perkembangan diri, tapi juga sebagian integral dari perkembangan diri itu.⁵⁷

⁵⁵ Deviation (late Latin, deviation) the act or an instance of deviating; Specification,

a. sharp divergence from normal behavior

b. divergence from the official ideology or policies of a political party, especially a communist party. *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, USA, Third College Edition, 1996, page 377.

⁵⁶ Praxis, a way of doing something; the use of a theory or a belief in a practical way. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Op. Cit.*, page 1182. Praksis pertama – tama tertuju pada keperluan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan pada keinginan untuk meningkatkan kemungkinan – kemungkinan yang disajikan hidup ini. A.G.M. van Melsen, diterjemahkan oleh K. Bertens, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 105.

⁵⁷ A.G.M. van Melsen, diterjemahkan oleh K. Bertens, *Idem*. hal. 141.

Harapan terhadap Ilmu Pemerintahan begitu kuat dari masyarakat untuk menjadi ilmu yang praksis, karena keadaan yang tampak dalam kegiatan pemerintahan sehari – hari dengan segala dinamikanya yang tak terduga adalah problem – problem kongkrit dan krusial. Banyak hal yang tak dapat dijelaskan, bahkan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain dalam pemerintahan tetap kabur dan tinggal sebagai misteri. Ilmu Pemerintahan lebih banyak mengambil sikap diam dan tidak berdaya terhadap peristiwa pemerintahan dengan segala dinamika yang tak terduga, keterbatasan dan ketidakmampuan menyebabkan kemandekan ilmu pengetahuan. Ilmu Pemerintahan diharapkan oleh masyarakat untuk dapat memahami dengan lebih baik fenomena pemerintahan yang terjadi dengan segala dinamikanya dan disertai kemampuan untuk menjelaskan fenomena pemerintahan serta memberikan alternatif solusi yang lebih baik.

Sebagian besar dari komunitas Ilmu Pemerintahan beranggapan bahwa mempelajari Ilmu Pemerintahan adalah salah satu jalan untuk mengaktualisasi perkembangan diri serta untuk lebih memahami tentang dunia pemerintahan dengan segala dinamikanya dan sebagai jembatan ke dunia praktek pemerintahan. Upaya - upaya pemahaman terhadap realitas dan dinamika pemerintahan dalam kegiatan berfilsafat, adalah untuk mencerahkan serta memberikan pandangan – pandangan yang lebih komprehensif.

Sebuah pemahaman terhadap proses pemerintahan dalam suatu era "*big government*" adalah mendasar karena "Pemerintahan dengan kelengkapannya adalah yang paling besar dan efektif, dalam hal mana manusia membangunnya untuk memaksimalisasikan kekuasaannya sendiri dan menjadi apa

yang mereka inginkan, dan ini merupakan wujud kebebasan mereka.”⁵⁸

Pemerintah adalah bagian integral dari masyarakat pada umumnya, dan sebagai masyarakat umum yang maju dan berkembang maka sepantasnyalah Ilmu Pemerintahan di dalamnya ikut terlibat pada proses kemajuan dan perkembangan fenomena pemerintahan yang terjadi pada masyarakat umum baik secara praksis maupun teoritis. Ilmu Pemerintahan selain diselenggarakan oleh institusi pendidikan umum juga diselenggarakan sendiri oleh institusi pemerintahan, dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri. Disinilah Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu menjadi “sarana ideologis” dan sekaligus Ilmu Pemerintahan mengalami “ajang kepentingan subjektivitas” karena Ilmu Pemerintahan dengan realitas objek pemerintahan menjadi sarat dengan kepentingan penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai subjek yang melakukan kegiatan Ilmu Pemerintahan. Sebuah ideologi adalah sebuah nilai atau sistem kepercayaan yang telah diterima oleh umum sebagai fakta atau kebenaran oleh sejumlah kelompok.⁵⁹

Ilmu Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri sebaiknya dihapuskan dan dikembalikan kepada institusi pendidikan umum, dalam hal ini adalah universitas-universitas yang memiliki program studi Ilmu Pemerintahan untuk dapat secara penuh menghasilkan ahli-ahli

⁵⁸ *An understanding of the process of government in an epoch of “big government” is fundamental because “Government is the most massive and effective of the instruments which men have constructed to maximize their own power to be what they want to be, and this constitutes their freedom.”* Daniel Wit, *Comparative Political Institutions*, Henry Holt and Company, New York, 1953, page 1 – 2.

⁵⁹ *An ideology is a value or belief system accepted as fact or truth by some group.* Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies*, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, USA, Seventh Edition, 1987, page 2.

pemerintahan untuk mengisi kebutuhan dari semua jenjang pemerintahan yang ada.

Jika Ilmu Pemerintahan diajarkan dan diterima sebagai sebuah kebenaran oleh suatu kelompok, maka Ilmu Pemerintahan menjadi bersifat “ideologis”. “Seperangkat keyakinan, khususnya jika seseorang dikuasai melalui kelompok tertentu, yang dapat memengaruhi perilaku seseorang.”⁶⁰ Ilmu Pemerintahan yang diajarkan baik oleh institusi pendidikan maupun institusi pemerintahan menjadi mandek “*stagnant*”, dan kurang kreatif seperti layaknya sebuah ilmu pengetahuan yang diharapkan mengalami proses pertumbuhan pengetahuan.⁶¹

Materi dan penjelasan tentang objek dan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan untuk kurun waktu yang lama, menggunakan “*a priori method and method of authority*”. Proses waktu dengan mengamati kurikulum dan materi Ilmu Pemerintahan, tidak memberikan perubahan yang berarti dalam memahami fenomena pemerintahan, kalau pun ada perkembangan baru maka materinya bukan lagi Ilmu Pemerintahan tetapi sudah merupakan wilayah dari ilmu – ilmu sosial lainnya seperti “*political sciences*”.⁶²

⁶⁰ “a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave”. Oxford, *Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 2000, page 593.

⁶¹ Problem sentral epistemologi menurut Popper adalah problem pertumbuhan pengetahuan (Karl R. Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, Preface, page 15) pertumbuhan pengetahuan dapat dipelajari paling baik dalam pertumbuhan ilmiah, karena pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan biasa yang ditulis besar – besar. Tentang ini Popper menulis: Sampai ke Hume, Mill dan Mach, kebanyakan filsuf memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang mapan. Pengetahuan manusia adalah apa yang diketahui oleh hampir setiap orang: bahwa kucing itu di atas kasur, bahwa Julius Caesar dibunuh, bahwa rumput berwarna hijau. Semuanya itu bagiku tampak bukan main membosankan. Apa yang menarik ialah yang problematik, pertumbuhan pengetahuan, penemuan. Alfons Taryadi, *Op.Cit.*, hal. 116 – 117.

⁶² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ilmu Politik di Indonesia meliputi tiga bidang : a.Politik Indonesia, b.Hubungan Internasional dan c. Ilmu Pemerintahan. Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1983. Alfian dan Hidayat Mukmin, *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Rajawali, 1985, hal. 7.

Teori epistemologi Karl R. Popper, adalah tentang ilmu pengetahuan yang bertumbuh dan menjadi ilmu pengetahuan ilmiah yang objektif. Ilmu pengetahuan yang pada mulanya adalah untuk mencerahkan dan mensejahterakan manusia dapat berubah menjadi suatu ideologi dan bersifat totalitarianisme. Ilmu Pemerintahan disadari atau tidak telah “menyimpang” dari jalur ilmu pengetahuan karena menjadi sarana ideologis dan totalitarian.

Epistemologi dalam pengertian yang tradisional akan dibahas sebagai landasan untuk pembahasan epistemologi modern, kemudian epistemologi pragmatis instrumental dan epistemologi kritis dari Habermas akan mengakhiri pembahasan tentang Ilmu Pemerintahan, sebagai kritik ilmu pengetahuan. Tujuannya agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik dari Ilmu Pemerintahan,

Epistemologi, dari kata Yunani *epistemê* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu pengetahuan, informasi). Dapat dikatakan, pengetahuan tentang pengetahuan. Adakalanya disebut “teori pengetahuan”. Perbedaan pokok antara teori – teori pengetahuan adalah perbedaan antara metode rasionalisme dan teori empirisme. Yang terdahulu ditekankan oleh pemikir – pemikir seperti Parmenides, Plato, Descartes, Spinoza, Leibniz. Sedangkan yang kedua ditekankan oleh Francis Bacon, Locke, Berkeley, Hume, dst. Contoh pengetahuan yang paling menjanjikan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dengan demikian dapat diutarakan bahwa metode yang paling cocok dengan ilmu pengetahuan harus diterima.⁶³

Epistemologi hakekatnya adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan menempatkannya dalam posisi yang “tepat” dengan mengkritik metodologi ilmu pengetahuan agar memperoleh derajat kebenaran yang tinggi serta objektif.

⁶³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 212 – 213.

Kepentingan ideologis dan sifat otoritarian dari ilmu pengetahuan menjadi sasaran kritik dari epistemologi. Proses pemurnian ilmu pengetahuan berjalan terus sejak awal kelahirannya hingga apa yang sebaiknya terjadi adalah proses “pertumbuhan pengetahuan”.

“....dipahami bahwa Popper mengaitkan rasionalitas dan objektivitas ilmu – atribut yang membentuk keilmiahan ilmu pengetahuan – dengan sifat kritis: pengkajian kritis, argumentasi kritis, pendekatan kritis, dan tradisi kritis. Metode pengetahuan adalah metode kritis, yang diresapi oleh pendekatan kritis, yaitu pendekatan yang mengakui bahwa teori kita mungkin salah dan bahwa penerimaan atas suatu teori bersifat sementara, yaitu selama belum gugur oleh ujian keras.”⁶⁴

Teori – teori yang ada tentang pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan, adalah bersifat sementara. Melalui penelitian ini, apa yang menjadi kumpulan teori dan metodologi Ilmu Pemerintahan akan dibahas secara kritis reflektif. Tujuannya agar ditemukan konsep Ilmu Pemerintahan. Konsep itu penting, sebagai langkah awal untuk dapat dikembangkan lebih lanjut guna membangun ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik dan identitas keilmuan.

Richard Rorty menyebutkan dalam tulisannya tentang “kesudahan epistemologi,” dan dimulainya kegiatan postmodernisme untuk memperoleh pemahaman tentang realitas (*world reality*) dengan lebih baik. Penolakan terhadap “*logos*”⁶⁵ adalah bentuk yang mempertanyakan kembali tentang keabsahan – keabsahan dari positivisme dan modernisme. Pertanyaan yang

⁶⁴ Alfons Taryadi, *Op. Cit.*, hal. 128.

⁶⁵ Logos (Greek), speech, discourse, thought, reason, word, meaning, study of, the account of, the science of, the underlying reasons for why a thing is what it is, the principles and methods used to explain phenomena in a particular discipline, those features in a thing that make it intelligible to us, the rationale of a thing. Peter A. Angeles, *Op. Cit.*, pages 157.

dikemukakan adalah kritik – kritik postmodernisme yang secara intensif dan dinamis melakukan hal – hal yang mencengangkan dan tak terduga sama sekali.

Bahwa kita bisa belajar dari kesalahan, bagi Popper, merupakan pengertian fundamental, yang mendasari semua epistemologi dan metodologi. Sebab darinya bisa diperoleh saran bagaimana belajar secara sistematis, bagaimana maju secara lebih cepat. Secara sederhana, saran itu berbunyi: kita harus menggeledah kesalahan – kesalahan kita atau kita harus mencoba mengkritik teori – teori kita. Pengakuan akan kenyataan bahwa kita bisa salah dan bahwa pengajaran akan kepastian merupakan usaha keliru disebut oleh Popper dengan istilah “fallibilisme”. Salah satu konsekuensi pandangan ini ialah bahwa teori selalu bersifat tentatif, tak pernah final.⁶⁶

Menemukan kesalahan sekecil apa pun dalam Ilmu Pemerintahan, merupakan karakteristik yang mendasari semua epistemologi ilmu pengetahuan, sehingga teori dan konsep yang ada tidak pernah dalam status final. Ini adalah prinsip utama dalam penelitian epistemologis untuk menemukan dan membentuk konsep ilmu pengetahuan. Penelitian ini berupaya agar menghasilkan rekomendasi – rekomendasi yang dapat memperbaiki kesalahan – kesalahan yang ada dan dapat diperoleh pemahaman yang baru, serta yang lebih baik lagi terhadap Ilmu Pemerintahan.

Pengertian ‘paradigma filsafat kesadaran’ atau apa yang juga disebut rasio yang berpusat pada subjek adalah segala bentuk pemikiran yang menempatkan kenyataan, baik masyarakat maupun alam, sebagai objek. Bentuk pemikiran ini dipandang menyembunyikan kekuasaan. Istilah ‘menyembunyikan kekuasaan’, adalah kekuasaan yang ada dibelakang subjek, karena menentukan dan memberikan penilaian – penilaian terhadap semua kenyataan alamiah dan objek yang ada.

⁶⁶ Alfons Taryadi, *Op. Cit.*, hal. 129.

Kelemahan ini, menurut Habermas sudah terjadi dalam filsafat Marx sendiri yang kemudian diikuti oleh Teori Kritis. Marx menyempitkan praksis pada kerja, sehingga kritik, yakni perjuangan kelas revolusioner, dipahami sebagai penaklukan kelas atas kelas. Dalam “paradigma produksi” atau “paradigma kerja”, terkandung asumsi dasar bahwa kritik adalah penaklukan, seperti juga praksis kerja berarti penaklukan alam sebagai objek. Dengan cara ini menurut Habermas, kritik adalah rasionalitas yang menyembunyikan kekuasaan.

Sampai pada tahun 1980-an, Habermas tetap berpegang teguh bahwa kritik hanya bisa maju dengan landasan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai praksis komunikasi atau tindakan komunikatif. Sudah sejak tahun 1960-an dalam studinya tentang psikoanalisis, dia mempertahankan pendirian ini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Habermas mengubah “paradigma kerja” dalam Teori Kritis ke “paradigma komunikasi”.

Habermas berpegang pada pendapat bahwa sebuah masyarakat yang komunikatif menjadi tujuan universal masyarakat. Dasarnya adalah pandangannya yang sudah ada sejak tahun 60-an, bahwa konsensus yang universal dan bebas dari dominasi merupakan kehendak fundamental setiap hubungan sosial.⁶⁷

Habermas melihat dalam masyarakat terdapat dua tindakan, yaitu tindakan instrumental (*instrumental action*) yaitu tindakan individu untuk menaklukkan alam dan menguasainya serta untuk membebaskan diri dari kendala – kendala alam serta untuk mewujudkan dirinya dan tindakan komunikasi (*Communicative Action*) yaitu tindakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan dengan memerhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan

⁶⁷ Paradigma Filsafat Kesadaran dan pemikiran Habermas, dikutip dari tulisan : Francisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. xiii – xxi.

masyarakat. Perubahan paradigma tersebut akan diterapkan dalam metodologi Ilmu Pemerintahan.

Kritik ilmu pengetahuan dan teori kepentingan – kepentingan kognitif dari Habermas, membuka tabir hubungan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Secara kritis, Habermas melakukan, kritik ideologi dan kritik ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Penelitian ini akan menggunakan teori kepentingan kognitif Habermas sebagai bahan untuk kepentingan Ilmu Pemerintahan.

Ilmu Pengetahuan pada hakikatnya memiliki tujuan. Tujuan tersebut dapat secara umum dirumuskan menjadi :

1. Ilmu Pengetahuan untuk ilmu pengetahuan artinya ilmu itu dipelajari terus menerus untuk menghasilkan teori – teori baru, dan teori – teori baru adalah bentuk perbaikan dan penyempurnaan dari teori – teori lama serta menjadikan ilmu pengetahuan bergerak maju dan berkembang karena ada proses "*self critic*".
2. Ilmu Pengetahuan untuk keperluan *praxis*,⁶⁸ maksudnya ilmu pengetahuan ada dan dikembangkan semata – mata untuk keperluan kehidupan sehari – hari. Semakin tinggi hasil ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari

⁶⁸ Praxis, classical Greek "prassein", to do

1. Practice, as distinguished from theory, of an art, science, etc.

2. Established practice; custom

Webster's New World College Dictionary, Macmillan, USA, 1996, Third College Edition, page 1060.

semakin tinggi apresiasi masyarakat umum terhadap keberadaan ilmu pengetahuan tersebut.

3. Ilmu Pengetahuan dalam bentuk gabungan satu dan dua di atas. Jadi ilmu pengetahuan sekaligus dikembangkan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk keperluan *praxis*. Ilmu pengetahuan yang memiliki dua sisi ini memiliki konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Kecenderungan umum dari ilmu pengetahuan adalah mengambil posisi nomor tiga.

Sumber: kajian penulis

Dari ke tiga tujuan ilmu pengetahuan tersebut, tujuan hakiki dari setiap ilmu pengetahuan adalah untuk menjadikan ilmu pengetahuannya semakin objektif, semakin dapat dipahami, semakin dapat diperbaiki, dan semakin tinggi derajat kebenarannya serta dapat diterima oleh masyarakat pengguna ilmu pengetahuan tersebut. Semakin objektif ilmu pengetahuan semakin banyak perbaikan atas konsep – konsep lama yang telah diyakini kebenarannya untuk kemudian diganti dengan konsep pemahaman baru yang memberikan kemungkinan – kemungkinan yang lebih baik.

Popper juga menegaskan bahwa metode ilmu pengetahuan adalah metode problem solving. Metode ilmu adalah metode usaha tentatif untuk memecahkan masalah dengan konjektur – konjektur,⁶⁹ secara sadar yang dikontrol oleh kritik yang keras.

⁶⁹ Conjecture, Latin Conjectura, a putting together, guess, inference

1. an inferring, theorizing, or predicting from incomplete or uncertain evidence; guesswork (an editorial full of conjecture)
2. an inference, theory, or prediction based on guesswork; guess

Ini adalah metode “trial and error” yang dikembangkan secara sadar dan kritis.⁷⁰

Pemahaman terhadap realitas (*world reality*) pemerintahan dalam hubungan antara subjek dan objek pada Ilmu Pemerintahan melalui upaya epistemologi adalah awal untuk menjadikannya lebih jelas dan mendalam. Objek Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan melalui kritik dan refleksi yang mendalam dapat diperoleh konsep pemahaman baru. Hal – hal baru, nilai – nilai baru, arti dan tafsiran baru, hubungan – hubungan baru dan konsep konsep baru menjadi bermunculan untuk dapat diterima secara terbuka guna menunjang kegiatan ilmu pengetahuan, tanpa ini semua apa artinya ilmu pengetahuan tanpa ada perkembangan baru dan tidak ada apa – apa lagi untuk diketahui, yang ada hanyalah kebuntuan ilmu untuk bidang yang sama dalam kurun waktu “tak terbatas,” dan inilah yang saya anggap “*the end of science*”.⁷¹

Tidak ada jaminan bagi setiap ilmuwan untuk tidak berbuat kesalahan. Realitas adalah ungkapan tentang yang ada, jika pengetahuan kita mengenainya dapat dikritik secara terbuka oleh semua yang berkepentingan maka kebenaran objektif akan muncul dari interaksi tersebut. Ilmu Pemerintahan memiliki pengetahuan tentang realitas (*world reality*), tetapi pengetahuan yang ada tidak dijamin benar semua. Kesalahan sekecil apa pun, pada dasarnya adalah proses

Webster's New World College Dictionary, Idem., page 294.

⁷⁰ Alfons Taryadi, *Op.cit.* hal. 113. Mengutip dari Karl R. Popper, *The Logic of the Social Sciences*, dalam Theodor W. Adorno et.al. (ed.) *The Positivist Dispute in German Sociology*, trans. By Glyn Adly & David Fresby, Harper & Row, 1976.

⁷¹ Gunther Stent, ahli biologi dari Universitas California, menegaskan “ilmu pengetahuan mungkin akan berakhir, bukan karena adanya skeptisisme kaum akademisi yang sofis. Sebaliknya, ilmu pengetahuan berakhir justru karena ia telah bekerja dengan sangat baik.” John Horgan, *The End of Science*, (*Senjakala Ilmu Pengetahuan*), Penerjemah Djejen Zainuddin, Teraju, Jakarta, cetakan I September 2005, hal. 13.

untuk memperbaiki kesalahan dan menambah isi dari kebenaran atau “*verisimilitude*”.⁷²

Melalui proses epistemologi Popper, ilmu pengetahuan mengalami proses “pertumbuhan ilmu pengetahuan” atau “pembangunan ilmu pengetahuan” untuk menjadi objektif. Manfaat tersebut sangat relevant dengan tujuan ilmu pengetahuan. Dapat dibayangkan juga kenyataan yang terbalik dari harapan Popper ilmu pengetahuan berada dalam posisi “mati suri”.⁷³

Jadi ujung dari kegiatan ilmu pengetahuan adalah menemukan kesalahan - kesalahan yang telah terjadi selama ini baik disadari atau pun tidak disadari. Proses seperti ini adalah proses alamiah dengan tujuan bahwa yang dapat secara terus menerus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka ia akan dapat bertahan (*survive*). Oleh Popper diistilahkan dengan “*Darwinian Selection*.” Intinya ilmu pengetahuan isinya berubah karena lingkungan kritis dari waktu ke waktu melalui pertumbuhan pengetahuan dan upaya epistemologis. Untuk melihat tahap – tahap perkembangan Ilmu Pengetahuan, maka peneliti menggunakan teori Thomas Kuhn tentang Siklus Historis.

Siklus Historis berjalan melalui empat tahap:

- a) tahap pra paradigma, dalam tahap ini akan muncul heuristik, yaitu cara untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan ilmu pengetahuan;
- b) tahap paradigmatis, yaitu tahap ketika paradigma membimbing kegiatan ilmiah dalam ilmu normal (*normal science*), dengan kata lain tahap paradigmatis menunjukkan bahwa ilmu berjalan secara normal;
- c) tahap krisis, yaitu adanya krisis dalam ilmu pengetahuan: ilmuwan menjumpai beberapa kesulitan

⁷² *Verisimilitude*, terutama yang menyangkut gagasan-gagasan mengenai ilmu sebagai usaha untuk menemukan kebenaran atau makin mendekati kebenaran, Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 11 – 12.

⁷³ Tampaknya seperti mati, tetapi sebenarnya tidak; Badudu – Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 877.

dalam menjalankan risetnya, ia menjumpai berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan dengan teorinya, itulah yang disebut dengan anomaly (kelainan);

- d) tahap revolusi ilmiah, yaitu ketika si ilmuwan mulai mempertanyakan lagi paradigma yang telah dipakainya, sehingga ilmuwan keluar dari ilmu normal. Untuk mengatasi krisis, ilmuwan dapat kembali pada kegiatan ilmiahnya dengan membawa paradigma tandingan yang dapat memecahkan masalah dan membimbing riset berikutnya.⁷⁴

Siklus Historis sangat penting dan relevant dengan upaya epistemologis untuk memberi arti, karakteristik dan identitas yang lebih baik terhadap Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dipahami keberadaan Ilmu Pemerintahan pada saat penelitian ini berlangsung.

Ilmu Pemerintahan di Indonesia dirintis pertama kali oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950 dengan tujuan untuk mendidik kader – kader pemerintahan yang kelak akan mengisi hirarkhie pemerintahan dan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan. Berawal dari tujuan tersebut, Ilmu Pemerintahan berkembang di beberapa universitas dan di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dalam perjalanan historisnya Ilmu Pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah yang berbenturan dengan kepentingan akademik sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di satu sisi Ilmu Pemerintahan menjadi sarana ideologis dan disisi lain untuk lepas dan netral dari kepentingan kekuasaan dan murni sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk kepentingan umat manusia.

Pemikiran ulang (*review*) terhadap Ilmu Pemerintahan, dirintis melalui penelitian ini, upaya – upaya pemikiran filsafat dikaji berdasarkan epistemologi

⁷⁴ Irmayanti M. Budianto, *Op.Cit.*, hal. 39 – 40.

terhadap Ilmu Pemerintahan. Peneliti sangat berkepentingan untuk mempelajari Ilmu Pemerintahan dari aspek filosofis, dengan melihat kepada metodologi ilmu pengetahuannya berdasarkan terbentuknya pengetahuan yang menjadi bahan dasar untuk ilmu pengetahuan, untuk kemudian direkonstruksi melalui pembongkaran kesalahan – kesalahan guna mendapatkan perbaikan yang berarti. Ada proses selektivitas, pemurnian terhadap ilmu pengetahuan tetapi juga mengkreaitifkan ilmu agar mempunyai fungsi “*praxis*” bagi kehidupan umat manusia.

Filsafat mengkaji keberadaan suatu ilmu, yang tidak mungkin dilakukan oleh dirinya sendiri dan filsafat menilai berdasarkan kritik – kritik yang dikemukakannya. Apakah arti dari kebenaran ilmu pengetahuan, filsafatlah yang berhasil merumuskannya melalui pendapat – pendapat para ahli. Paling tidak filsafatlah yang memikirkan tentang arti dan nilai – nilai kebenaran. Apa yang ada dibalik ilmu dan tujuan dari ilmu pengetahuan menjadi kajian filosofis yang tidak ada habis – habisnya. Apa yang selama ini sudah diketahui tentang ilmu pengetahuan, maka diperlukan kritik terhadapnya untuk memperbaiki dan menemukan hal – hal yang salah atau pun hal – hal yang telah dianggap benar (legitimate) guna dikaji kembali untuk lebih diperkuat dan dicari kekayaan makna, dan nilai – nilai baru.

Beberapa referensi utama sebagai bahan studi pustaka mengambil dari,

1. Popper, Karl R., *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge, New York, Reprinted 1992.
2. Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago & London, 1968.

3. MacIver, R.M., *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, Twentieth Printing 1963.
4. Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*, jilid 1 dan 2, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan pertama Mei 2003.
5. Habermas, Jürgen, *The Theory of Communicative Action*, volume 1, Beacon Press, Boston, 1984.

1.6 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.6.1 TUJUAN

1.6.1.1 Penelitian terhadap Ilmu Pemerintahan secara epistemologis, adalah upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap realitas pemerintahan (*world reality*).

1.6.1.2 Melalui penelitian ini diharapkan terbukanya komunikasi dialogis yang kritis dan kreatif antara Filsafat dan Ilmu Pemerintahan.

1.6.1.3 Melalui epistemologi, dapat diperoleh pemahaman baru yang lebih baik terhadap arti kebenaran dalam Ilmu Pemerintahan .

1.6.1.4 Kritik terhadap teori – teori dan metodologi yang digunakan dalam Ilmu Pemerintahan, menjadikannya lebih kreatif dan toleran

terhadap disiplin ilmu – ilmu yang lain, sehingga terwujudlah Ilmu Pemerintahan yang multidisipliner dan interdisipliner.⁷⁵

1.6.1.5 Ilmu Pemerintahan melalui upaya epistemologis, diharapkan mengisi predikabel⁷⁶ “pemerintahan,” yang bermakna “*relevant*” dan substantif dengan “kepentingan dan kesejahteraan umat manusianya”

1.6.1.6 Ilmu Pemerintahan agar selalu diingatkan dan menjadi introspektif dan reflektif sepenuhnya melalui penelitian ini, untuk tidak terjebak atau digunakan baik secara sadar maupun tidak sadar dari sarana ideologis tertentu.

1.6.1.7 Penelitian ini bertujuan untuk tidak menyeragamkan atau membatasi konsep dan definisi, tetapi ada peluang dan makna baru yang dapat ditemukan, diterima untuk dijelaskan dan dipahami. Keragaman konsep dan definisi dengan konsep yang kokoh dan jelas, akan kelihatan lebih hidup dan kaya akan elemen – elemen imaji yang kreatif.

⁷⁵ Multidisciplinary, involving several different subjects of study. Interdisciplinary, involving different areas of knowledge or study. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Op. Cit.*, pages 1003 and pages 809.

⁷⁶ Predikabel adalah pengertian – pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Jan Hendrik Rapar, *Op.Cit.*, hal. 20.

1.6.2 MANFAAT PENELITIAN

1.6.2.1 Penelitian berdasarkan epistemologis terhadap Ilmu Pemerintahan akan memberikan pengalaman baru yang mampu memperkaya makna atas fenomena – fenomena yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

1.6.2.2 Dunia yang serba tidak pasti dan berubah setiap saat, memerlukan rujukan dan pedoman dalam kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini berupaya agar Ilmu Pemerintahan dapat memberikan rekomendasi yang “*pragmatis*”, “*reliable*,” kritis serta bertanggung jawab untuk masa depan yang tidak pasti.

1.6.2.3 Penelitian ini berupaya agar konsep dan metodologi Ilmu Pemerintahan yang bersumber pada epistemologi, dapat diarahkan untuk menjadi konsep dan metodologi yang bukan berdasarkan positivisme dan modernisme tetapi berdasarkan refleksi kritis.

1.6.2.4 Penelitian ini selain untuk memenuhi rasa ingin tahu yang mendalam pada diri peneliti terhadap fenomena pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan, juga untuk memberikan nilai pragmatis, yaitu untuk memecahkan persoalan

aktual pada saat sekarang, yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

1.6.2.5 Penelitian terhadap Ilmu Pemerintahan melahirkan kritik – kritik yang *immanent*, artinya kritik – kritik yang selalu ada dan diberikan kepada hal – hal yang ideal dalam modernisme untuk menjadi lebih baik dan bagus lagi.

1.6.2.6 Penelitian terhadap Ilmu Pemerintahan, adalah juga upaya epistemologis untuk memberikan peringatan – peringatan kritis terhadap adanya konsekuensi buruk dari modernisme itu, sehingga dapat diupayakan pencegahan dan antisipasinya.

1.6.2.7 Penelitian terhadap Ilmu Pemerintahan adalah upaya – upaya untuk keluar dari kekakuan tradisional guna merumuskan kembali hakikat dan peran dari Ilmu Pemerintahan yang pragmatis dan kritis.

BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG N E G A R A

2.1 PENGANTAR

Tulisan diawali dengan uraian tentang asal mula timbulnya Negara, dengan maksud agar kita semua tahu tentang sejarah dan latarbelakang timbulnya Negara. Memahami Negara secara filosofis akan mengantarkan kita pada unsur – unsur Negara yang menjadi dasar pembentukan suatu Negara. Salah satu unsur yang membentuk Negara, adalah pemerintah disamping unsur penduduk, wilayah dan kedaulatan.

Pengelolaan Negara atau kekuasaan Negara sangat tergantung pada organisasi pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kekuasaan atas rakyat dapat dilandasi oleh praktek otokrasi ataupun praktek demokrasi. Masing – masing memiliki konsekuensinya terutama kepada rakyat yang dikuasai dan yang sekaligus dimiliki sebagai bangsa yang berada dalam suatu Negara.

Kekuasaan Negara yang dikelola oleh pemerintah memerlukan pengawasan. Tanpa pengawasan yang efektif dan efisien, maka pengawasan akan hilang maknanya serta memberikan peluang kepada yang berkuasa untuk melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan bersama dan tujuan umum. Pengawasan politik dan publik, menjadi hal yang fundamental dalam menjalankan kekuasaan Negara.

Kekuasaan Negara yang dijalankan oleh pemerintah, tidaklah semata – mata hanya didasarkan kepada kekuasaan pada Pemerintah Pusat atau sentralisasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan adanya penyerahan kekuasaan

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui desentralisasi. Tujuan Negara adalah tujuan bersama yang sebaiknya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Emansipasi dan partisipasi dalam politik pemerintahan Negara adalah syarat bagi pertumbuhan demokrasi dalam suatu Negara.

Strong Government merupakan kondisi yang diharapkan dan diinginkan oleh rakyat, agar tujuan utama rakyat bernegara dapat diwujudkan. *Strong Government and Good Governance*, adalah kondisi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan semata – mata *Strong Government* yang pada akhirnya mereduksi rakyatnya sendiri, untuk menjadikan pemerintahan pada akhirnya “powerful” dan rakyatnya “powerless”.

2.2 ASAL MULA TIMBULNYA NEGARA

Pemikiran tentang Negara, telah lama dilakukan. Para filsuf Yunani yang menjadi sumber dari peradaban dunia, dengan dipelopori oleh filsuf Plato dan Aristoteles mereka berusaha di jamannya untuk menjelaskan secara filsafat tentang asal mula Negara.⁸¹ Keberadaan Negara telah ada sejak adanya manusia. Pemikiran tentang Negara tidak pernah berhenti, bahkan terus berkembang seiring dengan upaya manusia untuk dapat memahami realitas tentang Negara.

Dalam pemikiran politik abad ke 17, ada dua jenis teori tentang asal usul Negara yang di dalamnya ada substansi Pemerintahan.

1. Sir Robert Filmer, jenis ini menetapkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kuasanya kepada orang – orang tertentu, dan bahwa orang – orang itu, atau pewaris mereka, merupakan pemerintah yang absah;

⁸¹ H.D.P. Lee, *Plato The Republic*, Penguin Books, London and Tonbridge, Reprinted 1960.

pemberontakan terhadap mereka bukan hanya merupakan pengkhianatan, melainkan juga tindakan orang – orang kafir.

2. John Locke, menetapkan bahwa pemerintahan sipil merupakan hasil dari sebuah kesepakatan, dan murni merupakan urusan duniawi, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh otoritas suci.⁸²

Teori pertama, dapat dinamakan dengan Negara Teokrasi, yaitu Negara yang kekuasaannya diyakini diperoleh dari Tuhan atau “Hukum Alam”.⁸³ Penjelasan dan sumber dari teori ini diperoleh dari Kitab Taurat Nabi Musa, yang menjadi bagian dari Perjanjian Lama, Kitab Suci umat nasrani. Negara Teokrasi telah berlangsung sejak pembebasan bangsa Israel dari negeri Mesir oleh nabi Musa hingga penobatan raja – raja.

Dari zaman Perjanjian Lama di atas, muncullah golongan orang yang memiliki otoritas suci untuk menjalankan aturan – aturannya, seperti aturan tentang, “jangan membunuh sesama manusia”. Pandangan mereka selalu mengarah dan berpusat pada Tuhan sebagai pusat perhatiannya dan sekaligus sumber dari otoritas atau kewenangan yang dijalankannya. Proses ini memunculkan istilah “teokrasi” yang artinya adalah :

1. Pemerintahan suatu Negara oleh Tuhan atau suatu dewa.
2. Pemerintahan oleh seseorang atau orang – orang yang menegaskan bahwa pemerintahannya memiliki otoritas yang bersifat ketuhanan.⁸⁴

⁸² Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, terjemahan oleh Sigit Jatmiko, et al, dari judul asli “*History of Western Philosophy*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I November 2002, hal. 823 – 824.

⁸³ “Keyakinan tentang ‘negara alami’ yang sejahtera di masa lampau sebagian berasal dari penjelasan Injili di jaman *patriarchal*, dan sebagian berasal dari mitos klasik jaman keemasan”. *Ibid.* hal. 818.

⁸⁴ Michael Agnes, editor in chief, *Webster's New world College Dictionary*, Wiley Publishing, USA, Canada, fourth edition 2004, pages 1484.

Negara teokrasi ini diyakini ada sejak manusia menyadari tentang adanya Tuhan. Negara tersebut sangat tertib dan sejahtera, karena semua orang taat kepada Tuhan dan hukum – hukumNya. Hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran, misalnya “membunuh manusia” dianggap adalah hukuman yang dari Tuhan dan pemerintahan hanyalah menjalankan otoritas yang diberikan Tuhan kepada mereka.

Sir Robert Filmer, berpendapat: bahwa kekuasaan politik tidak berasal dari kesepakatan, tidak pula dari pertimbangan kemaslahatan umum, namun sepenuhnya dari otoritas sang ayah kepada anaknya. Pandangannya ialah bahwa raja adalah pewaris Adam, atau setidaknya dianggap demikian: bahwa hak alami sang raja adalah sama dengan hak seorang ayah; bahwa, dengan sendirinya, anak tidak pernah bebas dari kekuasaan sang ayah, bahkan ketika si anak telah dewasa dan orang tuanya sudah dalam kondisi pikun.⁸⁵

Pandangan Sir Robert Filmer, bahwa “raja adalah pewaris Adam”, maknanya adalah sama, yaitu Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya dan memberikan warisan kehidupan dunia kepada Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan sendiri.

Raja sebagai simbol dan penjelmaan kekuasaan yang memerintah suatu Negara, memiliki makna pewaris tahta kerajaan dunia sebagaimana telah diberikan Tuhan kepada Adam manusia pertama ciptaannya. Tidak ada keraguan sedikit pun dari sudut pandang teokrasi, bahwa Negara adalah sama dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dijalankan orang – orang

⁸⁵ Bertrand Russell, *Op. Cit.*, hal. 811 – 812.

kepercayaannya untuk menegakkan hukum – hukumnya di atas bumi agar manusia dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dan kembali ke asalnya.

Sir Robert Filmer, dalam bukunya yang terkenal *Patriarchia or the Natural Power of Kings* (1680) menjelaskan teori tentang hak raja yang bersifat ilahi. Locke kemudian berpikir bahwa gaya politik kerajaan absolut menjadi semakin kuat pengaruhnya dan teori tentang hak yang bersifat ilahi menjadi cara yang paling kuat untuk menjelaskan tentang kewajiban politik. Locke mengkritik Sir Robert Filmer dalam bukunya *First Treatise of Civil Government* (1681 – 1683), dan dalam buku yang ke dua dengan judul yang sama *Second Treatise of Civil Government* (1681 – 1683) dengan isi menyerang teori dari Thomas Hobbes.⁸⁶

Teori yang ke dua, dapat dinamakan Negara dengan Pemerintahan Sipil, sebagaimana yang ditulis oleh John Locke dalam bukunya yang pertama maupun kedua. Locke mengemukakan kritik atas teori – teori pendahulunya dan sekaligus mengemukakan versi teori Perjanjian Sosialnya yang melahirkan Pemerintahan Sipil.

Teori tentang hak ilahi bukanlah tanpa keaburan padanya sendiri. Adalah jelas terdapat beberapa persamaan antara cara Tuhan memerintah alam semesta dan cara yang diharapkan dari seorang raja yang baik untuk memerintah rakyatnya. Gambaran tentang Tuhan sebagai bapak yang memerintah di alam semesta dipenuhi oleh anak – anak yang suka melawan, bayangkan raja sebagai bapak dari rakyatnya. Raja memiliki tugas – tugas kebapaan : memberi makan kepada rakyatnya (dalam hal darurat), untuk membela mereka, untuk mendidik mereka (dalam iman), dan memberi keadilan dalam penyelesaian pertentangan di antara mereka. Tentu saja, tidak semua raja, sebagaimana tidak semua bapak, dipenuhi dengan tanggung jawab yang sama dan baik, tetapi raja tidak kurang dari raja jika

⁸⁶ J. S. McClelland, *A History of Western Political Thought*, Routledge, London and New York, reprinted 1998, pages 231.

mereka gagal dalam menjalankan tugas – tugasnya, dibandingkan dengan bapak – bapak yang secara alami berhenti menjadi bapak bilamana mereka gagal dalam menjalankan tugas – tugasnya. Seorang raja yang buruk tetaplah seorang raja.⁸⁷

Kritik John Locke terhadap Sir Robert Filmer sangat jelas dan substantif. Ada persamaan antara Tuhan dan raja. Tuhan menciptakan dan sekaligus menguasai dan memerintah alam semesta dengan segala isinya. Raja menciptakan kerajaannya dan sekaligus menjadi penguasa dan memerintah rakyatnya. Ada gambaran yang sama tetapi ada substansi yang berbeda antara Tuhan dan raja. Tuhan adalah sempurna dan sebagai maha pencipta segalanya, sedangkan raja adalah manusia yang tidak sempurna dan sebagai makhluk ciptaannya. Jadi bagaimana bisa seorang raja yang adalah manusia juga dapat membawa sifat ilahi dalam kedudukan dan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang diperintah? Padahal seorang raja lahir dari manusia sebagai hasil reproduksi yang membawa kodrat atau (pem) bawaan dan sifat – sifat kemanusiaan pada umumnya.

Manusia membutuhkan kekuasaan, kekayaan, penghargaan, keamanan dan perdamaian, kalau bisa ingin menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan adalah segalanya, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan sama sekali tidak membutuhkan, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Sebaliknya Tuhan adalah

⁸⁷ *The theory of Divine Right was not without little subtleties of its own. There was obviously some kind of parallel between the way God ruled the universe and the way that a good king was expected to rule his people. The image of God the father ruling in a universe full of his recalcitrant children was mirrored in the image of the king as father of his people. The king had the duties of fatherhood: to feed his people (in emergencies), to defend them, to educate them (in the faith, a job a wise king left to Mother Church), and justice in the settling of disputes between them. Of course, not all kings, like all fathers, fulfilled these responsibilities equally well, but kings were no less kings if they failed in their duties, any more than natural fathers ceased to be fathers when they failed in theirs. A bad king was still king. Ibid., pages 232.*

Roh Ilahi, yang melampaui segalanya dan berada di luar kemampuan manusia (*beyond measure*).

Bagaimana mungkin setiap raja pada saat sekarang secara sungguh – sungguh dapat menegaskan bahwa dia ada dalam garis keturunan langsung dengan Adam ? Seperti Hobbes, Locke mengkritik Filmer dengan menunjukkan bahwa pandangan tentang hak ilahi yang disajikan oleh Filmer memiliki dua sisi karena menyangkut kepentingan dari diri raja. Karena keturunan dari sejak Adam telah bercampur, adalah sangat mungkin semua raja yang ada sekarang adalah perebut kekuasaan, atau kecuali satu.⁸⁸

Pemerintah yang sah bersumber dari otoritas yang tertinggi. Untuk Negara teokrasi sumber otoritas yang tertinggi adalah Tuhan, dan pemerintahannya adalah sah dan dapat dipercaya serta diterima oleh rakyatnya. Dalam realitas kehidupan bernegara, banyak sekali raja – raja yang menyimpang dari tugas – tugas dan tanggung jawabnya. Terlalu banyak raja yang menyakiti hati rakyatnya dan hidup dalam kejahatan serta jauh dari gambaran wakil Tuhan di bumi yang memiliki sifat – sifat ilahi. Karenanya raja tersebut tidak dicintai oleh rakyatnya melainkan dibenci dan digulingkan sendiri tahta kerajaannya oleh rakyat.

Untuk Negara dengan Pemerintahan Sipil, yang dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya yang kedua, sekaligus sebagai kritik terhadap Sir Robert Filmer dan Thomas Hobbes, bahwa sumber otoritas tertinggi bagi suatu

⁸⁸ *How can any king at the present time seriously claim that he is in the line of direct descent from Adam? Like Hobbes, Locke meets and beats his opposition on their own ground by showing that the Divine Right argument as presented by Filmer is double-edged as far as kings are concerned. Because the genealogy since Adam is scrambled, it is perfectly possible that all the present kings are usurpers, or all the king except one. Ibid., pages 232 – 233.*

pemerintahan yang sah adalah “adanya persetujuan bebas dari yang diperintah kepada yang memerintah”. Adanya persetujuan terhadap yang memerintah menjadikan pemerintahan sah berdasarkan sumber otoritas tertinggi, dalam hal ini adalah rakyat. Tidak ada kekuasaan lain, baik di dalam maupun di luar yang mampu campur tangan terhadap jalannya pemerintahan dan keabsahannya. Negara didirikan dan diselenggarakan atas dasar perjanjian sosial (*social contract*), yang mengutamakan proses inter aksi dan tawar menawar antara yang memerintah dan yang diperintah melalui persetujuan bebas.

Locke ingin mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang ke dua, *Second Treatise*, bahwa setiap orang, termasuk yang berkuasa, yaitu pemerintahan menjadi *Civil Society* atau masyarakat sipil, dengan demikian keseluruhannya termasuk yang berkuasa mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum. Dalam memperdebatkan hal ini, Locke tetap menyimpan dalam pikirannya mengenai pendapat kaum *Hobbesian* adalah tidak mungkin untuk yang berkuasa, pembuat hukum, dan pelaksana hukum menjadi *Civil Society* karena mereka tidak dapat menjadi bagian dari perjanjian sosial. Locke menginginkan untuk membatasi pemerintahan.⁸⁹

Negara dengan Pemerintahan Sipil versi John Locke, adalah Negara yang memiliki sumber otoritas tertinggi yaitu rakyat yang diperintah. Bagi Locke ini adalah Negara yang paling ideal dan memenuhi semua kriteria demokrasi. Dalam *Civil Society*, semua orang tidak terkecuali yang berkuasa, mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*Social Contract*). Pelanggaran atas hukum (*Social Contract*) akan berakibat dikenakannya sanksi efektif, artinya sanksi diberikan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam

⁸⁹Locke wants to argue in the *Second Treatise* that everyone, including the sovereign, comes into *Civil Society*, so that all, the Sovereign included, are obliged to obey the law. In arguing this, Locke has to keep in mind the Hobbesian argument that it is impossible for the Sovereign, the law-maker and law-enforcer, to come into *Civil Society* because he cannot be a party to the social contract. Locke wants to limit government. *Ibid.* pages 233.

perjanjian sosial. Pemerintahan yang berkuasa tidak dapat menjalankan kekuasaannya dengan sewenang – wenang, karena kekuasaan yang ada diawasi, dibatasi dan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan perjanjian sosial yang telah dibuat bersama antara pemerintah dan yang diperintah.

Periode kekuasaannya pun dibatasi dan dipercaya berasal dari rakyat sebagai satu – satunya sumber otoritas yang tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tidak ada raja yang seumur hidup berkuasa, tanpa ada persetujuan bebas dari rakyat yang dipimpinnya. Inti dari teori Negara dengan Pemerintahan Sipil versi John Locke, adalah membatasi kekuasaan pemerintah dan memerintah dengan sah karena memperoleh persetujuan bebas dari rakyat yang diperintah.

Dalam Negara dengan pemerintahan sipil versi John Locke, inti dari *Civil Society*, adalah adanya :

1. Keadilan, yaitu adanya perlakuan yang sama berdasarkan hak dan kewajibannya, jujur dan terbuka bagi setiap orang yang menjadi anggota dalam Negara.
2. Kesejahteraan, adanya jaminan kesehatan umum, kebahagiaan dan keselamatan perseorangan, seekor binatang atau kelompok tertentu.
3. Keamanan, yaitu adanya kegiatan – kegiatan yang melibatkan di dalamnya perlindungan suatu Negara, bangunan atau perseorangan terhadap serangan , bahaya dan lain -- lainnya.
4. Hak Asasi, adalah salah satu dari hak dasar dimana setiap orang dapat perlakuan sama dan tidak dalam cara kejam, khususnya oleh pemerintahan yang berkuasa.

5. Demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan diperoleh dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, melalui persetujuan bebas terhadap yang memerintah (*Social Contract*).

Sumber: Kajian Penulis

Pemikiran tentang Negara adalah upaya – upaya untuk menjelaskan asal mula terjadinya Negara, perkembangannya dan masa depannya. Tidak mudah untuk melakukannya, tetapi dengan memahami dan kembali kepada sumber asli dari Negara, yaitu individu manusianya diharapkan pengetahuan tentang Negara dapat diperoleh secara lengkap dan jelas. Negara diciptakan, diselenggarakan dan diperuntukkan manusia. “Hobbes meyakini bahwa idea – idea yang dia peroleh tentang manusia berasal dari introspeksi, bahwa dia mampu membaca tentang umat manusia dari dalam dirinya sendiri”. (*“Hobbes believed that he got his ideas about man from introspection, that he read mankind in himself”*).⁹⁰ Jadi apa yang dipikirkan oleh Hobbes, adalah juga apa yang dapat kita rasakan.

Hobbes mengakui bahwa manusia, apa pun kewajiban mereka di dalam Negara Alami, berkewajiban untuk mentaati penguasa yang mereka angkat hanya jika hal itu aman bagi mereka untuk melakukan demikian, hanya jika ia dapat memaksa yang enggan untuk taat dan dapat melindungi mereka yang mau taat. Meskipun mereka mengangkat seorang penguasa melalui perjanjian, setiap orang menyetujui dengan yang lain untuk mentaati beberapa orang (atau badan) yang menyatakan hukum kepada mereka semua, perjanjian tidaklah mengikat kecuali jika orang yang dipilih untuk berkuasa memiliki kekuasaan cukup untuk memaksakannya. Dan masih, kecuali jika para pembuat perjanjian mempertahankannya, tidak ada seorang pun

⁹⁰ Thomas Hobbes, *Leviathan*, Collins Fontana, Great Britain, pages 19.

yang dapat memaksakannya. Hal itu nampaknya bahwa perjanjian harus dapat dipertahankan sebelum munculnya kekuatan yang membuatnya sendiri aman, dan karenanya masuk di akal dan diwajibkan, untuk para pemegang perjanjian untuk mempertahankannya.⁹¹

Menurut Locke dan juga Hobbes, Negara dibangun berdasarkan perjanjian sosial diantara mereka sebagai anggota – anggota Negara. Ada pandangan sama dan sejalan diantara mereka berdua mengenai metodologi berdirinya sebuah Negara. Ada proses alamiah dalam hukum alamiah di Negara Alamiah. Pemahaman tentang Negara Alamiah membedakan pendapat dan teori masing – masing mengenai hal tersebut.

Menurut Locke, yang dimaksud dengan Negara Alami adalah : “manusia hidup bersama sesuai pertimbangan nalar mereka, tanpa adanya pihak – pihak yang berposisi di antara mereka di dunia, dan masing – masing berwenang untuk saling menilai sesamanya”.⁹² Dibanding Hobbes, gagasan Locke tentang Negara Alami kurang asli. Hobbes menganggap Negara ini sebagai Negara yang sering mengalami perang antar sesama, kehidupannya kacau balau, brutal, dan umurnya singkat. Keyakinan tentang Negara Alami yang sejahtera di masa lampau sebagian berasal dari penjelasan Injili di jaman patriarchal, dan sebagian berasal dari mitos klasik jaman keemasan. Kepercayaan umum akan buruknya

⁹¹ *Hobbes admits that men, no matter what their obligations in the state of nature, are obliged to obey the sovereign they set up only if it is safe for them to do so, only if he can compel the reluctant to obey and can protect the willing. Though they set up a sovereign by covenant, every man agreeing with every other to obey some person (or body) who is to declare the law to them all, the covenant is not binding unless the person chosen to be sovereign is powerful enough to enforce it. And yet, unless the makers of the covenant keep it, there is no one powerful enough to enforce it. It would seem then that the covenant must be kept before there can arise the power which alone makes it safe, and therefore reasonable and obligatory, for the covenanters to keep it.* *Ibid.*, pages 33.

⁹² Bertrand Russel, *Op.Cit.*, hal. 818.

masa lampau baru muncul dengan hadirnya doktrin evolusi.⁹³ Banyak pengamat yang menilai Thomas Hobbes, melakukan kekeliruan dengan metode introspeksinya dan terlalu percaya diri yang berlebih – lebih. Bukti penjelasan tentang Negara Alami antara Thomas Hobbes dan John Locke, terlihat dengan jelas perbedaan pokoknya : John Locke dengan latarbelakang teologis yang kuat, sedangkan Thomas Hobbes adalah seorang atheis.

Pemerintahan adalah suatu fenomena⁹⁴ yang timbul dalam kehidupan sosial, dan ada secara alami dalam ketertiban sosial. Secara alami mahluk sosial adalah suatu sistem tanggapan dan kebutuhan yang kompleks. Dalam hubungan manusia dan manusia di mana saja di sana terdapat benih dari pemerintahan.

⁹⁵

Pengertian Negara Alami adalah Negara tanpa pemerintahan, tepat kata Aristoteles bahwa manusia adalah “binatang sosial” yang memiliki sistem tanggapan dan kebutuhan yang kompleks. Jadi gambaran masa lalu kehidupan manusia tanpa pemerintahan di Negara Alami adalah kehidupan yang mengerikan dan menakutkan. Masing – masing menjaga dirinya sendiri terhadap sesama yang penuh dengan kebutuhan dan tanggapan – tanggapan atas apa yang dimiliki ataupun atas apa yang dilakukan. Karena semua merasa terancam dan tidak ada keamanan, timbullah naluri untuk menyemaikan benih diantara mereka melalui perjanjian sosial guna mengangkat seseorang atau badan yang diberikan kekuasaan untuk dapat menjamin dan mempertahankan hak – hak dasar mereka

⁹³ Bertrand Russel, *Op.Cit.*, hal. 818.

⁹⁴ a. Anything that can be perceived as an occurrence or fact.

b. Any remarkable occurrence or person.

Collins, *Paperback English Dictionary*, HarperCollins Publishers, Great Britain, latest reprint 2003, pages 612.

⁹⁵ *Government is a phenomenon that emerges within the social life, inherent in the nature of social order. Man's social nature is a complex system of responses and of needs. In the relation of man to man everywhere there is the seed of government.* R.M. MacIVER, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, Twenticht Printing, 1963, pages 20.

sebagai manusia. Proses itu menghasilkan pemerintahan yang kemudian menjelma menjadi Negara.

2.3 OTOKRASI DAN DEMOKRASI

Otokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh seorang individu dengan kewenangan yang tidak terbatas.⁹⁶ Munculnya otokrasi sangat berhubungan dengan sumber otoritas, dalam hal ini adalah otoritas suci. Raja atau penguasa yang menjadi pemerintahan dianggap sebagai wakil dari Tuhan yang ada di bumi. Apa pun yang dilakukan dan diputuskan oleh raja atau penguasa, itulah yang terbaik bagi rakyat. Tuhan adalah maha adil dan maha bijaksana, sehingga sifat – sifat ilahi seperti itu akan juga ada pada yang mewakilinya di muka bumi. “Ajaran tentang teokrasi, mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari semua kekuasaan politik, merupakan titik awal dari pemikiran agama di abad pertengahan”⁹⁷

Hampir semua raja atau penguasa pemerintahan menyatakan sebagai wakil dari Tuhan, ini diperlukan untuk: Pertama, melegitimasi kedudukan dan kekuasaan yang dijalankan terhadap rakyat yang diperintah. Kedua, untuk keamanan dan adanya kepastian hukum baik ke dalam mau pun ke luar. Ketiga, memperkokoh akar kekuasaan agar mahkota kerajaan dapat dikenakan seumur hidup dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain kecuali ke tangan orang dalam lingkaran keluarga sendiri. Betapa pentingnya otoritas suci dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena konsekuensi yang ditimbulkannya sangat luas dan dalam.

⁹⁶ Autocracy, government by an individual with unrestricted authority. Collins, *Ibid.*, pages 45.

⁹⁷ “The doctrine of theocracy, according to which God is the source of all political power, was the starting point of medieval religious thought”. Alf Ross, *Why Democracy?*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1952, pages 12.

Jika seseorang secara alamiah terikat kepada hak dan hukum yang bersifat ketuhanan, atau jika hak dan hukum yang bersifat ketuhanan merupakan suatu kebutuhan alamiah, maka tidak ada keperluan untuk Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia, serta mengikat mereka dengan sumpah dan perjanjian. Karenanya, kita diharuskan mengakui secara penuh bahwa hak dan hukum yang bersifat ketuhanan bersumber di saat manusia menyatakan persetujuan dalam perjanjian untuk mentaati Tuhan dalam segala hal, dan menyerahkan sebagaimana adanya, kebebasan alami mereka, menyerahterimakan hak – hak mereka kepada Tuhan dalam cara sebagaimana yang dilukiskan dalam pembicaraan mengenai formasi dari suatu Negara.⁹⁸

Prinsip bahwa Tuhan adalah sumber dari semua kekuasaan politik dapat dipahami dari 2 (dua) aspek, sebagaimana yang dikemukakan oleh Baruch Spinoza dalam tulisannya dengan judul *“Theologico – Political Treatise,”*⁹⁹ yaitu :

1. Aspek Negara Alami

Secara alamiah masyarakat menyadari akan kebutuhan pokok mereka dalam menerima, menjalankan serta sangsi hukuman bagi yang melanggar “hak dan hukum yang bersifat ketuhanan” yang berasal dari otoritas suci. Tuhan adalah sumber keberadaan mereka secara langsung, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup di muka bumi.

⁹⁸ *“If men were naturally bound by the Divine law and right, or if the Divine law and right were a natural necessity, there would have been no need for God to make a covenant with mankind, and to bind them thereto with an oath and agreement. We must, then, fully grant that the Divine law and right originated at the time when men by express covenant agreed to obey God in all things, and ceded, as it were, their natural freedom, transferring their rights to God in the manner described in speaking of the formation of a state.”* Steven M. Cahn, *Classics of Political and Moral Philosophy*, Oxford University Press, New York - Oxford, 2002, pages 450.

⁹⁹ *Ibid.*, pages 445.

Penentangan terhadap hakekat Negara Alami akan memiliki konsekuensi, menjadi terkutuk, sekutu iblis, dan masuk neraka.

2. Aspek Negara Perjanjian

Hak dan hukum yang bersifat ketuhanan, bersumber pada saat manusia menyatakan persetujuan dalam perjanjian untuk mentaati Tuhan dalam segala hal secara sadar dan bertobat.

Pada saat yang bersamaan juga, manusia dengan sukarela melepaskan kebebasan pribadinya kepada Tuhan dan meninggalkan dunia kehidupannya lamanya dan masuk dalam dunia kehidupan baru bersama – sama Tuhan untuk mendapatkan perjanjian – perjanjianNya. Dalam hal ini ada penyerahan tetapi juga ada perjanjian yang diberikan antara manusia dan Tuhan.

Sumber: Kajian Penulis

Ke dua aspek tersebut di atas, memiliki hakekat yang sama yaitu semua kekuasaan politik bersumber pada otoritas yang suci. Hanya mekanisme dan legalitasnya berbeda antara aspek pertama dan kedua. Kalau pada aspek pertama, mekanisme dan legalitasnya berjalan dengan sendirinya dan dinamakan Negara Alamiah (*The State of Nature*) tidak ada penyerahan yang ada kepasrahan. Kepasrahan dalam Negara Alamiah bermakna mengikhlaskan dan merelakan sedangkan dalam Negara Perjanjian yang ada “penyerahan” bermakna

takluk, tunduk, menurut, patuh, mempersembahkan serta memulangkan.¹⁰⁰ Sikap pasrah atau kepasrahan dengan sendirinya melahirkan Negara Alamiah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya perjanjian antara manusia dan Tuhan.

Mekanisme dan legalitas pada aspek ke dua, yaitu Negara Perjanjian memerlukan persyaratan untuk dibuatkannya perjanjian antara manusia dan Tuhan. Persyaratan pokok dari perjanjian yang akan dibuat, adalah adanya sikap lahir dan batin untuk takluk, tunduk, menurut dan patuh terhadap isi dari perjanjian yang dibuat bersama antara manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan disyaratkan sama dengan kondisi yang sama pula, yaitu masing – masing pihak mempunyai kewajiban dan juga hak yang sama.

Wawasan Baruch Spinoza, mengenai otokrasi yang bersumber pada otoritas suci, memperlihatkan kedalaman dan keluasan berpikir dalam filsafat politiknya. Mekanisme dan legalitas yang bersumber pada otoritas suci, mencerminkan kemahakuasaan dalam Negara Alami dan keadilan yang dicerminkan dalam Negara Perjanjian antara manusia dan Tuhan yang bersama – sama mengedepankan kewajiban sebagai utama dan kemudian hak – hak untuk memperoleh perjanjian sebagaimana yang dijanjikan antara manusia dan Tuhan serta sebaliknya.

Menurut Spinoza, karena substansi – substansi berdasarkan hakikatnya sendiri lengkap secara sempurna, substansi satu dan hanya satu adanya. Substansi itu adalah Tuhan. Karena itu Tuhan satu dengan alam semesta, dan perbedaan antara pencipta dan ciptaan, “Allah” dengan “Alam”, adalah ilusi. (pendirian ini ialah panteisme¹⁰¹). Semua individu, termasuk diri kita, dalam kenyataannya adalah modifikasi – modifikasi

¹⁰⁰ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 454 dan 586.

¹⁰¹ Panteisme = *Pantheism, is the belief that God somehow exists in everything, or that everything is God.* Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada – USA, 1991, pages 148 – 149.

dari substansi Esa itu.¹⁰² Esensi sebuah substansi adalah suatu sifat, tetapi banyaknya sifat tidak terhingga, di antaranya adalah yang kita kenal sebagai pikiran dan tubuh.¹⁰³

“Tuhan itu satu dengan alam semesta,” makna dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan sebagai Pencipta tidak dibedakan dengan ciptaanNya. Tuhan dan Alam adalah sama, kehendak Tuhan adalah hukum alam arti bahwa kekuasaan yang dibentuk oleh manusia untuk manusia juga adalah tuntutan hukum alam yang sekaligus adalah kehendak Tuhan juga. Kekuasaan yang memerintah bermakna “*theocratic*,” artinya suatu masyarakat diperintah oleh seorang imam yang menjadi wakil dari Tuhan, tetapi secara teknis proses itu melalui Negara Alami dan Negara Perjanjian.

Sumber lain dari otokrasi adalah manusianya sendiri, contoh paling nyata pada Adolf Hitler yang menjadi diktator¹⁰⁴ dari Negara nazi¹⁰⁵ Jerman pada tahun 1933 – 1945. Awalnya pada tahun 1923 di Beer Hall Putsch, Adolf Hitler melayani di penjara selama sembilan bulan dan menulis bukunya yang terkenal dengan judul “*Mein Kampf*”. Intinya adalah tentang ketidaksetaraan

¹⁰² Di Persia pada abad sebelumnya, Mulla Sadra (kira – kira tahun 1571 – 1640) dengan cara yang sama telah mendeskripsikan alam sebagai rangkaian yang mempersatukan semua mahluk. Ia bersikeras bahwa gerakan benda – benda sangat penting bagi alam, karena itu alam pada dasarnya selalu dalam perubahan yang terus – menerus. Seperti Spinoza, Mulla Sadra juga menghubungkan penjelasan tentang alam ini dengan visi etis. Ia berargumen, semua mahluk mempunyai keinginan bawaan untuk menyempurnakan dirinya sendiri; keinginan ini memberikan arah bagi semua mahluk, termasuk kita. Konsekuensinya ialah bahwa alam menjadi teratur, dengan semua bagiannya bersatu dan mengalir secara berurutan.

¹⁰³ Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, *A Short History of Philosophy (Sejarah Filsafat)*, Benteng Budaya, Yogyakarta, cetakan kedua Juni 2003, hal. 336 – 337.

¹⁰⁴ Dictator,

- a. A ruler who has complete power over a country, especially one who has gained it using military force.
- b. A person who behaves as if they have complete power over other people, and tells them what to do.

Hornby, A. S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Printed in China, 2005, 7th edition, pages 422.

¹⁰⁵ Nazi, the nickname Nazi was taken from the first word of its full name, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei. Stevens, Mark A. (editor), *Merriam Webster's Collegiate Encyclopedia*, Merriam – Webster, Springfield, Massachusetts, USA, 2000, pages 1135.

diantara ras – ras yang ada sebagai bagian dari keharmonisan alam, dia memuliakan “ras Aria” serta mengajukan idea “*anti-Semitism, anticommunism, dan extreme German nationalism*” yang membawa malapetaka bagi bangsa Yahudi.

Otokrasi selain bersumber dari otoritas suci seperti telah diterangkan di atas, juga bersumber dari otoritas individual seperti contoh Adolf Hitler, dan dari Roma Italia, Benito Mussolini yang berkuasa pada tahun 1922 – 1943 yang menganggap diri mereka sebagai manusia super. Mereka adalah individu – individu yang memiliki otoritas penuh dalam kekuasaannya untuk kepentingan individu penguasa. Rakyat adalah objek kekuasaan yang dijadikan sarana untuk memenuhi hasrat dan kepentingan penguasa.

Lawan dari otokrasi adalah demokrasi, jika otokrasi bersumber pada otoritas suci dan individu manusia, maka demokrasi bersumber dari otoritas rakyat. Rakyat adalah satu – satunya sumber kekuasaan dan legalitas bagi pemerintah. Apakah arti dari demokrasi ? Sebuah kata yang mempunyai makna yang luas dan dalam dan selalu menjadi terminologi dalam kaitannya dengan Negara.

Secara umum atau leksikografis¹⁰⁶, arti dari ‘demokrasi’ telah ada sejak hari – hari kebesaran Athena yaitu, ‘pemerintahan atau penguasa yang dijalankan oleh rakyat’. Hal itu menunjukkan kepada metode penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan demikian menunjukkan siapa yang berkuasa, atau yang membuat kebijakan mengenai keputusan – keputusan yang mengikat dalam suatu Negara. Setiap upaya kontemporer pada definisi tersebut akan menyebabkan berkurangnya kebingungan jika hal tersebut dapat menjaga arti asli dari

¹⁰⁶ Lexicography, the theory and practice of writing dictionaries. Hornby A.S., *Op. Cit.*, pages 883.

demokrasi, sebagaimana yang telah diberikan pengertiannya oleh sejarah masa lalu yang panjang.¹⁰⁷

Definisi dari 'demokrasi' tersebut, bermakna adanya "metode penyelenggaraan pemerintahan" yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan definisi tersebut secara tegas menunjukkan siapa yang berkuasa dalam membuat kebijakan yang berisi keputusan – keputusan yang mengikat semua pihak. Ini adalah substansi 'demokrasi' yang ada sejak awal manusia mengenal pemerintahan dan dalam perkembangan kontemporer kenegaraan, substansi tersebut tetap ada supaya pemahaman tentang demokrasi menjadi lebih jelas dan terang. Pemahaman yang kabur dan tidak jelas disebabkan adanya definisi – definisi dan penjelasan yang menyimpang dari arti substansi.

Pada waktu itu dua Negara besar Eropa yaitu – Jerman dan Italia – menyatakan ketaatan mereka kepada teori – teori kelompok unggul (*elitist*), mematuhi seseorang secara mutlak (*authoritarian*), dan secara keras menunjukkan sikap anti demokrasi. Adakalanya hal tersebut adalah benar, Hitler menyebut sistemnya demokrasi yang 'sesungguhnya' dan Mussolini pernah menggambarkan bahwa Fasisme adalah suatu 'demokrasi yang terorganisasi, terpusatkan dan kepatuhan yang mutlak kepada seseorang', tetapi penjelasan – penjelasan yang tidak benar itu janganlah membuat kita bingung; sebagian besar dari kelompok Nazi dan Fasisme menolak demokrasi, dan menyombongkan diri untuk berbuat demikian. Hari ini hampir di seluruh dunia, termasuk sejumlah Negara komunis, memiliki berbagai macam kata untuk demokrasi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *The common or lexicographic meaning of 'democracy' which it has had since the days of Athenian greatness is 'government or rule by the people.' It refers, that is, to a method of governing, and does so by specifying who rules, or makes the binding policy decisions in a state. Any contemporary attempt at a definition will cause less confusion if it keeps close to this original meaning of 'democracy,' given to it by long historical usage.*

Henry B. Mayo, *Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, pages 22 – 23.

¹⁰⁸ *At that time two large European countries – Germany and Italy – proclaimed their adherence to theories that were elitist, authoritarian, and violently anti – democratic. Occasionally, it is*

Kata 'demokrasi' adalah terminologi yang selalu muncul dalam kaitan Negara. Apakah Negara dalam arti 'demokrasi' yang sesungguhnya atau sekedar nama yang diberi penjelasan tambahan sehingga melampaui substansi dari kata demokrasi itu. Kalau hal yang terakhir terjadi, maka kaburlah makna dan penjelasan dari 'demokrasi' itu sendiri. Kita tidak boleh dibuat bingung dan kabur dengan berbagai kata, definisi, penjelasan bahkan teori yang isinya semakin jauh dari substansi demokrasi yang telah ada sejak sejarah panjang masa lalu. Sejarah dan realitas politik menunjukkan bahwa 'demokrasi' yang ditumpangi oleh kepentingan – kepentingan tertentu dan tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak akan menjadikan demokrasi menjadi semu dan tidak berarti apa – apa.

Demokrasi lahir seiring dengan adanya manusia, karena demokrasi adalah kehidupan bersama dan untuk kepentingan bersama. Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari manusia, kalau hal ini terjadi maka manusia yang kehilangan demokrasi menjadi tidak manusiawi dan kehilangan predikat sosialnya. Menurut, 'Jean Jacques Rousseau', demokrasi berawal dari Perjanjian Sosial (*The Social Pact*).

Keberadaan awal manusia adalah kelompok – kelompok kecil yang hidup dari satu tempat ke tempat lain dengan kekuatan – kekuatan sendiri untuk menghadapi ancaman dan gangguan di antara mereka. Perempuan sebagai inti dari kelompok kecil dan disebut sebagai keluarga inti adalah perempuan dan

true, Hitler called his system 'real' democracy, and Mussolini once described Fascism as 'an organized, centralized, and authoritarian democracy,' but these atypical remarks need not confuse us; for the most part the Nazis and Fascists rejected democracy, and boasted of doing so. To day nearly all the world, including a number of communist countries, has kind words for democracy. Ibid., pages 21.

keturunannya. Peran dari perempuan dalam menciptakan masyarakat, adalah sangat besar dan pokok.

Makna dibalik perempuan adalah juga sebagai ibu kandung dari dilahirkannya 'masyarakat', karena 'masyarakat' pada akhirnya melahirkan demokrasi. Masyarakat terbentuk dari keluarga – keluarga yang intinya adalah perempuan dengan keturunannya. Secara heroik, laki – laki adalah penjaga dan pelindung dari ancaman dan bahaya terhadap keluarga dan kelompok mereka, tetapi perempuan adalah Sang Pengumpul dan sekaligus sebagai pencipta masyarakat yang kompleks.

Keadaan primitif dengan kelompok – kelompok kekuatan yang kecil dan tersebar tidak akan mampu bertahan terhadap ancaman dan gangguan yang semakin membesar seiring dengan makin kompleksnya keadaan masyarakat. Ada kebutuhan alami dan mendasar untuk menjaga keamanan dan kepastian hidup keluarga dan keturunannya. Dirasakan perlu ditunjuk seorang pemimpin untuk mempersatukan kekuatan – kekuatan di antara mereka yang memiliki motivasi sama dengan tindakan sama untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya mereka harus merelakan kebebasan pribadi yang telah dinikmati selama ini, untuk dibatasi dan sebagian diserahkan kepada Sang Pemimpin agar dibekali dengan kekuasaan lebih guna menjalankan kesepakatan – kesepakatan dengan sangsi – sangsi hukuman yang harus dijalankan.

Kondisi di Negara Alamiah, sebagaimana yang ditulis oleh Thomas Hobbes sangat mencekam dan menakutkan. Tidak ada keamanan, kepercayaan dan ketenangan dalam hidup bersama. Setiap manusia individu berusaha mendapatkan keuntungannya sendiri sebagaimana orang lain juga ingin mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari diri kita sendiri. Siapa pun dapat

mengancam keselamatan jiwa kita, tidak terkecuali yang lemah pun dapat menjadi ancaman yang mematikan, baik dengan cara akal – akalan atau pun dengan cara persekongkolan. Keadaan Alamiah manusia telah berlangsung lama dan tidak ada yang berani untuk mengakhiri dan memberikan penyelesaian yang terbaik diantara mereka. Hal tersebut dirasakan sebagai krisis kemanusiaan dan ancaman kepunahan ras manusia oleh ulah manusianya sendiri.

Keselamatan dan kedamaian kata Thomas Hobbes dalam tulisannya tersebut, adalah perhatian utama dari semua orang yang secara sukarela menyerahkan hak untuk memerintah atas dirinya sendiri kepada orang atau majelis orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkan keselamatan dan kedamaian bersama. Seperti yang dikatakan, Jean Jacques Rousseau di atas bahwa demokrasi berasal dari adanya Perjanjian Sosial (*The Social Pact*), dan Perjanjian Sosial terjadi dalam proses alamiah menurut hukum alamiah sebagai kebutuhan dasar alamiah dari makhluk alamiah yang bernama manusia.

Otoritas rakyat adalah sumber demokrasi, yang wujud nyatanya adalah proses perjanjian sosial dimana setiap orang secara sadar mengurangi kebebasannya dan menyerahkan hak atas memerintah dirinya sendiri kepada orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk memimpin mereka. Perjanjian itu adalah 'kesatuan', artinya orang yang diberi kuasa untuk memimpin adalah bagian dari yang memberi kuasa, tidak boleh ada jurang pemisah di antara mereka. Jadi Perjanjian Sosial (*The Social Pact*) bukanlah sekedar persetujuan atau persesuaian antara yang memerintah dengan yang diperintah, tetapi lebih substantif lagi, yaitu kesatuan yang nyata (*it is a real unity of them all*). Kondisi

demikian adalah gambaran dari terbentuknya masyarakat yang melahirkan pemerintahan dan akhirnya melahirkan Negara.

Apa yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes tentang terbentuknya masyarakat, ada persamaan : Jean Jacques Rousseau mengatakan bahwa inti dari masyarakat adalah “ mempersatukan mereka agar kekuatan – kekuatan yang ada dapat dipimpin oleh suatu motivasi dan tindakan yang tunggal dalam kebersamaan (“...uniting them so that their powers are directed by a single motive and act in concert”). Kata kunci dari masyarakat menurut Rousseau, adalah “kebersamaan” atau “kesesuaian,” “*in concert*”.¹⁰⁹ Thomas Hobbes mengatakan, “ ...ini lebih dari sekedar persetujuan atau persesuaian; ini adalah satu kesatuan yang nyata dari mereka semua ...” (*... this is more than consent, or concord; it is a real unity of them all ...*) kata kunci dari masyarakat adalah “ kesatuan,” “*unity*”¹¹⁰. Dapat disimpulkan bahwa hakekat yang terjadi dalam masyarakat memiliki dua elemen dasar, yang pertama adalah ‘kesamaan’ dan kedua ‘kesatuan’. Makna dari masyarakat ini, adalah : antara kata dan perbuatan, pandangan dan sikap, harapan dan kenyataan, memiliki sifat yang sama dan satu.

Masyarakat yang sakit, adalah masyarakat yang hakekatnya rusak dan cacat, yaitu elemen dasar ‘kesamaan’ dan ‘kesatuan’ sudah berubah menjadi bertentangan, yaitu dari ‘kesamaan’ menjadi ‘perbedaan’ dan dari ‘kesatuan’ menjadi ‘perpecahan’ antara kata dan perbuatan, pandangan dan sikap, harapan dan kenyataan, semuanya menjadi kacau dan campur aduk yang tidak

¹⁰⁹ In concert in unison; in agreement; together. Michael Agnes, (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Cleveland, Ohio, Canada, fourth edition, 2004, pages 301.

¹¹⁰ Unity, the state of being one, or united; oneness; singleness. *Ibid.*, pages 1563.

menunjukkan adanya masyarakat yang manusiawi (*humanize*) malahan yang terjadi masyarakat yang sangat tidak manusiawi (*dehumanize*).

Masyarakat yang manusiawi (*humanize society*), adalah masyarakat yang elemen dasarnya antara yang memerintah dan yang diperintah dalam 'kesamaan' dan 'kesatuan' berupaya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan idea masyarakat agar situasi atau kondisi dapat diperbaiki dengan melakukan perubahan yang akan menjadikan masyarakat semakin layak kesehatan, sosial, ekonomi dan lain – lain serta menjadikan masyarakat hidupnya lebih senang. Sedangkan masyarakat yang tidak manusiawi (*dehumanize society*), adalah masyarakat yang kehilangan, ditiadakkannya atau dkekangnya kualitas – kualitas hidup manusia yang baik, seperti : kebaikan, kedermawanan, dan kemandirian.

*"The basis of a democratic state is liberty."*¹¹¹ "Dasar dari suatu Negara demokrasi adalah kemerdekaan atau kebebasan," tulisan Aristoteles ini dibuat pada masa antara tahun (384 – 322 SM), suatu pemikiran yang sangat dalam dan mengakar dalam kehidupan manusia. Bagaimana realitas kehidupan bernegara pada jamannya, dipahami secara filosofis. Pemikiran Aristoteles, sepanjang sejarah manusia memiliki relevansi dengan keadaan sekarang. *"Aristotle had a predilection for natural history. His theoretic activity was always controlled by a direct awareness of specific facts. While contemplating reality he was also engaged in dissecting it."*¹¹² "Aristoteles memiliki kegemaran untuk mempelajari sejarah alam. Aktivitas teorinya selalu diawasi oleh suatu kesadaran langsung dari fakta – fakta tertentu. Pada waktu

¹¹¹ Aristotle, *The Politics*, edited by Stephen Everson, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pages 1292 – re – quotation by Larry Diamond in Robert Dahl, "et al", (edited by), *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts – London – England, 2003, pages 29.

¹¹² Radoslav A. Tsanoff, *The Great Philosophers*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1953, pages 73.

merenungkan kenyataan dia juga mengikutsertakan perbedaan – perbedaan pendapat ke dalamnya.”

Apa yang dikatakan oleh Aristoteles tentang dasar dari suatu Negara demokrasi, yaitu kebebasan adalah hasil dari kesukaannya yaitu mempelajari sejarah alam termasuk di dalamnya Negara Alamiah. Pengamatan terhadap realitas dalam kehidupan bernegara, dibuktikan kebenarannya karena pendapat atau teori Aristoteles selalu dihubungkan dengan kesadaran terhadap fakta yang ada dan diuji dengan perdebatan yang pendapat – pendapatnya berlawanan dengan pendapatnya sendiri. Hasil dari proses teoritisasi tersebut menghasilkan teori yang teruji dan memiliki kebenaran.

'*Liberty*' atau 'Kemerdekaan' memiliki arti tertentu, yaitu : (1) Kemerdekaan adalah kebebasan hidup dalam kehidupan yang dijalani seseorang menurut cara yang diinginkannya, tanpa ada campur tangan dari orang – orang lain atau yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. (2) Kemerdekaan adalah kebebasan untuk pergi ke mana saja yang diinginkan oleh seseorang, kebebasan itu akan hilang bila ia menjadi seorang tahanan. (3) Kemerdekaan adalah kebebasan untuk menyatakan kehendak baik secara lisan maupun secara tertulis. (4) Kemerdekaan adalah kebebasan untuk meyakini sesuatu yang dipercayainya. Landasan Negara demokrasi adalah 'kemerdekaan' dalam arti yang seluas – luasnya, akan melahirkan Negara demokrasi yang tulen dan ideal.

Sebagaimana ilmuwan politik dan para pengamat yang tidak dapat menyetujui ada berapa banyak demokrasi – demokrasi yang ada di dunia, dengan demikian mereka berbeda pendapat untuk bagaimana menggolong – golongan kelompok penguasa dengan ciri – ciri tertentu, keadaan untuk menciptakan dan mengkonsolidasikan demokrasi, dan konsekuensi – konsekuensi yang ditimbulkan oleh demokrasi untuk perdamaian dan pembangunan. Element kunci dari semua

perdebatan ini adalah ketiadaan kesepakatan mengenai arti dari demokrasi Dalam jumlah yang besar, kebanyakan sarjana dan para pembuat kebijakan menggunakan istilah demokrasi pada hari ini dengan merujuk konsep politik murni dari terminologi tersebut, dan para intelektual tersebut bergeser kembali kepada persetujuan awal yang dengan mudah memiliki perkembangan pesat dalam pengkajian terhadap dinamika demokrasi, termasuk di dalamnya hubungan antara demokrasi politik dan berbagai kondisi sosial dan ekonomi.¹¹³

Perkembangan terakhir yang membahas tentang arti 'demokrasi', menunjukkan tidak adanya kesepakatan mengenai arti dari demokrasi. Bahkan data dari referensi tersebut menyebutkan sebagian besar sarjana dan para intelektual kembali kepada konsep politik murni dan persetujuan awal mengenai arti dari demokrasi. Persetujuan awal adalah apa yang telah dikemukakan pada tulisan di atas, juga pendapat Aristoteles tentang demokrasi. Jadi apa yang dimulai dan dikembangkan oleh Aristoteles, menjadi referensi utama bagi para sarjana politik hingga saat ini. Itu berarti substansi demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau adanya 'kesamaan' dan Thomas Hobbes tentang 'kesatuan' dan terakhir dari Aristoteles mengenai dasar dari demokrasi adalah 'kemerdekaan'. Semuanya adalah elemen 'demokrasi' yang penting untuk dikembangkan dan dilaksanakan sebagai dinamika demokrasi politik.

Apa yang dikemukakan oleh Rousseau dan Hobbes, tentang Perjanjian Sosial intinya adalah keselamatan dan kebahagiaan bersama dalam masyarakat

¹¹³ *Just as political scientists and observers do not agree on how many democracies there are in the world, so they differ on how to classify specific regimes, the conditions for making and consolidating democracy, and the consequences of democracy for peace and development. A key element in all these debates is lack of consensus on the meaning of democracy By and large, most scholarly and policy uses of the term democracy today refer to a purely political conception of the term, and this intellectual shift back to an earlier convention has greatly facilitated progress in studying the dynamics of democracy, including the relationship between political democracy and various social and economic conditions.* Robert Dahl, "et al", *Op.Cit.*, pages 31. Ketidakadilan sosial ekonomi yang berlangsung terus menerus boleh jadi (sebagaimana beberapa sarjana menemukannya) menjadi suatu ancaman terbesar kepada demokrasi politik. Tetapi untuk membuktikan hal ini, kita harus terlebih dahulu memiliki suatu ukuran demokrasi yang dibatasi oleh ciri-ciri dari sistem politik.

yang pemimpinnya di angkat oleh mereka sendiri dengan perjanjian yang dibuat bersama – sama. Hasil penelitian terakhir di bidang demokrasi politik menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi ‘demokrasi’ dewasa ini adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi yang berlangsung secara terus menerus. Jadi terdapat hubungan kausalitas antara variabel sosial ekonomi dengan variabel demokrasi. Semakin baik kondisi sosial ekonomi maka semakin baik pula perkembangan kondisi demokrasi politik suatu masyarakat, sebaliknya semakin buruk kondisi sosial ekonomi maka semakin buruk pula perkembangan kondisi demokrasi politik suatu masyarakat.

2.4 PENGAWASAN POLITIK DAN PUBLIK

Pengawasan Politik adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga yang ada, misalnya legislatif dan yudikatif terhadap pemegang kekuasaan seperti Pemerintahan (eksekutif). Pengawasan politik terhadap ruang lingkup pemerintahannya dalam arti luas (internal) berdasarkan *checks and balances* ditujukan untuk kepentingan demokrasi dan pengawasan politik terhadap yang diperintah (external) berdasarkan *domineering* dan ditujukan untuk kepentingan otokrasi. Negara demokrasi atau otokrasi, sama – sama melakukan pengawasan dengan tekanan dan tujuan yang berbeda. Negara demokrasi, melakukan pengawasan terhadap ruang lingkup pemerintahannya dengan tekanan agar terjadi ‘*checks and balances*’, yaitu : “mempunyai pengaruh dalam suatu organisasi atau sistem politik yang membantu menjaganya agar tetap mengikuti

aturan yang berlaku dan menghentikan suatu kelompok kecil untuk memegang semua kekuasaan.”¹¹⁴

Sistem “*Checks and balances*”, mencegah dan menghentikan upaya – upaya dari suatu kelompok untuk mengambil semua kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk kepentingannya sendiri. Pengawasan Politik adalah upaya untuk memisahkan (*to separate*) atau membagi (*to distribute*) kekuasaan agar jangan terjadi akumulasi kekuasaan dan menjadi tirani. Kekuasaan harus dibatasi dan diawasi (*control*), sebab fungsi utama dari kekuasaan adalah untuk sebesar – besarnya kepentingan rakyat banyak. Pengawasan dan pembatasan kekuasaan dilakukan dengan cara dibuatnya hukum tertulis yang jelas dan tegas tentang seluk beluk kekuasaan dan dinamakan konstitusi.

Kita sudah melihat dalam sejarah bahwa seluruh pemikiran politik berasal dari jaman pertengahan dan berikutnya adalah jaman Revolusi Perancis yang mengemukakan seputar dua idea : hak raja yang bersifat ilahi dan kedaulatan yang populer. Tugas dalam ke dua kasus tersebut adalah sama – untuk menjelaskan asal usul kewenangan kekuasaan politik yang sebenarnya, adalah kekuasaan itu terikat secara legalitas dan moralitas, dan tidak saja oleh persetujuan secara sikap jasmaniah. Idea pertama bertalian dengan kewenangan yang dikembalikan kepada sangsi ilahi. Kedua, idea kedaulatan yang populer, menyatakan bahwa semua kewenangan politik pada akhirnya didasarkan pada persetujuan dari masing – masing orang yang memilikinya.¹¹⁵

¹¹⁴ Checks and balances, influences in an organization or political system which help to keep it fair and stop a small group from keeping all the power. A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, 2005, 7th edition, pages 252.

¹¹⁵ We have seen in the historical part that all political thought throughout the Middle Ages and right down to the time of the French Revolution revolved around two ideas: the divine right of kings and popular sovereignty. The task in both cases was the same – to explain the origin of the actual political power's authority, that is, its power to bind legally and morally, and not only by physical might. The first idea traces authority back to divine sanction. The second, the idea of popular sovereignty, is the idea that all political authority ultimately is founded on the subject's own consent. Alf Ross, *Why Democracy*, Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts, 1952, pages 41.

Kekuasaan yang bersumber pada otoritas suci (hak raja yang bersifat ilahi) maupun yang bersumber pada otoritas rakyat (kedaulatan yang populer), memiliki keterikatan dari aspek legalitas. Artinya setiap kekuasaan selalu dan sejalan dengan hukum atau aturan yang berlaku dan setiap tindakan yang dijalankan oleh masing – masing kekuasaan dari perolehannya, pelaksanaannya hingga pergantiannya wajib berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan secara hukum karena ada dan telah diatur dalam hukum. Penyimpangan dari dasar dan mekanisme hukum yang berlaku akan berakibat bahwa setiap kekuasaan menjadi bersifat ilegal artinya setiap tindakan kekuasaan bertentangan dan tidak dapat dibenarkan dengan hukum aturan yang berlaku.

Kekuasaan yang bersumber pada otoritas suci maupun yang bersumber pada otoritas rakyat, memiliki keterikatan dari aspek moralitas, yang artinya bahwa kekuasaan yang ada dapat diterima oleh rakyat banyak dan dianggap benar serta diyakini sebagai kekuasaan yang memiliki sifat ilahi. Di luar dari yang diyakini oleh rakyat banyak adalah salah dan tidak dapat diterima. Moralitas adalah, “suatu sistem atau seperangkat nilai – nilai dan prinsip – prinsip yang berhubungan dengan perilaku dari orang – orang kebanyakan, yang secara umum dapat diterima oleh rakyat banyak atau dapat diterima oleh sekelompok orang.”

¹¹⁶ Jadi moralitas kekuasaan adalah sesuatu yang mengikat antara rakyat dan penguasa, bahkan sebagai satu kesatuan. Rakyatlah sebagai penentu untuk memberikan penilaian seberapa benar dan dapat diterima kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Kekuasaan yang bersumber pada otoritas suci (hak raja yang bersifat ilahi) memiliki sangsi langsung dari Tuhan sebagai sumber dari otoritas suci.

¹¹⁶ John Sinclair (founding editor in chief), *English Dictionary for Advanced Learners*, Harper Collins Publishers, Spain, latest reprint 2001 (six times), pages 1000.

Setiap pelanggaran dan perlawanan yang terjadi dalam penyelenggaraan kekuasaannya berakibat hukuman langsung yang diyakini berasal dari Tuhan sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dan raja adalah wakil dari Tuhan yang ada di bumi. Sangsi yang diberikan Tuhan adalah tindak lanjut dari pengawasan politik (Negara) dan pengawasan publik (Rakyat).

Kekuasaan yang bersumber pada otoritas rakyat dengan sangsi langsung yang diberikan rakyat kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Perjanjian yang secara jelas dan tegas mengatur hak dan kewajiban setiap warga Negara dan mengatur kekuasaan, membatasi dan mengawasi kekuasaan Negara yang bersumber dari persetujuan dan kesepakatan rakyat secara bersama – sama. Perjanjian itu dikenal dengan nama ‘konstitusi’, yang secara resmi mencantumkan hak dan kewajiban warga Negara dan juga hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Setiap tindakan pemerintah dapat diawasi apakah sesuai dan ada aturan hukumnya, untuk mencegah dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan Negara.

Konstitusi adalah sumber hukum bagi penyelenggaraan kekuasaan. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang populer artinya pemerintahan itu didukung oleh rakyat dan telah sesuai dengan aturan hukum tentang perolehan, pelaksanaan dan pengalihan kekuasaan yang ada dalam suatu Negara. Jadi konstitusi adalah ikatan legalitas kekuasaan dari pemerintahan dalam bentuk persetujuan, dukungan dan penerimaan rakyat terhadap suatu pemerintahan dan merupakan ikatan moral dari pemerintahan yang berkuasa karena sesuai dengan nilai – nilai serta prinsip – prinsip yang berlaku dalam kehidupan masyarakat banyak.

Pengawasan politik menjadi penting, karena pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh legislatif terhadap eksekutif dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Semakin pengawasan menjadi lemah, semakin bentuk dari pemerintahan berubah menjadi hanya demokrasi nominal (nama saja), dalam hal mana tentu saja kekuasaan dijalankan atas nama rakyat tetapi bohong dalam kenyataannya dengan maksud meningkatkan derajat dari yang mewakili tetapi tidak untuk yang diwakili.¹¹⁷

Pengawasan politik adalah substansi politik, agar pemerintahan yang berkuasa dapat menjalankan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi. Pengawasan harus dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif, agar jangan menjadi lemah. Pengawasan yang lemah dan tidak dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif dapat berakibat fatal dalam demokrasi. Rakyat harus bersama – sama menjaga agar Negara jangan sampai masuk ke dalam demokrasi nominal atau hanya sekedar nama saja. Hakekat demokrasinya tidak ada dan bohong. Pengawasan politik harus kuat dan menjadi semakin kuat untuk mengimbangi kekuasaan dari eksekutif, dengan tujuan agar demokrasi tidak menjadi nominal melainkan menjadi aktual. Demokrasi aktual, memiliki pengertian sebagai demokrasi yang betul – betul ingin diwujudkan dan diadakan dalam kenyataannya serta dipentingkannya demokrasi sebagai bagian yang utama dalam kehidupan bernegara.

Pengawasan politik adalah pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan agar hakekat demokrasi dapat terwujud dalam kehidupan

¹¹⁷ *The more that control is weakened, the more the form of government changes into a merely nominal democracy, where the power is certainly exercised in the name of the people but lies in reality to an increasing degree with the representatives and not with the represented.*
Alf Ross, *Op. Cit.*, pages 89.

bernegara. Untuk dapat menjaga kekuasaan agar tetap dijalankan sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan untuk sebesar – besarnya kepentingan rakyat banyak maka pengawasan menjadi sesuatu yang sangat pokok dan penting. Sebaliknya pengawasan politik terhadap rakyat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa terhadap rakyat dengan tujuan agar rakyat dapat patuh dan tunduk secara mutlak kepada pemerintah tanpa mempunyai hak untuk menolak atau menentang. Pemerintahan seperti ini, adalah pemerintahan otoriter dan tirani. Contoh : Adolf Hitler sebagai diktator¹¹⁸ Nazi dari Jerman, (1933 – 1945).

Pengawasan Publik adalah pengawasan rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Publik berasal dari kata Latin '*publicus*' yang berarti : berasal, menjadi milik dari, atau berhubungan dengan rakyat sebagai suatu keseluruhan. Pengawasan publik adalah ciri utama dari Negara demokrasi. Rakyat sebagai sumber otoritas kekuasaan bagi yang memerintah memiliki perjanjian sosial untuk mengatur hak dan kewajiban dari masing – masing. Timbulnya pengawasan adalah konsekuensi dari adanya otoritas kekuasaan yang berasal dari rakyat. Hak rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, untuk mencegah dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi karena rakyat akan selalu melihat, mendengar dan merasakan terhadap perilaku kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah.

Pengawasan Publik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 Pengawasan Langsung (*direct government*) dan Pengawasan Tidak Langsung (*indirect government*). Pengawasan Langsung adalah segala sesuatunya

¹¹⁸ Dictator, 1. A ruler who has complete power over a country, especially one who has gained it using military force. 2. A person who behaves as if they have complete power over other people, and tells them what to do. A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, China, Seventh edition 2005, pages 422.

diputuskan, dijalankan dan dipikul bersama – sama. Pengawasan Tidak Langsung adalah segala sesuatunya diwakilkan kepada majelis perwakilan untuk memutuskan, menjalankan dan memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan rakyat kepada majelis perwakilan tersebut.

Pemerintahan langsung melalui penduduknya sendiri adalah kemungkinan terjadi dan sepanjang hal itu pernah terjadi atau dapat terjadi di setiap Negara. Dan sekali pun demikian, sebagaimana yang kita telah catat, kebanyakan demokrasi di Athena adalah tidak langsung – jika anggota majelis, dewan, dan para pegawainya berjumlah besar yang bertindak atas nama keseluruhan penduduk sebagai badan. Kebutuhan untuk meneruskan setiap kegiatan administrasi dan untuk efisiensi selalu mengesampingkan pelaksanaan penuh dari demokrasi langsung dalam setiap Negara, tidak ada masalah seberapa kecil pun Negara itu.¹¹⁹

Pengawasan langsung yang terjadi di Athena, adalah Pemerintahan langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedemikian baiknya model pengawasan dan pemerintahan langsung yang terjadi di Athena, menyebabkan tidak ada seorang pun yang berkehendak untuk memerintah. Karena bagi penduduk di Athena, jika pelayanan yang mereka dapatkan memadai dan memuaskan maka pelayanan diantara penduduk menjadi utama diantara mereka. Pelayanan adalah segala – galanya, dan segala sesuatu dapat dibicarakan dan sekaligus dapat diputuskan secara bersama – sama. Pengawasan langsung diperlukan dan tetap dijalankan jika pelayanan yang diberikan kepada sesama penduduk mengalami ketidakcocokan.

¹¹⁹ *Direct government by the citizens themselves was probably taken as far as it has ever gone or could go in any state. And even then, as we have noted, much of the Athenian democracy was indirect – in the large 'juries,' the council, and officials, who acted in the name of the whole citizen body. The need for any continuing administration and for efficiency always rules out the full practice of direct democracy in any state, no matter how small.* Henry B. Mayo, *Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, pages 41.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan melalui badan perwakilan penduduk yang telah ditunjuk dan dipilih untuk mewakili masyarakatnya dalam badan perwakilan guna mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan tidak langsung, disebut juga sebagai pemerintahan tidak langsung atau demokrasi tidak langsung. Salah satu pertimbangan diadakannya pengawasan tidak langsung, karena jumlah penduduk yang besar, kepentingan administrasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan tidak langsung menghilangkan rasa kebersamaan yang sebelumnya dirasakan dalam penyelenggaraan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung melahirkan 'popularitas' dalam sistem keterwakilan di badan perwakilan rakyat. 'Popularitas' mengganti 'kebersamaan' yang mula – mula ada bersama rakyat dengan sejarah kenegaraan yang panjang dari sejak sebelum masehi.

“Untuk mencegah penyalahgunaan ini, sudah sewajarnya bahwa kekuasaan harus dikontrol dengan kekuasaan.”¹²⁰ Pendapat Montesquieu tersebut bermakna adanya perimbangan kekuasaan dalam suatu Negara, tidak ada kekuasaan yang absolut dan itu berarti kekuasaan bersifat terbatas, terkontrol dan terimbangi oleh adanya kekuasaan lainnya. Ini adalah bentuk kebebasan yang bertanggung jawab kepada yang memberi kekuasaan.

'Popularitas' berasal dari bahasa Latin *'popularitas'*, yang artinya adalah keadaan atau kualitas untuk menjadi populer. Arti 'populer', adalah : dari atau diteruskan oleh rakyat umumnya atau oleh semua orang. Popularitas menjadi sangat penting dalam kegiatan pengawasan tidak langsung atau demokrasi tidak langsung, karena rakyat menghendaki yang dikenal, diterima dan dipercaya untuk menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan atau majelis.

¹²⁰ Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan*, alihbahasa J.R. Sunaryo, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 44.

Tidak ada hal yang sulit untuk diperlihatkan bahwa bentuk ideal dan terbaik dari pemerintahan adalah adanya kedaulatan, atau kekuasaan tertinggi dalam mengawasi sebagai upaya terakhir, sebagaimana kepentingan yang ada di dalam komunitas secara keseluruhan; setiap penduduk tidak hanya memiliki satu suara dalam pelaksanaan kedaulatan yang paling akhir, tetapi kadang – kadang akhirnya meminta ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan menyalurkan beberapa orang ke dalam fungsi – fungsi publik, baik lokal atau pun umum.¹²¹

Antara model pemerintahan yang ideal dan lengkap dengan model pemerintahan yang populer, terdapat substansi yang sama dan orientasi yang berbeda. Substansi yang sama artinya ke dua model tersebut bersandar sepenuhnya pada rakyat sebagai pemegang otoritas kekuasaan. Pada model pemerintahan yang ideal dan lengkap orientasinya adalah pada kedaulatan dengan fungsi pengawasan rakyat atas kekuasaan pemerintah. Berjalannya fungsi pengawasan merupakan akses bagi rakyat untuk mengetahui dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya akses rakyat terhadap penyelenggara kekuasaan merupakan sesuatu yang ideal dan lengkap karena secara historis ada ‘pemerintahan langsung’ dari rakyat tetapi dikarenakan faktor – faktor kependudukan, administrasi dan efisiensi maka mekanisme ‘pemerintahan langsung’ dirubah menjadi ‘pemerintahan tidak langsung’.

Pada model pemerintahan yang populer atau pemerintahan kerakyatan, orientasi pemerintahannya adalah untuk selalu menerima tuntutan – tuntutan yang berasal dari rakyat dan membuat keputusan – keputusan yang berpihak pada

¹²¹ *There is no difficulty in showing that the ideally best form of government is that in which the sovereignty, or supreme controlling power in the last resort, is vested in the entire aggregate of the community; every citizen not only having a voice in the exercise of that ultimate sovereignty, but being, at least occasionally, called on to take an actual part in the government, by the personal discharge of some public function, local or general* Robert A. Dahl, et. al. (edited by), *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts – London – England, 2003, pages 312.

rakyat atau yang memenuhi tuntutan rakyat. Sebaliknya kalau tuntutan – tuntutan rakyat yang terjadi setiap hari, tidak pernah didengar dan diterima maka pemerintahannya adalah tidak populer.

Ke dua model pemerintahan tersebut adalah penting dan mutlak ada dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya muncul model ketiga, sebagai gabungan dari model satu dan dua. Model ketiga ini adalah gabungan dari ‘model ideal dan lengkap’ dan ‘populer,’ artinya bahwa pemerintahan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan terbuka untuk dilakukannya pengawasan langsung oleh rakyat sebagai bentuk partisipasi dan ikut memiliki serta juga pemerintahan yang selalu mau mendengarkan dan menerima tuntutan – tuntutan yang diajukan oleh rakyat terhadap pemerintahnya. Model ke tiga ini sebagai bentuk kombinasi merupakan model yang relevant untuk keadaan sekarang dan masa depan karena berbasis historis. Disamping itu juga model ke tiga ini akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan sangat demokratis. Kuat dalam arti bersih, karena rakyat secara terus menerus dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan demokratis karena pemerintahan yang berkuasa selalu menerima tuntutan – tuntutan dan aspirasi rakyat sehingga keputusan - keputusan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki keberpihakan kepada rakyat banyak.

2.5 SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

Sentralisasi adalah terminologi kekuasaan pemerintahan dari suatu Negara. Sentralisasi adalah semua kekuasaan dan keputusan yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut ada pada suatu lembaga atau perorangan. Biasanya sentralisasi kekuasaan terjadi pada Negara dengan sistem otokrasi. Antara

otokrasi dan sentralisasi terdapat hubungan “*similarity*.” Artinya ‘substansi kekuasaannya sama tetapi secara bentuk dan mekanisme tidaklah sama’. Otokrasi adalah bentuk kekuasaan dari suatu sistem pemerintahan Negara dalam hal mana seseorang memiliki kekuasaan secara lengkap dan keseluruhan, atau suatu Negara yang diperintah oleh seseorang yang memiliki kekuasaan secara lengkap dan keseluruhan. Sentralisasi berarti memberikan pengawasan atau kekuasaan kepada Negara atau suatu organisasi atau suatu kelompok orang – orang di satu tempat tertentu. Jadi antara otokrasi dan sentralisasi, letak kekuasaan otokrasi adalah pada perorangan sedangkan sentralisasi letak kekuasaannya ada pada lebih dari satu orang.

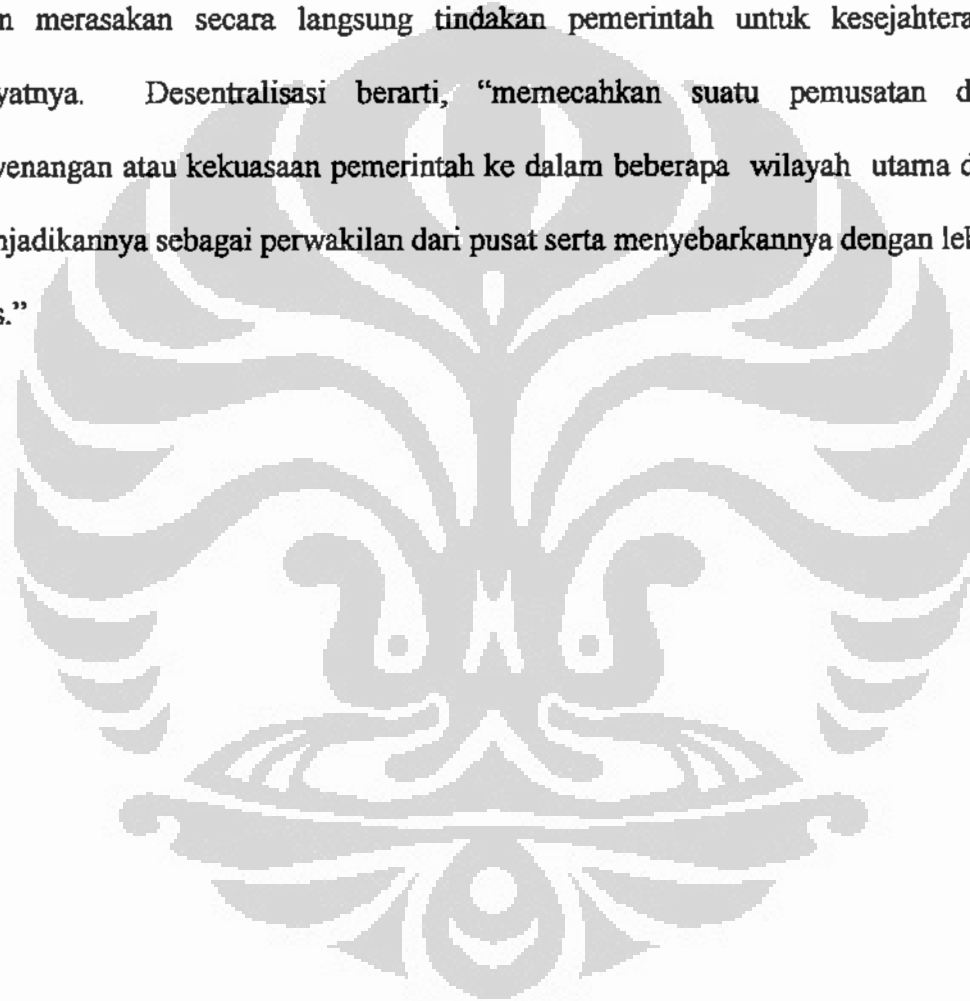
Disamping adanya Pemerintahan Pusat terdapat juga aturan yang rumit dari kewenangan lokal. Bersama – sama mereka membentuk sejumlah mesin kenegaraan, dan hubungan antara yang satu dengan yang lain menciptakan suatu tugas berarti dari proses perwujudan politik.¹²²

Sentralisasi hanya melihat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Rakyat melalui badan perwakilan, tanpa mempertimbangkan adanya karakteristik geografis, distribusi kependudukan, tatanan sosial, kegiatan ekonomi, dan proses sejarah dari wilayah – wilayah yang ada. Gagasan ini menjadi tidak memadai dan sangat sempit, karena tidak mempertimbangkan adanya wilayah – wilayah dalam suatu Negara yang mampu secara swadaya menyediakan kebutuhan – kebutuhan penduduknya dengan baik dan memadai. Menurut MacIver, kegiatan – kegiatan lokal dari wilayah – wilayah yang ada dalam suatu Negara secara bersama – sama

¹²² *Thus besides the central government there exists a complicated array of local authorities. Together they form the vast machinery of state, and the relation of the one to the other creates a highly significant task of political articulation.*
R. M. MacIver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, reprinted 1941, pages 390 – 391.

mereka membentuk ‘mesin kenegaraan’ dengan tujuan untuk menciptakan perwujudan politik yang menjadi dambaan bersama.

Jika semua secara bersama – sama baik Pusat dan wilayah – wilayah yang tersebar luas dalam Negara membentuk dengan sadar, ‘mesin kenegaraan’ untuk menciptakan perwujudan politik yang menjadi dambaan bersama melalui proses yang dinamakan ‘desentralisasi’ politik atau kekuasaan, maka penduduk akan merasakan secara langsung tindakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Desentralisasi berarti, “memecahkan suatu pemusatan dari kewenangan atau kekuasaan pemerintah ke dalam beberapa wilayah utama dan menjadikannya sebagai perwakilan dari pusat serta menyebarkannya dengan lebih luas.”



Perbandingan antara sentralisasi dan desentralisasi dapat dilihat pada tabel

berikut di bawah ini :

NO.	SENTRALISASI	DESENTRALISASI
01	HUBUNGAN SEBATAS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT.	HUBUNGAN TAK TERBATAS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA SEMUA DAERAH ATAU WILAYAH.
02	GAGASAN PEMIKIRAN SANGAT SEMPIT DAN TIDAK MEMADAI.	GAGASAN PEMIKIRAN SANGAT LUAS DAN MEMADAI KARENA MENCAKUP SEMUA YANG ADA DALAM WILAYAH NEGARA.
03	NEGARA DIPAHAMI DENGAN CARA SEDERHANA	NEGARA DIPAHAMI DENGAN CARA YANG KOMPLEKS DAN KOMPREHENSIF.
04	SATU – SATUNYA KEPENTINGAN PEMERINTAH HANYALAH KEKUASAAN.	ADA BANYAK KEPENTINGAN TERUTAMA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDUDUK.
05.	PRIORITAS ADALAH KEAMANAN NEGARA	PRIORITAS ADALAH KESEJAHTERAAN RAKYAT
06.	SISTEM KOMUNIKASI ADALAH KOMANDO ATAU SATU ARAH.	SISTEM KOMUNIKASI ADALAH "COMPLY", ARTINYA "MENURUTI" KEHENDAK RAKYAT BANYAK MELALUI KOMUNIKASI DUA ARAH.
07	OTOKRASI	DEMOKRASI
08	TIRANI	KEBEBASAN

Dari tabel perbandingan Sentralisasi dan Desentralisasi di atas, dapat diperoleh beberapa pengertian :

1. Sentralisasi lebih berpihak kepada elite penguasa, sedangkan desentralisasi lebih berpihak kepada rakyat.
2. Sentralisasi bertujuan menciptakan homogenitas, sedangkan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan pluralitas.
3. Sentralisasi menciptakan kekakuan (*rigid*) dan kekerasan (*violence*) sedangkan desentralisasi menciptakan kelonggaran dan kebebasan (*freedom*).
4. Sentralisasi melahirkan masyarakat yang keras dan bersahaja (*rude society*) sedangkan desentralisasi melahirkan masyarakat yang humanis dan toleran (*civil society*).

..... Berbagai bentuk dari gabungan politik pusat dan lokal keseluruhannya adalah merupakan perangkat manusia dan masyarakatnya, keberadaannya tidaklah untuk mereka sendiri tetapi untuk kebaikan dari mereka yang mengabdikan. Mereka dinilai dalam keberhasilannya atas pencapaian dari tujuan – tujuan pemerintahan – keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, kebebasan - sepanjang berhubungan dengan politik, tanpa memerhatikan nilai – nilai dari keadaan yang lain.

Salah satu pertimbangan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan,

baik itu sentralisasi atau pun desentralisasi adalah ‘analisa kepuasan’ dan ‘batas

¹²³

..... *The various forms of central and local political association are all tools of man and men, existing not for themselves but for the good of those they serve. They are to be judged in the light of the ends of government – security, order, justice, welfare, freedom as far as the political is concerned, regardless for the moment of other values.* Charles E. Merriam, *Systematic Politics*, University of Chicago Press, Chicago, fourth impression 1957, pages 282 – 283.

pemisah wilayah' antara pusat dan daerah. Jadi hubungan antara pusat dan daerah dapat diukur sebagai 'batas pemisah wilayah' atau sebagai 'fungsi' untuk mencapai tujuan. Kutipan sebelumnya di atas dari R.M. MacIver, menyebutkan bahwa apa pun nama dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam keadaan yang sesungguhnya wilayah – wilayah yang ada dalam suatu Negara telah dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari penduduknya dengan baik. Ini berarti, bagi penduduk tolok ukur keberhasilan dari suatu pemerintahan adalah nilai kepuasan yang dapat diberikan kepada penduduknya.

Analisa kepuasan menjadi faktor utama dalam menerapkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan politik. Secara formal dan potensial, prinsip desentralisasi memiliki peluang untuk lebih memperbesar nilai kepuasan yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduknya. Jika desentralisasi diterapkan dengan pertimbangan hanya sekedar membagi wilayah yang ada dan sekaligus memberi batas – batas wilayah Negara ke dalam provinsi – provinsi dan wilayah administratif lainnya maka usaha terakhir ini akan sia – sia dan tidak memberikan nilai kepuasan sedikitpun kepada penduduknya, yang terjadi adalah melegalisasi pembagian wilayah suatu Negara atas nama 'desentralisasi'.

Oleh sebab itu apapun bentuk dari himpunan politik yang ada, apakah sentralisasi atau desentralisasi ? Yang pokok adalah himpunan politik tersebut adalah semata – mata sebagai alat perlengkapan (perangkat) untuk mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri, seperti : keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Berdasarkan tabel perbandingan antara sentralisasi dan desentralisasi di atas, maka diperlukan adanya pengukuran secara langsung kepada penduduk dengan menggunakan variabel kepuasan terhadap pemerintahan yang ada berdasarkan tujuan – tujuan yang telah disebutkan di atas.

Dalam setiap analisis objektivitas, baik untuk lokal dan pusat masing – masing memiliki nilai nyata yang sepatutnya perlu dipertimbangkan untuk tuntutan – tuntutan bagi pengakuan dan penerimaan mereka. Tidak ada persetujuan mendasar diantara mereka untuk saling mengorbankan. Pada hakekatnya, baik pusat maupun lokal secara keseluruhan adalah baik atau pun buruk, tergantung dari masing – masing.¹²⁴

Untuk analisis kepuasan di tingkat lokal maupun pusat, secara objektif masing – masing memiliki nilai tersendiri. Hakekatnya baik pusat maupun lokal masing – masing menghendaki adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan mereka. Secara kenegaraan baik pusat maupun lokal merupakan mesin besar untuk memproses artikulasi atau mewujudkan keinginan bersama menjadi kenyataan bersama. Kondisi seperti inilah yang perlu diatur dan diberi kejelasan dalam konstitusi kenegaraan, apakah Negara menjalankan prinsip sentralisasi atau desentralisasi? Menurut Charles E. Merriam, baik atau buruknya kondisi ‘kepuasan’ yang ada baik di pusat atau pun di lokal sangat tergantung dari masing – masing. Mengingat baik di pusat atau pun di lokal, masing – masing memiliki penduduk dan organisasi pemerintah, hubungan antara penduduk dengan organisasi pemerintah sangat tergantung dari berfungsinya organisasi tersebut dalam memproses keinginan bersama untuk diterjemahkan menjadi kenyataan bersama.

Faktor – faktor management, organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, keuangan dan komunikasi serta juga infrastruktur perhubungan, energi,

¹²⁴ *Both local and central have real values which must be fully considered in any objective analysis of their claims for recognition and acceptance. There is no fundamental presupposition in favor of either of them at the expense of the other. Neither all central is good nor bad, nor is all local good or bad per se.*
Ibid., pages 283.

teknologi informasi semuanya menjadi saling berkait dan memengaruhi satu sama lain. Semakin faktor – faktor tersebut dikelola dan diawasi bersama – antara pemerintah dan rakyat, karena aset pusat dan daerah sepatutnya adalah milik Negara dan berarti milik semua – secara maksimal semakin dirasakan adanya peningkatan kualitas kepuasan dari masing – masing penduduk baik pusat maupun lokal dari keadaan minimal.

Akhirnya, pemerintahan lokal memiliki kemampuan untuk memperoleh ketaatan umum. Pemerintahan lokal dapat dengan lebih baik untuk mempertemukan dengan kebutuhan – kebutuhan lokal dan memperoleh dukungan untuk penyediaan pelayanan umum karena memberikan pilihan. Pemerintahan lokal mempermudah adanya pertemuan penyesuaian kesamaan antara sumber – sumber lokal dan kebutuhan – kebutuhan lokal. Pemerintahan lokal, dengan membuat pemerintahan akan mengurangi keterpencilan dan menjadikannya lebih dapat dikelola, membuatnya menjadi lebih dapat dipahami, dan memungkinkan terjadinya suatu pilihan yang jelas dan seimbang guna membuat keluasan dalam hal mana orang – orang berkehendak untuk memajukan nilai – nilai dari komunitas.¹²⁵

Desentralisasi dalam hubungannya dengan pemerintahan lokal, menurut Gerry Stoker memiliki sejumlah kemampuan lebih dibandingkan dengan sentralisasi. Kemampuan untuk memperoleh ketaatan umum karena pemerintahan lokal dapat dengan cepat mempertemukan antara tuntutan dan kebutuhan dengan sumber – sumber lokal yang ada dengan efisien. Pemerintahan lokal yang ada bersama – sama penduduk dapat merasakan langsung adanya kebutuhan dan respons yang tepat dapat diberikan dengan baik, cepat maka

¹²⁵ *Finally, local government has the capacity to win public loyalty. It can better meet local needs and win support for public service provision because it allows choice. It facilitates a matching of local resources and local needs. 'local government, by making government less remote and more manageable, makes it more comprehensible, enabling a clear and balanced choice to be made over the extent to which people wish to promote community values.'* Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, Macmillan, Great Britain, second edition 1991, pages 234 – 235.

dukungan penduduk terhadap kewenangan yang ada di atas mereka tidak diragukan lagi kesetiannya.

Dalam mengelola organisasi dan administrasi, pemerintahan lokal memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan organisasi dan administrasi dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Kelebihan itu karena dekat dengan penduduk, dan lokasi kejadian yang memerlukan penanganan segera. Nilai – nilai komunitas penduduk akan lebih dapat dikembangkan dengan tepat, berdasarkan sumber – sumber lokal yang tersedia. Semakin besar kemampuan sumber – sumber lokal akan semakin besar kemampuan pemerintahan lokal untuk mengembangkan nilai – nilai komunitas penduduk, dan mata rantainya adalah berupa kepercayaan, dukungan dan kesetiaan terhadap pemerintahan lokal menjadi semakin kuat dan berakar. Demikian pula sebaliknya, jika kemampuan sumber – sumber lokal kecil maka kemampuan dari pemerintahan lokal untuk mengembangkan nilai – nilai komunitas penduduknya juga kecil dan berakibat ketidakpercayaan, penentangan, dan sikap masa bodoh serta apatis terhadap pemerintahan lokal akan menjadi semakin kuat dan berakar.

Fungsi pemerintah pusat sebagai bentuk dari sentralisasi, adalah menyeimbangkan kemampuan pemerintahan lokal dengan sumber – sumber yang ada di semua wilayah, agar terjadi proses keseimbangan melalui asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas, adalah :

*'Subsidiarity is the principle of allowing the individual members of a large organization to make decisions on issues that affect them, rather than leaving those decisions to be made by the whole group.'*¹²⁶ Subsidiaritas adalah asas yang membolehkan anggota – anggota individu dari suatu organisasi yang

¹²⁶ John Sinclair (Founding editor in chief), *English Dictionary for Advanced Learners*, HarperCollins Publishers, Spain, latest reprint (six times), pages 1555.

besar untuk membuat keputusan – keputusan tentang mereka sendiri yang berpengaruh kepada mereka juga secara langsung, daripada menyerahkan keputusan – keputusan perihal mereka yang dibuat oleh kelompok secara keseluruhan. Desentralisasi dengan asas subsidiaritas menjadi pokok organisasi dan administrasi pemerintahan lokal dalam menghadapi berbagai perubahan tuntutan dan kebutuhan untuk kemudian dikelola dengan cepat untuk memperoleh keputusan yang tepat dan terukur. Pemerintah pusat hanya mengawasi saja agar kepentingan nasional tetap terjaga dan terkendali dalam proses penyelenggaraan desentralisasi oleh pemerintahan lokal.

Melalui asas subsidiaritas, pemerintah pusat dapat melihat kemampuan wilayah – wilayah lokal dalam mengelola wilayahnya. Bagi wilayah – wilayah yang digolongkan minus atau sumber – sumber lokal yang terbatas, maka tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk membantu dan memberikan dukungan bagi peningkatan dan pembangunan nilai – nilai komunitas lokal. Kemajuan dan kemakmuran komunitas di wilayah – wilayah lokal akan mewujudkan stabilitas wilayah nasional secara keseluruhan. Basis wilayah lokal dengan kemampuan lokal dan dinamika persoalannya, jika di *'matching'* atau *'d disesuaikan'* akan memberi hasil memuaskan bagi wilayah lokal dan memperkuat kesetiaan, dukungan dan kecintaan terhadap Negara nasional.

Merefleksi semua itu, patut selalu diingat, keberlanjutan desentralisasi akhirnya diuji sejauh mana rakyat menjadi bagian sistem itu. Secara fungsional itu berarti akomodasi kepentingan dan perbaikan kehidupan mereka. Ia jangan berhenti hanya pada penguatan otoritas politik dan kapasitas fiskal pemda (manfaat antara) seperti sekarang, tetapi harus lebih jauh membuktikan manfaat pada pelayanan publik

(administratif), demokratisasi (politik), dan kesejahteraan (ekonomi) di daerah.¹²⁷

Desentralisasi sebagai pemecahan kekuasaan yang ada dalam wilayah suatu Negara bertujuan agar pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat dengan lebih baik lagi. Kepentingan rakyat adalah pertimbangan terbesar dalam memilih desentralisasi, dan pilihan itu akan diuji, apakah rakyat dapat menerima dan puas dengan prinsip dan sistem yang dijalankan ? Kalau tidak, maka desentralisasi itu bukanlah untuk kepentingan rakyat karena mereka tidak menjadi bagian dari sistem tersebut, yang menikmati dan memperoleh untung adalah kaum elite politik atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat di wilayah lokal tersebut.

2.6 STRONG GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE

Strong Government, pemerintahan yang kuat dalam arti yang luas karena 'kuat' bukan dalam satu pengertian fisik atau dalam pengertian non fisik, tetapi bermakna banyak dan saling terkait satu sama lain. Beberapa filsuf politik abad 16 dan abad 18, telah menulis dan membahas arti dari '*strong government*', seperti di kutip berikut ini :

Banyak filsuf politik, menyadari bahwa kekuasaan saja tidak akan dapat menegakkan pemerintahan, mereka mencari penjelasan lain. Sebagaimana Rousseau menjelaskan, "kekuasaan tidak akan menciptakan hak," dan "yang paling kuat tidak akan cukup kuat untuk selalu menjadi orang yang mempunyai kekuasaan, kecuali kalau dia merubah kekuatannya menjadi hak." Perjanjian Sosial adalah saluran dari perubahan.

¹²⁷ Robert Endi Jaweng, *Taruhan Jalan Desentralisasi*, Kompas, hal. 7, tanggal 27 Maret 2007.

Ini adalah ajaran yang disetujui untuk dipegang dari abad ke 16 sampai dengan abad ke 18.¹²⁸

Rousseau menjelaskan, bahwa kekuatan tidak akan menciptakan hak dan orang yang paling kuatpun tidak akan mampu untuk mempertahankan kekuasaannya kecuali kalau kekuasaannya dirubah menjadi hak. Antara kata 'menciptakan' dan 'merubah' ada makna yang berbeda. Kata 'menciptakan' berarti mengadakan, menjadikan, mewujudkan, dan melahirkan, sedangkan kata 'merubah' berarti beralih, berganti, bersalin atau bertukar. Makna dari kata pertama 'menciptakan' artinya kekuatan dengan cara apa pun tidak akan pernah melahirkan hak dalam pengertian hak untuk berkuasa atas orang - orang lain, karena antara yang berkuasa dan dikuasai tidak terjadi hubungan sukarela. Keadaan seperti itu sangat rapuh dan sewaktu – waktu dapat diputuskan oleh akibat adanya perlawanan dari yang dikuasai terhadap kelompok berkuasa.

Kekuasaan yang dirubah menjadi hak dapat diartikan sebagai bertukar, itu berarti kekuasaan harus digunakan ke arah kepemilikan hak. Hak timbul karena adanya kewajiban, oleh sebab itu kekuasaan digunakan dengan sebaik – baiknya untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Kekuasaan adalah kemampuan yang dapat disalurkan untuk memenuhi kewajiban. Dengan mendahulukan kewajiban sebagai tanggung jawab moral,¹²⁹ maka timbullah hak. Jadi yang didahulukan adalah kewajiban dan daripadanya lahir hak sebagai tanggung jawab moral dalam kehidupan bersama.

¹²⁸ *Many political philosophers, realizing that force alone could not establish government, have sought another explanation. As Rousseau pointed out, "force does not create right," and "the strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right." The social contract was the agency of transformation. This was the doctrine that held favor from the sixteenth to the eighteenth century.* R.M. MacIver, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, Twentieth Printing, 1963, pages 17.

¹²⁹ *Morals are principles and beliefs concerning right and wrong behaviour.* John Sinclair (founding editor in chief), *Op. Cit.*, pages 999.

Memiliki tanggung jawab moral berarti kekuasaan didasarkan kepada tanggung jawab moral dan kekuasaan seperti inilah yang dapat bertahan lama. Kekuasaan didasarkan kepada tanggung jawab moral berarti kekuasaan yang sesuai dengan prinsip – prinsip dan keyakinan – keyakinan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Masyarakat akan dengan sukarela dan mendukung kekuasaan yang berlandaskan pemikiran dan nilai – nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Rousseau proses perubahan dari kekuatan menjadi hak adalah melalui Perjanjian Sosial. Arti Perjanjian Sosial adalah *“if you contract with someone to do something, you legally agree to do it for them or for them to do it for you.”*¹³⁰ “Jika anda melakukan perjanjian dengan seseorang untuk melakukan sesuatu, maka anda secara aturan hukum setuju melakukannya untuk mereka atau mereka melakukannya bagi anda.” Inti dari Perjanjian Sosial adalah ke dua belah pihak antara yang menyerahkan kekuasaan dan pihak yang menerima kekuasaan terjadi persetujuan, yang isinya adalah kewajiban dan hak dari masing – masing dalam proses perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka hak yang akan diperolehnya menjadi gugur. Merubah kekuatan menjadi hak melalui Perjanjian Sosial adalah demokratis dan memenuhi rasa keadilan.

Menurut Thomas Hobbes, Perjanjian Sosial adalah proses perubahan mendasar kehidupan manusia dari ‘Negara Alamiah’ menjadi ‘Civil Society’. Dalam ‘Negara Alamiah’ manusia tidak memiliki pemerintahan dan keadaannya sangat mencekam dan menakutkan, karena tidak ada yang melindungi dan masing – masing individu manusia melakukan hasratnya dengan tidak terkendali

¹³⁰ John Sinclair (founding editor in chief), *Op. Cit.* pages 327.

dan timbullah kesadaran akan perlunya pengendalian hasrat agar semua orang memperoleh perlindungan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan dengan membuat Perjanjian Sosial yang intinya setiap orang berkewajiban untuk menyerahkan kebebasannya kepada satu “orang atau majelis orang” dan memiliki kewenangan atas kehidupan mereka. Sebagai haknya, pemegang kewenangan berkewajiban untuk mengadakan dan menyelenggarakan kehidupan bersama dengan menyediakan perlindungan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Pemegang kekuasaan atas suatu masyarakat memerlukan kekuatan yang besar untuk dapat mengendalikan ‘hasrat yang bebas dan tak terkendali,’ sehingga Thomas Hobbes menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan sebaiknya menjadi seperti ‘Leviathan’.

Bilamana seseorang membuat suatu perkiraan yang pantas untuk kekuatannya, dia menjadi tak dapat dipercaya oleh yang lainnya dibandingkan dengan mereka yang berkehendak untuk menyerahkan kebebasan – kebebasan pribadinya, untuk kekuasaan yang terbentuk di dalamnya terdapat keinginan yang lebih besar untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi jika dia melakukan penilaian yang berlebih – lebih terhadap kekuasaannya sendiri atau melakukan penilaian yang sangat rendah akan kemampuan kekuasaannya, maka dia menjadi sangat dipercaya oleh orang – orang terlebih dari apa yang mereka berikan kepadanya, dan karenanya akan selalu terjadi perselisihan dengan mereka.¹³¹

Untuk menjadi raja yang teramat perkasa dan ditakuti oleh semua, Thomas Hobbes menjelaskan perlunya Perjanjian Sosial yang dilakukan oleh

¹³¹ *When a man makes a just estimate of his power, he is unlikely to require of others more than they are willing to concede, for his power consists largely in their willingness to do what he requires. But if he over-values his own power or under-values theirs, he is very likely to require more than they are willing to concede, and therefore to quarrel with them.* Thomas Hobbes (edited by John Plamenatz), *Leviathan*, Collins Fontana, Great Britain, seventh impression September 1974, pages 24.

rakyat dengan yang memiliki kewenangan sebagai penguasa. Perjanjian Sosial adalah bentuk perubahan dasar dari Negara Alamiah menjadi "*Civil Society.*" Untuk mewujudkan cita – cita bersama dalam kehidupan bersama, kewenangan yang ada sebaiknya, menurut penjelasan Hobbes menjadi seperti "*Leviathan*" yang artinya adalah : 1. *Bible, a sea monster, variously thought of as a reptile or a whale.* 2. *Anything huge or very powerful.* ¹³² *A leviathan is something which is extremely large and difficult to control, and which you find rather frightening.* ¹³³

1. Menurut Alkitab, seekor mahluk yang besar dan menakutkan, berbagai pemikiran melukiskannya sebagai seekor binatang melata atau seekor ikan paus.
2. Apa pun yang kelihatannya besar atau yang sangat hebat/berkuasa. Nama leviathan adalah sesuatu yang teramat besar sekali dan sulit untuk dikendalikan, dan bila anda mendapatkannya agak menakutkan. Kekuasaan dibangun atas dasar Perjanjian Sosial untuk menciptakan '*Civil Society,*' tetapi diperlukan adanya penguasa yang kuat dan perkasa serta disegani atau ditakuti oleh mereka yang dikuasai, jadi ada banyak pengorbanan dan kebebasan yang dikorbankan demi penguasa yang sebaiknya menjadi '*leviathan*'. Menurut Hobbes, pemerintahan sebaiknya menjadi '*strong government*', atau '*leviathan*' guna menghadapi hasrat yang tidak terkendali, perselisihan, dan ketidakenakan yang terjadi dalam Negara Alami.

Istilah '*good governance*' dapat diterjemahkan dengan 'tata kelola dengan baik,' kata '*governance*' diartikan : 1. *The governance of a country is the way in which it is governed.* 2. *The governance of a company or organization is the way in which it is managed.* ¹³⁴ Kata '*governance*' berasal dari *Old French*

¹³² Michael Agnes (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Canada – USA, fourth edition, 2004, page 824.

¹³³ John Sinclair (founding editor in chief), *Op. Cit.*, pages 889.

¹³⁴ John Sinclair (founding editor in chief), *Op. Cit.*, page 678.

'*gouvernance*' dan *Medieval Latin* '*gubernantia*,' *the action, manner, function, or power of government.* ¹³⁵ 1. Governance dari suatu Negara adalah cara dalam hal mana Negara itu dikuasai. 2. Governance dari suatu Perusahaan atau organisasi adalah cara dalam hal mana Perusahaan itu dikelola. Kata '*governance*' berasal dari bahasa Perancis kuno '*gouvernance*' dan abad pertengahan Latin '*gubernantia*,' dengan pengertian 'tindakan, cara, fungsi, atau kekuasaan pemerintahan.' Kata '*governance*' berhubungan dengan kata dasar atau kata yang terdahulu (*preceding entry*) yaitu : '*govern*' dengan pengertian 1. Melaksanakan kewenangan terhadap; memerintah, mengurus, mengatur, mengawasi, mengelola, dan lain -- lain. 2. Memengaruhi tindakan atau tingkah laku; mengubah [menguasai pendapat umum] 3. Pengendalian; pengekangan; mengekang [mengendalikan watak seseorang]. (*1. to exercise authority over; rule, administer, direct, control, manage, etc. 2. to influence the action or conduct of; guide; sway [to govern public opinion] 3. to hold in check; restrain; curb [to govern one's temper]*). ¹³⁶

PERBANDINGAN ANTARA GOVERNANCE DAN GOVERNMENT

NO.	GOVERNANCE	GOVERNMENT	KETERANGAN	
			GOVERNANCE	GOVERNMENT
01.	MELAKSANAKAN	PELAKSANA	KEGIATAN	MANUSIA
02.	MEMERINTAH	PEMERINTAH	FUNGSI	ORGANISASI
03.	MENGURUS	PENGURUS	KEGIATAN	MANUSIA
04.	MENGATUR	PENGATUR	FUNGSI	MANUSIA & ORGANISASI
05.	MENGAWASI	PENGAWAS	FUNGSI	MANUSIA
06.	MENGELOLA	PENGELOLA	FUNGSI	MANUSIA
07.	MEMENGARUHI	PENGARUH	KEGIATAN	MANUSIA & ORGANISASI
08.	MENGENDALIKAN	PENGENDALI	FUNGSI	ORGANISASI

¹³⁵ Michael Agnes (editor in chief), *Op.Cit.*, pages 614.

¹³⁶ Michael Agnes (editor in chief), *Op.Cit.*, pages 614.

Dari tabel perbandingan antara *Governance* dan *Government* terlihat dengan jelas perbedaan antar unsur – unsurnya. Pada unsur – unsur *Governance* semuanya merupakan fungsi dan kegiatan yang merupakan aspek dinamikanya, sedangkan unsur – unsur pada *Government* semuanya merupakan manusia dan organisasinya yang merupakan aspek statisnya. Jadi, 'good governance' adalah ukuran yang diberikan atas kegiatan dan fungsi yang dijalankan baik oleh manusia dan organisasinya. Ukuran 'good governance' dikembalikan kepada rakyat sebagai konsumen terakhir dalam mata rantai pemerintahan. Analisa kepuasan atas setiap unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bahan masukan bagi pemerintah sebagai pemegang kewenangan.

Menurut *World Bank*, kata 'governance' diartikan sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources for development society." ¹³⁷ Adalah "cara Negara dalam menggunakan kekuasaannya di dalam mengelola sumber – sumber ekonomi dan sosial bagi pengembangan masyarakatnya. "

UNDP mengemukakan definisi 'governance' sebagai : "the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels." ¹³⁸ Adalah "pelaksanaan dari kewenangan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah -- masalah nasional di semua tingkat."

Dari kedua definisi di atas, kata 'governance' dipakai oleh Negara dan pemegang kewenangan yang ada. Semua sumber – sumber yang ada pada semua tingkat, dapat dikelola dengan sebaik – baiknya oleh Negara maupun yang memegang kewenangan untuk dapat disesuaikan 'matching' dengan tuntutan dan

¹³⁷ *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 54.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 55.

kebutuhan penduduk. Sasaran akhir dari *'good governance'* adalah terwujudnya masyarakat Sipil *'Civil Society'* melalui pengembangan nilai – nilai yang ada di masyarakat.

Demokrasi adalah dasar bukan tujuan dalam hidup bernegara, karena otoritas kekuasaan berada pada rakyat sebagai satu – satunya sumber yang ada dan nyata. Negara diadakan sesuai dengan Perjanjian Sosial (*the social pact*) untuk kepentingan rakyat bersama dan jaminan untuk masa depan. Dalam mengelola Negara aspek *'strong government'* dan *'good governance'* menjadi dua sisi dari satu mata uang logam. *'Strong government and good governance'* adalah sempurna dan ideal, karena pemerintahan memerlukan kekuasaan yang besar untuk menghadapi persoalan di dalam maupun di luar. Tanpa kekuatan besar maka pemerintahan tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan yang melanda kehidupan Negara setiap saat. Proses merubah keadaan dari *'ketidakenakan'* menjadi *'enak'*, diperlukan *'Strong Government'* yang akan membawa semua anasir ketidakpuasan kepada proses *'Perjanjian Sosial,'* karena dengan adanya kesepakatan maka semua dapat berlangsung stabil untuk bekerja keras hingga terwujudnya *'Civil Society'*.

'Strong government and bad governance', berbahaya dan menjadi tirani bagi demokrasi dan rakyat. Negara bukan untuk rakyat, tetapi sebaliknya rakyat untuk Negara. Negara adalah sosok yang harus dipertahankan mati – matian dengan segala isinya. Bela Negara, Abdi Negara, Pejabat Negara, Kepentingan Negara, Tamu Negara, Jamuan Negara, Kekayaan Negara ini semuanya menjelaskan bahwa apa pun subjeknya utamanya dan segala – galanya adalah Negara. *'Strong government and bad governance'* menghilangkan *'negara kerakyatan'* sebagai wujud aslinya. *'Strong Government'* menjadi utama dan

segala – galanya, pada hal ‘*Strong Government*’ tujuannya untuk memberdayakan dan mengembangkan nilai – nilai kehidupan masyarakat dan dikelola dengan sekuat tenaga dan sebaik – baiknya agar ‘*Civil Society*’ dapat terwujud, dan kondisi seperti yang ada di Negara Alamiah dapat ditinggalkan untuk selama – lamanya.

Saya rasa, komunitas demokratis memiliki minat alami akan kebebasan: bila terserah kepada mereka sendiri, mereka akan mencarinya, menghargainya, dan melihat setiap bentuk ketiadaan kebebasan dengan penyesalan. Namun untuk kesetaraan, hasrat mereka berapi – api, tak terpuaskan, tanpa henti, luar biasa: mereka menyerukan kesetaraan dalam kebebasan; dan jika mereka tak bisa mendapatkannya, mereka masih menyerukan kesetaraan dalam perbudakan. Mereka akan sanggup memikul kemiskinan, kerja paksa, kebiadaban tapi mereka tak akan sanggup memikul aristokrasi.¹³⁹

Begitulah adanya sepanjang waktu, terutama pada masa kita sendiri. Semua orang dan semua kekuasaan yang berupaya menanggulangi hasrat yang tak tertahankan ini, akan terguling atau hancur karena hasrat ini. Pada zaman kita, kebebasan tak bisa dibangun tanpa hal itu, dan pemerintahan yang sewenang – wenang itu sendiri tak bisa berkuasa tanpa dukungannya.¹⁴⁰

Rakyat memiliki sifat dan minat alami, artinya : sifat alami yang ada pada rakyat, yaitu bawaan, personalitas, watak seperti senasib dan sepenanggungan, keikhlasan akan apa pun yang terjadi. Minat alami, artinya : kepentingan, kecenderungan, keinginan dan kesenangan yang selalu menjadi objek perhatian dari rakyat. Berkenaan dengan ekonomi, politik dan hukum, dan lain – lain ini lebih kepada minat alami rakyat yang ada dalam suatu Negara. Adanya situasi nasional yang tak terhindarkan, seperti : Negara miskin, Negara

¹³⁹ Aristokrasi = aristocracy, the aristocracy is a class of people in some countries who have a high social rank and special titles. John Sinclair (founding editor in chief), *Op.Cit.*, pages 71.

¹⁴⁰ Alexis de Tocqueville (Yusi A. Pareanom, penerjemah), *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 372.

yang paling padat penduduknya, Negara paling korup akan disikapi dengan sifat pasrah dan 'khuluk' (kata Arab, artinya bawaan).¹⁴¹

Sifat rakyat secara alami adalah positif, karena sanggup memikul konsekuensi dari Negara miskin, Negara korup, Negara Republik Mimpi karena rakyat sudah percaya takdir dan 'khuluk', itu semua sudah disuratkan dan menjadi warna kehidupan rakyat dalam keseharian. Rakyat akan berontak terhadap 'ketidakadilan' yang telanjang di hadapan mata rakyat karena bertentangan dengan minat alami rakyat yaitu: kepentingan, kecenderungan, keinginan dan kesenangan yang ada dalam hati sanubari (kalbu). Munculnya '*Strong Government and Bad Governance*' akan melahirkan 'aristokrasi,' yaitu lahirnya kelas penguasa, kelas elite, kelas bangsawan, kelas tinggi yang menikmati porsi kekuasaan dan sumber – sumber kekayaan Negara secara tidak terkendali. Untuk itu rakyat berpotensi untuk berontak dan mampu mengadakan revolusi sosial politik. '*Strong Government and Good Governance*' akan melahirkan 'demokrasi', yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

2.7 KESIMPULAN

Pemikiran tentang Negara adalah upaya untuk memahami proses dan realitas kekuasaan yang ada didalamnya. Kekuasaan adalah hakekat utama kenegaraan dan pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh terhadap kekuasaan yang dikelolanya. Kepada siapa pemerintah perlu mempertanggung jawabkan kekuasaannya ? Pertanyaan ini terjawab dalam tulisan disertasi penulis, yaitu kepada rakyat yang mempercayai demokrasi.

¹⁴¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 597.

Tidak dengan sendirinya ada demokrasi, diperlukan pilihan dan memperjuangkan untuk dapat mempertahankan pilihannya. Mengapa memilih demokrasi dibandingkan dengan otokrasi, karena demokrasi adalah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat, sedangkan otokrasi adalah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan golongannya sendiri.

Desentralisasi akan menciptakan otonomi daerah, yang memberi peluang untuk ikut mewujudkan tujuan Negara dan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan Negara. Desentralisasi akan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, mewujudkan demokrasi dan *civil society*. Sentralisasi akan menciptakan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, kebijakan dan keputusan dibuat oleh Pusat tanpa melibatkan daerah yang menjadi bagian dari kebijakan dan keputusan tersebut.

Strong Government and bad governance akan menciptakan penderitaan rakyat karena yang diuntungkan adalah kaum elite, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menjadi sewenang – wenang dan hanya memperkaya dirinya sendiri sedangkan *Strong Government and good governance* membawa kesejahteraan rakyat karena pemerintah lebih mengutamakan aspek *civil society* daripada *rude society*.

BAB III

PERUBAHAN PARADIGMA ILMU PEMERINTAHAN

3.1 PENGANTAR

Perkembangan dan perubahan paradigma dimulai dari awal abad keduapuluh yang dimulai dengan positivisme kemudian muncul pragmatisme dan kritisisme. Perubahan terjadi sebagai kritik terhadap ilmu pengetahuan dan bertujuan agar ilmu pengetahuan dapat lebih memahami dan menjelaskan realitas dengan derajat kebenaran yang lebih tinggi. Berpikir secara filsafat adalah upaya untuk mencari jawaban (*problem solving*) atas berbagai masalah di dunia realitas melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan kemudian dibahas serta dijawab berdasarkan penalaran yang sistematis kritis, radikal, refleksif dan substantif.

Kebenaran universal adalah satu – satunya kebenaran yang diklaim sebagai yang mutlak benar oleh positivisme, menurut Habermas kebenaran didominasi oleh kekuasaan yang disembunyikan oleh atas nama ilmu pengetahuan. Pluralisme memberikan peluang adanya kebenaran yang lain, berbeda dan tidak sama. Proses revolusi ilmiah dari Thomas Kuhn, adalah contoh terjadinya perubahan paradigma ilmu pengetahuan. Semakin ilmu pengetahuan mengalami krisis dan ketidakpastian, maka terjadi perubahan dan teori baru muncul sebagai pengganti teori lama.

Paradigma positivisme yang dianggap sebagai suatu kebenaran universal, oleh Habermas dianggap sebagai tindakan instrumental saja yang tujuannya adalah semata - mata untuk menguasai objek dari ilmu pengetahuan, perlu diganti dengan paradigma komunikasi dengan tujuan untuk menciptakan

pemahaman dan tujuan bersama berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama. Tidak ada lagi bentuk dominasi yang ada yaitu, kesetaraan dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang berkontribusi untuk mewujudkan keselamatan umat manusia, kesejahteraan dan *civil society*, dan tindakan instrumental justru akan menjadikan masyarakat hanya sebagai sarana produksi atau ‘paradigma produksi’. Perubahan paradigma Ilmu Pemerintahan adalah inti dari penulisan disertasi Epistemologi Ilmu Pemerintahan yaitu untuk mengubah paradigma kekuasaannya dengan paradigma komunikasi dengan tujuan agar cita-cita bersama dalam mewujudkan *civil society*, dapat terwujud.

Sebagai sebuah Negara kebangsaan, kita berada ditengah – tengah dunia. Hidup berdampingan secara damai dalam arus globalisasi tanpa kehilangan identitas sebagai sebuah Negara kebangsaan tetap relevant. Diperlukan kesatuan ekonomi dunia, pemerintahan yang kuat (*strong government and good governance*), kawasan yang kuat, alat bayar internasional, komunikasi media internasional, transportasi dan lain – lain semua menjadi kebutuhan pokok untuk kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Ilmu Pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk dapat berpartisipasi dalam kepentingan umat manusia.

3.2 MODERNISME KE POSTMODERNISME

Modernisme berasal dari kata “*modern*” dengan akhiran “*isme*” yaitu rangkaian kata “*modern*” dan “*isme*” yang berasal dari kata Inggris “*-ism*” dan bermakna sebagai pandangan, paham atau prinsip – prinsip yang dianut oleh sebagian orang. “*Ism*”, digunakan untuk menunjukkan kepada seperangkat idea –

idea, gagasan – gagasan, sistem keyakinan atau sistem perilaku” tentang apa yang dinamakan dengan kata “*modern.*”¹⁴³ “*Modern,*” memiliki arti baru dan dimaksudkan untuk berbeda dalam gaya, cara – cara menunjukkan dan dalam hal pemikiran.¹⁴⁴

Kata modernisme yang juga berasal dari kata Inggris, “*modernism*” dapat disimpulkan sebagai “gagasan – gagasan, metode – metode, atau suatu gaya dan gerakan dalam seni, arsitektur dan bacaan populer di abad pertengahan dan sampai abad ke dua puluh dalam hal mana gagasan – gagasan modern, metode – metode dan bahan – bahan lebih banyak digunakan dibandingkan dengan yang tradisional.” Pengertian etimologis diperlukan sebagai upaya untuk memahami kata dan makna dasar yang ada dalam kata modernisme tersebut.

Yang dimaksud dengan “modernisme” di bidang filsafat adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasi oleh Descartes, dikokohkan oleh gerakan Pencerahan (*Enlightenment/Aufklärung*), dan mengabadikan dirinya hingga abad kedua puluh ini melalui dominasi sains dan kapitalisme.¹⁴⁵

Modernisme adalah gerakan pemikiran yang diawali oleh Descartes sampai dengan Kant, yaitu tahun 1630 – 1790. Pemikiran – pemikiran yang ditulis dalam beberapa bukunya menjadi sumber inspirasi dari gerakan modernisme dalam berfilsafat dan pengembangan ilmu pengetahuan. “*Rules for the Direction of the Mind*”, ditulis pada tahun 1628, “*Meditations on First*

¹⁴³ - *ism*, used to refer to a set of ideas or system of beliefs or behaviour. AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 823.

¹⁴⁴ Modern, new and intended to be different from traditional styles, of ways of behaving, thinking. AS Hornby, *Ibid.*, pages 984.

¹⁴⁵ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 29.

Philosophy”, “*The Physical Universe*”, “*The World or Treatise on Light*”, “*The Discourse on Method*”, hal tersebut diikuti oleh “*Meditations on First Philosophy*” (1641), “*Principles of Philosophy*” (1644), “*The Passions of the Soul*” (1649).¹⁴⁶

Beberapa karya tulis yang dibuat sepanjang hidup Descartes di atas, merintis pandangan – pandangan baru terhadap metodologi ilmu pengetahuan juga pandangan tentang pusat alam semesta yang pada jamannya oleh gereja dipercayai ada di bumi (*geocentris*) hal ini dibantah oleh Galileo sebagai pendukung Nicolaus Copernicus tentang “*Copernican System or Copernican Principle*,” yang ditulis pada tahun 1543 dengan judul “*On the Revolution of the Celestial Spheres*” bahkan Descartes ikut mendukung Galileo yang membuktikan bahwa pusat alam semesta ada di matahari (*heliocentris*).

Pemikiran Descartes sebagai landasan dari filsafat modern, adalah bertentangan dengan prinsip, ajaran dan tradisi yang diyakini kebenarannya baik oleh ilmuwan maupun gereja pada jamannya sebagai tempat di mana skolastik timbul¹⁴⁷ dan berakhir dengan munculnya filsafat modern. Filsafat skolastik memandang Tuhan sebagai pusat dari segala – galanya karena Tuhan adalah pencipta, maka dengan beriman kepada Tuhan manusia akan dapat memahami akan ciptaannya dan semua realitas yang ada.

¹⁴⁶ James Collins, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 4th printing with bibliographical continuation 1961, pages 139.

¹⁴⁷ Skolastik = scholasticism, 1. The system of logic, philosophy, and theology of medieval university scholars, or schoolmen, from the 10th to the 15th century, based upon Aristotelian logic, the writings of the early Christian fathers, and the authority of tradition and dogma. 2. Insistence upon traditional doctrines and methods. Michael Agnes (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Inc., Canada, fourth edition 2004, pages 1282. Skolastik dari Johannes Scotus Eriugena, (± 810 – 870), pemikiran filsafatnya berdasarkan keyakinan Kristiani. Oleh karena itu segala penelitiannya dimulai dari iman, sedang wahyu ilahi dipandang sebagai sumber bahan – bahan filsafatnya. Menurut dia, akal bertugas mengungkapkan arti yang sebenarnya dari bahan – bahan filsafat yang digalinya dari wahyu ilahi itu. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kedelapan 1992, hal. 89.

Filsafat modern dengan tokoh Descartes menolak prinsip dan ajaran tersebut dan memiliki titik tolak yang berbeda untuk memahami dan menemukan hakekat yang sebenarnya ada dalam realitas. Kedudukan Tuhan sebagai pusat digantikan oleh manusia, karena ilmu pengetahuan dan kebenarannya diciptakan oleh manusia dan bukan diberikan Tuhan. Ini adalah suatu lompatan besar pada zamannya, terjadi perubahan paradigma, keyakinan dan sikap dari skolastik menjadi mekanistik.

René Descartes (1596 – 1650) yang menjadi pernyataan sempurna kepada tanda perubahan ini. Descartes terutama sekali adalah seorang “*mechanist*.” Meskipun dia mengakui adanya dua tingkat tentang keberadaan, pikiran dan persoalan, keseluruhan realitas yang non mental dapat dikurangi, dia berfikir, berdasarkan konsep murni mekanik (posisi, gerakan, dorongan tiba – tiba), dan setiap kejadian dapat dijelaskan melalui perhitungan, hukum – hukum mekanik. Pada waktu bersamaan dia adalah seorang “*subjectivist*” – kepadanya pemikiran adalah sumber data utama dan menjadi titik tolak yang pasti dari filsafat. Lebih lanjut dia adalah seorang “*nominalist*” yang adanya berupa tanggapan inderawi untuk hal – hal yang bersifat individual, sedangkan untuk tanggapan intelektual menjadi tidak mungkin. Akhirnya, Descartes diakui sebagai seorang yang berhadapan dengan logika formal.¹⁴⁸

Pemikiran René Descartes adalah merubah paradigma skolastik yang berlangsung dari abad ke XII – XIV dan memberi landasan filosofis yang baru terhadap pemahaman realitas. Descartes memiliki beberapa predikat yang diberikan oleh para filsuf, karena pemikiran – pemikirannya yang membangun

¹⁴⁸ *It is René Descartes (1596 – 1650) who brings to perfect expression this signal change. Descartes is above all a mechanist. Although he recognizes two levels of being, mind and matter, the whole of nonmental reality can be reduced, he thinks, to purely mechanical concepts (position, motion, impulse), and every occurrence can be explained by calculable, mechanical laws. At the same time he is a subjectivist – to him thought is the prime datum and the inevitable starting point of philosophy. Furthermore he is a nominalist – there is only sense perception of individual things, intellectual intuition being impossible. Finally, Descartes is an avowed opponent of formal logic.*

I. M. Bochenski, *Op.Cit.*, pages 2.

pemahaman akan kelebihan cara berpikir Descartes dibandingkan dengan cara – cara berpikir skolastik. Descartes adalah seorang “*mechanist*,” artinya setiap realitas dan perubahannya dapat dipahami dengan adanya perhitungan dan hukum – hukum mekanik melalui posisi, gerakan dan dorongan tiba – tiba untuk melakukan sesuatu tanpa direncanakan terlebih dahulu. Kata “*mechanist*” berhubungan dengan kata “*mechanic*” untuk kata “*mechanist*” adalah orang yang melakukan fungsi dari “*mechanic*,” yaitu : suatu proses, sistem, atau kegiatan yang merupakan cara hal tersebut bekerja atau bagaimana hal tersebut selesai dikerjakan. Kata “*mechanic*” juga sama dengan “*mechanics*,” yaitu :

1. Cabang dari fisika yang berhubungan dengan gerakan dari materi yang ada di tubuh dan fenomena tindakan kekuatan terhadap tubuh : Statis, Dinamis, Kinematis (cabang dari mekanik yang berhubungan dengan gerakan secara abstrak, tanpa ada acuan untuk kekuatan atau massa).
2. Pengetahuan teoritis dan praktis yang menyangkut ‘*design, construction, operation, and care*’ tentang mesin.¹⁴⁹

Salah satu dasar dalam pemikiran filsafat modern adalah berpikir secara mekanistik, yaitu semua kejadian dapat dipahami dan mengikuti proses mekanik dengan hukum – hukum mekanik dan pengukuran. Kejadian alam maupun sosial melalui hukum – hukum mekanik dapat dijelaskan dan diberikan satuan – satuan ukuran tertentu yang sama dengan ilmu pasti untuk memperoleh jawaban yang pasti.

Predikat yang kedua untuk Descartes, adalah “subjektif” yaitu pemikiran menjadi sumber data primair dan menjadi titik tolak utama dalam kegiatan berfilsafat. Dalam posisi ini Descartes adalah seorang yang rasionalis, artinya : ia melakukan pendekatan filsafat dengan menekankan akal sebagai

¹⁴⁹ Michael Agnes (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Inc., Canada, fourth edition 2004, pages 892.

sumber utama bagi pengetahuan, lebih dahulu atau lebih unggul, dan lepas dari pandangan – pandangan (bebas), dan akal memberikan tanggapannya terhadap pancaindera.

Perenungan – perenungan yang diberikan oleh René Descartes selanjutnya meyakinkan para filsuf bahwa dunia yang kelihatan ini telah menyediakan bagi kita premis – premis untuk dibuat kesimpulan mengenai apa yang dirasakan dalam kenyataan (pikiran – dunia bebas dari hal – hal yang ada di dalam dirinya sendiri). Kita harus berpikir dengan sepenuhnya dan hati – hati kepada dunia luar dari kepastian – kepastian yang ada di dalam diri sendiri.¹⁵⁰

Descartes memberikan ciri kuat dalam filsafat modern mengenai peranan akal sebagai sumber utama bagi terbentuknya pengetahuan. Kepercayaan dan peranan yang diberikan kepada akal, menjadikannya seorang tokoh “*rationalists*” dan meruntuhkan peranan Tuhan sebagai pusat dari pengetahuan tentang realitas. Akal menggantikan peranan Tuhan sebagai pusat dari pengetahuan dan melalui akal manusia dapat menembus dan melampaui realitas. Dunia pemahaman adalah dunia akal dan melalui akal yang dipercaya sebagai sumber utama bagi data – data primair untuk kemudian mengambil premis – premis yang sudah ada dan tersedia dari dunia yang kelihatan, hubungan antara data primair di akal dan premis – premis adalah hubungan proses penalaran “*reasoning*” yang menghasilkan kesimpulan atau sebagai bentuk keputusan yang baru. “Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah : apakah proses penalaran (dari

¹⁵⁰ René Descartes’s meditations further persuaded philosophers that this world of appearances provides our only available premises for conclusions about noumenal reality (the mind-independent realm of things in themselves). We must excogitate the external world from inner certainties.

Roy Sorensen, *A Brief History of the Paradox*, Oxford University Press, Oxford – New York, 2003, pages 297.

premis – premis ke kesimpulan) dalam suatu argument tertentu tepat atau tidak, lurus atau tidak? Bila ternyata proses penalarannya tepat, maka kesimpulan yang dihasilkan pasti tepat juga. Dalam logika formal, argumen semacam itu disebut argumen yang sah (*valid*).”¹⁵¹

Descartes sebagai “subjektif” juga mengandalkan peranan dari logika formal sebagaimana yang telah dikembangkan oleh filsuf pendahulunya yaitu Aristoteles. Melalui logika formal; kesimpulan yang diperoleh akan dapat memahami realitas dan kebenaran yang ada di dalamnya.

Descartes berupaya untuk mengatasi persoalan – persoalan ini melalui anggapan bahwa kita memiliki idea – idea bawaan dari lahir, dan hukum – hukum tentang pemikiran serta hukum – hukum tentang keberadaan yang berjalan secara lengkap dan bersamaan. Ungkapannya yang terkenal “*cogito*” memberikan kepadanya jaminan untuk dapat masuk ke dalam realitas. Akal adalah pikiran yang dipergunakan sebagai pengaruh atas persoalan. Sekelompok pemikir, dengan nama yang kurang tepat “*rationalist*” menyetujui teori tentang idea – idea bawaan, diantaranya adalah Baruch Spinoza (1632 – 1677), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), dan Christian Wolff (1679 – 1754).¹⁵²

Pemikiran Descartes sebagai “subjektif” meyakinkan para filsuf lain untuk bergabung dan mengembangkan apa yang telah dirintisnya untuk ikut memberi aliran yang deras terhadap perkembangan filsafat modern. Rasionalisme adalah salah satu upaya filsafat untuk memahami realitas dan menemukan kebenarannya. Menguatnya aliran tersebut menimbulkan tandingan dari aliran

¹⁵¹ Y.P. Hayon, *Logika*, ISTN, Jakarta, cetakan kedua 2001, hal. 10.

¹⁵² *Descartes himself attempted to solve these problems by assuming that we have innate ideas, and that the laws of thought and of being run completely parallel. His famous “cogito” guaranteed him access to reality. Mind was thought to exert a causal influence upon matter. A group of thinkers, misnamed rationalists, adopted his theory of innate ideas, among them Baruch Spinoza (1632 – 1677), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), and Christian Wolff (1679 – 1754).* I. M. Bochenski, *Op. Cit.*, pages 3.

lain “empirisme” yang juga merupakan upaya filsafat untuk memahami realitas dan menemukan kebenarannya.

Predikat ketiga untuk Descartes adalah “nominalis” yaitu hanya ada tanggapan indrawi dari hal – hal yang bersifat individual, tanggapan intelektual secara intuisi menjadi tidak mungkin. Ini bertentangan dengan predikat yang kedua sebagai “subjektif.” Sebagai seorang “nominalis” yang utama adalah hasil dari pengamatan pancaindera sebagai upaya untuk memahami realitas dan kebenarannya. Descartes sebagai seorang filsuf sejati mencari dan memadukan semua pemikiran untuk dapat masuk ke dalam realitas dan menemukan kebenarannya.

Descartes yang percaya kepada hukum – hukum dan pengukuran mekanik, percaya kepada akal sebagai sumber data utama, dan juga mempercayai pancaindera sebagai alat untuk melihat dunia realitas menggabungkan semuanya menjadi prosedur dari ilmu alam dan matematika. Kepercayaannya dan sekaligus keyakinannya memberi sumbangan yang besar bagi perkembangan filsafat terutama pada era tahun 1600 – 1900 dan dinamakan jaman modern atau filsafat modern.

Tokoh berikutnya dari filsafat modern dan sekaligus menjadi penggagas dari empirisme adalah John Locke (1632 – 1714), dengan beberapa karya tulis besar yang memperkuat aliran modernisme dalam berfilsafat. Tulisan pertamanya, “*Essay on Toleration*” dan bukunya yang paling berpengaruh dalam kehidupan berpolitik, adalah : “*Two Treatises of Civil Government*” ditulis pada tahun 1690 yang tidak diterbitkan sampai 40 (empat puluh) tahun sesudah terbitnya “*Leviathan*” dan merupakan jawaban yang keras terhadap sejumlah gagasan yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. “*Thoughts Concerning*

Education”, adalah pemikiran – pemikiran Locke yang ada hubungan dengan anak cucunya. Cucunya memperoleh manfaat langsung dari kearifan Locke dan menjadi orang yang baik dan sekaligus penentang dari ajaran – ajaran yang angkuh. “*Essay Concerning Human Understanding*” karya tulisnya yang dikerjakan selama 20 (dua puluh) tahun mengenai pentingnya sumber pengetahuan. John Locke mengatakan bahwa pikiran itu mendapatkan semua bahan – bahan akal dan pengetahuan melalui “pengalaman”.¹⁵³

Leslie Paul dalam bukunya dengan judul “*The English Philosophers*” menulis tentang John Locke dengan judul bab “*The Founder of Empiricism*” adalah sebagai suatu gagasan untuk dapat memahami realitas dengan lebih baik dan sekaligus sebagai kritik terhadap rasionalisme dari Descartes. Idea yang dikemukakan oleh pemikiran John Locke bahwa media pengetahuan hanya ada 2 (dua), yaitu melalui sensasi dan refleksi. Sensasi adalah :

1. Suatu perasaan yang diperoleh bila sesuatu memengaruhi tubuh kita.
2. Kemampuan untuk merasakan melalui indera peraba.
3. Suatu perasaan umum atau kesan yang sulit untuk dapat dijelaskan; suatu pengalaman atau suatu ingatan.
4. Keheranan yang sangat besar, menyenangkan, atau kepentingan diantara orang banyak; orang

¹⁵³ *Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, from EXPERIENCE. In that all our knowledge is founded; and from that it ultimately derives itself. Our observation, employed either about external sensible objects, or about the internal operations of our minds perceived and reflected on by ourselves, is that which supplies our understandings with all the materials of thinking.”*

On the one hand the mind perceives the sensations it receives from the external world, and from the body: on the other hand certain purely mental processes go on like thinking, doubting, imagining, reasoning. However, all forms of perception are in truth but two – Sensation, and Reflection. Leslie Paul, The English Philosophers, Faber and Faber, London, 1952, pages 116 – 117.

atau sesuatu yang menyebabkan timbulnya keheranan.¹⁵⁴

Refleksi adalah : *“The process of calm reconsideration, which may lead to a better view of things”*¹⁵⁵ yang artinya adalah proses pertimbangan kembali secara tenang, yang dapat membawa kepada pandangan yang lebih baik mengenai sesuatu. Baik sensasi ataupun refleksi merupakan proses interaksi antara pikiran dan pengalaman. Sensasi adalah hubungan antara pikiran dengan apa yang diterima tubuh dari dunia luar, sedangkan refleksi adalah hubungan pikiran dengan panca indera yang menangkap objeknya terdahulu untuk kemudian diolah kembali dalam pikiran. Jadi kedua media pengetahuan tersebut adalah landasan dari empirisme.

Tokoh ketiga dan terbesar dalam sejarah filsafat modern adalah Immanuel Kant yang lahir di Königsberg sebuah kota kecil di Prusia Timur pada tahun 1724. Beberapa karya tulis yang dihasilkannya semasa hidupnya antara tahun 1724 – 1804, antara lain : *“His Thoughts on the True Estimation of Living Forces”* (1747) dan *“General Natural History and Theory of the Heavens “* (1755) yang menunjukkan kemampuannya untuk memperlakukan masing – masing dengan memperhitungkan kekuatan pada tubuh dalam gerakan dan dengan penciptaan awal dari alam semesta kita.

Kant menerima yang setara dengan sarjana atas suatu risalah ilmiah atas api, dan diakui sebagai dosen pribadi atau pengajar di Universitas Königsberg setelah menyampaikan sebuah tulisan dengan judul, *“A New Exposition of the First Principles of Metaphysical Knowledge”* (1755). Pendapat

¹⁵⁴ AS Hornby, *Oxford Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 1381.

¹⁵⁵ Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada – USA, 1991, pages 198.

yang dipertahankannya dengan hebat dalam tulisannya yang memperoleh penghargaan, yaitu : “*An Inquiry into the Distinctness of the Fundamental Principles of Natural Theology and Morals* “ (1764), dan konsekuensi – konsekuensinya yang skeptis untuk metafisika yang untuk sementara diselidikinya dalam “*Dreams of a Spirit Seer Illustrated by the Dreams of Metaphysics*” (1766). Perbedaan dasar, bersama – sama dengan doktrin konsekuensi dari alam yang ideal dengan bentuk – bentuk ruang dan waktu dan pembatasannya terhadap fenomena melalui inti dari tulisan Kant yang berjudul, “*Dissertation on the Form and Principles of the Sensible and Intelligible World* (1770). Buku berikutnya adalah tentang kritik, “*Critique of Pure Reason* (edisi pertama atau edisi A, 1781; edisi kedua atau edisi B, 1787). Karena adanya beberapa salah pengertian mengenai hubungan dia dengan idealisme dan hal – hal lain yang berhubungan dengan kritik pertama, Kant menerbitkan “*Prolegomena to Any Future Metaphysics*” (1783), sebagai sebuah pengantar terhadap pendirian kritis bagi para guru filsafat.

Suatu bagan tentang posisi moral yang ditulisnya dalam “*Foundations of the Metaphysics of Morals*” (1785) yang kemudian diikuti dengan tulisannya tentang etika “*Critique of Practical Reason*” (1788). Kritik triloginya dilengkapi dengan “*Critique of Judgment*” (1790), sebagai studi tentang faktor – faktor estetika dan tujuannya dalam alam. Satu – satunya karya tulis Kant yang membawa dirinya berada dalam konflik dengan penguasa sipil adalah “*Religion within the Limits of Reason Alone*” (1793). Karya tulis lain di tahun – tahun terakhir dalam kehidupannya mengenai uraian tentang politik, adalah : “*Perpetual Peace*” (1795) dan catatan – catatan terakhir yang memperlihatkan

perjuangan antara pikiran dan usia tuanya, yang kemudian hari diterbitkan sebagai "*Opus Postumum*" (1920, 1938).

Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode jaman pra – kritis dan jaman kritis. Dalam jaman pra – kritis ia menganut pendirian rasionalistis yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan – kawannya. Tetapi karena dipengaruhi oleh Hume, berangsur – angsur Kant meninggalkan rasionalisme. Ia sendiri mengatakan bahwa Hume-lah yang membangunkan dia dari tidur dogmatismenya.¹⁵⁶

Rasionalisme yang dianggap sebagai metode pemahaman yang lebih baik dari skolastik mengalami kritik yang tajam. Pada masa skolastik posisi Tuhan sebagai pusat dari pemahaman manusia terhadap realitas digantikan oleh akal manusia yang melakukan upaya pemahaman dengan menggunakan hukum – hukum pemikiran dan logika formal. Masa skolastik berakhir dan timbullah rasionalisme yang dianggap sebagai metode pemikiran filsafat yang dapat dibuktikan secara logika, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Rasionalisme kemudian berubah menjadi dogmatisme, dan untuk melawan dogmatisme timbullah kritisisme yang intinya adalah untuk menyelidiki kemampuan dan batas – batas rasio itu sendiri. Kant sering menempatkan perkembangan filsafat ke dalam tiga (3) tahap : *dogmatism*, *skepticism* dan *criticism*.¹⁵⁷

Jasa Kant dalam filsafat modern adalah mensintesakan dua (2) aliran besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kritik filsafatnya adalah proses yang

¹⁵⁶ Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan ke sepuluh 1992, hal. 59.

¹⁵⁷ *Kant often reduced philosophical development to three stages: dogmatism, skepticism, and criticism. He saw these three phases exemplified not only in the general history of philosophy but also in his own mental evolution. He came to formulate the basic philosophical problems in such a way as to synthesize both the rational and the empirical aspects of his mind. Yet his critical philosophy was not a mere blending, but a radical reconstitution, of the elements provided by the previous century of modern speculation.* James Collins, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 1954, pages 458.

dibangun melalui pergumulan waktu dan pemikiran yang mendalam. Pergumulan tersebut dapat ditelusuri melalui karya – karya tulis dari Kant. Kritik filsafatnya adalah melengkapi pemikiran Descartes maupun dogmatisme yang berpengaruh pada jamannya. Rasionalisme mementingkan unsur – unsur “*a priori*” yaitu : “hal itu dapat diketahui sebagai *a priori* jika hal tersebut dapat diketahui sebelumnya, atau tidak tergantung sama sekali, dari pengalaman inderawi yang berupa fakta di dalam pertanyaan” (*It can be known a priori if it can be known before, or independently of, from sense experience of the fact in question*).¹⁵⁸ Empirisme menekankan unsur – unsur “*a posteriori*” yaitu : hal itu dapat diketahui sebagai *a posteriori* jika hal tersebut dapat diketahui berdasarkan, sesudah, adanya pengalaman inderawi yang berupa fakta (*It can be known a posteriori if it can be known on the basis of, after, sense experience of the fact*).¹⁵⁹

Menurut Kant, unsur *apriori* itu sudah terdapat pada taraf indera. Ia berpendapat bahwa dalam pengenalan inderawi selalu ada dua bentuk *apriori*, yaitu ruang dan waktu. Jadi, ruang tidak merupakan ruang kosong, di mana benda – benda diletakkan; ruang tidak merupakan “ruang pada dirinya” (*ruang an sich*). Dan waktu tidak merupakan suatu arus tetap, di mana penginderaan – penginderaan bisa ditempatkan.¹⁶⁰ Sintesa yang dikemukakan oleh Kant antara unsur *apriori* dan unsur *aposteriori* merupakan metode berpikir komprehensif. Pengenalan terhadap suatu objek dianalisa dalam pemikiran bentuk yang berwujud ruang dan waktu. Pemikiran bentuk sudah menjadi bawaan pada indera, sedangkan materi yang mengisi ruang dan waktu adalah unsur *aposteriori*. Hasil pemikiran sintesa adalah pengenalan terhadap objek merupakan bawaan indera dan proses identifikasi materi yang mengisi ruang serta waktu menggunakan akal

¹⁵⁸ Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada, 1991, pages 14.

¹⁵⁹ *Ibid.*, pages 14.

¹⁶⁰ Kees Bertens, *Op. Cit.*, hal. 60 -61.

pikiran subjek seteliti mungkin untuk mendapatkan pengenalan yang jelas dan hakiki.

Tokoh modernisme yang terakhir dalam uraian berikut ini adalah Auguste Comte yang lahir di Montpellier Perancis pada tahun 1798. Dia adalah tokoh Positivisme dalam filsafat modern yang berpengaruh dalam perkembangan metodologi dan ilmu pengetahuan. Beberapa karya tulisnya yang menjadi sumber dari pengaruh positivismenya, antara lain : *"Course of Positive Philosophy"* diterbitkan dalam enam (6) jilid antara tahun (1830 – 1842), atas dasar pembagian yang dilakukannya terhadap ilmu pengetahuan. Untuk beberapa tahun, dia menunjang kehidupannya sendiri dengan memberikan bimbingan dan menguji mahasiswa sekolah politeknik. Buku berikutnya *"Discourse on the Positive Spirit"* (1844) dia meringkaskan garis – garis utama dari filsafatnya dalam bentuk yang singkat dan populer, menekankan pentingnya ilmu baru dalam sosiologi. *"Discourse on the Positivist Outlook"* (1848) menekankan puncak perkembangan dari positivisme, tidak saja dalam sosiologi, tetapi juga dalam suatu pelayanan praktis kemanusiaan. *"Positivist Catechism"* juga tersedia di tahun 1852, sehingga orang yang beriman memiliki ringkasan sejarah kemanusiaan dan suatu bimbingan menghadapi perkembangan masa depannya. Pernyataan yang paling lengkap dari bagian yang terakhir ini dalam pemikiran Comte adalah dari empat (4) jilid dengan judul *"System of Positive Polity"* (1851 – 1854), yang mensintesaikan spekulasi dan praktis, keilmiahan dan keagamaan, aspek – aspek dari pemikiran Comte. Menjelang kematiannya (1857), Comte diminta untuk menulis dengan judul *"Subjective Synthesis"* (Vol. I, 1856) yang maksudnya adalah untuk mencapai kesatuan yang sempurna dari semua ilmu

pengetahuan, dengan merujuk kepadanya untuk kepuasan dari kebutuhan dasar manusia yang normal.

Menurut Auguste Comte kehidupan manusia dibagi dalam tiga (3) tahapan, yaitu : tahapan teologis, tahapan metafisis, dan tahapan ilmiah atau positif.¹⁶¹ Pengertian “positif” adalah “menunjukkan adanya bukti yang jelas bahwa bagian dari hakekat atau keadaan yang berhubungan dengan kedokteran betul – betul ada,” (*showing clear evidence that a particular substance or medical condition is present*).¹⁶² Jadi arti kata positif adalah faktual yaitu adanya bukti yang jelas dan betul – betul ada. Positivisme artinya bahwa pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta – fakta.¹⁶³

Filsafat mengalami masa kemunduran di jaman positivisme, karena direduksi menjadi sama kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan yang empiris. Ilmu – ilmu pengetahuan yang lain berlomba – lomba untuk mencontoh teladan dari ilmu pengetahuan yang empiris serta membuktikan sebatas fakta itu sendiri. Keunggulan positivisme dari Auguste Comte, adalah : objek yang dibahas adalah nyata, memiliki kegunaan, mengutamakan ketepatan, kepastian, bersifat organik artinya terdiri dari beberapa bagian yang keseluruhannya saling berhubungan satu sama lain, relatif yang artinya untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian serta membandingkan dengan yang lain, serta pengetahuan yang menaruh perhatian terhadap persoalan – persoalan yang ada (*sympathetic knowledge*). Positivisme

¹⁶¹ *By the very nature of the human mind, every branch of our knowledge is necessarily obliged to pass successively in its course through three different theoretical states: the theological or fictitious state; the metaphysical or abstract state; finally, the scientific or positive state. ...In other words, the human mind, by its nature, employs successively in each of its investigations three methods of philosophizing, the character of which is essentially different and even radically opposed: first, the theological method, then the metaphysical method, and finally the positive method.* Auguste Comte, *System of Positive Polity*, Cres, Paris, fourth edition, 4 vols., 1912, pages 77.

¹⁶² Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 1173.

¹⁶³ Kees Bertens, *Op.Cit.*, hal. 72.

mengalami masa kejayaan di jaman industrialisasi dan menghasilkan perdamaian, kemajuan dan ketertiban sosial di akhir abad ke 18 dan abad ke 19.

Descartes sampai pada keyakinan yang tak tergoyahkan dan bersifat pasti, yaitu "*je pense donc je suis*" (aku berpikir maka aku ada). Apa yang ditemukannya pada taraf epistemologis adalah peranan mutlak subjek dalam membentuk realitas, maka dalam sejarah epistemologi, filsuf ini telah menggerakkan pendulum dari kutub objek ke subjek.¹⁶⁴

Descartes yang menggerakkan pendulum pada jamannya dari kutub objek ke subjek dengan kesimpulan bahwa subjeklah yang membangun dan menciptakan realitas yang diketahui itu sehingga ada. Posisi Tuhan digantikan seratus persen oleh subjek sebagai penentu akhir dari kebenaran.

Positivisme Comte, kembali menarik pendulum dari subjek ke objek karena pengetahuan indrawi menjadi satu – satunya norma bagi kegiatan pengetahuan. Pendulum ke objek mengalihkan segala – galanya untuk berpihak pada objek, sehingga memunculkan objektivisme yang meminta kepada subjek untuk mengosongkan dirinya karena kebenaran dan realitas ada pada dirinya sendiri sebagai objek dalam realitas. Objektivisme memunculkan krisis epistemologis, karena epistemologis, adalah : teori tentang pengetahuan; yang mempelajari tentang (a) asal mula pengetahuan itu (b) anggapan – anggapan dasar yang ada (c) sifat dasar dari pengetahuannya (d) ruang lingkupnya, dan (e) kejujuran (kebenaran, dapat dipercaya, keabsahan) dari pengetahuan. Proses identifikasi atas setiap pertanyaan epistemologis tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari subjek terhadap objek yang sedang ditelitinya. Padahal objektivisme meminta subjek untuk mengosongkan dirinya, dan menyalin serta

¹⁶⁴ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 52 – 53.

melakukan interaksinya terhadap objek agar jawaban dari setiap pertanyaan tersebut muncul dari objek sendiri serta bukan hasil rekayasa subjek terhadap objek. Inilah yang disebut dengan krisis epistemologis dan berakhirnya epistemologis.

Seiring dengan krisis epistemologis, kritik terhadap modernisme muncul antara tahun 1960 – 1970 dan periode tersebut melahirkan gerakan postmodernisme. Dalam kamus bahasa "*Oxford Advanced Learner's*," kata tersebut dijelaskan sebagai berikut : "suatu gaya dan gerakan dalam seni, arsitektur, kepustakaan, dan lain – lain di akhir abad ke 20 yang bereaksi terhadap gaya – gaya modern, sebagai contoh dengan mencampurkan ciri – ciri dari gaya tradisional dan modern" (*a style and movement in art, architecture, literature, etc. in the late 20th century that reacts against modern styles, for example by mixing features from traditional and modern styles*).¹⁶⁵

Hakikat dari postmodernisme adalah reaksi terhadap semua hal yang berpredikat modern. Reaksi muncul dari ketidakpuasan terhadap pemikiran, praktek, dan situasi yang ada. Reaksi melihat ada potensi untuk lebih baik lagi jika dikritik dan dirubah dan perubahan itu adalah mekanisme pokok dalam proses modernisasi. Perubahan demi perubahan dapat terus menerus terjadi sebagai upaya untuk kesempurnaan dalam pemahaman terhadap realitas yang ada dan bermakna. Semakin kita paham akan realitas semakin mendekati kesempurnaanlah pengetahuan yang kita bangun dan kembangkan dan itu berarti bahwa pengetahuan menjadi semakin maju. Inti dari perubahan adalah semakin jelas dan paham manusia terhadap realitas – realitas yang ada, baik secara fisik maupun metafisika.

¹⁶⁵ AS Hornby, *Op.Cit.*, pages 1176.

Inti dari pemahaman Lyotard, bahwa postmodern adalah bagian dari modern, dan postmodern adalah keadaan yang barusan lahir (*modo*) dan akan terus berulang sesuai dengan reaksi yang diberikan terhadap sesuatu untuk diperbaiki menjadi lebih baik dan modern. Perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat dari generasi ke generasi, intinya postmodernisme bukanlah modernisme dalam bentuk akhir, tetapi ia barusan saja lahir untuk menjadi modern kembali. “Hal ini dapat diterima, kata “*post*” dari “*postmodernity*” bukanlah berarti suatu proses untuk kembali lagi atau kilas balik, umpan balik, tetapi *ana – lysing* yang berarti : 1. memisahkan (sesuatu, idea, dan lain – lain) ke dalam bagian – bagiannya dengan demikian untuk menemukan sifat – sifat dasarnya, ukurannya, fungsi – fungsinya, hubungan timbal balik, dan lain – lain. 2. Untuk diuji secara rinci dengan demikian dapat ditentukan sifat atau kecenderungannya. 3. Untuk dilakukan analisa kejiwaan.¹⁶⁶ Kemudian *ana – mnesing*, yang artinya mengingat kembali kejadian – kejadian masa lalu, dan melakukan *reflecting* yang artinya adalah proses untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang, serta dapat membawa kepada suatu pandangan yang lebih baik lagi mengenai sesuatu” (*Defining The Postmodern, Jean François Lyotard*).¹⁶⁷ Inilah pengertian yang terkandung dalam “*postmodernity*” untuk dirubah dan lahir kembali serta dilakukan tahapan “*ana – lysing*” dan tahapan “*ana – mnesing.*”

Pendapat Lyotard tentang postmodernisme adalah sebagai proses yang tidak pernah berhenti untuk mencari kebaruan, eksperimentasi, dan revolusi

¹⁶⁶ Michael Agnes (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Inc., Canada, fourth edition 2004, pages 50.

¹⁶⁷ Lisa Appignanesi (edited by), *Postmodernism*, Free Association Books, London, 1989, pages 10.

kehidupan terus menerus.¹⁶⁸ Postmodernisme bukanlah akhir dari modern, tetapi baru saja mulai berubah untuk kemudian menjadi modern kembali dan tidak pernah meninggalkan modernisme, karena postmodernisme adalah bagian dari modernisme. Hakekat postmodernisme adalah memayungi segala bentuk kritik atas modernisme, dan segala bentuk refleksi kritis atas paradigma – paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya.

Gerakan postmodernisme yang hendak merevisi paradigma modern barangkali bisa dimasukkan ke dalam 3 kategori, namun kategori ini tidak bisa dilihat secara ketat.

- (1) adalah pemikiran – pemikiran yang dalam rangka merevisi kemodernan itu cenderung kembali ke pola berpikir pramodern.
- (2) adalah pemikiran – pemikiran yang terkait erat pada dunia sastra dan banyak berurusan dengan persoalan linguistik. Kata kunci yang populer untuk kelompok ini adalah “dekonstruksi”.
- (3) adalah segala pemikiran yang hendak merevisi modernisme, tidak dengan menolak modernisme itu secara total, melainkan dengan memperbaharui premis – premis modern di sana – sini saja.¹⁶⁹

Ke 3 kategori pemikiran tentang postmodernisme mempunyai objek yang sama yaitu modernisme. Ke 3 kategori pemikiran tersebut melakukan refleksi kritis terhadap paradigma – paradigma modern. Jika modernisme menjadi objek dari pemikiran refleksi kritis, maka modernitas sebagai objek bermakna : untuk memberi sesuatu sebagai sebuah alasan untuk dapat dipertentangkan (*to give something as a reason for opposing something*).¹⁷⁰ Pemberian dari modernitas itu dapat berupa hal – hal yang positif tetapi juga hal – hal yang negatif. Arus utama (*the mainstream*) dari pemikiran postmodernisme adalah kecenderungan untuk mempertahankan hal – hal yang positif dari modernisme

¹⁶⁸ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 27 – 28.

¹⁶⁹ I. Bambang Sugiharto, *Ibid.*, hal. 30 – 31.

¹⁷⁰ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 1045.

dan hal – hal yang negatifnya untuk dikritik dan diperbaiki agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Timbulnya postmodernisme dikarenakan adanya totaliterisme dari paradigma modernisme, yaitu hanya ada satu idea, prinsip dalam penerapan paradigma modernisme (*totalitarianism, is the ideas, principles, and practices of totalitarian¹⁷¹ political systems*).¹⁷²

Kalau kita mengikuti program Teori Kritis Habermas, kita akan menemukan bahwa menurut filsuf ini, modernitas yang kita alami sekarang ini adalah *suatu modernitas yang terdistorsi*. Kapitalisme membuat modernitas berciri patologis,¹⁷³ karena terjadi erosi makna, alienasi, psikopatologi, dst.¹⁷⁴ Istilah Habermas untuk totalitarianisme dalam modernitas adalah “suatu modernitas yang terdistorsi” karena hanya berlaku paradigma tunggal, yaitu “rasionalitas tujuan” atau “modernitas kapitalis” yang berciri patologis, yaitu masyarakat yang perilaku dan mentalnya bercirikan “*extreme*” dan tidak terkendali, dengan kata lain masyarakatnya sakit. Ini adalah modernitas yang bertujuan untuk memperoleh sebesar – besarnya materi kekayaan sebagai perwujudan dari pandangan hidup moderen. Ini adalah salah satu penyebab dari timbulnya kritik terhadap modernisme.

Adanya hal – hal negatif dalam modernisme berdampak pada timbulnya ketidakpuasan dan kritik – kritik sebagai bibit dari timbulnya

¹⁷¹ A totalitarian political system is one in which there is only one political party which controls everything and does not allow any opposition parties. Totalitarians are people who support totalitarian political ideas and systems. John Sinclair (editor in chief), *English Dictionary for Advanced Learners*, Harper Collins Publishers, Spain, third edition 2001, pages 1653.

¹⁷² *Ibid.*, pages 1653.

¹⁷³ Pathological, you describe a person or their behaviour as pathological when they behave in an extreme and unacceptable way, and have very powerful feelings which they cannot control. *Ibid.*, pages 1129.

¹⁷⁴ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 162.

postmodernisme. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang kritis dan reflektif melihat terjadinya perubahan paradigma dari modernisme ke postmodernisme. Perubahan ini adalah akibat dari adanya hal – hal negatif sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Untuk hal – hal yang positif seperti rasionalitas, pengalaman empiris dan kebebasan selayaknya diakui keunggulannya dalam ilmu pengetahuan dan patut untuk dipertahankan serta disempurnakan lebih baik lagi.

Perubahan paradigma modernisme ke postmodernisme berlaku untuk semua bidang. Perubahan adalah kritik dan perbaikan dari keadaan lama dengan segala kondisinya menjadi keadaan baru sebagaimana yang diharapkan. Paradigma postmodernisme bukanlah akhir dari modernisme, tetapi lahir dari adanya dampak negatif modernisme yang menimbulkan kritik – kritik untuk terjadinya perubahan sebagaimana yang diharapkan. Paradigma postmodernisme adalah bukti terjadinya mekanisme perubahan tersebut dari negatif untuk menjadi positif.

Sejalan dengan itu, Turner mendefinisikan posmodernisme sebagai serangkaian teori tentang perubahan sosial, dan memahami posmodernitas sebagai sebuah perubahan yang berbeda dengan konsep Max Weber tentang modernisasi yang lebih menekankan rasionalitas. Postmodern menekankan lokalitas, perbedaan, kontekstualitas, serta kekhasan yang berbau lokal (Turner, 2002:398).¹⁷⁵

Hal – hal yang negatif adalah objek kritik yang memunculkan postmodernisme, tetapi bukan saja hal – hal negatif, hal – hal yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang lemah, yang berbeda, yang tidak ada, untuk semuanya dirubah dan menjadi positif dalam postmodernisme. Artinya, melalui perubahan

¹⁷⁵ Akhyar Yusuf Lubis, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Akademia, Bogor, 2004, hal. 19 – 20.

yang berbeda pemahaman terhadap realitas sebagai kunci utama dari semuanya akan menjadi lebih utuh, lebih baik, dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan pemikiran modernisme. Postmodernisme diharapkan memberikan makna baru, faktor emosi dan psikis yang diakui ikut berperan dalam segala hal, untuk semuanya dapat memperkaya pemahaman terhadap realitas.

3.3 UNIVERSALISME KE PLURALISME

Universalisme adalah aliran pemikiran yang sudah dirintis oleh Socrates dan Plato dan mencapai puncak perkembangannya pada jaman pertengahan dan awal abad ke 19. Universalisme adalah pandangan atau pemikiran berdasarkan kepada sesuatu yang *universally*,¹⁷⁶ artinya “jika sesuatu diyakini atau diterima sebagai universal, maka hal tersebut diyakini atau diterima oleh setiap orang dengan tidak ada penolakan” atau “jika sesuatu adalah benar secara universal, maka hal tersebut adalah benar di mana saja di dalam dunia atau dalam segala situasi.” Inilah yang menjadi arti dari terminologi universalisme. Universalisme dalam konteks filsafat atau ilmu pengetahuan memiliki konsep pengertian, seperti adanya taraf kepastian dalam ilmu empiris dan ilmu pasti (rasional).

Teori – teori pengetahuan bila didasarkan menurut sifat teoritis dan historis dapat dikelompokkan menjadi dua aliran yang besar, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme meyakini bahwa sejumlah ide atau konsep adalah terlepas dari pengalaman dan bahwa kebenaran itu dapat diketahui hanya dengan nalar. Sementara empirisme berpendapat bahwa semua ide dan konsep berasal

¹⁷⁶ John Sinclair (editor in chief), *Op.Cit.*, pages 1710.

dari pengalaman dan bahwa kebenaran hanya dapat dibangun berdasarkan pengalaman.¹⁷⁷

Taraf kepastian yang dihasilkan oleh masing – masing aliran pemikiran dibangun dari sumber pengetahuan masing – masing. Untuk pengetahuan mutlak yang sama sekali tidak membutuhkan pengalaman, tetapi membutuhkan abstraksi yang mendalam dan kritis untuk menghasilkan pemikiran tentang pengetahuan yang memiliki taraf kepastian. Hasil akhir dari taraf kepastian akan pengetahuan yang dihasilkan diuji berdasarkan kontradiksi yang timbul pada diri sendiri. Semakin ragu dan tidak pasti, maka kontradiksi yang ada dapat menuntun seseorang pada proses refleksi kritis berikutnya untuk memperoleh taraf kepastian yang lebih tinggi lagi.

Sedangkan untuk pengetahuan empiris hasil akhir dari taraf kepastian akan pengetahuan yang dihasilkan diuji berdasarkan pengalaman, semakin terbukti secara empiris pengetahuan tersebut akan memperoleh peningkatan taraf kepastian tetapi semakin tidak terbukti secara empiris maka pengetahuan tersebut akan diragukan dan kehilangan kepastiannya.

Masing – masing aliran pemikiran memiliki keunggulannya, seperti kaum rasional dan empiris yang mengunggulkan sumber pengetahuan sendiri – sendiri. Benar bahwa aliran pemikiran rasional maupun empiris sangat berjasa dalam mencari dan menemukan sumber pengetahuan manusia, dan melalui sumber tersebut pengetahuan dapat berkembang hingga mencapai taraf kepastian hingga sekarang ini.

Sintesis antara kedua paham yang berbeda ini, sesungguhnya sampai tingkat tertentu telah kita temukan pada Aristoteles. Baginya, akal budi hanya

¹⁷⁷ Milton D. Hunnex, *Peta Filsafat* diterjemahkan dari *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*, penerjemah Zubair, Teraju, Jakarta, 2004, hal. 8 – 9.

melakukan abstraksi atas data yang diperoleh melalui pengamatan. Maka, supaya pengetahuan bisa tercapai dibutuhkan baik pengamatan maupun akal budi.¹⁷⁸ Kelebihan masing – masing aliran pemikiran baik rasio dan pengalaman menurut Aristoteles perlu disintesakan untuk mencapai taraf kepastian dalam pengetahuan serta pemahaman yang komprehensif. Aristoteles menyadari akan kelebihan masing – masing tetapi juga sekaligus kekurangannya, sehingga kesimpulan akhir sebagai proposisi tidak akan mencapai kebenaran dan kepastian. Pemikiran Aristoteles yang mendahului jaman yang ada sekarang, sudah dapat melihat bahwa sumber pemikiran atau pengetahuan yang tunggal memiliki resiko lebih tinggi jika dibandingkan sumber pemikiran atau pengetahuan yang majemuk. Semakin banyak sumber yang diperoleh untuk pengetahuan semakin lengkap dan jelas gambaran realitas yang akan dipahami dan dijelaskan. Memahami dan menjelaskan realitas adalah fungsi rasio yang secara abstrak dapat membuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap keadaan ketidakjelasan. Menangkap dan mengetahui realitas adalah fungsi dari indra termasuk kebenaran yang ada pada dirinya sendiri sebagai objek. Kebenaran juga ada pada subjek, dan masing – masing memiliki kelebihannya.

Untuk kebenaran yang ada pada dirinya sendiri, dapat dinamakan sebagai realitas yang berdiri sendiri dan untuk memahaminya diperlukan kerja keras dari upaya empiris agar diperoleh gambaran yang sesuai dengan realitas sebenarnya. Semakin mendekati realitas maka gambaran atau salinan yang diperoleh akan memiliki taraf kepastian. Untuk realitas yang kebenarannya ada pada subjek, dapat dinamakan sebagai realitas ketergantungan, artinya hitam

¹⁷⁸ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 57.

putuhnya realitas amat ditentukan oleh subjek yang mempelajari dan menentukannya.

Pencarian terhadap taraf kepastian dari pengetahuan yang kita miliki, mengalami perjalanan panjang. Baik pada masa modern maupun pada masa peradaban Yunani sebagai cikal bakal dari peradaban barat dan ilmu pengetahuan modern. Proses itu sudah dimulai karena adanya ketidakpastian dan keraguan. Keadaan yang mendesak manusia untuk mengatasinya dengan baik.

Ketidakpastian yang membayangi pengetahuan manusia, mendorong tokoh – tokoh filsafat untuk kembali ke akar dari pengetahuan, yaitu hadirnya subjek dan objek. Keberadaan subjek dan objek memiliki makna dan realitas tersendiri, untuk memahami dan sekaligus menjelaskan hubungan diantara keduanya diperlukan sumber – sumber pengetahuan yang majemuk dalam arti tidak hanya satu sumber pengetahuan yang memberikan kebenaran sebagai otoritas yang mutlak. Kebenaran dibangun dari realitas yang ada, dan realitas yang ada lebih dari satu. Berarti kebenaran pun tidak hanya satu tetapi ada kebenaran yang lain juga.

Pandangan yang dikembangkan oleh Lingkaran Wina¹⁷⁹ disebut neopositivisme, atau kerap juga dinamakan positivisme logis, ataupun empirisme logis. Pandangan mereka amat bervariasi. Secara umum mereka berpendapat bahwa hanya ada satu sumber pengalaman saja, yaitu pengalaman. Yang dimaksud ialah pengalaman yang mengenal data – data inderawi. Selain pengalaman itu, mereka mengakui adanya dalil – dalil logika dan matematika yang tidak dihasilkan lewat pengalaman. Dalil – dalil itu hanya memuat serentetan tautologi – subjek dan predikat – saja, yang berguna untuk mengolah data pengalaman

¹⁷⁹ Lingkaran Wina (dalam bahasa Jerman: Wiener Kreis, atau *Vienna Circle* dalam bahasa Inggris) adalah suatu kelompok yang terdiri dari sarjana – sarjana ilmu – ilmu pasti dan alam di Wina, ibukota Austria. Kelompok ini didirikan oleh Mórítz Schlick pada tahun 1924.

(inderawi) menjadi suatu keseluruhan yang meliputi segala data itu.¹⁸⁰

Lingkaran Wina mengakui adanya kebenaran yang bersumber pada pengalaman tetapi ada kebenaran lain bersumber pada rasio dan kedua sumber kebenaran tersebut dipakai sebagai upaya filsafat ilmu pengetahuan pada abad ke 20 untuk meningkatkan taraf kepastian dan kebenaran dari ilmu pengetahuan. Sedemikian kuatnya upaya untuk meningkatkan taraf kepastian dan kebenaran maka bahasa pengantar yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan pun harus menggunakan bahasa ilmiah yaitu bahasa dan lambang dari cara kerja ilmu – ilmu alam.

Keutamaan dalam ilmu pengetahuan adalah kepastian dan untuk mencapai taraf tersebut, maka ilmu pengetahuan harus menjadi ilmu terpadu dengan menggunakan satu bahasa pengantar yang menggunakan bahasa dan cara kerja ilmu – ilmu alam (*Einheitswissenschaft* atau *unified science*). Merubah keadaan dari tidak pasti untuk menjadi pasti adalah merubah pemikiran dengan mempergunakan bahasa yang bermakna (*meaningful*), filsafat adalah bidang yang tidak pasti dan tidak ada tempat untuk mengukur sebagai proses untuk menghasilkan kepastian. Oleh sebab itu filsafat dianggap sebagai ilmu yang penuh dengan ungkapan emosi dan spekulasi (*emotional use of language*).

Perkembangan demikian menghasilkan ilmu pengetahuan yang terpadu dan seragam baik dalam bahasa, metode dan cara kerja ilmu pengetahuan untuk sampai pada jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan. Ini terjadi untuk meningkatkan taraf kepastian dalam ilmu pengetahuan dan disisi yang lain

¹⁸⁰ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 154.

menyebabkan tersisihkannya ilmu – ilmu kemanusiaan dan juga filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Dari keadaan yang mengutamakan positivisme logis, timbullah ketidakpastian kembali terhadap peran dari ilmu – ilmu empirisme logis atau positivisme logis. Apakah kebenaran hanya diperoleh melalui satu cara yang disebut dengan cara kerja ilmu – ilmu alam? Keraguan dan kritik timbul kembali dari dunia filsafat terhadap peranan dari pandangan yang positivistik maupun yang neopositivistik.

3.4 POSITIVISME KE KRITISISME

Positivisme adalah penjelmaan dari apa yang disebut dengan filsafat kesadaran, yaitu ‘rasio yang berpusat pada subjek’ sebagai bentuk pemikiran yang menempatkan kenyataan, baik masyarakat maupun alam, sebagai objek. Bentuk pemikiran ini dipandang menyembunyikan kekuasaan.¹⁸¹

Pengertian positivisme menyembunyikan kekuasaan, karena rasio yang ada pada subjek sangat menentukan. Segala sesuatu tentang objek diputuskan oleh rasio yang ada pada subjek. Jadi kebenaran amat ditentukan oleh rasio subjektivisme. Kebenaran dari pernyataan – pernyataan observatoris sangat ditentukan oleh adanya pembuktian antara apa yang ada dalam rasio dengan apa yang diobservasi oleh subjek terhadap objeknya (*the correspondence theory of truth*). Ini adalah kebenaran sepihak yang ditentukan oleh kekuasaan subjektivisme. Padahal ada kekuasaan yang lain, yaitu kebenaran dari pernyataan – pernyataan observatoris yang dapat diputuskan melalui intersubjektivitas. Kebenaran intersubjektivitas dapat diperoleh secara luas dan menjadikannya tidak

¹⁸¹ F. Budi Hardiman, *Memuji Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. xiii.

bermasalah. Kebenaran intersubjektivitas adalah kekuasaan lain dan berada di luar subjektivisme.

Pernyataan adalah benar kalau memiliki relasi, meneguhkan dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya (*the coherence theory of truth*). Pernyataan ini tidak perlu dibuktikan langsung atau dicari kesesuaiannya dengan realitas. Pernyataan cukup dibuktikan dengan hubungannya yang memiliki relasi, meneguhkan dan konsisten dengan pernyataan yang lain – lain. Contoh: (1) Semua manusia pasti mati (2) Sokrates adalah manusia (3) Sokrates pasti mati. Pernyataan Sokrates pasti mati adalah kebenaran dan merupakan implikasi logika dari sistem pemikiran yang ada, pernyataan ini tidak ditentukan oleh realitas, Sokrates mati atau tidak.¹⁸² Filsafat kesadaran yang ada pada manusia dalam bentuk rasio tunggal memutuskan kebenaran dari suatu pernyataan secara mutlak.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima awalnya sebagai kebenaran universal, mengalami proses introspeksi untuk dipertimbangkan kembali segala sesuatunya dan dicari pemikiran baru yang lebih baik dan tetap menghormati kebebasan dalam kegiatan atau cara kerja dalam ilmu pengetahuan guna menghasilkan kebenaran yang tidak lagi universal tetapi ada juga kebenaran yang partikular, sehingga kebenaran nampaknya tidak lagi satu tetapi ada kebenaran yang lain.

Realitas kebenaran yang ada ternyata lebih dari satu dan keadaan ini merubah pandangan dari semula kebenaran hanyalah satu dan universal menjadi kebenaran lebih dari satu dan dinamakan kebenaran partikular. Pluralisme, artinya pemikiran yang tidak hanya didasarkan kepada suatu perangkat tunggal yang terdiri dari prinsip – prinsip atau keyakinan – keyakinan tertentu, atau di

¹⁸² A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 68.

dalam pluralisme juga terdapat keyakinan yang memungkinkan dan memberi peluang adanya perbedaan dalam prinsip – prinsip atau keyakinan – keyakinan yang ada dalam suatu masyarakat. Perangkat tunggal dengan prinsip – prinsip dan keyakinannya dianggap tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri, ada kebenaran lain dalam perangkat majemuk dengan prinsip – prinsip dan keyakinan yang lain.

Pemikiran Kuhn merupakan pemberontakan terhadap paradigma positivisme seperti yang dilakukan Karl Raimund Popper, Paul Feyerabend dan Stephen Toulmin. Gagasan Kuhn sangat radikal dan memberi sumbangan pemikiran dan pengaruh yang sangat besar bagi pascapositivisme dan epistemologi postmodern dengan pluralisme paradigma ilmiahnya.¹⁸³ Pemberontakan Kuhn terhadap positivisme ataupun neopositivisme, adalah wujud dari adanya keyakinan dan prinsip yang berbeda terhadap pemikiran yang dianggap “*trendsetter*”¹⁸⁴ pada jamannya serta dianggap sebagai kebenaran yang universal. Pemberontakan Kuhn adalah memunculkan paradigma baru dari dirinya yang bertentangan dengan paradigma yang berlaku dan telah dianggap sebagai kebenaran yang universal. Munculnya paradigma baru menambah jumlah paradigma yang ada, dari satu yang dianggap berlaku universal sekarang ada paradigma lain yang menentang dan meniadakan paradigma awal.

Paradigma asal kata Yunani “*paradeigma*” kata, *para* = *besides*, artinya “dibandingkan dengan ...,” *dekhnai* = *to show*, artinya “yang nampak,” “model,” “contoh,” “pola dasar,” dan “ideal.” Paradigma dapat dirumuskan, sebagai berikut :

¹⁸³ Akhyar Yusuf Lubis, *Metodologi Posmodernis*, Akademia, Bogor, 2004, hal. 5.

¹⁸⁴ Adalah orang atau pemikirannya yang dianggap sebagai pencipta, penentu dan paling terkenal serta diterima oleh kebanyakan orang.

1. Suatu cara untuk melihat sesuatu (*A way of looking at something*).
2. Dalam ilmu pengetahuan, suatu model, pola, atau suatu teori ideal yang dalam pandangannya keberadaan fenomena dapat dijelaskan (*In science, a model, pattern, or ideal theory from which perspective phenomena are explained*).
3. Sebuah situasi atau pemberian contoh yang ideal (*An ideal situation or exemplification*).¹⁸⁵

Paradigma Kuhn adalah suatu teori ideal yang dalam pandangannya keberadaan fenomena dapat dijelaskan. Kuhn berani mengkritik Popper, karena Kuhn yakin akan pandangannya yang mampu memberikan penjelasan yang lebih baik dibandingkan dengan pandangan dari Popper.

Popper berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus bertumbuh atas dasar teori – teori yang benar, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki derajat kebenaran yang tertinggi. Melalui ilmu pengetahuan yang kuat dan tangguh, permasalahan akan mudah dipecahkan dalam arti bahwa realitas dapat lebih dipahami dan dijelaskan secara meyakinkan. Pemikiran ini oleh Popper dinamakan metode *Problem Solving*, dan dapat dirumuskan sebagai berikut : P 1 – TS – EE – P 2 (Problem awal – *Tentative Solution* – *Error Elimination* – Problem baru).¹⁸⁶

Pandangan Popper tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan melalui metode *problem solving* ditolak oleh Kuhn dengan alasan proses falsifikasi terhadap suatu teori secara faktual tidak pernah terjadi, yang terjadi adalah satu perubahan yang sangat mendasar atau melalui suatu revolusi ilmiah dengan perubahan paradigma.

¹⁸⁵ Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, USA, 1981, pages 203.

¹⁸⁶ Alfons Taryadi, *Ibid.*, hal. 84.

Menurut Kuhn tidak pernah terjadi upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar atau melalui suatu revolusi ilmiah. Rumus perkembangan ilmu pengetahuannya, adalah : Paradigma 1, Ilmu Pengetahuan Normal, Anomali, Krisis dan Paradigma 2. Revolusi ilmiah merupakan pergantian paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma ilmiah adalah sebuah model untuk pengembangan ilmu pengetahuan normal dan dirasakan memuaskan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Paradigma Kuhn, memiliki kepentingan pragmatis dan bersifat instrumental, dalam pengertian memberi tuntunan model untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya.

Ilmu Pemerintahan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan paradigma ilmiah yang memiliki kepentingan pragmatis, karena sifat dari Ilmu Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya paradigma ilmiah yang digunakan dalam Ilmu Pemerintahan memiliki kepentingan instrumental artinya alat untuk dijadikan model dalam mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan ilmu pengetahuannya.

Terjadinya krisis ilmiah menyebabkan pergantian paradigma yang lama menjadi paradigma baru. Adanya pergantian paradigma adalah hal yang biasa dan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin ilmu pengetahuan itu berkembang semakin banyak paradigma lama digantikan oleh paradigma baru, dengan makna terjadi penguatan teori (*corroboration*).

Beberapa penemuan besar, seperti : teori Archimedes, penisilin, teori gravitasi Newton ¹⁸⁷ yang muncul tanpa menggunakan prosedur hukum ketat untuk memunculkan teori – teori barunya, menunjukkan bahwa universalisme dalam ilmu pengetahuan (*unified science*), metodologi, susunan/limas ilmu pengetahuan (*De Opbouw van de Wetenschap, C.A. van Peursen*) tidak berlaku. Ada hal – hal yang muncul di luar (*out of scientific explanation*), keadaan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paul Feyerabend dalam bukunya *Against Method* :

Feyerabend menentang metode dengan alasan kuat. Menurutnya, dalam menjalankan riset dan mengambil keputusan – keputusan, sebaiknya ilmuwan tidak dibatasi – meski barangkali memang dibimbing – oleh metode – metode yang ada. Ia harus bebas. Kegiatan ilmiah atau ilmu pengetahuan adalah suatu upaya yang anarkistik. ¹⁸⁸

Keterbukaan menyangkut perbedaan adalah prinsip dan keyakinan yang melandasi pandangan Popper, Kuhn dan Feyerabend. Paradigma berbeda adalah kekayaan bagi ilmu pengetahuan untuk mencapai taraf kebenaran yang tertinggi. Perbedaan melahirkan hal – hal baru yang tak terduga, mencengangkan dan membongkar tatanan dan prosedur yang baku. Keadaan ini adalah awal dari pluralisme pemikiran, paradigma, kebenaran yang tak tertahankan dan melanda segala bidang dalam kehidupan manusia. Adanya teknologi informasi yang sangat dahsyat pada awal abad ke 21 ini, menyebabkan hampir setiap orang dikaitkan dengannya. Untuk menjadi nasabah bank misalnya dengan segala kemudahannya (baik itu simpanan maupun pinjamannya) disyaratkan memiliki

¹⁸⁷ Akhyar Yusuf Lubis, *Op.Cit.*, hal. 43.

¹⁸⁸ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 166 – 167.

nomor telepon atau nomor *hand phone/mobile phone/cellphone* yang dapat dihubungi. Tanpa adanya keterkaitan dengan teknologi informasi tersebut maka seseorang tidak memiliki akses kemudahan dalam dunia perbankan dan itu berarti seseorang akan tersisihkan dari kehidupan orang banyak secara ekonomi finansial. Karenanya pluralitas dalam segala bidang sudah menjadi fenomena umum dan tak dapat dibatasi ataupun dibendung oleh siapa pun, rezim mana pun.

Perubahan di abad ke 21 ini tidak dapat ditahan, seperti halnya setiap orang suka atau tidak suka dengan keadaan sekarang didorong secara paksa untuk memiliki dan menggunakan teknologi informasi. Melalui teknologi informasi perkembangan paradigma ilmu pengetahuan menjadi lompatan – lompatan yang tak terduga. Apa yang dikatakan oleh Feyerabend, bahwa ilmu pengetahuan harus dibiarkan berkembang secara anarkis, dan Kuhn melalui revolusi ilmu pengetahuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sejati, maju dan kuat. Inilah jaman pluralisme yang tidak bisa lagi diseragamkan, disatukan, dan dijadikan universalisme.

Jürgen Habermas, berpendapat kebenaran pernyataan dengan mencari kesesuaian dengan realitas (*the correspondence theory of truth*) dan kebenaran yang diperoleh dengan melihat hubungan, keteguhan, dan konsistensi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain (*the coherence theory of truth*) yang kesemuanya amat ditentukan oleh paradigma berpikir tunggal subjek rasio. Inilah yang oleh Habermas dikatakan ada kekuasaan lain yang disembunyikan, dan kekuasaan itu adalah paradigma pemahaman timbal balik melalui kebenaran intersubjektivitas.¹⁸⁹

¹⁸⁹F. Budi Hardiman,, *Op.Cit.*, hal. xiii.

Cacat – cacat modernisasi seperti paradigma tunggal dengan rasio, positivisme yang menjadi ideologi adalah bukti bahwa modernisasi belum sempurna dan perlu diperbaiki serta dicerahkan lebih lanjut dengan wawasan rasio komunikatif. Artinya bukan lagi paradigma tunggal tetapi paradigma timbal balik. Terjadi komunikasi, intersubjektivitas dalam menentukan kebenaran.¹⁹⁰

Habermas mengatakan untuk mencapai masyarakat komunikatif yaitu masyarakat yang komunikasinya terbuka dan berkedudukan sejajar, dapat mempertahankan dan memiliki sebuah ruang bebas dari diktatur dan pemaksaan, anggota – anggota masyarakatnya toleran serta menghormati martabat semua anggotanya sebagai manusia bersama – sama mewujudkan kemampuan berkomunikasi dengan sejajar disertai bebas dari tekanan – tekanan.

Menurut Habermas tindakan komunikasi (*communicative action*) adalah jalan yang diterima sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang komunikatif. Paradigma timbal balik atau masyarakat komunikasi, dapat terwujud jika semua agen yaitu anggota, pemerintah, ilmuwan, tokoh – tokoh ekonomi, sosial dan budaya serta semua elemen masyarakat sebagai peserta dalam melakukan tindakan komunikasi untuk tidak mengejar kepentingan – kepentingan individual (seperti dalam masyarakat kapitalis) tetapi berhasil menyeimbangkan dengan kepentingan serta keadaan umumnya.¹⁹¹

Proses penyeimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat dapat dibicarakan atau dirundingkan bersama – sama yang kemudian dapat

¹⁹⁰F. Budi Hardiman., *Op.Cit.*, hal. xiv.

¹⁹¹ *By contrast, I shall speak of communicative action whenever the actions of the agents involved are coordinated not through egocentric calculations of success but through acts of reaching understanding. In communicative action participants are not primarily oriented to their own individual successes; they pursue their individual goals under the condition that they can harmonize their plans of action on the basis of common situation definitions. In this respect the negotiation of definitions of the situation is an essential element of the interpretive accomplishments required for communicative action.*

Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, Boston, vol. 1, 1984, pages 285 – 286.

dijadikan referensi bersama untuk melakukan tindakan komunikasi. Proses untuk mewujudkan masyarakat komunikatif ternyata melalui tahapan – tahapan untuk sampai pada tahapan memiliki “kompetensi komunikatif”.¹⁹² Artinya klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim kejujuran, dan klaim komprehensibilitas dilakukan oleh para agen pemerintah, masyarakat dan lain – lain yang mengutamakan komunikasi dua arah (*dialog*) jadi bukan satu arah (*monolog*). Syarat terjadinya perubahan itu dapat terwujud jika negara dan masyarakat memahami keberadaannya masing – masing dan secara sadar mempertanggungjawabkan Perjanjian Sosial yang telah disepakati bersama melalui konstitusi.

ACTION ORIENTATION	ORIENTED SUCCESS	ORIENTED TO REACHING UNDERSTANDING
ACTION SITUATION	INSTRUMENTAL ACTION	
NON SOCIAL	STRATEGIC ACTION	COMMUNICATIVE ACTION

Sumber: Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, Beacon Press, Boston, vol. 1, 1984, pages 285.

¹⁹² F. Budi Hardiman, *Op. Cit.*, hal. xxi – xxii.

Habermas melihat dalam masyarakat terdapat dua tindakan, yaitu Tindakan Instrumental (*instrumental action*) yaitu tindakan individu untuk menaklukkan alam dan menguasainya serta untuk membebaskan diri dari kendala – kendala alam serta untuk mewujudkan dirinya dan Tindakan Komunikasi (*Communicative Action*) yaitu tindakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan dengan memerhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat.

Instrumental action adalah sikap dan tindakan yang selama ini memperoleh pembenaran baik secara kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan melalui positivisme. Didasarkan kepada tujuan yang sangat pragmatis¹⁹³ untuk menaklukkan alam dan menguasainya serta untuk mewujudkan dirinya, dan ini adalah kesuksesan yang dinilai positif secara tradisional dan modern berdasarkan ukuran materialisme sekaligus juga mengemban nilai – nilai transendental karena adanya keyakinan terhadap perintah Tuhan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya.

Habermas mengemukakan, *communicative action* yaitu tindakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan dengan memerhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini tidak ada objek yang dieksplorasi habis oleh subjek manusia yang merasakan dirinya berpredikat “sebagai makhluk tertinggi”. Pandangan Habermas jelas dan membuka selubung tersembunyi “kekuasaan subjek atas objek”, bahwa hubungan antara subjek dan objek adalah setara, sederajat dan saling membutuhkan untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama.

¹⁹³ *Pragmatic*, memandang sesuatu menurut kegunaannya. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cornell University Press dan Gramedia, Ithaca – London – Jakarta, hal. 442.

Dalam epistemologi Ilmu Pemerintahan terjadi proses untuk memahami secara substansi tentang prinsip, sumber – sumber, ruang lingkup dan batas – batas dari pengetahuan. Paradigma Ilmu Pemerintahan yang positivistik berada dalam arus ilmu pengetahuan modern yang berkecenderungan untuk dapat mempersatukan ilmu – ilmu di bawah satu metodologi, yaitu metodologi empiris – analitis ilmu – ilmu tentang alam, dengan karakteristik bebas nilai dan netral.

Habermas, memberikan kritik ilmu pengetahuan atas paradigma ilmu pengetahuan yang positivistik dengan teori kepentingan – kepentingan kognitif. Syarat – syarat kemungkinan (*the conditions of possibility*) yang berbeda – beda bagi pengetahuan dan suatu cara untuk melakukan sesuatu (*praxis*). Manusia itu diarahkan oleh kepentingan – kepentingan pengetahuan (*erkenntnisleitende interessen*).

1. Manusia sebagai spesies memiliki kepentingan teknis untuk mengontrol lingkungan eksternalnya.
2. Manusia sebagai spesies memiliki kepentingan praktis untuk menjalin saling pemahaman timbal balik melalui perantaraan bahasa.
3. Manusia sebagai spesies memiliki kepentingan emansipatoris untuk membebaskan diri dari hambatan – hambatan ideologis melalui perantaraan kekuasaan.¹⁹⁴

Jadi manusia itu diarahkan oleh berbagai kepentingan pengetahuan, inilah teori kepentingan kognitif Habermas yang mengkritik paradigma ilmu pengetahuan yang modern dan positivistik. Ketiga kepentingan di atas tidak dapat direduksikan satu sama lain dan menjadi suatu *unified science* ke dalam ilmu empiris analitis yang menjadikan semua realitas seperti benda – benda alamiah.

¹⁹⁴ Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan pertama 1990, hal. 192 – 193.

	MEDIUM KERJA DIMENSI KERJA	MEDIUM BAHASA DIMENSI KOMUNIKASI	MEDIUM KEKUASAAN DIMENSI KEKUASAAN
KEPENTINGAN	TEKNIS	PRAKTIS	EMANSIPATORIS
PENGETAHUAN	INFORMASI	INTERPRETASI	ANALISIS
TINDAKAN	TINDAKAN RASIONAL BERTUJUAN	TINDAKAN KOMUNIKATIF	TINDAKAN REVOLUSIONER EMANSIPATORIS
UNGKAPAN LINGUISTIS	PROPOSISI- PROPOSISI DEDUKTIF NOMOLOGIS (MONOLOGAL)	BAHASA SEHARI-HARI, <i>LANGUAGE GAME,</i> UNGKAPAN- UNGKAPAN DIALOGAL	PEMBICARAAN EMANSIPATORIS
METODOLOGI	EMPIRIS ANALITIS	HISTORIS HERMENEUTIS	REFLEKSI – DIRI
SISTEMATIKA METODIS	ILMU-ILMU EMPIRIS ANALITIS (ILMU-ILMU PENGETAHUAN ALAM)	ILMU-ILMU HISTORIS HERMENEUTIS (ILMU-ILMU PENGETAHUAN SOSIAL BUDAYA)	ILMU-ILMU KRITIS (TEORI KRITIS)

Sumber: Habermas dalam Pidato Pengukuhan. Lihat, Habermas, Jurgen, *Knowledge and Human Interest*, Boston, Beacon Press, 1971, hal. 313. Francisco Budi Hardiman, *Ibid.*, hal. 193.

Paradigma Ilmu Pemerintahan melalui Teori Kritis Habermas mengalami perubahan substansi, yakni dari rasionalitas instrumental (yang selalu ada dalam posisi ingin menguasai dan menaklukkan) melalui rasionalitas strategis (interaksinya dilakukan secara terbuka dan menghindari tindakan tersembunyi agar tidak terdistorsi dan menimbulkan manipulasi) menuju rasionalitas komunikatif (yang membebaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan sosial).

Perubahan paradigma Ilmu Pemerintahan ditandakan dengan adanya perubahan dari titik tolak rasionalitas instrumental menjadi rasionalitas

emansipatoris, dan proses perubahan berjalan seiring dengan krisis yang terjadi. Perubahan ini adalah landasan ke arah “*civil society*”.

Positivisme ke pragmatisme adalah juga tentang kebenaran pada masa berlakunya prinsip – prinsip dan keyakinan – keyakinan positivisme yang kemudian bergeser menjadi pragmatisme. Kebenaran positivisme tidak sama dengan kebenaran pragmatisme. Perbedaan pokok diantara keduanya ditentukan oleh perbedaan paradigma masing – masing. Apa artinya, kebenaran? Kebenaran adalah kualitas untuk menjadi benar atau tepat yang sesuai dengan beberapa landasan pemikiran atau test untuk membuka realitas dari suatu pernyataan (proposisi, idea, pemikiran, keyakinan, pendapat), *{The quality of being true or correct according to some ground or test for establishing the reality of a statement (proposition, idea, thought, belief, opinion)}*.¹⁹⁵

Filsafat Aristoteles dengan jelas membedakan antara kata “benar” dan “tepat,” perbedaan tersebut dimaksudkan agar makna kata dibedakan dalam konteks penggunaan kalimat. Mencegah terjadinya penggunaan kata secara salah kaprah dan selektif memilih kata sebagai lambang dari pengertian dengan betul.

Dua pandangan dasar pada abad ke 19 tentang kebenaran, yaitu teori tentang kebenaran sebagai persesuaian (*correspondence theory of truth*) dan teori tentang kebenaran sebagai keteguhan (*coherence theory of truth*). Untuk kebenaran sebagai persesuaian intinya adalah antara si pengenal dan yang dikenal terjadi persesuaian (*correspondence*) dan titik berat kebenaran ini dilandasi oleh *a posteriori*, yaitu sesudah atau datang dari pengalaman indra (*After or coming from sense experience*). Untuk kebenaran sebagai keteguhan intinya adalah yang memegang peranan utama adalah subjek dengan sumber pengetahuan utamanya

¹⁹⁵ Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, USA, 1981, pages 297.

adalah rasio. Titik berat kebenaran ini dilandasi oleh *a priori*, yaitu sebelum ke atau tidak tergantung pada pengalaman indra (*prior to and independent of sense experience*).

Dua pandangan lain tentang kebenaran berasal dari dunia *Anglo Saxon*, (Amerika Utara dan Inggris) masing – masing adalah teori tentang kebenaran yang terwujud dalam praktek ilmu (*pragmatic theory of truth*) dan teori tentang kebenaran yang terlaksana dalam ungkapan manusia (*performative theory of truth*).¹⁹⁶ Teori tentang kebenaran yang terwujud dalam praktek ilmu dapat diartikan sebagai hasil material dari ilmu tersebut yang berdaya upaya atau ikhtiar serta membuat seseorang berhasil atas dasar penggunaan teori tersebut. Tokoh – tokoh dari teori ini, adalah : Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey. Teori kebenaran yang terlaksana dalam ungkapan manusia adalah kebenaran dari pernyataan manusia yang menciptakan realitas baru jadi bukan mengungkapkan realitas.¹⁹⁷ Atau menurut filsafat Austin (*performative utterances*) yaitu ungkapan – ungkapan tertentu yang meng – ada – kan apa yang dikatakan dan yang belum ada sebelum ungkapan itu dinyatakan. Tokoh – tokohnya adalah, Frank Plumpton Ramsey, John Langshaw, Austin dan Peter Frederick Strawson.

198

Sebagaimana bangsa Yunani di masa lalu, demikian pun keadaan kita di jaman sekarang tetap ada keinginan untuk memahami realitas yang akan dijelaskan dengan cara meyakinkan kepada kedua belah pihak, yaitu diri kita sendiri dan orang lain tentang apa yang kita ketahui tentang realitas dan mengatakan kebenaran tentangnya. Kebenaran sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, untuk dipahami dan juga dapat dirasakan hasil manfaatnya.

¹⁹⁶ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. Cit.*, hal. 123 – 124.

¹⁹⁷ A. Sonny Kerat dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 74.

¹⁹⁸ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. Cit.*, hal. 124 – 125.

Filsafat berguna karena ia menciptakan satu masyarakat yang pluralis yang membiarkan terjadinya dialog dari berbagai pandangan yang berbeda – beda. Filsafat bukan sebagai ratu ilmu pengetahuan atau sebagai hakim yang memiliki wewenang (otoritas) permanen untuk menentukan klaim – klaim kebenaran pengetahuan atau wacana.¹⁹⁹

Nilai pragmatis dalam filsafat adalah nilai yang memberikan manfaat nyata dalam upaya manusia untuk membebaskan dirinya agar masuk dengan bebas ke dalam dunia imajinatif. Nilai pragmatis juga membebaskan masyarakat dari belenggu otoritarianisme dan absolutisme, sehingga masyarakat pluralis dan masyarakat sipil (*civil society*) dapat berkembang. Kebenaran universal sebagai satu – satunya kebenaran berubah menjadi toleran dan pluralis, sehingga muncullah kebenaran yang lain dalam bentuk kebenaran partikular. Pragmatis (*pragmatic*), mengatasi masalah dengan cara yang praktis dan pantas dibandingkan dengan hanya memiliki idea – idea atau teori – teori yang teguh (*solving problems in a practical and sensible way rather than by having fixed ideas or theories*).²⁰⁰

Apa yang dikatakan Rorty setelah berakhirnya jaman metodologi ilmu pengetahuan secara tradisional, agar para filsuf menjadi pencinta seni atau seorang yang menjalankan keyakinan pragmatis secara penuh. Isu tentang berakhirnya filsafat berkaitan erat dengan populernya istilah *deconstruction*.²⁰¹ Istilah ini awalnya sebetulnya digunakan oleh Heidegger, khususnya manakala ia

¹⁹⁹ Akhyar Yusuf Lubis, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Akademia, Bogor, 2004, hal. 222.

²⁰⁰ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 1182.

²⁰¹ Deconstruction, a theory that states that it is impossible for a text to have one fixed meaning, and emphasizes the role of the reader in the production of meaning. AS Hornby, *Op.Cit.*, pages 397.

berkata bahwa : "... konstruksi dalam filsafat itu dengan sendirinya harus serentak destruksi, yaitu dekonstruksi konsep – konsep tradisional dengan cara justru kembali ke tradisi " ...²⁰² Peran yang paling diharapkan oleh Rorty, agar para filsuf dapat menjadi *edifiers (edifying)* yang berperan untuk mendatangkan perbaikan untuk ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Salah satu perannya adalah menjaga agar ilmu pengetahuan tidak membangun jalan yang aman bagi masa depannya, sehingga tertutup terhadap kritik dan perubahan yang mengharapakan ilmu pengetahuan menjadi lebih dapat diandalkan lagi bagi umat manusia.

3.5 PEMERINTAHAN DAN *CIVIL SOCIETY*

Pembentukan suatu Negara selalu didahului oleh unsur – unsurnya. Pertama – tama adalah unsur wilayah, kedua adalah unsur masyarakat sebagai dasar dari suatu Negara, ketiga adalah unsur pemerintahan dan yang keempat adalah unsur kedaulatan dan yang kelima adalah unsur adanya pengakuan dari Negara lain. Inilah cikal bakal dari lahirnya suatu Negara. Unsur yang paling penting dalam suatu Negara adalah masyarakat disamping tentunya wilayah sebagai dasar pijakan hidupnya, dan dari unsur masyarakatlah kemudian lahir pemerintahan, kedaulatan dan adanya pengakuan dari Negara lain. Menurut MacIver, masyarakat tidak hidup dalam Negara dan tidak merasa hidupnya ada dan terikat secara ketat oleh Negara. Meskipun Negara ditiadakan dan hilang sama sekali, masyarakat tetap ada dan hidup bahkan akan menciptakan kembali Negara baru yang lebih baik dan demokratis.

²⁰² I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1966, hal. 43.

Secara alamiah masyarakat tinggal dan hidup secara ketat dan terikat kuat pada komunitas – komunitas. Komunitas ini sebagai jelmaan dari unsur – unsur yang ada di bawahnya, seperti :

1. Tinggal dalam satu wilayah.
2. Sekelompok orang yang memiliki agama, ras dan mata pencaharian yang sama.
3. Perasaan yang ikut ambil bagian dan memiliki kelompok, di mana ia hidup dan berada.

Masyarakat secara organik²⁰³ ada pada komunitas dengan segala dinamika dan aktivitasnya, kelahiran dan kematian seseorang paling dirasakan dalam komunitas. Oleh sebab itu Negara yang kuat adalah Negara yang memerhatikan kepentingan rakyatnya untuk setiap waktu dengan konsisten. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab Negara dan karenanya negaralah yang pertama – tama diperuntukkan rakyat.

Negara terwujud dengan adanya unsur – unsur Negara, apa artinya Negara ?

Negara adalah suatu himpunan komunitas yang menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat dengan wilayah tertentu berdasarkan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang memaksa.²⁰⁴

²⁰³ Organic, consisting of different parts that are all connected to each other. AS Hornby, *Op.Cit.*, pages 1071.

²⁰⁴ *The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order.* R.M. MacIver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, reprinted 1941, pages 22.

Terbentuknya Negara tidak lepas dari tujuan Negara yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat dan menjaga masyarakat dari ancaman serta gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Untuk menjaga masyarakat maka Negara memiliki kekuasaan yang penuh dan bersifat memaksa. Sifat pemaksaan ini ditujukan bagi musuh – musuh masyarakat dan bukan untuk menekan masyarakatnya sendiri, tetapi demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Prioritas Negara adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan Negara.

Salah satu unsur Negara adalah pemerintah. Apakah artinya pemerintah?

Pemerintahan, menurut Lewis dalam bukunya yang berjudul *'Use and Abuse of Political Terms,'* yaitu memiliki cara untuk menyelesaikan secara lengkap tentang kehidupan, hak – hak dan kewajiban dari setiap anggota komunitas.' Demikianlah yang diajarkan oleh seluruh sekolahan dari Hobbes, Bentham dan Austin.²⁰⁵

Pengertian pemerintahan yang dikemukakan oleh Lewis, sejalan dengan apa yang dari awal dikatakan oleh MacIver, bahwa orang – orang berada dan hidup dalam komunitas dan bukan dalam ruang Negara. Baik buruknya seseorang sangat ditentukan oleh komunitas dan bukan oleh Negara. Pemerintahan sebagai salah satu unsur dari Negara berperan sebagai *organ* dalam bahasa Latin (*organum*) yang berarti alat (*tool*) atau peralatan dan sebagai pelaksana (*implement*). Jadi tugas pokok pemerintahan sebagai alat Negara adalah berhubungan langsung dengan setiap warga Negara dan memberikan

²⁰⁵ *'The sovereign', says Lewis in his Use and Abuse of Political Terms, 'has the complete disposal of the life, rights, and duties of every member of the community.' So say the whole school of Hobbes and Bentham and Austin. R.M. MacIver, Ibid., pages 14.*

kontribusinya yang menyangkut kehidupan, hak dan kewajiban dari setiap warga Negara agar tujuan Negara dapat tercapai melalui pemerintahan.

Hubungan antara Negara dan masyarakat secara langsung tidak ada. Hubungan itu baru terwujud jika pemerintahan sebagai alat Negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi kelahiran atau keruntuhan suatu Negara amat ditentukan oleh peran atau fungsi dari pemerintahan sebagai alat Negara dalam melaksanakan tujuan Negara. Kekuasaan pemerintahan digunakan untuk kepentingan umum yang dilandasi oleh kehendak dari komunitas. Ini adalah ciri utama dari pemerintahan. Hal lain dari kekuasaan pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang sifatnya mengatur antar lembaga yang ada dan selalu menempatkannya di bawah kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan adalah pelaksanaan dari kepentingan umum untuk mencapai tujuan umum dari semua warga Negara.

Peranan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan amat menentukan kehidupan dari masyarakatnya. *Civil society* adalah tujuan dasar dari setiap Negara demokrasi yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah. Konsep *civil society* dari Karl Marx ini sangat berhubungan erat dengan teori perjanjian sosial dari John Locke yang menjelaskan secara kronologis dari Negara alami (*state of nature*) menjadi Negara perjanjian sosial (*state of social contract*). Hakekat *civil society* Karl Marx, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menikmati hak kepemilikannya. Hak kesetaraan (*equality*) berlaku sama untuk semua orang, baik itu untuk melindungi maupun untuk menghukum. Hak keamanan adalah jaminan yang diberikan kepada setiap warga Negara atas perlindungan dirinya, hak – haknya dan kepemilikannya.

Kebaikan bersama dalam kekuasaan politik menurut John Locke, adalah dilandasi untuk melindungi setiap warga Negara yang terancam hak – haknya, kepemilikannya, kebebasannya, keamanannya baik dari dalam mau pun yang datang dari luar. Kekuasaan politik itu dipegang dan dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu unsur Negara dan alat Negara dalam upayanya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan yang dibentuk melalui kesepakatan menurut John Locke, adalah bagi yang melaksanakannya artinya ikut dan setuju dengan kesepakatan. Inti dari pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga harta benda dan jiwa mereka dari bahaya ancaman baik yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar. Locke adalah salah satu filsuf yang mementingkan unsur masyarakat dalam pendirian Negara, dan untuk melindungi dan melayani masyarakat dan demi kebaikan bersama maka perlu ada kesepakatan sosial politik untuk mendirikan pemerintahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kant tentang *civil society*, yang utama adalah adanya perlindungan, kesetaraan dan keamanan melalui kesepakatan sosial untuk membentuk pemerintahan sebagai pemegang dan pelaksana dari kekuasaan politik. Untuk mengatasi keadaan yang tidak pasti dalam hubungan antar bangsa, teman dan musuh, masa teror (tindakan yang menimbulkan perasaan ketakutan yang amat sangat dan dilakukan atas nama Negara, kelompok dan atau perorangan yang mengandalkan suatu monopoli legal atas kekerasan)²⁰⁶ perlu setiap Negara untuk melakukan kesepakatan konstitusi atau hukum internasional yang isinya sama dengan konstitusi yang ada dalam *civil society*. Kekuasaan politik untuk menjamin setiap anggotanya agar dapat

²⁰⁶ Ibid., hal. 148 – 149.

menikmati akan hak kepemilikannya, hak kebebasannya, hak kesetaraannya, dan hak keamanannya dari ancaman bangsa lain, musuh ataupun teror.

Tugas utama pemerintahan sebagai salah satu unsur Negara adalah menciptakan *civil society* sebagai landasan dan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan konstitusi, yaitu perjanjian sosial untuk mendirikan pemerintahan dari suatu Negara. *Republicanism*, sebagai paham yang dianut oleh suatu Negara atau bangsa, dalam hal mana kekuasaan tertinggi berada pada semua warga Negara yang berhak memilih (dalam pemilihan umum) dan dijalankan oleh wakil – wakil yang dipilih oleh rakyat, secara langsung atau secara tidak langsung, oleh semua warga Negara dan bertanggung jawab juga kepada semua warga Negara. Inti setiap konstitusi sipil dari Negara atau bangsa yang memiliki dan menyebut konstitusinya dengan predikat sipil, berarti konstitusinya secara substansi menganut prinsip *republicanism*.

Menurut Kant, konstitusi adalah penjelmaan dari idea perjanjian yang asli (*social contract*)²⁰⁷ karenanya akan menciptakan perdamaian yang langgeng. Perdamaian itu lahir karena konstitusi mengatur dengan jelas untuk semua orang tentang hak dan kewajibannya. Egoisme ada tetapi dibatasi oleh apa yang dinamakan keamanan, artinya fungsi keamanan sebagai alat untuk menciptakan perdamaian yang langgeng pada masyarakat sipil.

²⁰⁷ Social contract (or compact), in the theories of certain political philosophers, as Locke and Rousseau, the agreement among individuals uniting for various reasons, by which organized society was begun and sets of regulations were instituted to govern interrelations of members. Michael Agnes (editor in chief), *Ibid.*, pages 1360.

To the obvious objection that none of us seem to have been explicitly consulted on this matter Locke argues that by enjoying the benefits of the protection of the state we tacitly consent to its authority. Only express consent can make someone a full member, but we all give our tacit consent whether or not we expressly consent. Michael Rosen and Jonathan Wolff (edited by), *Op.Cit.*, pages 52.

3.6. NASIONALISME DAN GLOBALISASI

Mula – mula keluarga – keluarga bergabung dalam komunitas kemudian komunitas bergabung dengan komunitas yang lain untuk membentuk masyarakat dan masyarakat ini kemudian menciptakan Negara dan sekaligus menjadi bangsa dari Negara tersebut. *“Kinship creates society and society at length creates the state.”*²⁰⁸ Akar dari kebangsaan adalah keluarga yang berarti ada hubungan langsung antara bangsa, masyarakat dan keluarga. Semakin jelas hubungan ikatan sosialnya semakin kuatlah Negara kebangsaannya sebaliknya semakin tidak jelas hubungan ikatan sosialnya semakin rawan konflik dalam Negara kebangsaannya.

Menurut MacIver baik pada binatang maupun masyarakat intinya adalah keluarga, dan hal itu tidak akan dapat terwujud jika keluarga memisahkan diri. Sebaliknya keluarga – keluarga baru akan terbentuk melalui perkawinan yang menyatukan dua keluarga yang berbeda. Banyaknya keluarga yang secara terus menerus berkembang melalui perkawinan membentuk masyarakat dan masyarakat karena kebutuhan keamanan dan kesejahteraannya melalui perjanjian sosial pada akhirnya membentuk Negara.

Pengertian keluarga (*family*), masyarakat (*society*), dan bangsa (*nation*) masing – masing berbeda hakekat pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat, sebagai berikut : keluarga (*family*), berarti suatu kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang tua (ibu dan bapa), anak – anaknya dan saudara – saudara terdekatnya ; masyarakat (*society*), berarti orang – orang pada umumnya, hidup bersama dalam komunitas – komunitas yaitu semua orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, Negara, dan sebagainya ; bangsa (*nation*), berarti sebuah

²⁰⁸ R.M. MacIver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, reprinted 1941, pages 33.

Negara yang didasarkan atas suatu kelompok orang – orang dengan sejarah, kebudayaan dan bahasa yang sama, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di bawah satu pemerintahan.²⁰⁹

Masyarakat dan bangsa akhirnya adalah keluarga, dan Negara dilandaskan oleh keberadaan masyarakat yang ditopang oleh keluarga – keluarga. Terjadi hubungan sosial antara keluarga, masyarakat dan Negara, tetapi watak dan tindakan Negara tidak ditentukan oleh keluarga – keluarga melainkan oleh kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Keberadaan Negara di dalam masyarakat, tetapi keberadaannya bukanlah bentuk dari masyarakat. Kita melihat yang terbaik dalam apa yang dilakukan oleh Negara. Prestasi Negara adalah menciptakan suatu pola ketertiban hidup dan dijalankannya pengawasan. Negara dalam sebuah kata mengatur hal – hal utama yang berada di luar hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara mendukung atau memanfaatkan, mengekang atau membebaskan, memenuhi atau bahkan menghancurkan, kehidupan sosial dalam hal mana kehidupan tersebut disertai pengawasan – tetapi alat untuk menjalankan itu semua tidak menggunakan kehidupan dari masyarakat itu sendiri.²¹⁰

Keberadaan Negara adalah penjelmaan dari kebutuhan masyarakat akan keamanan dan kesejahteraan. Peranan Negara adalah mengatur kepentingan bangsa atau kepentingan nasional dari seluruh rakyat. Tujuan negara dalam masyarakat adalah bagaimana kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan baik ataupun sebaliknya. Jadi tergantung dari watak dan tindakan negara

²⁰⁹ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 552, 1453, 1014.

²¹⁰ *The state exists within society, but it is not even the form of society. We see it best in what it does. Its achievement is a system of order and control. The state in a word regulates the outstanding external relationships of men in society. It supports or exploits, curbs or liberates, fulfils or even destroys, the social life over which it is invested with control – but the instrument is not the life.* R. M. MacIver, *Op.Cit.*, pages 5.

dalam menggunakan kekuasaan yang ada padanya. Hanya negara yang benar – benar demokratis yang dapat menjaga watak dan tindakannya dalam menggunakan kekuasaan untuk sepenuhnya diberikan kepada rakyat sesuai dengan tujuannya.

Untuk menilai negara – negara manakah yang demokratis, kami akan menggunakan definisi formal demokrasi secara ketat. Sebuah negara dikatakan demokratis bila memberikan kepada rakyatnya hak untuk memilih pemerintah sendiri melalui pemilihan secara periodik, bebas dan rahasia, dan multipartai, atas dasar hak pilih orang dewasa yang sederajat.²¹¹

Negara demokratis adalah negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, dengan cara memberikan hak untuk memilih pemerintah sendiri dengan bebas. Terpilihnya pemerintah oleh rakyatnya sendiri, akan memberikan watak dan tindakan negara yang demokratis dan terbuka untuk kritik. Negara sadar sepenuhnya bahwa keberadaan negara adalah semata – mata karena kepentingan rakyat bukan kepentingan kekuasaan apalagi orang per orang. Negara diciptakan oleh rakyat dan bukan rakyat diciptakan oleh negara.

Keluarga, masyarakat dan bangsa adalah serangkaian proses sosial yang timbul dari kepentingan orang – orang yang hidup dalam kelompoknya untuk mempertahankan, mengembangkannya dan meningkatkan kesejahteraannya melalui negara yang didirikannya.

Nasionalisme yang berasal dari kata dasar *nation*, adalah paham kebangsaan. Memiliki pengertian ‘kehendak dari sekelompok orang yang memiliki ras, kebudayaan dan bahasa yang sama dan lain - lain, untuk

²¹¹ Francis Fukuyama, penerjemah Mohammad Husein Amrullah, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (The End of History and The Last Man)*, Qalam, Yogyakarta, 1992, hal. 85.

membentuk sebuah negara yang merdeka' (*the desire by a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country*).²¹²

Pengertian nasionalisme tersebut memiliki sifat – sifat persamaan dalam sekelompok orang yang memiliki “kehendak” bersama juga untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Dalam pengertian yang lebih sempit, nasionalisme berarti : suatu perasaan cinta kepada dan bangga atas negaranya; suatu perasaan bahwa negaranya lebih baik dari negara yang lain (*a feeling of love for and pride in your country; a feeling that your country is better than any other*).²¹³

Nasionalisme yang menjadi realitas baik di negara – negara maju ataupun di negara – negara berkembang adalah gabungan pengertian dari nasionalisme yang di atas. Gabungan pengertian nasionalismenya, adalah :

1. Adanya sekelompok orang dengan kesamaan identitas dan keinginan untuk mendirikan negara yang merdeka.
2. Setelah mendirikan negara yang merdeka, timbulah perasaan cinta tanah air yang berlebihan dengan menganggap negaranya sendiri adalah yang terbaik di antara negara – negara yang lain.

Nasionalisme Roma yang menganggap bangsanya adalah yang terkuat dan terbaik diantara bangsa – bangsa lain di dunia. Agar mencapai cita – citanya, bangsa Roma harus menaklukkan negara – negara yang ada di sekitarnya. Untuk menjadi kuat maka negaranya harus memiliki jumlah penduduk yang banyak sebagai upaya untuk membuat angkatan perang yang besar dan kuat. Ada dua

²¹² Sally Wehmeier (chief editor), *Op.Cit.*, pages 1014.

²¹³ Sally Wehmeier (chief editor), *Op.Cit.*, pages 1014.

cara menurut Machiavelli untuk dapat memperoleh jumlah penduduk yang besar, yaitu : dengan membuat kota itu sendiri menarik dan menguntungkan sehingga banyak orang datang untuk menikmati dan tinggal disitu atau dengan cara memaksa yaitu melalui peperangan dan penaklukan.

Nasionalisme yang berlebih – lebih dan hawa nafsu untuk memperbesar kekuasaan menimbulkan peperangan dan penderitaan dimana – mana. Munculnya peradaban dunia barat menyadarkan negara – negara besar untuk memikirkan kembali peranan mereka di dunia ini. Sumber – sumber kekuasaan menjadi tersebar luas dimana – mana dan wilayah dari peradaban barat menyebar luas kemana – mana. Kondisi ini tidak mendukung nasionalisme yang sempit dan mengancam pusat kekuasaan yang ada oleh pengaruh geografis, modernisasi peradaban dan gerakan politik.

Negara nasional dengan paham nasionalisme yang sempit dalam jaman modern sudah tidak *relevant*, apapun sumber kekuasaan negara seperti patriotisme, ideologi, jumlah penduduk tidak akan mampu bertahan secara ekonomi terhadap kebutuhan negara dan warga negaranya. Negara membutuhkan pendapatan untuk membiayai kebutuhannya seperti penyediaan hukum dan ketertiban sebagai sarana infrastruktur bagi warga negaranya dalam beraktivitas ekonomi. Warga negara membutuhkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sebagai tuntutan dari peradaban barat dan dunia modern.

Pemerintah dituntut aktif untuk membantu dan melayani masyarakat yang pluralitas dengan partisipasi yang berbeda dan menyadarkan akan kemampuan dan sumber daya manusia, sosial dengan potensi yang berbeda. Tugas pemerintah adalah mengkoordinasi, membimbing, dan menuntun semua yang ada kepada tujuan bersama. Optimalisasi kepuasan bagi pluralitas anggota –

anggotanya adalah untuk memenuhi kebutuhan baik untuk warga negaranya dan juga untuk mempertahankan loyalitas warga negaranya terhadap negara. Terjaminnya kebutuhan dan kemantapan loyalitas warga negara terhadap negaranya maka negara melalui pemerintahnya akan dapat mengabsahkan tindakan – tindakan yang diperlukan untuk pencapaian ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Nasionalisme yang benar menghasilkan demokrasi yang baik dan sehat untuk setiap pluralitas anggota – anggotanya. Persamaan hak, kesadaran untuk memajukan kebaikan umum (*to promote the public good*), berbeda dalam banyak hal tetapi menjunjung tinggi toleransi dan sikap kerja sama dengan orang – orang lain yang berbeda dengan diri mereka sendiri. Habermas mengatakan, dalam suatu negara yang terpenting bukan pemerintahan, sumber – sumber kekuasaan, konstitusi, ekonomi dan politik, serta ideologi tetapi rakyat yang memiliki kualitas – kualitas demokrasi yang menghasilkan nasionalisme dengan *civil society* yang berkualitas. (Habermas 1992 : 7).²¹⁴

Abad ke 21 ini membutuhkan nasionalisme yang bukan berorientasi ke dalam (*chauvinism*)²¹⁵ ‘yaitu yang didasarkan kepada hawa nafsu dan hal – hal tidak masuk akal akan keyakinan bahwa hanya negaranya saja yang paling baik dibandingkan dengan negara – negara lain.’ Abad ini nasionalisme sebagai

²¹⁴ *These events have made clear that the health and stability of a modern democracy depends, not only on the justice of its basic institutions, but also on the qualities and attitudes of its citizens: e.g. their sense of identity, and how they view potentially competing forms of national, regional, ethnic, or religious identities; their ability to tolerate and work together with others who are different from themselves; their desire to participate in the political process in order to promote the public good and hold political authorities accountable; their willingness to show self-restraint and exercise personal responsibility in their economic demands, and in personal choices which affect their health and the environment. Without citizens who possess these qualities, democracies become difficult to govern, even unstable. As Habermas notes, ‘the institutions of constitutional freedom are only worth as much as a population makes of them’ (Habermas 1992 : 7). Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford – New York, second edition 2002, pages 284 – 285.*

²¹⁵ Chauvinism, an aggressive and unreasonable belief that your own country is better than all others. Sally Wehmeier (chief editor), *Op.Cit.*, pages 249.

identitas suatu negara dan sekaligus menunjukkan keberadaannya masih tetap penting dan diperlukan dalam pergaulan dunia internasional. Nasionalisme abad ke 21 ini adalah nasionalisme yang berorientasi pada globalisasi, yaitu ‘adanya fakta bahwa sistem ekonomi dan budaya yang ada di seluruh dunia menjadi terhubung dan menghasilkan kesamaan satu dengan lainnya, dikarenakan adanya pengaruh dari perusahaan – perusahaan multinasional yang besar dan bertambah baiknya kualitas komunikasi (*globalization*).’²¹⁶ Kesadaran untuk berwawasan internasional, bahwa suatu negara di dunia tidak dapat hidup sendiri, ada ketergantungan erat antar negara karena planet bumi hanya satu tetapi dihuni oleh banyak negara nasional yang tidak sama satu sama lainnya. Diperlukan kesadaran kerja sama, serta koordinasi internasional, interdependensi, orientasi dan wawasan global yang menjadi ciri hidup dari setiap negara, cepat atau lambat perkembangannya menjadi sangat revolusioner untuk abad globalisasi ini.

Nasionalisme yang berorientasi global adalah ciri negara untuk dapat *survive* di abad ke 21 dan yang akan datang. *Internationalism*, adalah ciri dan gaya pergaulan negara – negara di dunia, yaitu keyakinan terhadap negara – negara di dunia untuk dapat bekerja sama dalam suatu cara yang bersahabat. Orientasi global dan sikap internasional menjadi *attribute* negara bangsa. Tanpa adanya kesadaran tersebut akan menyebabkan ketegangan dan konflik hingga perbenturan kebudayaan antara bangsa – bangsa di dunia. Fungsi – fungsi pemerintahan tertentu, pelan – pelan tapi pasti akan digantikan oleh lembaga – lembaga internasional seperti ekonomi, kebudayaan, hukum dan keamanan, pendidikan, dan lain – lain. Contoh : semua universitas di Indonesia baik negeri

²¹⁶ Globalization, the fact that different cultures and economic systems around the world are becoming connected and similar to each other because of the influence of large multinational companies and of improved communication. Sally Wehmeier (chief editor), *Op. Cit.*, pages 659.

maupun swasta bersaing dan berlomba – lomba untuk menjadi *world class university*. Ini semuanya tidak lepas dari globalisasi abad ke 21.

Abad ke 21 akan ditandai dengan adanya relativisme besar – besaran dalam moral, kultural dan politik. Artinya abad ke 21 adalah abad guncangan *The Great Disruption* istilah Francis Fukuyama. Relativisme moral, kultural, teknologi dan politik sebagai keyakinan bahwa tidak ada seperangkat nilai, prinsip, norma atau teknologi yang kebenarannya dapat atau harus menduduki tempat teratas. Nasionalisme abad ke 21 juga mengalami relativisme, artinya bahwa nasionalisme tidak lagi bertolak dan melihat ke dalam (sebagai kebenaran umum dan tertinggi selama ini), tetapi ada kebenaran lain, prinsip, moral dan nilai – nilai kepentingan bersama, kemanusiaan secara global dan internasionalisme yang pantas dan terhubung dalam jaringan mewujudkan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dunia.

3.7. KESIMPULAN

Penulisan disertasi ini membawa pengertian terhadap gerakan postmodernisme sebagai gerakan untuk melanjutkan proses modernisasi dengan memperbaiki kekurangan – kekurangan dari modernisasi. Jadi ada kontinuitas dalam postmodernisme dan bukan semata – mata diskontinuitas.

Pluralisme membuka pemahaman bahwa ada ketidaksamaan dalam pandangan, sikap dan kebenaran mengenai sesuatu. Universalisme dengan bungkus *unified science* adalah bentuk menyembunyikan kekuasaan karena ada proses untuk mendominasi objek ilmu pengetahuan oleh yang melakukan interaksi antara subjek dan objek ilmu pengetahuan. Timbulnya kritisisme karena kritik – kritik terhadap positivisme.

Ilmu Pemerintahan dapat menerima perubahan paradigma tersebut. Dari tindakan instrumental atau rasio instrumental untuk bertindak komunikasi atau rasio komunikasi dengan tujuan menjalin pemahaman dan kesetaraan tanpa adanya dominasi antara 'yang memerintah dan yang diperintah'. Perubahan paradigma tersebut juga menjadikan Ilmu Pemerintahan yang semula berlandaskan pada epistemologi positivistik untuk kemudian berubah menjadi epistemologi kritis.

Globalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan saat ini, misalnya komunikasi media. Sebagai Negara kebangsaan dengan ciri budaya seperti bahasa dan adat tetap harus dijaga keutuhannya ditengah – tengah globalisasi. Itu berarti globalisasi hidup berdampingan dengan Negara bangsa, realitas ketergantungan antara Negara bangsa dan dunia luar serta keberadaan dunia luar yang didukung oleh Negara kebangsaan. Kesejahteraan umat manusia adalah tanggung jawab bersama dan hasil dari kegiatan ilmu pengetahuan adalah untuk mencerahkan dan memudahkan umat manusia dalam mensikapi realitas hidup.

BAB IV

EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

4.1 PENGANTAR

Karakteristik dan identitas dijelaskan dengan menggunakan teori abad pertengahan atau positivisme sebagai dasar pemahaman mengenai adanya hubungan subjek dan objek dalam ilmu pengetahuan. Paradigma lama adalah kebenaran didominasi oleh subjek, dan menjadi kebenaran universal. Paradigma baru hubungan subjek dan objek ada, tetapi tidak untuk mendominasi salah satu. Objektivitas melalui intersubjektivitas, atas dasar kesetaraan dibangun bersama untuk kebenaran bersama yang didasari kritisisme. Epistemologi positivisme digantikan oleh epistemologi kritisisme.

Etika sebagai penuntun dan pengakuan akan adanya nilai – nilai kebaikan bersama dan juga nilai – nilai keburukan bersama. Perlu dipelajari dan dikembangkan dalam Ilmu Pemerintahan karena berhubungan dengan rakyat dan kekuasaan. Adalah sangat riskan jika etika tidak mendapat porsi utama dalam Ilmu Pemerintahan.

Pendekatan multiperspektif dan perspektif, pengertian perspektif adalah sikap atau pola pikir tertentu terhadap suatu realitas. Multiperspektif adalah sikap dan pola pikir dari berbagai titik pandang dalam hubungannya dengan realitas sosial atau kemasyarakatan. Ini adalah sesuai dengan perkembangan dari gerakan modernisme ke postmodernisme dan dari paradigma

positivisme ke paradigma komunikasi. Pemahaman terhadap realitas sosial didasarkan juga kepada pendekatan interdisipliner dan multidisipliner yang memiliki aspek penekanan khusus dalam metodologi penelitiannya.

Kurikulum sebagai alat pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional atau umum. Ilmu Pemerintahan yang diajarkan dalam Program Studi di Perguruan Tinggi perlu dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan akhir – akhir ini.

4.2 KARAKTERISTIK DAN IDENTITAS

Ilmu Pemerintahan yang digolongkan *Political Sciences* termasuk ilmu pengetahuan yang tidak jelas metodologi, karakteristik dan identitasnya. Kelahiran Ilmu – Ilmu Politik termasuk Ilmu Pemerintahan di Indonesia lebih didasarkan pada minat dan objek penyelidikan *field of study* yang sama dengan Ilmu Hukum dan ilmu – ilmu sosial lainnya, seperti Sosiologi. Dapat dikatakan bahwa kelahiran Ilmu – Ilmu Politik termasuk Ilmu Pemerintahan di Indonesia sangat dipaksakan kehadirannya, sehubungan dengan perkembangan sosial politik yang cepat serta membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang itu.

Dalam keadaan terpaksa dan serba darurat, timbullah upaya perintisan yang dilakukan oleh bidang ilmu pengetahuan lain serta yang lebih mapan keadaannya, seperti Ilmu Hukum. Antara kurun waktu 1945 – 1965, hampir semua sarjana hukum di Indonesia terpanggil untuk memulai, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Ilmu – Ilmu Politik. Jadi Ilmu – Ilmu Politik lahir dari kepentingan dan kebutuhan hukum di Indonesia. Antara kurun waktu 1945 – 1965, politik menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Hukum hanya menjadi mitos, yang menyebabkan Ilmu Hukum

tidak berdaya untuk menghadapi realitas politik. Ilmu Hukum memerlukan Ilmu Politik sebagai upaya untuk menghadapi realitas politik guna melandasi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas dan norma dari sebuah negara hukum.

Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki organisasi profesi ilmiah di bidang Ilmu Politik yang juga menjadi wadah dari Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Pemerintahan. Organisasi itu bernama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan didirikan pertama kali pada tanggal 17 Januari 1985 di Jakarta. Organisasi profesi ilmiah tersebut, lahir dan dibesarkan oleh orang – orang yang memiliki kompetensi di bidang yang sama. Jadi, AIPI merupakan tonggak sejarah kembalinya Ilmu Politik kepada pemiliknya yang sah.

Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari Ilmu Politik yang diwariskan oleh keadaan yang *anomaly* pada masa awal kemerdekaan, memberikan banyak ketidakjelasan menyangkut keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dengan ruang lingkup pembahasannya.

Dari pembentukan organisasi profesi tersebut dengan nama AIPI, maka perkembangan Ilmu – Ilmu Politik dan Pemerintahan di Indonesia dapat dianalisis menjadi 3 periode, yaitu:

PERIODE		
1945 – 1965	1965 – 1985	1985 – 2005
<p>ILMU POLITIK DILAHIRKAN OLEH PARA AHLI ILMU HUKUM DAN MENJADI BAGIAN DARI FAKULTAS HUKUM PARA PENGAJAR BERASAL DARI BERBAGAI DISIPLIN DAN KALANGAN PRAKTISI SERTA TOKOH-TOKOH MASYARAKAT PARA PEGAWAI PEMERINTAHAN DI PUSAT DAN DAERAH BANYAK DIISI OLEH BANGSAWAN JAWA DAN PARTAI POLITIK</p>	<p>UGM MENJADI MODEL PENDIDIKAN ILMU POLITIK DI INDONESIA</p> <p>PARA PENGAJAR DI DAERAH SEBAGIAN BESAR BERASAL DARI UGM</p> <p>PARA PEGAWAI PEMERINTAHAN DI PUSAT DAN DAERAH BANYAK DIISI OLEH ALUMNUS UGM</p>	<p>JUMLAH UNIVERSITAS YANG MENJADI MODEL PENDIDIKAN ILMU POLITIK BERTAMBAH</p> <p>JUMLAH AHLI ILMU POLITIK BERTAMBAH BAIK YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI</p> <p>PARA PEGAWAI PEMERINTAHAN DI PUSAT DAN DAERAH DIISI OLEH ALUMNUS DARI BERBAGAI UNIVERSITAS BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI</p>
<p>POLITIK DAN PEMERINTAHAN DIAJARKAN SEBAGAI PELENGKAP DARI KURIKULUM ILMU HUKUM BERDASARKAN MINAT DAN KEPENTINGAN</p>	<p>MASING – MASING UNIVERSITAS MEMILIKI KURIKULUMNYA SENDIRI</p> <p>SARJANA DAN PRAKTISI DARI BERBAGAI KALANGAN IKUT MEMBERIKAN PEMIKIRAN TENTANG POLITIK</p>	<p>KURIKULUM NASIONAL LAHIR SEBAGAI STANDAR PENDIDIKAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN TERBENTUKNYA KOMUNITAS PARA ILMUWAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN</p>
<p>TIDAK ADA MEDIA DAN ORGANISASI PROFESI DALAM ILMU POLITIK</p>	<p>HASIL PENELITIAN DAN TULISAN TENTANG POLITIK YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING INDIVIDU DAN KELOMPOK</p>	<p>MEMILIKI JURNAL – JURNAL ILMIAH SENDIRI</p>

Perkembangan pada periode sekarang pun tidak berjalan baik dan lancar, karena ada polemik antara Ilmu Politik dengan Ilmu Pemerintahan, organisasi profesi AAPI yang berjalan tersendat – sendat, terjadinya *anomaly* dalam kelahiran dan perkembangan Ilmu Pemerintahan serta campur tangan pemerintah yang begitu kuat dalam mengatur organisasi dan kurikulum pendidikan Ilmu – Ilmu Politik di Indonesia.

Oleh karenanya pengkajian secara epistemologi²⁴⁸ terhadap Ilmu Pemerintahan adalah upaya yang perlu dilakukan dengan seksama dan kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Keadaan Ilmu Pemerintahan yang tidak jelas ruang lingkup dan objeknya, telah berlangsung lama jika dibandingkan dengan ilmu – ilmu lainnya, misalnya Ilmu Politik. Ada keraguan terhadap eksistensi Ilmu Pemerintahan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Ilmu Pemerintahan dianggap kurang berperan dan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Ilmu Politik dewasa ini, khususnya peran kontribusi ilmunya terhadap kegiatan pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan memiliki predikat pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata benda (*nomina*), “perintah”, yang artinya aba – aba, amanat, amar (an), arahan, instruksi, komando, mandat, suruhan, titah, tugas. Makna dari kata ‘pemerintahan’ adalah pemegang kekuasaan (*the ruling class*) yang memiliki kewenangan untuk melakukan “perintah” terhadap rakyatnya (*the ruled class*). Memerintah adalah kata kerja (*verba*) yang dilakukan oleh ‘pemerintah’ yang

²⁴⁸ Epistemologi, atau filsafat pengetahuan, adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian – pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. P. Hardono Hadi, *Epistemologi* (Disadur dari buku Kenneth T. Gallagher, *The Philosophy of Knowledge*), Kanisius, Yogyakarta, Cetakan pertama 1994, hal. 5.

berarti lembaga/organisasi atau 'pemerintahan' yang berarti pemegang kekuasaan/golongan penguasa.

Melalui buku ini, bilamana kita membicarakan tentang pemerintahan tanpa menggunakan kata sifat kita artikan sebagai pemerintahan politik, yaitu organisasi yang terpusatkan yang memelihara sistem ketertiban atas suatu komunitas besar atau kecil. Pemerintahan politik adalah bentuk dari pengaturan sosial, tetapi bukan satu – satunya bentuk. Pokok ini perlu diingat bilamana kita mengemukakan pertanyaan – pertanyaan mengenai asal usul tentang pemerintahan. Pengaturan adalah suatu aspek universal dari masyarakat. Masyarakat berarti suatu sistem hubungan yang ditertibkan.²⁴⁹

Pemerintahan adalah organisasi politik yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara ketertiban dalam suatu masyarakat. Pemerintahan adalah manifestasi atau kristalisasi dari pengaturan sosial yang ada dalam masyarakat. Pengaturan merupakan aspek universal yang ada pada setiap masyarakat. Menurut MacIver, masyarakat berarti suatu sistem hubungan antar individu atau mahluk sosial tetapi perlu ditertibkan, dan untuk menjaga dan memelihara ketertiban itu sangat diperlukan adanya organisasi yang terpusatkan dan diberi kekuasaan untuk menjalankan fungsi utamanya.

Penulis akan mengutip beberapa definisi perumusan tentang Ilmu Pemerintahan dengan objek yang berbeda satu dengan yang lain, sebagai bukti adanya kebingungan dan kehilangan orientasi dalam metodologi Ilmu Pemerintahan terhadap realitas yang ada, yaitu pemerintahan sebagai objeknya.

²⁴⁹ *Throughout this book, when we speak of government without a qualifying adjective we mean political government, the centralized organization that maintains a system of order over a community large or small. Political government is one form of social regulation, but by no means the only form. This point must be remembered when we raise questions about the origins of government. Regulation is a universal aspect of society. Society means a system of ordered relations.* R.M. MacIver, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, twentieth printing 1963, pages 22.

1. Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.²⁵⁰
2. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas – dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.²⁵¹
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.²⁵²
4. Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.²⁵³
5. Ilmu Pemerintahan mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah.²⁵⁴

Rumusan definisi pertama (1) menitikberatkan pada objek keorganisasian, pada rumusan ke dua (2) menitikberatkan pada objek kepemimpinan, dalam rumusan ke tiga (3) menitikberatkan pada objek fungsi –

²⁵⁰ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 47.

²⁵¹ Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 7 – hal. 8.

²⁵² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, cetakan ke 3 Maret 2005, hal. 23 - 24.

²⁵³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan pertama Mei 2003, hal. 7.

²⁵⁴ Bayu Surianingrat, *Op. Cit.*, hal. 46.

fungsi pemerintahan serta dalam rumusan yang ke empat (4) menitikberatkan pada objek tujuan pemerintahan dan rumusan ke lima (5) menitikberatkan pada objek kebijakan pemerintah.

Perbedaan objek satu dan yang lain dalam rumusan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut,

TABEL
PERBEDAAN DEFINISI DAN OBJEK

DEFINISI	OBJEK MATERIA	OBJEK FORMA
PERTAMA	PEMERINTAHAN	ORGANISASI
KEDUA	PEMERINTAHAN	KEPEMIMPINAN
KETIGA	PEMERINTAHAN	FUNGSI
KEEMPAT	PEMERINTAHAN	TUJUAN
KELIMA	PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN

Melalui tabel di atas dapat dilihat secara jelas perbedaan antara setiap rumusan atau definisi tentang Ilmu Pemerintahan yang berasal dari sumber yang berbeda dan menghasilkan perumusan – perumusan yang berbeda pula dengan titik berat yang saling berbeda antara rumusan yang satu dengan rumusan yang lain.

Objek sebagai awal perhatian sebuah ilmu pengetahuan, merupakan syarat utama dalam proses kegiatan ilmu pengetahuan, komunitas Ilmu Pemerintahan sering mengabaikan objeknya dan langsung pada hal – hal yang lepas dari objek ilmu pengetahuannya. Hal tersebut telah berlangsung lama, sehingga setiap sarjana Ilmu Pemerintahan akan merumuskan dan menjelaskan makna Ilmu Pemerintahan bagi hasrat ingin tahu yang ada dalam diri sendiri,

untuk menjawab pertanyaan mengenai: “apakah Ilmu Pemerintahan itu?” Pertanyaan ini seharusnya dapat dijawab dengan mudah berdasarkan definisi yang ada. Justeru definisi yang ditulis oleh banyak sarjana Ilmu Pemerintahan memberikan kebingungan dan pemahaman simpang siur karena ditulis berdasarkan latarbelakang Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum, dan lain – lain.

Pembahasan tentang Ilmu Pemerintahan selalu mengabaikan objeknya. Para sarjana bersemangat membuat definisi – definisi yang kontribusinya terhadap Ilmu Pemerintahan menjadi semakin tidak jelas. Sebenarnya, definisi yang baik dan betul haruslah disusun berdasarkan objek ilmu yang jelas. Kejelasan dan ketajaman objek forma dari ilmu akan melahirkan esensi - esensi sebagai bahan pokok bahasan, dan berdasarkan kepada hubungan antar esensi akan dapat disusun suatu definisi substantif atau definisi real (eksplikatif) yang memberikan kontribusi yang jelas dan signifikan terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan.

Apakah yang menjadi objek dari Ilmu Pemerintahan? Pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu kekuasaan eksekutif, dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Pembagian dari fungsi – fungsi pemerintahan ke dalam jenis – jenis yang berbeda, sudah sejak jaman dahulu kala, dan barangkali akan menyusuri kembali kepada sumber asli dari analisa politik Aristoteles dalam bukunya yang berjudul ‘*The Politics*’. Ada juga beberapa pemikir sebelum Montesquieu, yang menekankan perbedaan pada kepentingan praktis, khususnya Locke. Tetapi penulis buku dari *L’Esprit des Lois* berada selangkah lebih maju. Baginya hal yang terpenting adalah bukan menganalisa fungsi – fungsinya, melainkan prinsip dari penjelmaan ke dalam lembaga – lembaga yang

terpisah. Baginya ini adalah di atas segala – galanya sebuah resep yang praktis untuk berpolitik secara bebas, pemikiran filsafatnya tidak memungkinkan untuk menguji ataupun mewujudkannya. *Trias Politica* dari kekuasaan dipahaminya sebagai, ‘legislatif’, ‘eksekutif’, dan ‘yudikatif’, seharusnya, harus dapat, penjelmaan yang terpisah, demikianlah seharusnya, dilaksanakan oleh kelompok – kelompok atau orang – orang yang berbeda.²⁵⁵

Pemerintahan dalam arti luas menurut Montesquieu adalah *Trias Politica* yang ‘seharusnya’ dan ‘harus dapat’ dijemakan ke dalam lembaga – lembaga yang terpisah dengan kelompok dan orang yang berbeda pula. Jika setiap masyarakat tidak melakukan pemisahan kekuasaan maka masyarakat tersebut ada dalam keadaan tanpa konstitusi atau kekuasaan pemerintahan akan menjadi *absolute*.

Objek pemerintahan bukan dalam arti luas atau *Trias Politica* yang mencakup ‘legislatif’, ‘eksekutif’ dan ‘yudikatif’ karena masing – masing memiliki fungsi dan kompetensi yang berbeda. *Legislative power*, ‘sebagaimana pemerintahan menetapkan peraturan – peraturan, apakah itu *legal* atau *constitutional*, hal tersebut merupakan penjelmaan dari fungsi kekuasaan legislatif. Ini adalah fungsi dasar dari pemerintahan. Di negara yang sudah maju semua kegiatan lain dari pemerintahan secara jelas bersumber kepada suatu

²⁵⁵*The division of governmental functions into distinct types, and usually into three, is ancient enough, and may be traced back to that fountain – head of political analysis, the Politics of Aristotle. There were also, before Montesquieu, thinkers who emphasized the distinction as having practical importance, notably Locke. But the author of L'Esprit des Lois went a step further. To him the important thing was not the analysis of functions, but the principle of their embodiment in separate organs. For him this was above all else a practical recipe for political liberty, the philosophical implications of which he scarcely examined or even realized. The trinity of powers conceived by him, 'legislative', 'executive', and 'judicial', ought to be, must be, separately embodied, that is, exercised by different men or groups. Ibid., pages 365 - 366.*

kewenangan yang ditetapkan melalui hukum. Karenanya fungsi dari kekuasaan legislatif secara logika adalah tertinggi.²⁵⁶

Executive power, sebagai organisasi politik yang mempunyai tugas pokok untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menurut MacIver, masyarakat berarti suatu sistem hubungan antar individu atau makhluk sosial tetapi perlu ditertibkan, dan untuk menjaga dan memelihara ketertiban itu sangat diperlukan adanya organisasi yang terpusatkan dan diberi kekuasaan untuk menjalankan fungsi utamanya dan disebut sebagai kekuasaan eksekutif.

Judicial power, dalam pengertian yang lebih luas fungsi yudikatif adalah bagian dari administrasi hukum, tetapi proses sejarahnya telah memisahkan eksekutif dari para hakim pengadilan, dan faktanya yang terakhir ini secara khusus dipisahkan dari keduanya yaitu badan pembuat undang – undang (*legislature*) dan kementerian /kabinet (*the ministries*) oleh karenanya kita telah sampai pada penerimaan adanya pembagian kekuasaan ke dalam tiga bagian.

Trias Politica adalah pemerintahan dalam arti yang sangat luas dengan berbagai fungsi dan kompetensi yang berbeda satu sama lain. Kata *Trias Politica* berasal dari kata *trinity*, yang artinya suatu organisasi yang memiliki tiga fungsi dan membentuk suatu kesatuan. Secara umum tujuan pemerintahan dalam arti luas adalah untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan.

Dapat dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan antara pemerintahan dan negara serta menghormati hukum konstitusi sebagai suatu ikatan, bukan terhadap negara, tetapi kepada pemerintahan. Hal itu mengikat mereka sendiri (*the legislature*) yaitu badan – badan yang membuat undang – undang. Dibalik badan – badan pembuat undang – undang terletak tujuan paling

²⁵⁶ (*In so far as government lays down rules, whether legal or constitutional, it is exercising the legislative function. This is the fundamental function of government. In the developed state all other activities of government are expressly referable to an authority assigned by law. The legislative function is therefore logically supreme*). R.M. MacIver, *Ibid.*, pages 367 – 368.

akhir dari kekuasaan yang memerintah. Hal tersebut telah tertanam di pemerintahan melalui beberapa kekuasaan, termasuk kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang – undang, tetapi kekuasaan eksekutif telah belajar untuk membuat pemerintahan dapat dipercaya, dan tidak menjadikannya sebagai tuan. Jika pemerintahan melanggar konstitusi yang telah dipercayakan, yang merupakan bagian perumusan dari hukum konstitusi, hal itu akan menghancurkan dukungan yang telah diberikan kepadanya.²⁵⁷

Pemerintah melalui kekuasaan eksekutif akan berusaha untuk menjaga kepercayaan rakyat bahkan untuk meningkatkan kepercayaan dan mempertahankannya agar pemerintahan dapat dipegang kembali oleh golongan politik tertentu. Pelanggaran terhadap konstitusi oleh pemerintah akan menghancurkan dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tujuan dari pemerintahan ada dalam konstitusi yang dibuat oleh badan legislatif, karena konstitusi adalah perjanjian sosial antara masyarakat dan pemerintah karenanya konstitusi tersebut mengikat semua pihak juga termasuk badan – badan yang membuat undang – undang.

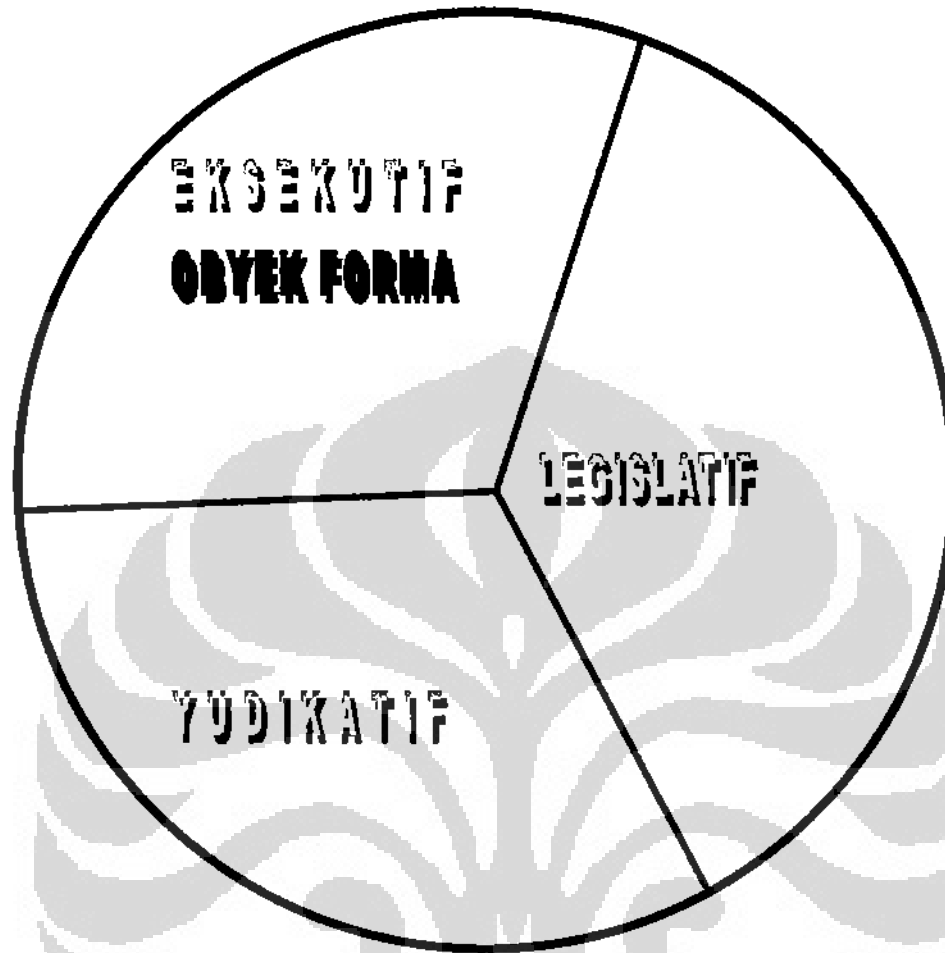
Dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi (*foundational*) Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi ke dalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

²⁵⁷*It might be said that we ought here to distinguish between the government and the state and regard constitutional law as binding, not the state, but the government. It binds the legislators in the making of law itself. Behind the legislature lies the ultimate sovereign. It has vested in the government certain powers, including the execution of the laws, but it has learned to make the government its trustee, and not its master. If the government were to violate the constitutional conditions of trusteeship, which are in part formulated as constitutional law, it would destroy the support on which it rests.* R.M. MacIver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, reprinted 1941, pages 277 – 278.

1. Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas – luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Sumber: Kajian Penulis

Setiap ilmu pengetahuan memiliki identitas sendiri sebagai yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu Pemerintahan dibedakan dengan ilmu – ilmu lainnya karena memiliki objek forma yang jelas, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif. Dalam objek material yang merupakan totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dimungkinkan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dengan ilmu – ilmu lainnya. Misalnya : Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Negara.



KETERANGAN  PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS

Maka itu kemanunggalan antara subjek dan objek di dalam pengetahuan bukanlah suatu kemanunggalan yang sempurna, mutlak, di mana subjek menjadi objek sepenuhnya dan objek menjadi subjek sepenuhnya, seperti misalnya diajarkan oleh aliran *monisme*,²⁵⁸ *pantheisme*²⁵⁹ ataupun ajaran Plato mengenai *Idea Absoluta*.²⁶⁰

²⁵⁸ Monism, (a) Metaphysical : The view that there is but one fundamental reality. (b) Epistemological : The view that the real object and the idea of it (perception or conception) are one in the knowledge relation.

²⁵⁹ Pantheism, the doctrine that reality comprises a single being of which all things are modes, moments, members, appearances, or projections.

²⁶⁰ A.M.W. Pranarka, *Epistemologi Dasar*, CSIS, Jakarta, 1987, hal. 38.

Dari pemaparan sederhana mengenai pengetahuan di atas dapat kita hitung betapa uraian tentang hal pengetahuan itu telah melibatkan berbagai macam aliran: antara ajaran yang serba rohani dan ajaran yang serba materi, antara ajaran yang serba subjektif dan ajaran yang serba objektif, antara ajaran yang serba deduktif dan ajaran yang serba induktif. Dapat kita catat berbagai macam *schools of thought* seperti misalnya : monisme, pantheisme, materialisme, sensasionalisme, nominalisme, konseptualisme, realisme, rationalisme, empirisme, idealisme, positivisme, intelektualisme, strukturalisme, analisa bahasa, positivisme logis, voluntarisme dan berbagai aliran yang sifatnya anti-intelektualis.²⁶¹

Pengetahuan (*knowledge*), adalah apa yang diketahui subjek mengenai objek baik secara indrawi (*empiricism*) maupun secara akal budi (*rationalism*). Pengetahuan hanya ada pada konstruksi pikiran manusia yang kemudian disistematisasikan, dijelaskan hubungannya dan dibuktikan kebenarannya untuk menjadi ilmu pengetahuan (*science*). Pengetahuan ada pada manusia yang dikembangkan untuk menjadi sarana bagi pemahaman akan realitas yang ada, semakin abstrak pengetahuan yang ada pada manusia, semakin tinggi tingkat kebenaran ilmu pengetahuan melalui konsep dan teori.

Scientia, berasal dari kata Latin (*scire*, artinya belajar, atau mengetahui) dalam pengertiannya amat luas, berarti belajar atau pengetahuan. Tetapi kata "*science*" dalam bahasa Inggris dipergunakan sebagai istilah yang dipendekkan untuk ilmu alam, persamaan arti kata yang terdekat adalah dalam bahasa Jerman, yaitu *Wissenschaft*, yang berarti semua termasuk di dalamnya kajian yang sistematis, tidak hanya dengan yang kita sebut *science*, tetapi juga dengan sejarah, *philology* atau *philosophy*. Untuk kita, kemudian, *science* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang teratur mengenai fenomena alam dan kajian yang rasional tentang hubungan di antara konsep –

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 39.

konsep dan dalam hal mana fenomena tersebut dapat diungkapkan.²⁶²

Pada awalnya kata *science* dalam bahasa Inggris memiliki arti sempit, yaitu sebagai ilmu alam. Persamaan arti kata yang terdekat adalah dalam bahasa Jerman, *Wissenschaft* yang artinya semua pengetahuan yang didalamnya berisikan kajian yang sistematis baik ilmu alam maupun ilmu – ilmu lainnya, seperti : ilmu sosial, sejarah dan filsafat adalah digolongkan sebagai ilmu pengetahuan (*wissenschaft*). Baru kemudian *science* memiliki arti yang luas dan sama dengan *wissenschaft* dengan mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji secara empiris dan rasional baik fenomena alam maupun konsep – konsep atau gejala – gejala untuk dapat dijelaskan dan diungkapkan makna yang ada di balik fenomena – fenomena tersebut.

Tetapi, segera setelah kita memikirkan lebih dalam, kita melihat persoalannya, sebagaimana semua konsep – konsep dari ilmu pengetahuan (*science*), hanya dapat diketahui oleh kita melalui pengaruhnya atas pengamatan indra – kita dibawa kembali kepada masalah pengetahuan. Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia yang kelihatan, yang mengungkapkan dan mensyaratkan melalui pengamatan indra dan pemikiran kita; tidaklah penting dengan apa yang disebut dengan dunia kenyataan. (*the world of reality*) Pada abad ke 18 kemungkinan – kemungkinan yang demikian masih tetap tersembunyi di masa depan; tetapi Locke, Berkeley dan Hume telah menunjukkan wujudnya, sebagaimana dipahami melalui pengamatan indra yang tidak memerlukan kenyataan yang mengungkapkan. Seandainya pengetahuan telah tersedia,

²⁶² *The Latin scientia (scire, to learn, to know), in its widest sense, means learning or knowledge. But the English word "science" is used as a shortened term for natural science, though the nearest German equivalent, Wissenschaft, still includes all systematic study, not only of what we call science, but also of history, philology or philosophy. To us, then, science may be defined as ordered knowledge of natural phenomena and the rational study of the relations between the concepts in which these phenomena are expressed. Sir William Cecil Dampier, A History of Science, Cambridge University Press, Cambridge – New York, reprinted 1989, pages xiii.*

materialisme, dalam analisa yang paling mutakhir, telah gagal untuk dapat memuaskan.²⁶³

Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia yang kelihatan baik secara indrawi maupun pemikiran, jasmani dan rohani oleh karenanya tidak penting dengan apa yang disebut dunia kenyataan (*the world of reality*). Ilmu pengetahuan adalah hasil dari konstruksi pemikiran manusia untuk memahami terhadap dunia yang kelihatan baik secara jasmani maupun rohani.

Pemerintahan adalah dunia yang kelihatan baik secara jasmani maupun rohani. Pemerintahan yang kelihatan secara jasmani, berarti dapat diamati melalui panca indera :

1. Kekuasaan eksekutif, yang diatur tentang keberadaannya, hak dan kewajibannya dalam konstitusi negara.
2. Kekuasaan eksekutif, yang diwujudkan dalam pimpinan negara. Misalnya : Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dst.
3. Kekuasaan eksekutif, yang diselenggarakan melalui organisasi dan management. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dst.

Pemerintahan yang kelihatan secara rohani, berarti dapat dilihat melalui akal budi, artinya melalui suatu idea, keyakinan atau suatu gambaran

²⁶³ *But, as soon as we think a little deeper, we see that matter, like all the other concepts of science, is only known to us through its effects on the senses – we are brought again to the problem of knowledge. The world of science is the world of appearance, revealed and conditioned by our senses and our minds; it is not necessarily the world of reality. In the eighteenth century such possibilities were still hidden in the future; but Locke and Berkeley and Hume had already shown that nature, as apprehended through the senses does not necessarily reveal reality. Even with the knowledge then available, materialism, in ultimate analysis, should have failed to satisfy. Sir William Cecil Dampier, Ibid., pages 199.*

yang dihasilkan, juga bagaimana kita melihat serta bagaimana kita memahami sesuatu yang bersumber dari akal budi:

1. Kekuasaan eksekutif yang keberadaannya melekat dengan keberadaan masyarakat, tidak terlihat tetapi *inherent*, artinya merupakan sesuatu yang mendasar atau bagian yang tetap dari masyarakat dan tidak dapat dialihkan ataupun dipisahkan.
2. Kekuasaan eksekutif yang keberadaannya seiring dengan kepemilikan kekuasaan (*power*). Penjelasan yang paling sederhana terletak dalam terminologi kekuasaan itu sendiri. Tidak ada seorangpun yang lebih kuat daripada yang lain, tetapi sekelompok orang yang berani dan cerdas dapat bersatu dan membuat kelompok mereka memerintah atas yang lain. Mereka mengambil alih sumber – sumber yang ada pada masyarakat, dan menjalankannya sesuai dengan kepentingannya sendiri, membuat yang lain menjadi pelayan – pelayan atau budak – budak mereka.²⁶⁴
3. Kekuasaan eksekutif yang keberadaannya sebagai penjelmaan demokrasi. Pokok utama, dan sebagai upaya sistematis yang paling berpengaruh adalah mengidentifikasi sifat – sifat khusus dari pemerintahan yang demokratis (Dahl, 1971). Dia mengembangkan suatu ukuran dengan nama "*polyarchy*" (banyak pola pemerintahan, *poly* = *many*; *archy* = *Latin*, *archia* = *to rule or government*) didasarkan kepada apa yang

²⁶⁴ R.M. MacIver, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, twentieth printing 1963, pages 14.

dia pertimbangkan sebagai dua dimensi utama dalam demokratisasi: adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan adanya kesempatan untuk bersaing dalam memperoleh kekuasaan politik atau eksekutif.²⁶⁵ Dan kesempatan itu datang dan diberikan oleh pemerintahan yang berkuasa, sebagai kekuasaan eksekutif.

Sumber: Kajian Penulis

Ilmu Pemerintahan memiliki dunia yang kelihatan, mengungkapkan, dan tergantung pada pengamatan indra dan pemikiran kita terhadap apa yang disebut objek yang kelihatan atau dunia realitas. Ilmu Pemerintahan yang memiliki objek dengan jelas telah mempunyai identitas untuk dibedakan dengan ilmu – ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam masyarakat modern yang rumit, dengan ciri demokratis atau kediktatoran, setiap individu secara bersamaan menjadi milik dari sejumlah kelompok dan melaluinya mereka merasakan beberapa aspek dari pemerintahan. Dalam keluarga, di gereja, di perkumpulan, dan pada perhimpunan profesional atau bisnis setiap individu dihadapkan dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah penggunaan paksaan secara sistematis dalam upaya untuk mengejar tujuan – tujuannya yang dinyatakan oleh atau yang bertalian dengan kelompok bersama dalam hal mana setiap individu merupakan anggota – anggotanya. Dapat dilihat dalam semua cara yang dilakukan oleh organisasi – organisasi kebersamaan, hal tersebut telah menjangkau secara luas dalam negara.²⁶⁶

²⁶⁵ Robert Dahl, et. al., (edited by), *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts – London, 2003, pages 527.

²⁶⁶ *In the complex modern community, be it democratic or dictatorial in character, individuals belong simultaneously to a number of groups through which they experience some aspects of government. In the family, in the club, and in professional or business associations the individual is confronted by government. Government is a systematic coercion of individuals in the pursuit of objectives proclaimed by or attributed to the collectivity of which those individuals are members. Visible in all manner of organized collectivities, it has its greatest elaboration in the state.* Daniel Wit, *Comparative Political Institutions*, Henry Holt and Company, New York, 1953, pages 3 – 4.

Inti pemerintahan menurut Daniel Wit, adalah menegakkan peraturan – peraturan yang telah dibuat secara bersama dan demokratis, karena *social contract* adalah kelanjutan peraturan – peraturan sederhana dan informal dari komunitas keluarga – keluarga. Pemerintahan bukanlah hasil usaha dari sekelompok orang yang cerdas dan kuat untuk kemudian menguasai yang lain. Pemerintahan adalah kelanjutan serta penjelmaan dari komunitas keluarga menuju masyarakat negara yang dinamakan *social contract*. Pemerintahan lahir dari masyarakat dan menjaga ketertiban dan melindungi serta mengejar tujuan masyarakatnya, untuk melaksanakan fungsi itu maka pemerintahan memiliki kekuatan yang memaksa agar dapat digunakan secara sistematis.

Definisi Ilmu Pemerintahan adalah sebagai Ilmu Sosial yang memiliki kepentingan praktis yang mampu menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan secara kritis guna mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama secara demokratis.

1. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu sosial disamping ilmu – ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hubungan internasional. Ilmu pemerintahan mempelajari secara khusus tentang asal mula terjadinya pemerintahan, tujuan dari pemerintahan itu sendiri, serta penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
2. Ilmu pemerintahan mempelajari secara khusus organisasi dan management pemerintahan sebagai kelengkapan dari kehendak umum (*the general will*) dalam kajian ini termasuk:

- Bentuk – bentuk pemerintahan
- Fungsi – fungsi pemerintahan
- Mekanisme dan proses pemerintahan
- Pengawasan dan birokrasi pemerintahan
- Kepemimpinan pemerintahan
- Administrasi dan keuangan pemerintahan

3. Ilmu pemerintahan mempelajari secara khusus sifat serta nilai dasar dari pemerintahan yang ada :

- Sifat mengancam (*threaten*)
- Sifat memaksa (*coercion*)
- Sifat menghukum (*punitive action*)
- Sifat mengatur (*to regulate*)
- Sifat memutuskan (*to decide*)
- Sifat *monopoly*
- Sifat mempersatukan (*united*)
- Sifat menjaga (*to guard*)
- Sifat melindungi (*protect*)
- Sifat idealis (*idealist*)
- Sifat optimis (*optimistic*)
- Sifat empati (*empathy*)
- Dan lain – lain

Nilai – nilai dasar dari pemerintahan yang ada, yaitu :

- Nilai inklusif (*inclusive*)
- Nilai tanggung jawab (*responsibility*)

- Nilai sosial (*social*)
- Nilai moral (*morality*)
- Nilai sakral (*sacred*)
- Nilai sekuler (*secular*)
- Nilai demokrasi (*democracy*)
- Dan lain – lain

Sumber: Kajian Penulis

Pemerintahan sebagai organ negara menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan warga negaranya. Warga negara bukanlah organ negara, tetapi sebaliknya negara adalah organ warga negara atau rakyat negara. Negara yang diciptakan dan dibangun selalu berdasarkan kepentingan warga negara (*social contract oriented*) dan sekaligus penjelmaan dari semua nilai – nilai yang ada.

Itu adalah kekuasaan yang memerintah dari negara, yang dilaksanakan oleh pemerintahannya, yang membuat pemerintahan tersebut tertinggi kedudukannya hingga beberapa waktu dan sampai digantikan pemerintahan tersebut melalui suatu kewenangan yang bersifat supranasional.²⁶⁷ Kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara adalah sangat besar dan menyeluruh. Tidak ada satu individu ataupun lembaga yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Sedemikian besar kekuasaan pemerintahan tersebut sehingga Thomas Hobbes, menyebutnya "*Leviathan*" yang artinya segala sesuatu yang serba besar atau sangat berkuasa penuh.

²⁶⁷ *It is the sovereign power of the state, exercised by its government, which makes that government the highest form until such time as it is supplanted by a real supranational authority.* Daniel Wit, *Ibid.*, pages 5 – 6.

4.3 DIMENSI ETIKA DALAM PEMERINTAHAN

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* asal kata *ethos* dalam bentuk tunggal, dengan pengertian kebiasaan, cara, watak, adat, kecenderungan, kelakuan atau tatakrama. Dalam bentuk jamak *ta etha*, pengertiannya adalah adat kebiasaan, dan arti inilah menjadi latarbelakang bagi terbentuknya “etika” yang pertama kali digunakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384 – 322 sm).²⁶⁸

Beberapa definisi etika, misalnya :

1. Uraian penjelasan tentang konsep – konsep seperti : seharusnya, sebaiknya, kewajiban, aturan – aturan moral, benar, salah, tanggung jawab, dan lain – lain.
2. Penyelidikan ke dalam moralitas atau tindakan – tindakan moral untuk menemukan kualitas dasar.
3. Penelitian terhadap kehidupan moral yang baik.²⁶⁹

Dari etimologi sampai kepada definisi tentang etika, semuanya berhubungan dengan kata moral. Moral berasal dari kata Latin, *moralis* yang artinya kelakuan atau kebiasaan – kebiasaan. Jadi etika adalah sama artinya dengan filsafat moral (*moral philosophy*). Beberapa pengertian moral :

1. Berhubungan dengan prinsip – prinsip tentang perilaku benar dan salah.

²⁶⁸ K. Bertens, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 4.

²⁶⁹ Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, New York, 1981, pages 82.

2. Didasarkan atas pengertian sendiri tentang apa yang benar dan adil, dan tidak didasarkan atas hak – hak hukum atau kewajiban – kewajiban.
3. Mengikuti standard perilaku yang didasarkan kepada pertimbangan penerimaan dan anggapan benar oleh kebanyakan orang.
4. Kemampuan untuk mengerti perbedaan antara benar dan salah.

270

Etika menurut Aristoteles berasal dari kata jamak *ta etha*, yang artinya adat kebiasaan. Etika adalah sikap atau perilaku yang sesuai dan diterima oleh kebanyakan orang, dan itu juga dapat disebut bermoral. Selain diartikan sebagai sikap atau perilaku, etika dan filsafat moral adalah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu cabang dari filsafat.

Untuk melakukan filsafat moral (atau etika) adalah untuk mempertimbangkan mengenai pertanyaan – pertanyaan yang paling akhir mengenai moralitas.

METAETIKA :

APAKAH YANG
MENJADI CIRI
POKOK/DASAR DAN
METODOLOGI DARI
PENILAIAN MORAL?

ETIKA NORMATIF :

PRINSIP – PRINSIP
APA YANG
SEHARUSNYA KITA
JALANI DALAM
KEHIDUPAN INI ?

Dengan demikian filsafat moral memiliki dua cabang utama. Metaetika melakukan kajian terhadap ciri pokok/dasar dan metodologi dari penilaian moral. Etika normatif, mempelajari

²⁷⁰ Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 991.

tentang prinsip – prinsip yaitu bagaimana seharusnya kita hidup.²⁷¹

Dimensi²⁷² etika dalam pemerintahan adalah mendasar dan sangat melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari ujung puncak sampai dengan ujung bawah kekuasaan pemerintahan bernapas dengan dimensi etika, karena masyarakat berada disepertinya seperti air yang ada di mana – mana. Nilai – nilai dasar yang ada pada pemerintah adalah moral dan tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepadanya. Kepentingan siapa yang diutamakan pemerintah dalam proses kehidupan politik dan bangsa ini, elite politik atau rakyat? Pertanyaan ini relevant dan aktual serta selalu mengemuka dalam persoalan – persoalan bangsa. Pertanyaan ini adalah etika normatif, karena atas dasar prinsip – prinsip apa pemerintah itu menjalankan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudahkah pemerintah mensejahterakan rakyat ? Pertanyaan ini dapat dijawab dari berbagai aspek. Salah satu aspek utama yang mendasari pemerintahan adalah aspek moral. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan moral sebagai bagian dari metaetika. Jawaban “sudah” atau “belum” apa dasarnya dan metodologi apa yang akan digunakan untuk memilih prinsip – prinsip sebagai dasar penilaian atas pertanyaan tersebut. Betapa luas dan dalam aspek etika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, semakin kuat kedudukan pemerintah semakin kuat etika mengikatnya. Sebaliknya semakin lemah kedudukan pemerintah di mata rakyatnya semakin longgar dan lepas ikatan etika dalam pemerintahan.

²⁷¹ Harry J. Gensler, *Ethics*, Routledge, London and New York, first Indian reprint 2003, pages 4.

²⁷² An aspect, or way of looking at or thinking about something. *Op.Cit.*, pages 426.

Dimensi etika dalam pemerintahan adalah sangat hakiki (*in truth*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Etika atau filsafat moral dapat membuat refleksi (*reflection*)²⁷³ kita menjadi lebih dalam atas pertanyaan – pertanyaan yang muncul paling akhir dari kehidupan ini.
2. Etika atau filsafat moral dapat membantu kita untuk berpikir lebih baik tentang moralitas.
3. Tujuan etika atau filsafat moral adalah untuk mempertajam proses pemikiran kita secara umum.²⁷⁴

Dapat dibayangkan jika pemerintahan kehilangan dimensi etika dalam keberadaannya. Pemerintah menjadi tidak manusiawi dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memuaskan naluri dasar manusia (*basic instinct*), melalui pemerintah sebagai alat kekuasaan, dengan cara – cara seperti :

1. Melakukan kecenderungan alamiah untuk memiliki sesuatu dengan cara tertentu serta menggunakan pengetahuan dan kemampuan sebagaimana mereka dilahirkan tanpa menggunakan pemikiran ataupun pelatihan.
2. Suatu perasaan yang membuat diri kita untuk melakukan sesuatu atau yakin bahwa sesuatu itu adalah benar, sekalipun hal itu tidak didasarkan atas fakta – fakta atau akal sehat.²⁷⁵

Jadi pemerintah menindas rakyatnya sendiri, dan bukan melindungi dan memberikan kesejahteraan yang cukup. Sejarah telah membuktikan ada banyak rezim pemerintahan yang kehilangan dimensi etika dalam keberadaannya, dan rakyat menjadi korban utama dari penguasa bangsanya sendiri. Misalnya:

²⁷³ Reflection, the process of calm reconsideration, which may lead to a better view of things. Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, broadview press, Canada – USA, 1991, pages 198.

²⁷⁴ *Op. Cit.*, pages 5 – 6.

²⁷⁵ *Op. Cit.*, pages 805.

Raja Herodes di jaman kerajaan Romawi Kuno, Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, Idi Amin di Uganda, Pol Pot di Kamboja dan lain – lain.

4.4 PENDEKATAN MULTIPERSPEKTIF

Pendekatan multiperspektif sangat erat kaitannya dengan *multicultural* dengan basis masyarakat yang ada dalam suatu negara. Pada dasarnya manusia itu tidaklah satu macam tetapi ada banyak macam manusia, dan representasi pada masyarakatnya menjadi *heterogeneous*. Memahami realitas masyarakat sosial yang demikian kompleks dan dinamis tidak cukup jika hanya dikaji dengan pendekatan monodisipliner atau hanya dari satu perspektif saja.

Perbedaan antara perspektif dan multi perspektif. Perspektif berarti sikap tertentu dalam menghadapi sesuatu atau suatu pola pikir tertentu mengenai sesuatu. Dari pengertian perspektif tersebut maknanya adalah setiap perubahan realitas sosial yang ada di masyarakat, selalu dihadapi dengan sikap dan pola pikir yang sama. Padahal realitas sosial telah berubah, inti realitas sosial adalah manusia yang selalu berubah dalam segala hal. Jadi tidak mungkin lagi perubahan yang cepat dan kompleks dalam realitas masyarakat sosial hanya dipahami dari satu perspektif saja, akan tidak lengkap dan tidak menyeluruh hasil kesimpulan dan pemahaman kita terhadap masyarakat tersebut.

Melihat kepada arti negara, perubahan dan keberadaannya di antara negara – negara lain di dunia, maka pendekatan untuk memahami realitas negara dan sosial masyarakatnya tidak cukup hanya dari satu perspektif, sehingga dirasakan bahwa realitas negara, pemerintahan dan sosial masyarakatnya perlu dipahami dari berbagai perspektif. Multi dalam bahasa Latin, "*multus*" artinya

banyak. Multi dalam penggunaan kalimat, berarti memiliki, terdiri dari, lebih dari dua, atau kadang – kadang lebih dari satu. Multiperspektif, berarti memahami atau menilai dan melihat sesuatu dari berbagai titik pandang dalam hubungannya dengan yang lain agar diperoleh salah satu cara untuk menjelaskannya.

Cultural studies, selalu merupakan bidang penelitian multi dan post-disipliner yang mengaburkan batas – batas antara dirinya dan subjek yang lain. *Cultural studies* berhubungan dengan kekuasaan dan politik, dengan kebutuhan untuk memperoleh adanya perubahan bagi kelompok – kelompok yang terpinggirkan. *Cultural studies* melihat pengetahuan teoritis sebagai praktik politik, melihat kepada kepentingan dari yang mengemukakan teori tersebut, dan kepentingan peruntukannya serta apa yang menjadi tujuan akhir dari pengetahuan itu.

Pendekatan multiperspektif dalam Ilmu Pemerintahan adalah bentuk multidisipliner. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan eksekutif dengan segala hal ihwalnya tentu sangat relevant dengan pendekatan multiperspektif dari *cultural studies*. Salah satu objek yang dieksplorasi oleh pendekatan multiperspektif *cultural studies* adalah kekuasaan itu sendiri dengan semua produknya sebagai kebudayaan. Bagaimana kekuasaan dan kebudayaan (praktek kekuasaan, lembaga kekuasaan, simbol – simbol kekuasaan, bahasa kekuasaan dan tujuan kekuasaan) memberikan perubahan yang berarti bagi golongan yang terpinggirkan. Perubahan yang diinginkan adalah perubahan masyarakat dari *rude society*²⁷⁶ untuk menjadi *civil society*.

²⁷⁶ Diartikan sebagai masyarakat yang lebih mengedepankan naluri primitifnya.

Ini semuanya tidak lepas dari faktor budaya yang menjadi focus dalam *cultural studies*.

Budaya sipil Anglo Amerika yaitu menghormati pemerintahan yang berkuasa tetapi juga mereka sangat giat berpartisipasi dalam politik. Juga dengan Inggris, konsensus yang luas terhadap peraturan – peraturan adalah dukungan terhadap demokrasi parlementer dan rasa hormat terhadap pemerintahan. Nilai – nilai inti tersebut menjadi milik dan dijaga bersama untuk kepentingan bersama. Nilai – nilai inti adalah kepercayaan sosial (*social trust*) diantara individu – individu dengan lembaga – lembaga politik, dan menjadi dasar sekaligus dukungan penuh untuk terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*).

Pendekatan multiperspektif adalah salah satu cara untuk memperkaya Ilmu Pemerintahan. Sebagaimana pada *cultural studies* pendekatan multiperspektif dengan fokus budaya telah memberikan harapan untuk terjadinya perubahan – perubahan yang berarti terhadap mereka yang terpinggirkan dari kekuasaan.

“McGuigan mengajak *cultural studies* untuk terlibat lebih menyeluruh ke dalam ekonomi politik budaya, yaitu dengan mempertanyakan kepemilikan, institusi, kontrol dan kekuasaan, mengeksplorasi bagaimana momen produksi memasukkan dirinya ke dalam berbagai makna produk budaya. Dia mendukung adanya pendekatan multiperspektif yang menyelidiki hubungan antara ekonomi politik, representasi, teks dan semua orang yang membaca (*audience*) bersama dengan keterlibatan di dalam kebijakan budaya.”²⁷⁷

²⁷⁷ *Op. Cit.*, hal. 383 – 384.

Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan terkait dengan banyak perspektif, ekonomi, politik dan budaya yang masing – masing berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan realitas yang kompleks dan serba tidak terduga. Oleh sebab itu McGuigan mendukung pendekatan multiperspektif dengan keterlibatan budaya, karena semua perspektif termasuk kekuasaan pemerintahan memiliki momen produksi yang menghasilkan produk – produk budaya kekuasaan. *Cultural studies* harus dapat ikut merubah produk – produk budaya kekuasaan untuk mereka yang selama ini terpinggirkan. *Cultural studies*, sosiologi politik dan lain – lain bersama – sama ilmu pemerintahan dapat mengantarkan masyarakat ke arah *civil society*.

Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul “*The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*” (1996), dengan jelas dan cemerlang membuat hipotesis tentang masa depan dunia. Konflik masa depan bukanlah disebabkan persoalan ekonomi, politik, nasionalisme atau pun ideologi tetapi lebih didasarkan pada “budaya.” Definisi budaya dapat dirumuskan, sebagai berikut: kebiasaan – kebiasaan dan keyakinan – keyakinan, seni, cara pandang dalam hidup.” Menurut Huntington, budaya adalah akar dari peradaban, “dengan demikian, peradaban adalah pengelompokan budaya tertinggi dari sekelompok orang dan identitas budaya paling luas yang dimiliki oleh orang – orang yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ia terdefiniskan baik lewat unsur – unsur objektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif.”²⁷⁸

Garis pemisah antara peradaban akan menjelma menjadi garis pertempuran di masa depan. Kutipan kalimat dari Huntington, yang dengan jelas

²⁷⁸ *Ibid.*, hal. 55.

dan cemerlang menggambarkan situasi masa depan dunia. Ilmu Pemerintahan yang secara khusus mempelajari kekuasaan pemerintah, menghadapi tantangan perkembangan yang mendunia. Ilmu pemerintahan tidak saja hanya disibukkan dengan masalah – masalah dalam negeri tetapi juga perkembangan dunia yang global dan cepat sekali.

Kebudayaan yang semula hanya dianggap sebagai identitas dari manusia untuk dibedakan dengan makhluk yang lain, atau menjadi identitas nasional atau negara bangsa dalam perkembangannya menjadi serba penting. Kebudayaan menjadi rumit dan tak terduga arah dan perkembangannya. Apa yang dikatakan oleh *cultural studies* tentang objek studinya.

Salah satu argumen utama *cultural studies* adalah bahwa objek studinya, yaitu kebudayaan, adalah zona perebutan di mana makna dan versi dunia yang saling bersaing harus bertarung untuk agar dianut dan untuk mendapatkan klaim pragmatis atas kebenaran. Secara khusus, makna dan kebenaran dalam domain budaya dibangun di dalam pola – pola kekuasaan. Dalam hal ini ‘kekuasaan untuk menamai’ dan menjadikan kaku deskripsi khas adalah satu bentuk politik budaya. Dalam konteks yang luas, kita bisa memandang politik budaya terkait dengan:

- Kekuasaan untuk menamai;
- Kekuasaan untuk merepresentasikan *common sense*;
- Kekuasaan untuk menciptakan ‘versi resmi’
- Kekuasaan untuk merepresentasikan dunia sosial yang *legitimate* (Jordan dan Weedon, 1995:13)²⁷⁹

Posisi Ilmu Pemerintahan dalam perkembangannya menghadapi realitas kekuasaan. Pemerintah menjadi sangat menentukan dalam segala hal karena memegang kekuasaan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara konstitusional masyarakat dan negara terikat melalui hukum hak dan kewajiban masing – masing. Aspek masyarakat, pemerintah dan kebudayaan

²⁷⁹ *Op.Cit.*, hal. 368.

yang dikaji berdasarkan pemikiran – pemikiran yang berkembang dewasa ini menjadi sangat berharga untuk tidak dipelajari dan dipahami oleh Ilmu Pemerintahan. Salah satu pemikiran yang sedang berkembang adalah pendekatan multiperspektif sebagai salah satu cara dan upaya untuk memahami realitas yang berkembang di masyarakat.

4.5 INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER

Ajaran tentang keanekaragaman (*Doctrine of multiplicity*), berasal dari kata Latin (*multiplicitas*, dalam bahasa Inggris “*manifold*,” “*multifarious*”) kata – kata Inggris dalam kamus bahasa *Oxford*, “*manifold*” berarti “*many*” diterjemahkan “banyak,”; atau “*of many different types*” diterjemahkan “terdiri dari berbagai jenis.” “*Multifarious*” berarti “*of many different kinds*” diterjemahkan “terdiri dari berbagai macam”; atau “*having great variety*” diterjemahkan “memiliki keanekaragaman yang besar.” Inti dari ajaran tentang keanekaragaman bahwa eksistensi tidak hanya satu tetapi ada banyak eksistensi yang lain. “*The universe is composed of a variety of existents that can never be reduced to a Unity or a One.*”²⁸⁰ “Alam semesta terdiri dari keanekaragaman eksistensi yang tidak dapat dikurangi/diturunkan menjadi satu kesatuan atau satu.”

Eksistensi berasal dari kata “*existence*” yang berarti “keadaan atau fakta menjadi nyata atau kehidupan atau kehadiran” (*the state or fact of being real or living or of being present*).²⁸¹ Dalam pengertian ini, eksistensi ada

²⁸⁰ Peter A. Angeles, *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, New York, 1981, pages 181.

²⁸¹ *Op. Cit.*, pages 532.

secara fisik yang dapat diamati oleh pancaindra dan disebut *ontology*²⁸² dan ada secara metafisik yang tidak dapat diamati oleh pancaindra disebut juga *ontology*.

Dengan singkat dapat dikatakan objek material atau bahan umum atau ruang lingkup yang dicakup dalam pembahasan metafisik ialah seluruh realitas, satu pun tidak terkecuali. Objek formal, atau fokus pembicaraan atau bidang khusus yang digeluti metafisika ialah ada sebagaimana adanya. Seluruh realitas yang mau dilihat dari segi metafisika ialah ada sebagaimana adanya (*ens in quantum ens*).²⁸³

Realitas ada fisik dan non fisik adalah seluruh realitas yang disebut dengan *general ontology*. Dari aspek keberadaan sudah terlihat dengan jelas perbedaan antara “eksistensi” dan “ekstensi.” Eksistensi adalah tentang realitas yang ada, sedangkan “ekstensi” adalah tentang ciri yang ada dari benda – benda itu (*ontological status*), misalnya kita berhubungan dengan raga, wujud dan bukan dengan *yang ada* sendiri dalam benda – benda itu.²⁸⁴ Eksistensi yang banyak berarti setiap eksistensi akan memiliki ekstensinya sendiri sebagai pembeda dan identitas dari keberadaannya. Inilah yang dinamakan keanekaragaman.

Samuel Alexander menolak pemikiran yang otokratis dan tidak setuju dengan adanya pemisahan antara idealisme dan realisme. Semua eksistensi sebagai anggota – anggota dari keanekaragaman realitas memiliki bakat – bakat yang dapat dilihat oleh kita semua secara demokratis. Pemikiran bukanlah sumber realitas, tetapi di atas dasar yang sama dengan eksistensi – eksistensi yang lain yang secara demokratis menjadi realitas dari diri masing – masing. Keanekaragaman realitas tidak menerima adanya superioritas tertentu terhadap

²⁸² The philosophical study of existence or being. Robert M. Martin, *The Philosopher's Dictionary*, Broadview press, Canada – USA, 1991, pages 162.

²⁸³ Lorens Bagus, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 27.

²⁸⁴ *Ibid.*, hal. 27.

realitas yang lain. Semua ada sebagaimana adanya dan secara demokratis muncul untuk menunjukkan watak dan bakat yang ada baik itu secara eksistensial maupun secara ekstensi. Pemikiran sebagai salah satu realitas harus menyadari untuk tidak memiliki sifat otoriter terhadap objek – objek realitas yang lain. Semua realitas hakekatnya secara demokrasi memiliki hak yang sama, yaitu eksistensi sebagai realitas dan kewajiban yang sama, yaitu menunjukkan bakat dan wataknya sebagai ekstensinya dalam realitas.

Sedemikian luas dan banyak pemikiran tentang realitas, realitas – realitas utama, dan perasaan sebagai realitas utama dalam manifestasi berupa tanggapan (*perception*) terhadap realitas – realitas yang ada. Dicontohkan ‘masyarakat’ ada yang menganggap sebagai kumpulan dari molekul, kristal, daging bahkan orang. Pemikiran bukanlah sumber realitas, tetapi ia adalah realitas tersendiri yang menunjukkan watak dan bakatnya dalam eksistensi dan ekstensinya. Pemikiran cenderung untuk memiliki keinginan yang besar guna memahami realitas yang lain disamping tentunya realitas terhadap dirinya sendiri.

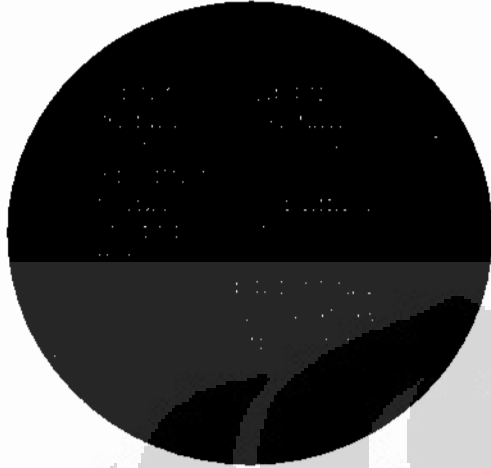
Doctrine of multiplicity, ajaran tentang keanekaragaman eksistensi dalam alam semesta adalah merupakan suatu realitas tersendiri dan tidak untuk dikurangi menjadi satu atau diseragamkan. Realitas berhubungan dengan kata, karena kata adalah lambang dari pengertian. Kata atau *word* berasal dari bahasa Yunani *eirein*, yang artinya *to speak* atau ‘mengatakan’. Mengatakan berhubungan dengan sesuatu artinya ada pengertian. Banyak yang dikatakan berarti banyak yang dihubungkan dengan yang ada. Kata dalam bahasa Latin *verbum*, yang artinya kata atau ungkapan. Dalam kamus bahasa Inggris, *Oxford* diartikan sebagai ‘sebuah satuan tunggal dari bahasa yang berarti sesuatu dan dapat diucapkan atau ditulis’.

Kata dan bahasa adalah lambang dari pikiran manusia. Dalam satu bahasa ada jumlah kata yang tak terhitung banyaknya, karena setiap komunikasi bisa melahirkan kata baru makna baru dan tentu saja pengertian yang baru. Jumlah bahasa – bahasa di alam semesta bukan saja bahasa manusia tetapi juga ada bahasa binatang, alam, roh – roh (*supernatural*)²⁸⁵, dan Roh Kudus/Suci (*Holy Ghost/Holy Spirit*).²⁸⁶ Tidak terhitung jumlah bahasa yang ada sebagai lambang dari pikiran eksistensi dan realitas masing – masing.

Pemerintahan sebagai realitas tersendiri diantara banyak realitas yang lain menjadi salah satu pelaku utama dalam realitas kehidupan di alam semesta ini. Pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, negara, kekuasaan, kesejahteraan, hubungan internasional dan lain – lain memerlukan berbagai pendekatan untuk mempertahankan eksistensi, ekstensi dan realitas politik. Pendekatan – pendekatan interdisipliner dan multidisipliner menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan interdisipliner (*an interdisciplinary approach*) yaitu melibatkan wilayah – wilayah atau objek – objek forma yang berbeda dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempunyai objek material yang sama. Contoh pendekatan interdisipliner antara ilmu pemerintahan, ilmu politik dan ilmu hukum dengan objek material yang sama yaitu pemerintahan.

²⁸⁵ Supernatural, that cannot be explained by the laws of science and that seems to involve gods or magic. AS Hornby, *Op.Cit.*, pages 1540.

²⁸⁶ Holy Ghost = Holy Spirit, A term used to denote the presence or power of God, often imbued with personal or quasi-personal characteristics; in Christian thought considered the third person of the Trinity, alongside the Father and the Son. In Acts, the Church received the Spirit at Pentecost, from which time it continued to direct the Church's missionary activities. Paul not only considered the 'gifts of the Spirit' as empowering various ministries in the Church, but also as associated with the ecstatic practices of speaking in tongues and prophesying (I Corinthians 12 – 14), which continue to feature prominently in Pentecostal churches. Rosemary Goring (edited by), *Dictionary of Beliefs & Religions*, Wordsworth Reference, Great Britain, 1992, pages 223.



MODEL PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Model pendekatan interdisipliner di atas, menunjukkan bahwa kerjasama antar ilmu pengetahuan adalah memungkinkan, terbuka, dibutuhkan dan sebagai realitas tersendiri yang menunjukkan watak dan bakatnya untuk memahami realitas sedalam – dalamnya dan menambahkan arti baru tentang pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas memiliki tiga (3) wilayah (*ontological status*), yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kerjasama diantara masing – masing merupakan model dari pendekatan interdisipliner.

Model pendekatan multidisipliner (*a multidisciplinary approach*) yang berarti, menggabungkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan objek material yang berbeda. Contoh : ilmu pemerintahan, sosiologi dan filsafat.



MODEL PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

Dari contoh model pendekatan multidisipliner tersebut (*a multidisciplinary approach*) untuk memahami realitas tentang pemerintahan, maka berbagai disiplin ilmu pengetahuan bergabung atau terlibat secara bersama – sama menyelidiki eksistensi pemerintahan dari titik tolak yang berbeda, filsafat dari titik pandang bahwa semua realitas adalah menjadi objek filsafat termasuk realitas pemerintahan, sosiologi dari titik pandang bahwa masyarakat adalah

objek material dan pemerintahan sebagai kelembagaan lahir dan dibentuk dari masyarakat, karenanya pemerintahan akan dipelajari secara khusus dalam sosiologi politik sebagai cabang dari sosiologi, dan ilmu pemerintahan yang memandang bahwa pemerintahan dalam arti seluas – luasnya merupakan objek materialnya dan menjadi focus pada objek formanya yaitu pemerintahan dalam arti sempit atau eksekutif sebagai kekuasaan pemerintahan yang melaksanakan dan menegakkan konstitusi kenegaraan.

4.6 KURIKULUM DAN RELEVANSI

Kurikulum adalah alat pendidikan yang dipakai dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu untuk pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kurikulum berasal dari kata Latin '*currere*' yang artinya 'berlari (*to run*); arus (*current*); terus menerus (*a running*); rangkaian pelajaran (*course*); perlombaan (*race*); periode waktu dalam hal mana seseorang menghabiskan waktu hidupnya dengan bekerja atau melakukan suatu pekerjaan khusus (*career*). Jadi kurikulum dapat dirumuskan, sebagai: (1). Suatu rangkaian pelajaran yang ditentukan dan diwajibkan, seperti di perguruan tinggi, untuk menamatkan sekolah, memenuhi persyaratan dalam mata pelajaran utama (2). Semua rangkaian pelajaran, bersama – sama, yang ditawarkan di sekolah, perguruan tinggi, atau dalam pelajaran tertentu.²⁸⁷

Ilmu Pemerintahan adalah bagian dari kurikulum yang diberikan pada perguruan tinggi dan ilmu pemerintahan sebagai nama dari program studi yang ada di perguruan tinggi berarti ilmu pemerintahan memiliki kurikulum

²⁸⁷ Michael Agnes (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Canada, fourth edition 2004, pages 356.

pendidikannya sendiri untuk dapat mencapai tujuan dari diselenggarakannya pendidikan ilmu pemerintahan yaitu menghasilkan sarjana ilmu pemerintahan.

Hampir semua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lainnya di Indonesia mengikuti pola UGM (Universitas Gadjah Mada). Beberapa universitas mempunyai Jurusan Pemerintahan dan Jurusan Hubungan Internasional, sedangkan beberapa hanya mempunyai salah satu saja. Peniruan dilakukan tidak hanya dalam hal organisasi, tetapi juga dalam hal kurikulum. Perkembangan yang demikian bisa dimengerti karena Universitas Gadjah Mada merupakan universitas yang tertua dan terbesar di Indonesia. Selain daripada itu, sebagian besar pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lainnya adalah alumni Gadjah Mada yang cenderung berpedoman kepada almanaternya.²⁸⁸

Peniruan dilakukan tidak hanya dalam hal organisasi, tetapi juga dalam hal kurikulum. Organisasi berasal dari kata Latin, *organum* atau *organ* yang berarti alat (*tool*) atau peralatan (*implement*) dan dapat dirumuskan sebagai suatu cara atau alat untuk pelaksanaan dari beberapa tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peniruan dalam hal organisasi dan kurikulum berarti organisasi yang didirikan meniru bentuk asli dari organisasi awal sebagai pelaksanaan dari kurikulum (serangkaian mata pelajaran) untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Umumnya perguruan tinggi di Indonesia untuk fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mewarisi keadaan yang tidak memiliki karakter dan identitas keilmuan berdasarkan potensi yang ada. Permintaan akan lulusan sarjana ilmu – ilmu sosial sangat tinggi, tetapi ketersediaan sumber daya manusia, organisasi dan kurikulum sangat terbatas atau kurang sekali. Organisasi dan kurikulum

²⁸⁸ Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50 – 51.

meniru universitas pertama di Indonesia sejak awal didirikan, menunjukkan bahwa pendidikan di perguruan tinggi umumnya:

1. Didasarkan atas kebutuhan secara ekonomi dan menangkap peluang pasar yang terbuka.
2. Didasarkan atas sikap dan pandangan 'jalan dulu urusan belakangan'.
3. Didasarkan atas sikap formal, yaitu syarat untuk penyelenggaraan pendidikan harus dilengkapi organisasi, kurikulum dan sumber daya manusia.
4. Didasarkan atas kepentingan daerah, menyangkut prestise dan prestasi.
5. Didasarkan atas sikap tradisi meniru dan meneruskan saja, tanpa kreativitas dan visi pendidikan.

Sumber: Kajian Penulis

Ini semuanya melandasi dan mewarnai kehidupan universitas, tradisi keilmuanpun menjadi hilang karena semuanya meniru dan melanjutkan hal -- hal yang telah dimulai dan dirintis pada universitas tertua di Indonesia (UGM). Sumber daya manusia, organisasi dan kurikulum hanyalah tiruan sehingga produk yang dihasilkan juga adalah tiruan dari aslinya. Keadaan ini berlangsung lama dan mengakar di sebagian perguruan tinggi. Jika sumber daya manusia, organisasi dan kurikulum adalah meniru untuk perjalanan waktu yang lama, maka dapat dibayangkan bagaimana dengan proses pertumbuhan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat? Warisan demikianlah yang

dimiliki salah satunya oleh Ilmu Pemerintahan yang tersendat – sendat pertumbuhannya dan penuh dengan ketidakjelasan dari awalnya.

Pasang surutnya Ilmu Politik di Indonesia kami gambarkan dengan melihat pada perkembangan pengajaran Ilmu Politik di masing – masing universitas selama sepuluh tahun terakhir (1971 – 1981). Dalam buku ini tidak lupa dikemukakan usaha yang telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk menyeragamkan organisasi pengajaran dan kurikulum Ilmu Politik, serta pengembangan tenaga pengajarnya. Melalui penyajian yang demikian diharapkan pembaca dapat lebih memahami tujuan pengajaran dan masalah – masalah yang dihadapi Ilmu Politik di Indonesia.²⁸⁹

Pemerintah bermaksud untuk menyeragamkan organisasi pengajaran dan kurikulum Ilmu Politik, jelas sekali adanya campur tangan pemerintah dengan otoritas kekuasaannya untuk membenahi dan menyeragamkan organisasi dan kurikulum pendidikan yang ada di universitas. Di sisi yang lain kebanyakan universitas masih meniru dan belum memiliki budaya dan tradisi yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan pendidikan yang semu dari sejak jaman kemerdekaan sampai data tahun 1981, menunjukkan betapa rapuh dan lemahnya upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan ini memang kalau dibiarkan terus akan berbahaya dan berakibat pada kehancuran pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu campur tangan pemerintah dalam keadaan krisis dapat diterima, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kehancuran.

Rencana pemerintah untuk membenahi dan menyeragamkan organisasi dan kurikulum pendidikan di universitas timbul bukan dari inisiatif pemerintah

²⁸⁹ Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, *Ibid.*, Kata Pengantar.

atau dunia perguruan tinggi sendiri yang ada di Indonesia, tetapi adanya dorongan dan dana yang berasal dari UNESCO PBB.

Karangan ini, "*Status Report on Political Science in Indonesia*", merupakan laporan yang disusun atas permintaan wakil UNESCO di Bangkok dan yang akan diterbitkan pada akhir tahun 1983 sebagai bagian dari suatu buku berjudul *Status Report on Political Science in Asia*. Dengan izin dari UNESCO maka versi bahasa Indonesia dapat diterbitkan pula pada tahun 1983 ini.²⁹⁰

Momentum pembuatan laporan yang disusun atas permintaan wakil UNESCO di Bangkok, membuka mata pemerintah dan masyarakat akan adanya realitas pendidikan Ilmu Politik²⁹¹ yang masih terbelakang dan tidak jelas arah pengembangan ilmunya. Jadi rencana pemerintah untuk menyeragamkan organisasi pengajaran dan kurikulum Ilmu Politik timbul dari adanya momentum pembuatan laporan untuk keperluan UNESCO PBB. Dapat dibayangkan seandainya UNESCO pada tahun 1981, tidak melakukan proyek pembuatan laporan mengenai pendidikan Ilmu Politik di Indonesia, maka keadaannya di tahun 2000 an sekarang masih jalan di tempat atau mati suri.

Perhatian pemerintah untuk mengembangkan pendidikan khususnya mengenai organisasi pengajaran dan kurikulum Ilmu Politik sangat dirasakan kurang bahkan sama sekali tidak ada. Ternyata bukan saja organisasi pengajaran dan kurikulum ilmu politik yang terabaikan, juga dirasakan oleh ilmu – ilmu lain sampai dengan hari ini.

²⁹⁰ Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, *Ibid.*, Kata Pengantar

²⁹¹ Ilmu Politik dalam arti luas, mencakup: Ilmu Politik (Indonesia), Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Hubungan Internasional. Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, *Ibid.*, hal. 24.

Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di perguruan tinggi secara umum kurang sekali. Bagi pemerintah belum menjadi prioritas untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis dan tradisi dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Oleh karenanya eksistensi dan pengembangan ilmu pengetahuan diserahkan penuh kepada komunitasnya. Jadi pengembangan dari organisasi pengajaran dan kurikulum ilmu politik lebih banyak perhatian dari dunia luar dan disertai dengan dana bantuan untuk pengembangannya.

Dalam tahap merintis eksistensi dan identitas ilmu pengetahuan yang disertai dengan lemahnya organisasi pengajaran dan kurikulum, campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk dapat menyeragamkan organisasi pengajaran dan kurikulum sebagai standarisasi²⁹² pendidikan. Campur tangan pemerintah dalam dunia pendidikan tinggi tidak boleh terlalu lama, karena akan menyebabkan adanya ketergantungan pada pemerintah dan dapat berubah menjadi ideologis.

Campur tangan pemerintah yang terlalu lama dan mendalam pada organisasi pengajaran dan kurikulum akan menjadikannya ideologis, dalam arti apa yang ditetapkan dan diatur akan dianggap serta diyakini menjadi kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari pemerintah memiliki legitimasi hukum tetapi tidak memiliki legitimasi keilmuan. Realitas yang ideologis akan menjadi totalitarisme, yang artinya ‘... menurut analisis Popper suatu sikap dasar yang mengelakkan segala kemungkinan pemeriksaan empiris: tidak hanya tidak dapat dibenarkan atau dibuktikan kebenarannya, melainkan tidak rela juga membuka

²⁹² Standard, a unit of measurement that is officially used when producing something. AS Hornby, *Op.Cit.*, pages 1493.

diri terhadap usaha untuk dibuktikan salah: sebagai tidak empiris, sikap itu luput dari kemungkinan falsifikasi.²⁹³

Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 0223/U/1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) bidang Ilmu Sosial dan Politik yang terdiri dari 11 program studi, yaitu :

1. Ilmu Administrasi Niaga
2. Kriminologi
3. Sosiologi
4. Ilmu Kesejahteraan Sosial
5. Ilmu Sosiatri
6. Antropologi Sosial
7. Ilmu Komunikasi
8. Ilmu Politik
9. Ilmu Hubungan Internasional
10. Ilmu Pemerintahan
11. Ilmu Administrasi Negara

Organisasi pengajaran untuk perguruan tinggi negeri dan kurikulum nasional yang berlaku untuk semuanya, termasuk perguruan tinggi swasta wajib mentaati dan melaksanakan kurikulum tersebut dengan hak untuk mendapatkan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Salah satu program studi yang diatur oleh pemerintah kurikulum nasionalnya, adalah program studi Ilmu Pemerintahan.

I.	MKU (MATA KULIAH UMUM)	10 SKS
	1. Pendidikan Pancasila SKS	2
	2. Pendidikan Agama SKS	2
	3. Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) SKS	2
	4. Ilmu Alamiah Dasar SKS	2

²⁹³ Falsifikasi (*falsification*), to change a written record or information so that it is no longer true. AS Homby, *Op. Cit.*, pages 552. Suatu teori mengalami falsifikasi hanya bila diterima pernyataan – pernyataan dasar yang berkontradiksi terhadapnya. Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 54.

	5. Ilmu Budaya Dasar SKS	2
II.	MKDK (MATA KULIAH DASAR KEAHLIAN)	33 SKS
	1. Pengantar Sosiologi SKS	3
	2. Pengantar Ilmu Politik SKS	3
	3. Pengantar Antropologi SKS	3
	4. Sistem Hukum Indonesia SKS	3
	5. Sistem Ekonomi Indonesia SKS	3
	6. Sistem Sosial Budaya Indonesia SKS	3
	7. Sistem Politik Indonesia SKS	3
	8. Pengantar Statistik Sosial SKS	3
	9. Metoda Penelitian Sosial SKS	3
	10. Asas – Asas Manajemen SKS	3
	11. Dasar – Dasar Logika SKS	3
III.	MKK (MATA KULIAH KEAHLIAN)	33 SKS
	1. Pengantar Ilmu Pemerintahan SKS	3
	2. Metodologi Ilmu Pemerintahan SKS	3
	3. Sistem Pemerintahan Desa SKS	3
	4. Sistem Pemerintahan Daerah SKS	3
	5. Kebijakan Pemerintah SKS	3
	6. Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia SKS	3
	7. Organisasi dan Manajemen Pemerintah SKS	3
	8. Sistem Pemerintahan Indonesia SKS	3
	9. Politik dan Hukum Agraria SKS	3
	10. Birokrasi Indonesia SKS	3

11. Hubungan Pusat – Daerah
SKS

3

T O T A L 76

SKS

Salah satu program studi yang diatur oleh pemerintah kurikulumnya adalah program studi Ilmu Pemerintahan, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0223/U/1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) bidang Ilmu Sosial dan Politik.

NO	MATA KULIAH UMUM	SKS	USULAN PENULIS	SKS	KETERANGAN
01	PENDIDIKAN PANCASILA	2	PENDIDIKAN PANCASILA	2	TETAP
02	PENDIDIKAN AGAMA	2	PENDIDIKAN AGAMA	2	TETAP
03	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN	2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN	2	TETAP
04	ILMU ALAMIAH DASAR	2	-	-	DIHILANGKAN
05	ILMU BUDAYA DASAR	2	ILMU BUDAYA DASAR	2	TETAP
06	-	-	FILSAFAT MORAL	2	BARU
JUMLAH		10	JUMLAH	10	

Untuk kelompok Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) dan kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK) untuk saat ini masih relevan dan memadai. Peningkatan yang mendesak dan diperlukan adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana di lapangan dengan memiliki kompetensi yang memadai.

Jadi rencana pemerintah untuk menyeragamkan kurikulum pendidikan telah tercapai melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0223/U/1995 untuk Bidang Ilmu Sosial dan Politik dan dijadikan

Kurikulum Nasional yang wajib dilaksanakan di setiap unit pendidikan yang menyelenggarakan Bidang Ilmu Sosial dan Politik.

Untuk mengatasi ketidakjelasan dari kurikulum pendidikan Bidang Ilmu Sosial dan Politik yang kebanyakan masih meniru dan membuat sendiri atas kepentingan dan selera masing – masing, maka dirasakan perlu adanya kurikulum nasional yang diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Formalisasi dan uniformasi (*to strive for uniformity*) berusaha supaya tercapai keseragaman dalam pendidikan, melalui standarisasi adalah perlu tetapi hanya untuk mengatasi ketidakpastian dalam pendidikan yang dilatarbelakangi oleh tiru meniru dan kepentingan – kepentingan non pendidikan. Tidak boleh terlalu lama dan berkepanjangan, sebelum dunia pendidikan menjadi dunia dari politik etatisme. Kreativitas dan sifat kritis yang menjadi ciri dari ilmu pengetahuan menjadi hilang dalam formalitas dan uniformitas. Padahal ilmu pengetahuan harus dikritisi untuk menjadi eksis dalam persaingan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan tidak dikembangkan oleh pemerintah tidak juga pemerintahan manapun di dunia. Pemerintah itu substansinya adalah kekuasaan dan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, '*Power tends to corrupt*'. Oleh sebab itu kurikulum nasional bukan seharusnya dibuat oleh pemerintah, tetapi oleh komunitas ilmuwan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Adalah aneh jika pemerintah menyusun kurikulum nasional dari semua program studi yang ada di perguruan tinggi, bahkan sampai jenjang yang paling bawah di Taman Kanak – Kanak. Legitimasi pemerintah untuk dunia pendidikan adalah jaminan mutu pendidikan dan sebagian besar orang memercayai sebagai suatu kebenaran dan bersifat final. Jauh berbeda dengan yang ada di negara – negara lain misalnya Amerika, legitimasi diperoleh dari

komunitas masyarakat ilmuwan menurut bidangnya masing – masing. Pemerintah tidak campur tangan dan tidak menunjukkan sosok kekuasaannya, karena bukan kompetensi dan kewenangannya untuk menangani bidang ilmu pengetahuan.

Penyelidikan ilmiah dimulai sebagai suatu pemberontakan terhadap dogma yang mapan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga politik dan sosial yang berkuasa. Sejarah ilmu pengetahuan berisi tentang beberapa kasus penting dari orang – orang yang berpikir secara berani yang muncul dari laboratorium – laboratorium mereka dengan penemuan – penemuannya dan merupakan ancaman terbesar terhadap pemahaman kemanusiaan dalam berbagai lapangan penyelidikan.²⁹⁴

Tantangan ilmu pengetahuan di Indonesia sangat besar dan berat sekali. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak ada kebebasan akademik dan dapat membuat organisasi pengajaran dan kurikulum secara otonom. Sejarah ilmu pengetahuan membuktikan banyak ilmuwan yang mengorbankan kehidupannya demi keterbukaan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Campur tangan dan dominasi pemerintah dalam dunia pendidikan, hanya diperlukan untuk menertibkan, standarisasi dan prosedur tetapi tidak bisa dipertahankan terus kalau tidak maka kurikulum nasional akan menjadi ideologis dan doktrin. Masa depan ilmu pengetahuan bukan di pemerintah tetapi ada di masyarakat ilmu pengetahuan, di lembaga – lembaga pendidikan dan penelitian, pada komunitas – komunitas jurnal ilmiah.

Merubah pola pikir, tingkah laku dan produk dalam hidup adalah wujud dari kebudayaan dan untuk dapat merealisasikan nilai – nilai fundamental

²⁹⁴ *Scientific inquiry began as a revolt against dogma established and controlled by dominant political and social institutions. The history of science contains some important cases of intrepid analysis who emerged from their laboratories with findings that threatened prevailing understandings in various fields of human inquiry.* Kenneth Hoover and Todd Donovan, *Ibid.*, pages 156.

tersebut diperlukan proses pendidikan yang terus menerus. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengakomodasi nilai – nilai fundamental kebudayaan ke dalam organisasi pengajaran dan kurikulum pendidikan. Kualitas kebudayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh adanya perubahan dan perbaikan terhadap nilai – nilai fundamental kebudayaan. Tujuan dari pendidikan umum adalah sejalan dengan kebudayaan suatu bangsa, inti dari pendidikan adalah adanya perubahan dan perbaikan terhadap nilai – nilai kebudayaan. Kebudayaan tidak ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakatnya, maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesadaran akan nilai – nilai yang baru, pengaruh dan hasil yang lebih baik serta berkualitas dalam wujud kebudayaan dan kehidupan.

Pemerintahan yang baik adalah wujud kebudayaan berdasarkan kesadaran akan nilai – nilai fundamental kebudayaan. Predikat ‘baik’ adalah hasil atau produk masyarakat dan produk itu agar menjadi lebih baik lagi, proses perubahan dan penggantian nilai – nilai lama *authoritarianism* diperlukan guna menjadi nilai – nilai baru *democratically*. Hanya dengan masyarakat yang demokratis, *civil society* dapat terwujud sebagai kerinduan dan keinginan serta kesadaran akan nilai – nilai baru.

4.7 KESIMPULAN

Kekurangan yang ada pada modernisme untuk diteruskan pada postmodernisme, dengan diketahuinya karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan. Identifikasi terhadap karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan dibantu dengan pemahaman subjek dengan objek pada positivisme. Kritik

terhadap positivisme menjadi dasar bagi penguatan karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan.

Nilai – nilai kebaikan dan keburukan bersama adalah modal dalam berkomunikasi untuk mencapai kesepahaman dan kesetaraan. Ilmu Pemerintahan perlu memasukkan etika sebagai bahan utama dalam proses pendidikannya untuk dapat mencapai tujuan pendidikan umum.

Multiperspektif, interdisipliner dan multidisipliner semuanya menghargai perbedaan dan melihat dari sisi – sisi yang lain. Tidak ada dominasi yang ada adalah *interdenominational* untuk mencapai kesepahaman yang dibangun dari komunikasi dan kesetaraan.

Ilmu Pemerintahan sebagai Program Studi yang diajarkan di Perguruan Tinggi memiliki kurikulum pendidikan. Evaluasi dan perbaikan sangat mendesak dilakukan agar kurikulum tidak menjadi instrumentasi kekuasaan yang tersembunyi khususnya dari pemerintah. Kurikulum diharapkan menjadi alat komunikasi sebagai bentuk kesepakatan bersama yang ingin mewujudkan kepentingan bersama melalui *civil society*.

BAB V

P E N U T U P

5.1 KESIMPULAN

Tema utama dalam penelitian disertasi ini, adalah tentang “Epistemologi Ilmu Pemerintahan.” Penulis merasakan secara langsung, bagaimana sulit dan kaburnya penjelasan – penjelasan yang diberikan selama ini tentang Ilmu Pemerintahan. Kesulitan dalam memahami Ilmu Pemerintahan menjadi pendorong bagi penulis untuk lebih menekuni bidang filsafat sebagai sarana pencerahan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Filsafatlah yang dapat menjelaskan tentang terjadinya pengetahuan, sumber – sumber pengetahuan, objek dan ruang lingkup pengetahuan serta metodologi dan teori tentang pengetahuan.

Ilmu Pemerintahan mengalami kegagalan dalam menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi, bahkan keberadaan Ilmu Pemerintahan diragukan dan dianggap sebagai pelengkap dari Ilmu Politik yang lebih siap segala – galanya. Ini adalah “krisis ilmu pengetahuan,” yang menurut Thomas Kuhn ditandai dengan kemandegan teori dan pengembangannya. Ketidakjelasan tentang definisi dan konsep mengenai Ilmu Pemerintahan menyebabkan banyak fenomena yang tidak dapat diterangkan untuk dapat dibuat kesimpulan sebagai rekomendasi – rekomendasi yang kritis.

Ilmu Pemerintahan dikelompokkan sebagai *political sciences*, disamping Ilmu Politik sendiri dan Ilmu Hubungan Internasional. Terdapat juga seperti Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Tata Pemerintahan, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara yang objek materialnya sama tentang pemerintahan. Timbul

pertanyaan epistemologis, apa bedanya antara Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu-ilmu yang sejenis, misalnya Ilmu Politik? Pertanyaan yang sangat sulit dijawab, dari sudut pandang masing – masing, seperti Ilmu Pemerintahan ataupun Ilmu Politik. Penulis menemukan titik terang melalui filsafat, sebagai upaya permulaan yang membedakan masing – masing ilmu pengetahuan berdasarkan *focus of interest* nya.

Untuk menjelaskan Ilmu Pemerintahan, peneliti menggunakan *Thesis Statement*, yang menjadi penuntun bagi peneliti dalam menjelaskan dan menjawab masalah – masalah utama. Adapun pemikiran yang menjadi *thesis statement* penulis, adalah sebagai berikut: kedudukan Ilmu Pemerintahan bukan pada epistemologi positivistik tetapi pada epistemologi pragmatis yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Interpretasi/Hermeneutik menurut Gadamer. Artinya “hermeneut” dapat mengadakan interaksi, sebagaimana yang terjadi dalam dialog atau dialektika antara yang umum dan yang individual. Dialog komunikatif melibatkan tiga kelas ekspresi kehidupan, yaitu : bahasa (linguistik), tindakan dan pengalaman. Juga digunakan metode “heuristika” yaitu upaya peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang Ilmu Pemerintahan dengan mempelajari referensi serta dapat memberikan rumusan yang jelas tentang konsep – konsep pemerintahan berdasarkan analisa kritis dan reflektif.

Kerangka teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti, adalah teori epistemologi dari Karl R. Popper, untuk ilmu pengetahuan yang bertumbuh dan menjadi pengetahuan ilmiah yang objektif. Ilmu pengetahuan yang pada mulanya adalah untuk mencerahkan dan mensejahterakan manusia dapat berubah menjadi

suatu ideologi dan bersifat totalitarianisme. Ilmu Pemerintahan disadari atau tidak telah “menyimpang” dari jalur ilmu pengetahuan menjadi sarana ideologis dan totalitarian. Penjelasan atas penyimpangan tersebut berdasarkan teori epistemologi Popper.

Untuk melihat tahap – tahap perkembangan Ilmu Pengetahuan, maka peneliti menggunakan teori Thomas Kuhn tentang Siklus Historis. Teori Kuhn menjadi sangat penting dan relevant dengan upaya epistemologis pragmatis untuk memberi pemahaman yang lebih baik terhadap Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dipahami keberadaan Ilmu Pemerintahan.

Penelitian ini memiliki sejumlah tujuan dan manfaat, antara lain tujuannya adalah upaya penulis untuk memperoleh substansi pemahaman yang lebih dalam mengenai Ilmu Pemerintahan dan menciptakan dialog ilmu yang kritis dan reflektif antara filsafat dan ilmu pemerintahan. Beberapa manfaat penelitian ini adalah: memberikan pengalaman baru yang mampu memperkaya makna atas fenomena – fenomena yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Dunia realitas yang serba tidak pasti dan berubah setiap saat, memerlukan rujukan dan pedoman dalam kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini berupaya agar ilmu pemerintahan dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi yang pragmatis, kritis dan *reliable* untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Dalam pembahasan mengenai Sejarah Pemikiran Tentang Negara pada abad ke 17, ada dua jenis teori tentang asal usul negara yang didalamnya terdapat substansi pemerintahan. Teori pertama dapat dinamakan dengan Negara Teokrasi, yaitu Negara yang kekuasaannya diyakini diperoleh dari Tuhan atau

“Hukum Alam”. Teori yang kedua dapat dinamakan dengan Negara Pemerintahan Sipil yang didasarkan teori Perjanjian Sosial dari John Locke.

Sumber otoritas untuk Negara Teokrasi adalah Tuhan dan untuk Negara dengan Pemerintahan Sipil sumber otoritasnya adalah persetujuan rakyat terhadap yang memerintah. Dijelaskan juga inti dari *civil society* versi John Locke, yaitu:

1. Keadilan, yang berlaku bagi setiap orang.
2. Kesejahteraan, untuk semua makhluk hidup.
3. Keamanan, untuk setiap orang.
4. Hak asasi, untuk setiap orang.
5. Demokrasi

Konsep otokrasi dan demokrasi dibedakan, otokrasi berarti kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh seorang individu dengan kewenangan yang tidak terbatas, sedangkan konsep demokrasi berarti pemerintahan atau penguasa yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan rakyat.

Keselamatan dan kedamaian kata Thomas Hobbes adalah perhatian utama dari semua orang yang secara sukarela menyerahkan hak untuk memerintah atas dirinya sendiri kepada orang atau majelis orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkan keselamatan dan kedamaian bersama. Baik Rousseau dan Hobbes mempunyai pandangan yang sama tentang Perjanjian Sosial yang intinya adalah keselamatan dan kebahagiaan bersama dalam masyarakat yang pemimpinnya di angkat oleh mereka sendiri dengan perjanjian yang dibuat bersama – sama.

Pengawasan Politik dibedakan dengan Pengawasan Publik. Dalam konsep Pengawasan Politik berarti pengawasan yang dilakukan oleh lembaga –

lembaga legislatif dan yudikatif terhadap pemegang kekuasaan yaitu pemerintahan (eksekutif). Pengawasan Politik dalam arti luas yaitu pengawasan terhadap ruang lingkup pemerintahan dalam arti luas (internal) berdasarkan *checks and balances*³²⁷ dan ditujukan untuk kepentingan demokrasi sedangkan Pengawasan Politik terhadap yang diperintah (external) berdasarkan *domineering*³²⁸ dan ditujukan untuk kepentingan otokrasi.

Sentralisasi adalah terminologi kekuasaan pemerintahan dari suatu negara. Sentralisasi adalah semua kekuasaan dan keputusan yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut ada pada suatu lembaga atau perorangan. Biasanya sentralisasi kekuasaan terjadi pada negara dengan sistem otokrasi. Desentralisasi berarti memecahkan suatu pemusatan dari kewenangan atau kekuasaan pemerintah ke dalam beberapa wilayah utama dan menjadikannya sebagai perwakilan dari pusat serta menyebarkannya dengan lebih luas.

Perbandingan antara sentralisasi dan desentralisasi dapat diperoleh beberapa pengertian:

1. Sentralisasi lebih berpihak kepada elite penguasa, sedangkan desentralisasi lebih berpihak kepada rakyat.
2. Sentralisasi bertujuan menciptakan homogenitas, sedangkan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan pluralitas.
3. Sentralisasi menciptakan kekakuan (*rigid*) dan kekerasan (*violence*) sedangkan desentralisasi menciptakan kelonggaran dan kebebasan (*freedom*).

³²⁷ Checks and balances, rules that are designed to control the amount of power, especially political power, that one person or group has. AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford – New York, seventh edition 2005, pages 251.

³²⁸ Domineering, trying to control other people without considering their opinions or feelings. *Ibid.*, pages 453.

4. Sentralisasi melahirkan masyarakat yang keras dan bersahaja (*rude society*) sedangkan desentralisasi melahirkan masyarakat yang humanis dan toleran (*civil society*).

Strong Government, pemerintahan yang kuat dalam arti luas karena 'kuat' bukan dalam satu pengertian fisik atau dalam pengertian non fisik, tetapi bermakna banyak dan saling terkait satu sama lain. Pemegang kekuasaan atas suatu masyarakat memerlukan kekuatan yang besar untuk dapat mengendalikan 'hasrat yang bebas dan tak terkendali', sehingga Thomas Hobbes menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan sebaiknya menjadi seperti 'Leviathan'.³²⁹

Good Governance, dapat diterjemahkan dengan 'tata kelola dengan baik'. Kata *governance* dari negara adalah cara dalam hal mana negara melalui pemerintahannya dikuasai. *Governance* dari suatu perusahaan atau organisasi adalah cara dalam hal mana perusahaan atau organisasi itu dikelola. Perbandingan antara *governance* dan *government* terlihat dengan jelas perbedaan antar unsur – unsurnya. Pada unsur – unsur *governance* semuanya merupakan fungsi dan kegiatan yang merupakan aspek dinamikanya, sedangkan unsur – unsur pada *government* semuanya merupakan manusia dan organisasinya yang merupakan aspek statisnya.

Pada penulisan tentang perubahan paradigma Ilmu Pemerintahan dibahas antara lain mengenai gerakan atau aliran pemikiran modernisme yang diawali oleh Descartes sampai dengan Kant, yaitu antara tahun 1630 – 1790. Pemikiran – pemikiran Descartes, yang ditulis dalam beberapa bukunya menjadi

³²⁹ Leviathan, apapun yang kelihatannya besar atau yang sangat hebat/berkuasa. Ayat terakhir dari pasal 41 Kitab Ayub Perjanjian Lama, di mana Leviathan dinamakan sebagai Raja yang teramat perkasa dan menakutkan. Juga menurut Alkitab, seekor mahluk yang besar dan menakutkan, berbagai pemikiran melukiskannya sebagai seekor binatang melata atau seekor ikan paus.

sumber inspirasi dari gerakan modernisme dalam berfilsafat. Yang dimaksud dengan 'modernisme' di bidang filsafat adalah gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasi oleh Descartes, dikokohkan oleh gerakan Pencerahan (*Enlightenment/Aufklärung*), dan mengabadikan dirinya hingga abad kedua puluh ini melalui dominasi sains dan kapitalisme.

Filsafat mengalami masa kemunduran di jaman positivisme, karena direduksi menjadi sama kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan yang empiris. Ilmu – ilmu pengetahuan yang lain berlomba – lomba untuk mencontoh teladan dari ilmu pengetahuan yang empiris serta membuktikan sebatas fakta itu sendiri. Keunggulan positivisme dari Auguste Comte, adalah: objek yang dibahas adalah nyata, memiliki kegunaan mengutamakan ketepatan, kepastian, bersifat organik artinya terdiri dari beberapa bagian yang keseluruhannya saling berhubungan satu sama lain, relatif yang artinya untuk dipertimbangkan dan diberi penilaian serta membandingkan dengan yang lain, serta pengetahuan yang menaruh perhatian terhadap persoalan – persoalan yang ada (*sympathetic knowledge*). Positivisme mengalami masa kejayaan di jaman industrialisasi dan menghasilkan perdamaian, kemajuan dan ketertiban sosial di akhir abad ke 18 dan abad ke 19.

Seiring dengan krisis epistemologis, kritik terhadap modernisme muncul antara tahun 1960 – 1970 dan periode tersebut melahirkan gerakan postmodernisme. Dalam kamus bahasa "*Oxford Advanced Learner's*," kata tersebut dijelaskan sebagai berikut: "suatu gaya dan gerakan dalam seni, arsitektur, kepustakaan, dan lain – lain di akhir abad ke 20 yang bereaksi terhadap gaya – gaya modern, sebagai contoh dengan mencampurkan ciri – ciri dari gaya tradisional dan modern."

Hakikat dari postmodernisme adalah reaksi terhadap semua hal yang berpredikat modern. Reaksi muncul dari ketidakpuasan terhadap pemikiran, praktek, dan situasi yang ada. Reaksi melihat ada potensi untuk lebih baik lagi jika dikritik dan dirubah dan perubahan itu adalah mekanisme pokok dalam proses modernisasi. Inti dari pemahaman Lyotard, bahwa postmodern adalah bagian dari modern, dan postmodern adalah keadaan yang barusan lahir (*modo*) dan akan terus berulang sesuai dengan reaksi yang diberikan terhadap sesuatu untuk diperbaiki menjadi lebih baik dan modern. Perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat dari generasi ke generasi, intinya postmodernisme bukanlah modernisme dalam bentuk akhir, tetapi ia barusan saja lahir untuk menjadi modern kembali.

Pendapat Lyotard tentang postmodernisme adalah sebagai proses yang tidak pernah berhenti untuk mencari kebaruan, eksperimentasi, dan revolusi kehidupan terus menerus. Postmodernisme bukanlah akhir dari modern, tetapi baru saja mulai berubah untuk kemudian menjadi modern kembali dan tidak pernah meninggalkan modernisme, karena postmodernisme adalah bagian dari modernisme. Hal – hal yang negative adalah objek kritik yang memunculkan postmodernisme, tetapi bukan saja hal – hal negatif, hal – hal yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang lemah, yang berbeda, yang tidak ada, untuk semuanya dirubah dan menjadi positif dalam postmodernisme.

Universalisme adalah aliran pemikiran yang sudah dirintis oleh Socrates dan Plato dan mencapai puncak perkembangannya pada jaman pertengahan dan awal abad ke 19. Universalisme adalah pandangan atau pemikiran berdasarkan kepada sesuatu yang *universally*, artinya “jika sesuatu diyakini atau diterima sebagai universal, maka hal tersebut diyakini atau diterima

oleh setiap orang dengan tidak ada penolakan” atau “jika sesuatu adalah benar secara universal, maka hal tersebut adalah benar di mana saja di dalam dunia atau dalam segala situasi.” Inilah yang menjadi arti dari terminologi universalisme. Universalisme dalam konteks filsafat atau ilmu pengetahuan memiliki konsep pengertian, seperti adanya taraf kepastian dalam ilmu empiris dan ilmu pasti (rasional).

Perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima awalnya sebagai kebenaran universal, mengalami proses introspeksi untuk dipertimbangkan kembali segala sesuatunya dan dicari pemikiran baru yang lebih baik dan tetap menghormati kebebasan dalam kegiatan atau cara kerja dalam ilmu pengetahuan guna menghasilkan kebenaran yang tidak lagi universal tetapi ada juga kebenaran yang partikular, sehingga kebenaran nampaknya tidak lagi satu tetapi ada kebenaran yang lain.

Realitas kebenaran yang ada ternyata lebih dari satu dan keadaan ini merubah pandangan dari semula kebenaran hanyalah satu dan universal menjadi kebenaran lebih dari satu dan dinamakan kebenaran partikular. Pluralisme, artinya pemikiran yang tidak hanya didasarkan kepada suatu perangkat tunggal yang terdiri dari prinsip – prinsip atau keyakinan – keyakinan tertentu, atau di dalam pluralisme juga terdapat keyakinan yang memungkinkan dan memberi peluang adanya perbedaan dalam prinsip – prinsip atau keyakinan – keyakinan yang ada dalam suatu masyarakat. Perangkat tunggal dengan prinsip – prinsip dan keyakinannya dianggap tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri, ada kebenaran lain dalam perangkat majemuk dengan prinsip – prinsip dan keyakinan yang lain.

Pemberontakan Kuhn terhadap positivisme ataupun neopositivisme, adalah wujud dari adanya keyakinan dan prinsip yang berbeda terhadap pemikiran yang dianggap “*trendsetter*” pada jamannya serta dianggap sebagai kebenaran yang universal. Pemberontakan Kuhn adalah memunculkan paradigma baru dari dirinya yang bertentangan dengan paradigma yang berlaku dan telah dianggap sebagai kebenaran yang universal. Munculnya paradigma baru menambah jumlah paradigma yang ada, dari satu yang dianggap berlaku universal sekarang ada paradigma lain yang menentang dan meniadakan paradigma awal.

Positivisme ke kritisisme, membahas teori komunikasi dan konsep masyarakat komunikatif. Pangkal dari kritisisme adalah Filsafat Kesadaran yang berwujud rasio pada manusia dan satu – satunya penentu kebenaran serta menjadi paradigma tunggal. Habermas mengkritiknya dan mengatakan untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala paksaan dan cacat – cacat modernisasi seperti otoritarianisme dan ideologi perlu ada komunikasi yang setara seperti orang berbicara dan dimengerti oleh yang lain. Pengertian inilah tujuan dari tindakan komunikasi untuk mewujudkan masyarakat komunikatif dalam bentuk kritik – kritik, baik kepada masyarakatnya dan pendekatan – pendekatan ilmiah yang dipakai dalam ilmu pengetahuan.

Disamping kritisisme, juga dibedakan beberapa pandangan tentang kebenaran, seperti: *correspondence theory of truth*, *coherence theory of truth*, *pragmatic theory of truth* dan *performative theory of truth*. Tokoh Richard Rorty yang mewakili postmodernisme mengatakan bahwa metodologionalisme ilmu pengetahuan tradisional telah berakhir melalui dekonstruksi (*deconstruction*). “...konstruksi dalam filsafat itu dengan sendirinya harus serentak destruksi, yaitu

dekonstruksi konsep – konsep tradisional dengan cara justru kembali ke tradisi ...”. Peran yang paling diharapkan oleh Rorty, agar para filsuf dapat menjadi edifiers (*edifying*) yang berperan untuk mendatangkan perbaikan untuk ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Salah satu perannya adalah menjaga agar ilmu pengetahuan tidak membangun jalan yang aman bagi masa depannya, sehingga tertutup terhadap kritik dan perubahan yang mengharapkan ilmu pengetahuan menjadi lebih dapat diandalkan lagi bagi umat manusia.

Unsur yang paling penting dalam suatu negara adalah masyarakat disamping tentunya wilayah sebagai dasar pijakan hidupnya, dan dari unsur masyarakatlah kemudian lahir pemerintahan, kedaulatan dan adanya pengakuan dari negara lain. Peranan pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan amat menentukan kehidupan dari masyarakatnya. *Civil society* adalah tujuan dasar dari setiap negara demokrasi yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah.

Konsep *civil society* dari Karl Marx ini sangat berhubungan erat dengan teori perjanjian sosial dari John Locke yang menjelaskan secara kronologis dari negara alami (*state of nature*) menjadi negara perjanjian sosial (*state of social contract*). Hakekat *civil society* Karl Marx, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menikmati hak kepemilikannya (*property*). Hak kesetaraan (*equality*) berlaku sama untuk semua orang, baik itu untuk melindungi maupun untuk menghukum. Hak keamanan adalah jaminan yang diberikan kepada setiap warga negara atas perlindungan dirinya, hak – haknya dan kepemilikannya.

Akar dari kebangsaan adalah keluarga yang berarti ada hubungan langsung antara bangsa, masyarakat dan keluarga. Semakin jelas hubungan ikatan

sosialnya semakin kuatlah negara kebangsaannya sebaliknya semakin tidak jelas hubungan ikatan sosialnya semakin rawan konflik dalam negara kebangsaannya. Nasionalisme yang menjadi realitas baik di negara – negara maju ataupun di negara – negara berkembang adalah gabungan pengertian dari nasionalisme. Gabungan pengertian nasionalismenya, adalah:

1. Adanya sekelompok orang dengan kesamaan identitas dan keinginan untuk mendirikan negara yang merdeka.
2. Setelah mendirikan negara yang merdeka, timbulah perasaan cinta tanah air yang berlebihan dengan menganggap negaranya sendiri adalah yang terbaik di antara negara – negara yang lain.

Nasionalisme yang berorientasi global adalah ciri negara untuk dapat *survive* di abad ke 21 dan yang akan datang. *Internationalism*, adalah ciri dan gaya pergaulan negara – negara di dunia, yaitu keyakinan terhadap negara – negara di dunia untuk dapat bekerja sama dalam suatu cara yang bersahabat. Orientasi global dan sikap internasional menjadi *attribute* negara bangsa. Tanpa adanya kesadaran tersebut akan menyebabkan ketegangan dan konflik hingga perbenturan kebudayaan antara bangsa – bangsa di dunia.

Dalam pembahasan tentang Epistemologi Ilmu Pemerintahan dijelaskan tentang terminologi, etimologi kata pemerintahan dan definisi Ilmu Pemerintahan. Secara tradisional Ilmu Pemerintahan juga harus diketahui dengan jelas apa yang menjadi sumber, objek dan metodologinya. Dasar penentuan dari objek Ilmu Pemerintahan adalah mengikuti pendapat dari Montesquieu adanya kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, yang mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pemerintahan dalam arti sempit hanya eksekutifnya saja.

Kejelasan objek dari Ilmu Pemerintahan dibagi ke dalam objek material dan objek formanya:

1. Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas – luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Setiap ilmu pengetahuan memiliki identitas sendiri sebagai yang membedakan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu Pemerintahan dibedakan dengan ilmu – ilmu lainnya karena memiliki objek forma yang jelas, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Definisi Ilmu Pemerintahan adalah sebagai Ilmu Sosial yang memiliki kepentingan teknis untuk menguasai dan mampu menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan dengan sebaik – baiknya dan juga kepentingan praktis guna mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama atas dasar kesetaraan.

Dimensi etika dalam pemerintahan berarti prinsip – prinsip, nilai – nilai, dan pengertian serta kemampuan untuk tahu membedakan mana perilaku benar dan salah, perbedaan antara nilai benar dan nilai salah. Mampu mengikuti standard perilaku yang didasarkan kepada pertimbangan penerimaan dan anggapan benar oleh kebanyakan orang. Dimensi etika dalam pemerintahan adalah mendasar dan sangat melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari ujung puncak sampai dengan ujung bawah kekuasaan pemerintahan bernapas dengan dimensi etika, karena masyarakat berada disepertinya seperti air yang ada di mana – mana.

Pendekatan multiperspektif sangat erat kaitannya dengan *multicultural* dengan basis masyarakat yang ada dalam suatu negara. Pada dasarnya manusia itu tidaklah satu macam tetapi ada banyak macam manusia, dan representasi pada masyarakatnya menjadi *heterogeneous*. Memahami realitas masyarakat sosial yang demikian kompleks dan dinamis tidak cukup jika hanya dikaji dengan pendekatan monodisipliner atau hanya dari satu perspektif saja.

Cultural Studies, selalu merupakan bidang penelitian multi dan postdisipliner yang mengaburkan batas – batas antara dirinya dan subjek yang lain. *Cultural Studies* berhubungan dengan kekuasaan dan politik, dengan kebutuhan untuk memperoleh adanya perubahan bagi kelompok – kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan multiperspektif dalam Ilmu Pemerintahan adalah bentuk multidisipliner. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan eksekutif dengan segala hal ihwalnya tentu sangat relevant dengan pendekatan multiperspektif dari *cultural studies*.

Pendekatan interdisipliner dan multidisipliner didasarkan kepada inti dari ajaran tentang keanekaragaman bahwa eksistensi tidak hanya satu tetapi ada banyak eksistensi yang lain. Dalam pengertian ini, eksistensi ada secara fisik yang dapat diamati oleh pancaindra dan disebut *ontology* dan ada secara metafisik yang tidak dapat diamati oleh pancaindra disebut juga *ontology*.

Model pendekatan interdisipliner (*an interdisciplinary approach*) yaitu melibatkan wilayah – wilayah atau objek – objek forma yang berbeda dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempunyai objek material yang sama. Menunjukkan bahwa kerjasama antar ilmu pengetahuan adalah memungkinkan, terbuka, dibutuhkan dan sebagai realitas tersendiri yang menunjukkan watak dan bakatnya untuk memahami realitas sedalam – dalamnya dan menambahkan arti

baru tentang pemerintahan. Model pendekatan multidisipliner (*a multidisciplinary approach*) yang berarti menggabungkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan objek material yang berbeda.

Kurikulum dan evaluasi adalah alat – alat pendidikan yang dipakai dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu untuk pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ilmu Pemerintahan adalah bagian dari kurikulum yang diberikan pada perguruan tinggi dan Ilmu Pemerintahan sebagai nama dari program studi yang ada di perguruan tinggi berarti Ilmu Pemerintahan memiliki kurikulum pendidikannya sendiri untuk dapat mencapai tujuan dari diselenggarakannya pendidikan Ilmu Pemerintahan yaitu menghasilkan sarjana Ilmu Pemerintahan.

Umumnya perguruan tinggi di Indonesia untuk fakultas ilmu sosial dan ilmu politik mewarisi keadaan yang tidak memiliki karakter dan identitas keilmuan berdasarkan potensi yang ada. Permintaan akan lulusan sarjana ilmu – ilmu sosial sangat tinggi, tetapi ketersediaan sumber daya manusia, organisasi dan kurikulum sangat terbatas atau kurang sekali. Pemerintah bermaksud melalui kurikulum nasional untuk menyeragamkan organisasi pengajaran dan kurikulum Ilmu Politik, jelas sekali adanya campur tangan pemerintah dengan otoritas kekuasaannya untuk membenahi dan menyeragamkan organisasi dan kurikulum pendidikan yang ada di universitas. Campur tangan pemerintah yang terlalu lama dan mendalam pada organisasi pengajaran dan kurikulum akan menjadikannya ideologis dan totalitarianisme, dalam arti apa yang ditetapkan dan diatur akan dianggap serta diyakini menjadi kebenaran.

5.2 CATATAN KRITIS

Epistemologi Ilmu Pemerintahan adalah upaya pemikiran yang dilakukan oleh penulis secara kritis terhadap keberadaan, paradigma, prinsip, objek dan ruang lingkup serta batas - batas Ilmu Pemerintahan. Keberadaan Ilmu Pemerintahan yang tidak jelas prinsip dan metodologinya menimbulkan keraguan di kalangan sarjana – sarjana Ilmu – Ilmu Sosial dan Politik.

Objek dari Ilmu Pemerintahan ada dua, yaitu objek material yang menyangkut pemerintahan dalam arti yang luas mencakup eksekutif, legislatif dan yudikatif serta objek forma yang menyangkut pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu yang menyangkut eksekutif saja. Kejelasan tentang objek menjadi sangat penting dalam pembahasan disertasi ini, karena diperlukan untuk membedakan antara ilmu – ilmu yang dikelompokkan secara bersama – sama, seperti: Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum Tata Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Negara.

Prinsip dan metodologi Ilmu Pemerintahan didasarkan atas adanya hubungan yang setara, kritis dan komunikatif antara subjek dan objek, baik rasionalisme yang berawal pada subjek ataupun empirisme positivistik yang berakhir pada subjek juga, keduanya menyembunyikan kekuasaan: “istilah Habermas” yang bermakna hubungan yang terjadi antara subjek dan objek adalah hubungan yang tidak adil. Subjek memiliki kebebasan untuk menentukan objek, tidak terjadi komunikasi kesepahaman (*dialog*) di antara keduanya, yang terjadi adalah komunikasi monolog (*monologue*). Kritik Habermas, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dan netral serta tidak dapat direduksi menjadi *unified science*.

Rasionalitas instrumental yang menjadi paradigma kebenaran secara tradisional dan universal ternyata menurut Habermas selama ini

menyembunyikan kekuasaan. Perubahan paradigma ilmu pemerintahan dari rasionalitas instrumental diupayakan untuk menjadi rasionalitas emansipatoris.

Thesis Statement peneliti adalah, epistemologi sebagai kerangka pemikiran yang juga sarana ilmiah untuk menganalisa secara kritis dan reflektif terhadap Ilmu Pemerintahan, yang menitikberatkan pada pemahaman atas paradigma, prinsip dan metodologi ilmu pengetahuan dan batas - batas pengetahuan ilmiah dan siklus historis ilmu pengetahuan, serta kritik terhadap ilmu pengetahuan.

Hakekat ilmu pengetahuan adalah untuk mencerahkan dan mensejahterakan manusia, campur tangan pemerintah yang berkepanjangan dan meliputi organisasi pengajaran dan kurikulum akan menjadikan ilmu pengetahuan bersifat ideologis dan totalitarianisme. Ilmu Pemerintahan perlu dibebaskan dari belenggu subjektivisme ataupun objektivisme yang berpangkal pada subjek pengetahuan.

Kurikulum nasional sebaiknya tidak dibuat oleh pemerintah tetapi dibuat oleh komunitas ilmu pengetahuan sendiri. Campur tangan pemerintah akan menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi tidak demokratis dan kreatif, bahkan cenderung menjadi ideologis dan totalitarian. Kepentingan, kekuasaan dan pengaruh yang meliputi pemerintahan akan dengan mudah disalahgunakan oleh orang - orang yang tidak memahami tentang filosofi pendidikan, dan pengembangan Ilmu Pemerintahan.

Tujuan Ilmu Pemerintahan adalah untuk kepentingan umat manusia, keselamatan dan kesejahteraan yang utama. Tujuan akhir ini harus ditempatkan sebagai di atas segala - galanya dan mengalahkan segala - galanya tanpa toleransi sedikitpun. Ilmu Pemerintahan bukanlah agen pembangunan atau agen

pembaharuan yang bertindak sebagai *instrumental action* dengan tujuan keberhasilan menaklukkan objek untuk kepentingan pemerintah yang lebih besar.

Kritik – kritik terhadap ilmu pengetahuan adalah bentuk dialog antara umat manusia dengan ilmu pengetahuan untuk membangun kepercayaan, kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Kritik menurut Popper akan menumbuhkan ilmu pengetahuan dan menambah derajat kebenaran, objektivitas melalui intersubjektivitas. Tradisi kritik dan budaya kritik masih perlu dipupuk untuk dikembangkan dan disebarluaskan di kalangan ilmuwan.

Keluarga – keluarga membentuk masyarakat dan akhirnya masyarakat membentuk negara. Pemerintah adalah salah satu unsur dari negara disamping unsur – unsur lainnya seperti wilayah dan penduduk. Sedemikian pentingnya unsur – unsur Negara yang ada, sehingga perlu dipelajari serta ditekuni bidang pengetahuannya untuk menghasilkan elemen – elemen yang berkualitas. Kepentingan pragmatis adalah salah satu dari latarbelakang adanya Ilmu Pemerintahan. Jika di suatu negara terjadi banyak kerusuhan, huru hara, ketiadaan keamanan dan kepastian hukum itu berarti Negara ada dalam status Alami artinya Negara tanpa Pemerintahan (Thomas Hobbes).

Negara Agama melahirkan otokrasi dan Negara Perjanjian Sosial melahirkan demokrasi. Otokrasi akhirnya menjadi totalitarianisme sedangkan demokrasi akhirnya menjadi pluralisme. Negara demokrasi adalah Negara yang sepatutnya menghormati pluralisme bukan dengan paksaan atau pun demi kepentingan umum yang lebih besar, karena ada kesepakatan tentang kekuasaan yang disembunyikan dibalik itu semua. Ada yang harus rela berkorban demi yang besar atas nama kepentingan umum yang lebih besar. Jadi perlu komunikasi yang

terbuka dan setara untuk membangun, “Negara untuk semua dan bukan semua untuk Negara.”

Lawan dari otokrasi adalah demokrasi, jika otokrasi bersumber pada otoritas suci dan individu manusia, maka demokrasi bersumber dari otoritas rakyat. Perbedaan sumber memiliki konsekuensi yang tidak sama. Negara demokrasi akan memerhatikan sumber – sumbernya, memelihara dan menjaga jangan sampai sumber – sumber yang ada cenderung untuk digantikan sumber – sumber lain baik karena alasan kecewa ataupun takut.

Masyarakat yang sudah modern berubah menjadi bertentangan adalah sakit karena unsur hakekatnya rusak yaitu ‘kesamaan’ dan ‘kesatuan’ menjadi tidak kokoh lagi. Perbedaan menjadi ‘perpecahan’, fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan komunikatif dari fungsi pemerintahan dijalankan untuk mencapai masyarakat yang damai.

Pengawasan politik menjadi penting, karena pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh legislatif terhadap eksekutif dalam menyelenggarakan negara agar hakekat demokrasi dapat terwujud dalam kehidupan bernegara. Jika pusat dan wilayah – wilayah yang tersebar luas dalam negara membentuk dengan sadar, ‘mesin kenegaraan’ guna menciptakan perwujudan politik yang menjadi dambaan bersama melalui proses yang dinamakan ‘desentralisasi’ politik atau kekuasaan maka penduduk akan merasakan secara langsung tindakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya.

Strong Government and Good Governance adalah pilar dari demokrasi untuk menciptakan *civil society*. *Strong Government and Bad Governance* adalah pilar dari otokrasi dan menciptakan *rude society*. Strategi pemerintah untuk membangun pilar demokrasi, berangkat dari keprihatinan dan kenyataan

sosial politik, yaitu melalui konsep *incommensurability* adalah juga keprihatinan implisit postmodern terhadap paksaan – paksaan totaliter yang bersembunyi di balik konsep – konsep universal yang berlagak netral, niscaya, objektif, dan melampaui sejarah serta konteks.³³⁰ Postmodernisme sangat membela ‘yang lain’ (*The Other*) dengan segala kelainannya. Dalam diskursus tentang soal ini sebenarnya tersirat suatu keprihatinan bahwa sejarah umat manusia ini selalu diwarnai oleh usaha – usaha menundukkan dan menyingkirkan ‘yang lain’ di bawah ‘yang sama’ (*The Same*).³³¹

Pada dasarnya manusia itu tidaklah satu macam tetapi ada banyak macam manusia, dan representasi pada masyarakatnya menjadi *heterogeneous*. Memahami realitas masyarakat sosial politik yang demikian kompleks dan dinamis tidak cukup jika hanya dikaji dengan pendekatan monodisipliner atau hanya dari satu perspektif saja. Inti dari ajaran tentang keanekaragaman bahwa eksistensi tidak hanya satu tetapi ada banyak eksistensi yang lain, sehingga muncullah pendekatan interdisipliner dan multidisipliner

Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia yang kelihatan baik secara indrawi maupun pemikiran, jasmani dan rohani oleh karenanya tidak penting dengan apa yang disebut dunia kenyataan (*the world of reality*). Ilmu pengetahuan adalah hasil dari konstruksi pemikiran manusia untuk memahami terhadap dunia yang kelihatan baik secara jasmani maupun rohani. Dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam konsep Ilmu Pemerintahan menjadi jelas.

Kurikulum Nasional tidak mencantumkan mata kuliah Etika sebagai mata kuliah wajib bagi para mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

³³⁰ *Incommensurability* (tidak dapat dibandingkan), F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 198.

³³¹ F. Budi Hardiman, *Ibid.* hal. 198.

dikhawatirkan mereka akan menjalankan roda -- roda pemerintahan tanpa etika. Etika adalah sikap atau perilaku yang sesuai dan diterima oleh kebanyakan orang, dan itu juga dapat disebut bermoral. Selain diartikan sebagai sikap atau perilaku, etika dan filsafat moral adalah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu cabang dari filsafat.

5.3 REKOMENDASI

1. Pemikiran terhadap Ilmu Pemerintahan melalui epistemologi adalah upaya untuk merubah paradigma positivisme menjadi paradigma kritisisme.
2. Karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan dijelaskan melalui gerakan modernisme ilmu pengetahuan yaitu positivisme dan *unified science*, untuk kemudian diteruskan menjadi ilmu pengetahuan dengan paradigma komunikatif.
3. Dominasi pemerintahan yang terlalu lama terhadap organisasi pengajaran dan kurikulum akan menyebabkan Program Studi Ilmu Pemerintahan menjadi ideologis dan sangat tergantung kepada pemerintah serta ilmu pengetahuannya menjadi tidak kreatif sehingga perlu segera diakhiri.

4. Paradigma tunggal Ilmu Pemerintahan yang berpusat pada rasio instrumental diupayakan untuk dapat dirubah menjadi paradigma rasio komunikatif yang menekankan kesetaraan tanpa ada struktur kekuasaan.
5. Disamping ada komunitas ilmu pemerintahan perlu juga diadakan Temu Ilmiah Ilmu Pemerintahan sebagai sarana pengembangan Ilmu Pemerintahan yang dinamis dan berkembang.
6. Pertemuan tahunan atau berkala diantara komunitas Ilmu pemerintahan perlu diadakan baik pada tingkat nasional, regional ataupun internasional sebagai bagian dari pengembangan Ilmu Pemerintahan yang dinamis dan berkembang.
7. Paradigma Ilmu Pemerintahan perlu dikaji ulang dengan menggunakan teori – teori kepentingan kognitif Habermas dan teori kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan bersama.
8. Tugas pokok Ilmu Pemerintahan adalah merubah mitos kekuasaan (kekuasaan dianggap sebagai sakral, dan

raja adalah suci dan wakil dari Tuhan), menjadi realitas kekuasaan.

9. Masa depan bangsa yang serba tidak pasti dan didera oleh krisis yang terus menerus, menuntut agar Ilmu Pemerintahan dapat mempertajam analisis, prediksi dan memperbaharui metodologi, paradigma ilmu pengetahuannya untuk masa depan bangsanya.
10. Hubungan antara Pemerintah dan yang diperintah akan menjadi setara, harmonis dan komunikatif jika Ilmu Pemerintahan dapat menjalankan fungsi eksekutif dengan sebaik-baiknya dan selalu mengedepankan posisi *communicative action* untuk mencapai kebersamaan, melalui *strategic action* yaitu interaksi yang dilakukan secara terbuka.
11. Otoritas sumber-sumber pengetahuan dari Ilmu Pemerintahan tidak boleh didasarkan hanya kepada otoritas birokrat, senioritas, ataupun kekuasaan politik tetapi harus didasarkan kepada sumber – sumber empirisisme, rasionalisme, dan gabungan diantara keduanya, kritik – kritik terhadap ilmu pengetahuan atau kritisisme.

12. Pemahaman tentang Negara Alamiah (tanpa pemerintahan) seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya fungsi pemerintahan yang dibangun berdasarkan Perjanjian Sosial untuk tidak bersikap lemah dengan kejahatan, kekacauan sosial politik, hukum dan ekonomi, serta segala bentuk totalitarianisme.

13. Demokrasi lahir seiring dengan adanya manusia, karena demokrasi adalah kehidupan bersama dan untuk kepentingan bersama sehingga harus dapat dijaga bersama – sama juga sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjalankan semuanya.

14. Negara demokrasi adalah bagian dari *civil society* dan sebagai infrastruktur sosial politik bagi terwujudnya *civil society* yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

15. Hasil penelitian terakhir di bidang demokrasi politik menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi ‘demokrasi’ dewasa ini adalah adanya ketimpangan sosial ekonomi yang berlangsung secara terus menerus.

16. Semakin baik kondisi sosial ekonomi maka semakin baik pula perkembangan kondisi demokrasi politik suatu masyarakat dan semakin terbuka peluang ke arah terwujudnya *civil society*.

17. Kekuasaan harus dibatasi (*limited*) dan diawasi (*control*) sebab fungsi utama dari kekuasaan pemerintah adalah untuk menetapkan (secara mutlak) alternatif – alternatif bertindak bagi sebesar – besarnya kepentingan rakyat banyak.

18. Sentralisasi dan desentralisasi adalah prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari desentralisasi bukanlah otonomi yang seluas – luasnya sehingga menimbulkan adanya negara dalam negara tetapi kembali pada konsep dasar yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

19. Indonesia adalah sebuah negara yang sudah memiliki predikat *Strong Government* tetapi tidak memiliki *Good Governance*, karena fungsi – fungsi pemerintahan (keamanan, kesejahteraan, kebebasan dan keadilan) masih belum terwujud dan jauh dari harapan serta proses penyelenggaraan pemerintahannya harus diperbaiki dan diawasi.

20. Ilmu Pemerintahan sedang mengalami perubahan paradigma. Dari paradigma tunggal ke paradigma timbal balik, dari positivisme ke pragmatisme kemudian ke kritisisme. Paradigma modernisme ke postmodernisme. perubahan ini harus disikapi dengan arif dan dijadikan upaya pencerahan untuk dapat lebih memahami realitas.

21. Ilmu Pemerintahan memiliki kedekatan dengan pemerintah yang memegang kekuasaan dan sekaligus menjalankan kekuasaan karenanya secara sadar harus mengambil jarak. Agar supaya Ilmu Pemerintahan tidak bersifat ideologis dan totalitarianisme.

22. Masyarakat Komunikatif adalah masyarakat yang dibangun secara strategis dengan nilai – nilai demokratis dan kesejahteraan, karenanya pemerintah dan Ilmu Pemerintahan sebagai agen komunikasi harus memulai tindakan komunikatif (kesetaraan dan dialog) dalam menjalankan fungsi – fungsinya.

23. *Civil Society* adalah buah dari demokrasi, karenanya pemerintah dan masyarakat harus bersama – sama

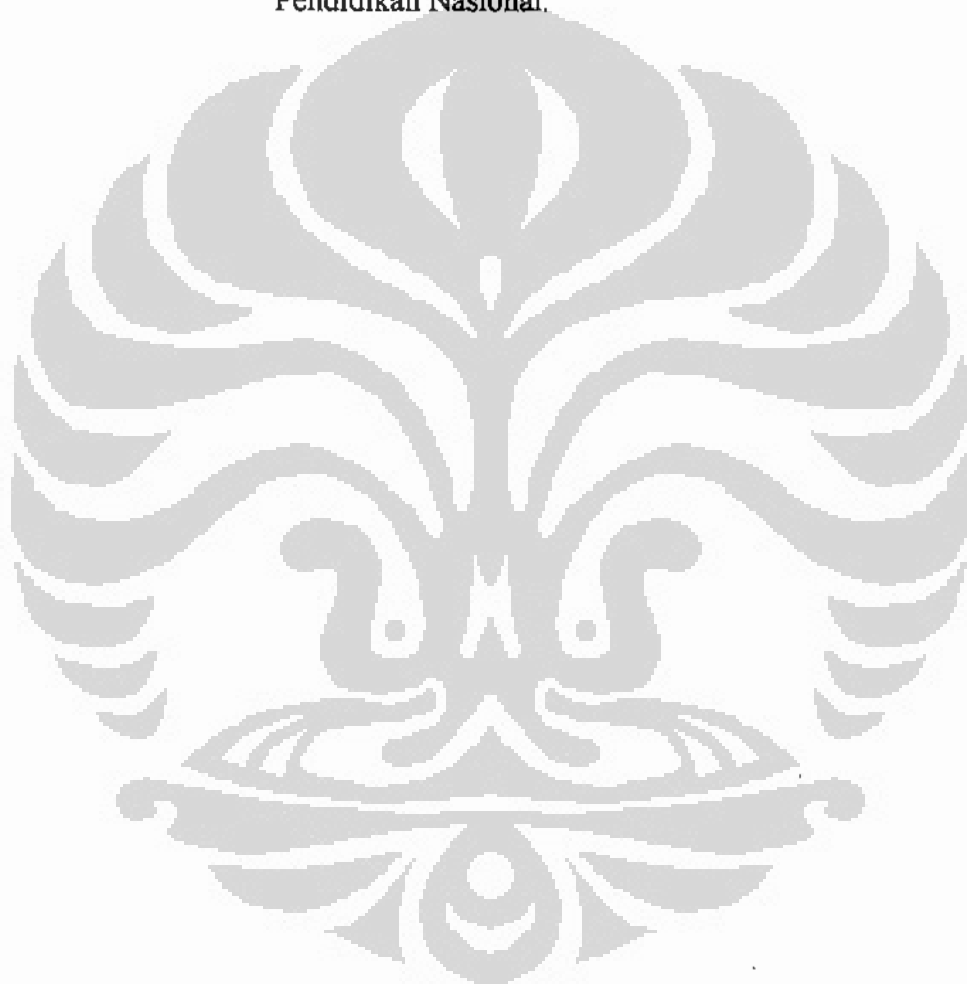
memahami hak dan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam konstitusi dan melakukan *checks and balances*.

24. Nasionalisme masih relevant dengan adanya globalisasi, artinya tujuan bersama dalam negara bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, lebih tertib dan sejahtera. Kebersamaan dalam nasionalisme melebihi ikatan apapun termasuk kesatuan – kesatuan sosial yang mendahuluinya. Oleh karenanya selama ada Negara dan pemerintahan sebagai unsurnya akan ada nasionalisme sebagai wujud dari kebersamaan yang perlu dibangun untuk tujuan bersama.

25. Teori kepentingan kognitif dari Habermas dipilih dan dijadikan proses untuk memahami realitas dengan lebih baik terutama hubungannya dengan masyarakat dan sikap Ilmu Pemerintahan yang harus terbuka dengan kritik – kritik dan dinamika pemikiran .

26. Dengan diketahuinya karakteristik dan identitas Ilmu Pemerintahan maka paradigma, prinsip dan metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Peranan Ilmu Pemerintahan dapat ditingkatkan sebagai ilmu pengetahuan yang pragmatis dan kritis dalam pengembangan demokrasi dan *civil society*.

27. Penyelenggaraan pendidikan Ilmu Pemerintahan yang sekarang terjadi adalah adanya dualisme, yaitu: Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional. Perlu dibenahi agar pendidikan Ilmu Pemerintahan dikembalikan kepada Departemen Pendidikan Nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfian, Hidayat Mukmin (editor), *Perkembangan Ilmu Politik Di Indonesia serta Peranannya Dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Appignanesi, Lisa (Edited by), *Postmodernism*, Free Association Books, London, 1989.
- _____, *Mengenal Posmodernisme*, penerjemah Ziauddin Sardar dan Patrick Curry, Mizan, Bandung, cetakan ke IV 1999.
- Apter, David E., *Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- _____, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Arbib, Michael A., *The Construction of Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
- Arendt, Hannah, *Asal Usul Totalitarisme*, penerjemah A. Agus Nugroho dan J.M. Soebijanta, 3 jilid, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Awuy, Tommy F., *Problem Filsafat Moderen dan Dekonstruksi*, Lembaga Studi Filsafat, Jakarta, 1993.
- Bagus, Lorens, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Baird, Forrest E. and Walter Kaufmann, *Medieval Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1994.
- _____, *Nineteenth Century Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1997.

- _____, *Twentieth Century Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1997.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubain, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Barker, Chris, *Cultural Studies*, Penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan ke dua Februari 2005.
- Bergmann, Gustav, *Realism*, The University of Wisconsin Press, Madison – Milwaukee – London, 1967.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- _____, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- _____, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kesepuluh 1993.
- _____, *Perspektif Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Black, Algernon D., *Etika*, terjemahan staf Yayasan Cipta Loka Caraka, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1990.
- Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer*, Alih Bahasa Ahmad Norma Permata, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, Juli 2003.
- Bochenski, I.M. , *Contemporary European Philosophy*, translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1956.
- Budi Hardiman, F., *Kritik Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- _____, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

- Budianto, Irmayanti M., *Realitas dan Obyektivitas*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan ke tiga 1991.
- Budiardjo, Miriam dan Maswadi Rauf, *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Cahn, Steven M., *Classics of Political and Moral Philosophy*, Oxford University Press, New York – Oxford, 1994.
- Chilcote, Ronald H., *Theories of Comparative Politics*, westview press, Boulder – San Francisco – Oxford, 1994.
- Cohen, I. Bernard, *A History of Science*, Cambridge University Press, Cambridge, reprinted 1989.
- Collins, James, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 4th printing 1961.
- Dahl, Robert, et. al. (edited by), *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts – London, 2003.
- Dampier, Sir William Cecil. *A History of Science*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- De Crespigny, Anthony and Jeremy Cronin, (edited by), *Ideologies of Politics*, Oxford University Press, South Africa, 1975.
- De Tocqueville, Alexis, *Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*, penerjemah Yusi A. Pareanom, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

- Driyarkara, N., *Filsafat Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kesebelas 1992.
- Edman, Irwin, (Edited), *The Philosophy of Plato*, The Modern Library, New York, 1956.
- Faulks, Keith, *Political Sociology*, Edinburg University Press, Great Britain, 1999.
- Finer, Herman, *Modern Government*, Methuen, London, 1956.
- Flew, Antony, *Western Philosophy*, Thames and Hudson, New York, reprinted 1994.
- Fontana, Biancamaria, (edited), *The Invention of The Modern Republic*, Cambridge University Press, Great Britain, 1994.
- Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Memperkuat Negara*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- _____, *Guncangan Besar*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, Crossroad, New York, 1992.
- Gaffar Karim, Abdul, (editor) *Persoalan Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Gensler, Harry J., *Ethics*, Routledge, London – New York, reprint 2003.
- Geuss, Raymond, *The Idea of a Critical Theory*, Cambridge University Press, Cambridge – New York, reprinted 1989.
- Guba, Egon G., *The Paradigm Dialog*, Sage Publications, Newbury Park – London – New Delhi, 1990.
- Gunawan, Jamil dkk., *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.

- Habermas, Jürgen, *Teori Kritis Jürgen Habermas, The Critical Theory of Jürgen Habermas*, penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan pertama September 2006.
- _____, *The Theory of Communicative Action*, volume 1, translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1984.
- _____, *Kritik atas Rasio Fungsionalis, Theorie des Kommunikativen Handelns, band II*, penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan pertama Maret 2007.
- Hadi, P. Hardono, *Epistemologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Jati Diri Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 1 s/d 4, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, jilid 1 dan 2, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kedelapan 1992.
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Hawgood, John A., *The Citizen and Government*, Nicholson & Watson, London, 1947.
- Heidegger, Martin., *Discourse on Thinking*, Harper Torchbooks, New York, 1966.
- _____, *Being and Time*, Oxford, Great Britain, reprinted 1973.
- Heraty, Toeti, *Aku Dalam Budaya*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.
- Heriyanto, Husain, *Paradigma Holistik*, Teraju, Jakarta, 2003.
- Heryanto, Ariel dan Sumit K. Mandal, *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004.

- Hindess, Barry, *Philosophy and Methodology in the Social Sciences*, The Harvester Press, Great Britain, 1977.
- Hobbes, Thomas., *Leviathan*, Collins Fontana, Great Britain, Seventh Impression 1974.
- Hoefnagels, Harry, *Wat Heet Sociaal*, Amboboeken/Baarn, Westland nv – Schoten, 1983.
- Hoogerwerf, A., *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- _____, *Politikologi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Hoover, Kenneth and Todd Donovan, *The Elements of Social Scientific Thinking*, Thomson Wadsworth, Canada, 2004.
- Horgan, John, *The End of Science, (Senjakala Ilmu Pengetahuan)*, Penerjemah Djejen Zainuddien, Teraju, Jakarta, Cetakan ke I, September 2005.
- Howard, Roy J., *Hermeneutika*, penerjemah Kusmana dan M.S. Nasrullah, Nuansa, Bandung, cetakan ke 2 April 2001.
- Huntington, Samuel P., et.al. *Amerika dan Dunia*, penerjemah Yusi A. Pareanom dan A. Zaim Rofiqi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
- Hutten, Ernest H., *The Origins of Science*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1962.
- Johnson, Terence J., *Profesi dan Kekuasaan*, Grafiti, Jakarta, 1991.
- Kebung Beoang, Konrad, *Plato Jalan Menuju Pengetahuan Yang Benar*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende – Flores, cetakan ke ix 1993.

- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, London, 1962.
- Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Bentang, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, Mizan, Bandung, 2002.
- Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy*, Oxford University Press, Great Britain, 2002.
- Langer, Susanne K., *Philosophy in a New Key*, Harvard University Press, New York, eleventh printing 1961.
- Laski, Harold J., *A Grammar of Politics*, George Allen & UNWIM LTD, London, 1957.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri*, Gramedia, Jakarta, edisi yang disempurnakan 1989.
- Leakey, Richard, *Asal Usul Manusia*, penerjemah Andya Primanda, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Lee, HDP., *Plato The Republic*, Penguin Books, London, reprinted 1960.
- Leech, Geoffrey, *Principles of Pragmatics*, Longman, London – New York – Singapore, eighth impression 1991.
- Lévi – Strauss, Claude, *Mitos dan Makna*, Marjin Kiri, Serpong – Tangerang, 2005.

- Lindsay, A.D., *The Modern Democratic State*, Oxford University Press, London - New York - Toronto, 1955.
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Akademia, Bogor, 2004.
- _____, *Metodologi Posmodernis*, Akademia, Bogor, 2004.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott (Penyunting), *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Liotard, Jean Franqois, *The Differend Phrases in Dispute*, University of Minnesota Press, Minneapolis, second printing 1992.
- _____, *The Postmodern Explained*, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1992.
- Machiavelli, Niccolo, *The Prince and The Discourses*, Modern Library College Editions, New York, 1950.
- _____, *Sang Penguasa (Il Principe)*, penerjemah C. Woekirsari, Gramedia, Jakarta, cetakan keenam 2002.
- MacIver, R.M., *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1941.
- _____, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, 1963.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- _____, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- _____, *Filsafat Kebudayaan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Malaka, Tan, *MADILOG (Materialisme Dialektika Logika)*, Pusat Data Indikator, Jakarta, 1999.

- Mangunhardjana, A., *Isme – Isme Dari A sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Mannheim, Karl, *Ideologia dan Utopia*, terjemahan F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Mayo, Henry B., *Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- McClelland, J.S., *A History of Western Political Thought*, London and New York, Routledge, 1996.
- Melling, David, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002.
- Merriam, Charles E., *Systematic Politics*, University of Chicago, 1957.
- Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan*, alih bahasa J.R. Sunaryo, Gramedia, Jakarta, Juli 1993.
- Muhaimin, Yahya dan Colin MacAndrews, *Masalah – Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kedua 1981.
- Musa, Mohammad dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Fajar Agung, Jakarta, 1988.
- Myerson, George, *Heidegger, Habermas and the Mobile Phone*, Icon Books, Cambridge, UK, 2001.
- Nasroen, M., *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke dua, Maret 1983.
- _____, *Kybernology*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan pertama Mei 2003.

- Norris, Christopher, *The Truth about Postmodernism*, Blackwell Publishers, UK – USA, 1993.
- _____, *Minding the Gap*, University of Massachusetts Press, USA, 2000.
- Paul, Leslie, *The English Philosophers*, Faber and Faber, London, 1952.
- Paz, Octavio, *Lévi – Strauss Empu Antropologi Struktural*, LKIS, Yogyakarta, 1997.
- Plato, *The Republic*, Penguin Books, Great Britain, 1960.
- Plato, , *Republik*, G. Sukur, Sylvester (Penerjemah) Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002.
- Piaget, Jean, *Psychology and Epistemology, Towards a Theory of Knowledge*, Penguin Books, Singapore, 1972.
- Piliang, Indra J., dkk. (editor), *Otonomi Daerah*, Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Jakarta, 2003.
- Poespoprodjo, W., *Logika Scientifika*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Poespowardojo, Soerjanto, *Strategi Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas*, penerjemah F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Popper, Karl R., *Conjectures and Refutations*, Harper & Row, New York London, 1968.
- _____, *Objective Knowledge, an evolutionary approach*, London, Oxford University Press, 1972.
- _____, *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge, New York, Reprinted 1992.

- Porter, JM., (edited by), *Sophia and Praxis*, Chatham House Publishers, Inc.,
Chatham, New Jersey, 1984.
- Qadir, C.A., *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
1988.
- Rand, Ayn, *Epistemologi Obyektif*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.
- Rapar, Jan Hendrik, *Filsafat Politik Augustinus*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- _____, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- _____, *Filsafat Politik Machiavelli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- _____, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Reichenbach, Hans, *The Rise of Scientific Philosophy*, University of California Press,
Berkeley and Los Angeles, 1968.
- Reinsch, Paul S., *The Fundamental Principles of Government*, Commercial Press,
LTD, Shanghai, 1921.
- Ricoeur, Paul, *Interpretation Theory*, Texas Christian University Press, For Worth,
1976.
- _____, *Filsafat Wacana*, penerjemah Musnur Hery, Institut for Religion and
Civil Society Development, Yogyakarta, cetakan ke II 2003.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah
Alimandan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga 2002.
- _____, *Teori Sosial Postmodern*, Penerjemah Muhammad Taufik, Kreasi
Wacana, Yogyakarta, cetakan ke tiga September 2005.

- Roberts, David, *Reconstructing Theory*, Melbourne University Press, Malaysia, 1995.
- Rooijackers, Ad., *Mengajar dengan Sukses*, penerjemah Soenoro, Grasindo, Jakarta, cetakan kedelapan 1991.
- Rorty, Richard, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1979.
- Rosen, Michael and Jonathan Wolff (edited), *Political Thought*, Oxford University Press, Great Britain, 1999.
- Ross, Alf, *Why Democracy*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1952.
- Runua, Nung (editor), *Dinamika Politik Indonesia*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994.
- Russell, Bertrand, *Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat*, penerjemah Irwanto dan Robert Haryono Imam, Gramedia, Jakarta, 1992.
- _____, *Our Knowledge of the External World*, Routledge, London – New York, reprinted 1993.
- _____, *Sejarah Filsafat Barat*, penerjemah Sigit Jatmiko dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sabine, George H. and Thomas L. Thorson, *A History of Political Theory*, Harcourt Brace College Publishers, USA, 1989.
- Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies*, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, seventh edition, 1987.

- Seidman, Steven, and Wagner, David G., *Postmodernism and Social Theory*, Blackwell Publishers, Great Britain, reprinted 1992.
- Shah, A.B., *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Shapiro, Ian, *Asas Moral Politik*, penerjemah Theresia Wurjantari dan Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Simon, Yves R., *Philosophy of Democratic Government*, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1951.
- Simpson, George Gaylord, *The Meaning of Evolution*, Oxford University Press, New York, ninth printing 1959.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Solomon, Robert C. & Kathleen M. Higgins, *Sejarah Filsafat*, penerjemah Saut Pasaribu, Benteng Budaya, Yogyakarta, Cetakan ke 2, Juni 2003.
- Sorensen, Roy, *A Brief History of the Paradox*, Oxford University Press, Oxford -- New York, 2003.
- Skinner, Quentin, *The Return of Grand Theory in The Human Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
- Smith, T.V. and Marjorie Grene (edited by), *From Descartes to Locke, the* University of Chicago Press, Chicago -- London, tenth impression 1974.
- Spencer, Herbert, *The Man versus The State*, Watts & Co., London, 1950.
- Stoker, Gerry, *The Politics of Local Government*, Macmillan, London, 1991.
- Strathern, Paul, *90 Menit Bersama Plato*, penerjemah Frans Kowa, Erlangga, Jakarta, 2001.

- _____, *90 Menit Bersama Aristoteles*, penerjemah Frans Kowa, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Strauss, Claude Le'vi, *Mitos dan Makna*, Alih bahasa LP Hok, Marjin Kiri, Tangerang, 2005.
- Subangun, Emmanuel, *Syuga Derrida*, CRI Alocita, Yogyakarta, 1994.
- Sugiharto, I. Bambang, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Susanto, Budi, dan Praptadiharja Sudiarja (editor), *Nilai – Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1992.
- Susanto, Hary, PS., *Mitos*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Sutrisno, Mudji dan F. Budi Hardiman (editor), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan pertama Mei 1995.
- Syafrudin, Ateng (saduran), *Pemerintah dan yang Diperintah*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan ke VI 2005
- Taryadi, Alfons, *Epistemologi Pemecahan Masalah*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Thoha, Mahmud, *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial & Humaniora*, Teraju, Jakarta, 2004.

- Thoyibi, M. (editor), *Filsafat Ilmu*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999.
- Tim Redaksi Driyarkara, *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu – Ilmu*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Tower Sargent, Lyman, *Contemporary Political Ideologies*, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1987.
- Tsanoff, Radoslav A., *The Great Philosophers*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1953.
- Utomo, Tjipto dan Kees Ruijter, *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Van der Meulen, W.J., *Ilmu Sejarah dan Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ke 2, 1991.
- Van Laer, Henry, *Filsafat Sain*, Lembaga Penterjemah & Penulis Muslim Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Van Melsen, A.G.M., *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Van Peursen, C.A., Beerling, Kwee, dan Mooij, *Filsafat Ilmu*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.
- _____, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Verhaak, C. dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Verhaar, John W.M., *Identitas Manusia*, Kanisius – BPK, Yogyakarta – Jakarta, cetakan kedua 1991.

Watioly, Aholiab, *Tanggung Jawab Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Whitehead, Alfred North, *Fungsi Rasio*, diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Wit, Daniel, *Comparative Political Institutions*, Henry Holt and Company, New York, 1953.

Wrong, Dennis (editor), *Max Weber*, penerjemah A. Asnawi, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2003.

Wuthnow, Robert, et.al., *Cultural Analysis*, Routhledge & Kegan Paul, Boston – London, 1984.

B. KAMUS BAHASA, KAMUS FILSAFAT DAN ENSIKLOPEDIA

Angeles, Peter A., *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, USA, 1981.

Agnes, Michael (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Inc., USA, fourth edition 2004.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975.

Ehrlich, Eugene, Stuart Berg Flexner, Gorton Carruth, Joyce M. Hawkins, *Oxford American Dictionary*, Avon Books, New York, 1986.

Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.

- Hawkesworth, Mary and Maurice Kogan, *Encyclopedia of Government and Politics*, volume 1 and 2, Routledge, London – New York, 1992.
- Hawkins, Joyce M., *The Oxford Paperback Dictionary*, Oxford University Press, Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, Seventh edition, 2005.
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, Seventh edition, 2005.
- Martin, Robert M., *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada – USA, 1991.
- Marwoto, BJ dan Witdarmono, H., *Proverbia Latina*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Mish, Frederick C., (editor in chief), *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, USA, Philippines, tenth edition, 2000.
- Neufeldt, Victoria, (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, USA, Third Edition, 1996.
- Prent, K., Adisubrata, J., Poerwadarminta, WJS., *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Sinclair, John, *Cobuild English Dictionary for Advanced Learners*, Harper Collins Publishers, Spain, third edition 2001.
- Stevens, Mark. A. (editor), *Merriam – Webster's Collegiate Encyclopedia*, Merriam – Webster Incorporated, Springfield – Massachusetts, USA, 2000.
- Treffry, Diana, *Collins Paperback English Dictionary*, Harper Collins Publishers, Great Britain, 2003.

Webster's, Merriam, *Collegiate Thesaurus*, Merriam – Webster Incorporated, USA, 1988.

Wehmeier, Sally (chief editor), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, seventh edition 2005.

C. JURNAL DAN TESIS

Driyarkara, Tahun XIX No. 4, *Kritik Ilmu dan Ilmu Kritis*, STF Driyarkara, Jakarta, 1992/1993.

_____, Tahun XX No. 2, *Kekuasaan Negara dan Legitimasinya*, STF Driyarkara, Jakarta, 1993/1994.

_____, Tahun XX No. 4, *Menggali Perspektif Baru Post Modernisme*, STF Driyarkara, Jakarta, 1993/1994.

_____, Tahun XXVI No. 2, *Pemikiran Filosofis Negara*, STF Driyarkara Jakarta, tanpa tahun.

Jurnal Filsafat, Tahun I No. 1, *Postmodernisme*, Lembaga Studi Filsafat dan Institute for Philosophy and the Future of Humanity, Jakarta, tanpa tahun.

Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial, No. 2, *Dari Otonomi ke Disintegrasi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu – Ilmu Sosial Universitas Indonesia dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Jurnal Ilmu Politik, No. 1, *Perkembangan Teori dan Analisis Situasi Sosial Politik*, AIPI – LIPI – Gramedia, Jakarta, 1989.

_____, No. 14, *Hubungan Negara dengan Masyarakat*, AIPI – LIPI – Gramedia, Jakarta, 1993.

Melintas, Tahun 19 No. 60, *Konflik Sebagai Wacana Afirmatif*, Jurnal Filsafat dan Teologi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Agustus 2003.

Van Ylst, Franciscus, *Hakekat Ilmu Pemerintahan*, Tesis S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Filsafat, Jakarta, 1998.

D. SURAT KABAR

Kompas, *Taruhan Jalan Desentralisasi*, hal. 7, 27 Maret 2007.

_____, *Eksistensi Ilmu Murni Terancam*, edisi Jawa Barat, 30 Mei 2007.

_____, *Kurikulum Beridentitas Kerakyatan*, hal. 14, 31 Mei 2007.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

N a m a : Franciscus van Ylst

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 September 1953

A g a m a : Kristen Protestan

A l a m a t : Taman Kopo Indah I Blok F No. 75
RT 07 RW 15 Bandung 40226
Jawa Barat

Pekerjaan : Dosen tetap pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung

N I P : 131122442

Pangkat/golongan/jabatan : Penata TK. I/III/d/Lektor Madya

Nama ayah kandung : Willem van Ylst (alm.)

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama ibu kandung : Griet Charlotte de Haas (alm.)

Nama isteri : Marthina Hehakaya

Pekerjaan : Badan Urusan Logistik (BULOG)
Divisi Regional Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta No. 711 A Bandung
40286

Nama anak : Margrieta Christina

Pekerjaan : Siswa SMAK 1 Bina Bakti

B. PENDIDIKAN

1. Lulus Sekolah Dasar dari Lembaga Pendidikan Sosial Kristen Bandung tahun 1966.
2. Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Yayasan Badan Pendidikan Umum Bandung tahun 1973.
3. Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Yayasan Badan Pendidikan Umum Bandung tahun 1975.
4. Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1981, dengan judul skripsi: Suatu Tinjauan tentang Peranan Walikotamadya Sebagai Kepala Wilayah Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Sarjana S2 Ilmu Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta tahun 1998, dengan judul tesis: Hakekat Ilmu Pemerintahan.
6. Studi S3 Ilmu Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok tahun 2008, dengan judul disertasi: Epistemologi Ilmu Pemerintahan: Tinjauan Kritis tentang karakteristik dan Identitas keilmuan.

C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Guru SMP Katolik Pandu Bandung tahun 1981 – 1983.
2. Guru SMP Katolik Yos Sudarso Bandung 1981 – 1983.
3. Guru SMA Ampera Bandung 1984.

4. Dosen tetap pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung 1982 – sekarang.
5. Dosen tidak tetap pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Bandung 1995 – 1997.
6. Dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung 1995 – 1997.
7. Dosen tidak tetap pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Yayasan Kartika Eka Paksi Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi tahun 2003 – sekarang.

D. ORGANISASI

1. Ketua OSIS SMA Yayasan Badan Pendidikan Umum Jl. Lombok Bandung tahun 1975.
2. Anggota Paduan Suara Gereja Sidang Jemaat Allah Jl. Merdeka No. 32 Bandung 1976 – 1979.
3. Ketua Kaum Muda Gereja Sidang Jemaat Allah Jl. Merdeka No. 32 Bandung 1979 – 1980.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung 1976 – 1981.
5. Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia tahun 1998 – 2000.
6. Anggota *National Geographic Society* tahun 2003.
7. Ketua Panitia Kredit Koperasi Kredit Bahagia Jl. Moh. Toha No. 19 Bandung tahun 1997 – 1999.
8. Ketua Umum Koperasi Bahagia Jl. Moh. Toha No. 19 Bandung tahun 2000 - sekarang.

E. PENELITIAN DAN PUBLIKASI

1. Anggota team pelaksana *Sociological Survey* DAS Cikaso Sukabumi tahun 1981.
2. Anggota team peneliti kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 1983 dan tahun 2000.
3. Supervisor peneliti untuk penataan kembali wilayah administrasi dan otonomi DT II Propinsi DT I Jawa Barat tahun 1986.
4. Anggota team peneliti penyusunan Rencana Kerangka Sumber Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi di daerah asal Propinsi Jawa Barat tahun 1986.
5. Anggota team Penyusunan Tipologi Lingkungan dalam Pengembangan DAS Arso Propinsi Irian Jaya tahun 1991.
6. Makalah seminar intern FISIP UNPAD Otonomi yang Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab tahun 1985.
7. Laporan Penelitian, Ketransmigrasian dan Pengembangan Wilayah tahun 1986.
8. Makalah dengan judul: Ilmu Pemerintahan, disampaikan dalam acara seminar bulanan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD tanggal 10 Mei 2001.
9. Makalah dengan judul: Implementasi Otonomi Daerah Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Perundang-undangan, disampaikan pada acara semiloka dengan judul: Pengaruh Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Bapeda Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga

Penelitian UNPAD pada tanggal 11 Juli 2005.

F. SEMINAR YANG DIKUTI

1. Peserta Kegiatan Semiloka Jurusan Ilmu Pemerintahan bagi PTN – PTS se-Jawa Barat dengan tema “Profesionalisasi Studi Ilmu Pemerintahan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD tanggal 14 – 15 Agustus 2000 di Narapati Guest House Bandung.
2. Peserta dalam seminar Religiositas Masyarakat Perkotaan pada tanggal 16 Oktober 2003 di kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok.
3. Moderator dalam acara Forum Optimalisasi Peran Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 2 September 2004.

G. PIAGAM PENGHARGAAN

Satya Karya Bhakti Kelas II bagi tenaga edukatif yang telah memenuhi masa kerja minimal 15 tahun dan telah berjasa dan/ atau telah terbukti kesetiiaannya dan pengabdianya kepada Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Senat Universitas Padjadjaran Nomor 5042/J06/Kep/KP/2003 tanggal 28 Agustus 2003.



UNIVERSITAS INDONESIA

**EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
TINJAUAN KRITIS TENTANG KARAKTERISTIK
DAN IDENTITAS KEILMUAN**

RINGKASAN DISERTASI

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR DOKTOR
DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DENGAN KEKHUSUSAN FILSAFAT,
DAN DIPERTAHANKAN DI DALAM SIDANG TERBUKA
SENAT GURU BESAR UNIVERSITAS INDONESIA
DI BAWAH PIMPINAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
PROF. DR. DER SOZ GUMILAR RUSLIWA SOMANTRI
PADA HARI SABTU, 28 JUNI 2008**

Oleh

FRANCISCUS VAN YLST

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008**



PRIMO VIVERE,

DEINDE PHILOSOPHARI

PERTAMA-TAMA HIDUP DULU,

BARU KEMUDIAN BERFILSAFAT

**(Terjemahan bebas: pertama, menjadi orang
yang realis dulu, baru kemudian menjadi
orang yang idealis)**

**Franciscus van Ylst
Bandung
Kamis, 25 Juni 2008**

TIM PEMBIMBING

Promotor : Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo

Kopromotor : Dr. Akhyar Yusuf Lubis

TIM PENGUJI

1. Dr. Vincencius Y. Jolasa (Ketua Penguji)
2. Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo (Promotor)
3. Dr. Akhyar Yusuf Lubis (Kopromotor)
4. Prof. Dr. Alois Agus Nugroho (anggota)
5. Dr. V. Irmayanti (anggota)
6. Dr. Singkop Boas Boangmanalu (anggota)
7. Dr. S. Margaretha Kushendrawati (anggota)

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk sampai pada tahap akhir disertasi ini, penulis telah melampaui beberapa tahapan penting. Setiap tahapan mulai dari persiapan, perkuliahan, seminar, ujian pra promosi dan sampai ujian promosi memiliki suka duka dan kenangan tersendiri. Semua tahapan akhirnya dapat ditempuh meskipun ada kalanya harus berhenti dan ditempuh ulang perjalanannya. Kekurangan yang terjadi berulang kali dalam proses studi untuk menyelesaikan S3, ini adalah bukti bahwa penulis tidaklah sempurna dan memiliki banyak keterbatasan.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kekuatan dan keselamatan bagi penulis yang telah memberikan kemurahanNya untuk dapat mengikuti semua proses dengan lama waktu enam tahun. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa untuk kesehatan, kekuatan, keuangan dan kesempatan belajar di Universitas Indonesia.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dr. Bambang Wibawarta dan Ketua Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Dr. Vincencius Y. Jolasa dan sekretarisnya Dr. Singkop Boas Boangmanalu atas pengabdian dan pelayanannya kepada para mahasiswa khususnya kepada saya.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H.A. Kartiwa, Drs., SH., MS, dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Nasrullah Nazsir, Drs., M.S atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada promotor penulis Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo atas kesediaannya membimbing dan menerima penulis baik di rumah maupun di fakultas, untuk kesabaran dan ketelitian dalam membimbing proses penulisan disertasi ini dari awal sampai akhir penulisan. Terima kasih kepada ko promotor penulis Dr. Akhyar Yusuf Lubis yang dengan leluasa dan dukungan serta nasihat-nasihatnya membantu sepenuhnya penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. A. Agus Nugroho sebagai penguji dan sekaligus penasihat penulis dalam memperbaiki dan menyelesaikan bagian terpenting dari disertasi ini. Terima kasih juga kepada Dr. V. Irmayanti atas catatan-catatan dan peringatan yang diberikan kepada penulis agar disertasi ini menjadi lebih baik. Rasa terima kasih saya berikan kepada Dr. S. Margaretha Kushendrawati atas koreksi tertulis dari awal sampai akhir disertasi ini, saran-saran, yang sering mengingatkan agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada isteri saya Marthina Hehakaya terima kasih yang setulus-tulusnya karena telah memberikan yang terbaik dari hidupnya, untuk ikut berkorban dengan sabar dan menyatakan dukungan sepenuhnya dalam membantu serta berperan besar dalam menyelesaikan sekolah dan tugas akhir ini. Untuk anak saya Margrieta Christina terima kasih untuk kesabaranmu dalam hidup bersama, keseharian, suka dan duka. Saya merasa bahagia dengan memiliki mereka dan menjadi bersemangat dalam menyelesaikan sekolah.

Kunjungan dan doa yang diberikan oleh Pdt. Jo Lukas dan ibu ke rumah, beserta tim doa untuk penulis dan keluarga sangat mendukung dalam penyelesaian tugas akhir sekolah. Terima kasih atas pelayanannya dan perhatian kepada saya dan keluarga, kiranya Tuhan yang Mahaesa akan memberkati dan meneguhkan pelayanannya.

Akhirnya kepada rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Jenderal Achmad Yani, Koperasi Bahagia, kerabat dan keluarga yang belum tertulis namanya, saya mengucapkan terima kasih.



Depok, 19 Juni 2008

Franciscus van Ylst

ABSTRAK

Disertasi ini merupakan suatu upaya penelitian dari penulis untuk memahami Ilmu Pemerintahan secara epistemologis, dengan menggunakan metodologi hermeneutika yaitu untuk memahami (*verstehen*) dan menjelaskan (*erklären*) tentang paradigma, metodologi, ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan tentang ilmu itu sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam disertasi ini adalah: 1. Apa yang menjadi status ontologis dari Ilmu Pemerintahan? 2. Sejujukanakah Ilmu Pemerintahan dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu? 3. Bagaimanakah metodologi Ilmu Pemerintahan itu?

Thesis Statement, penulis dalam disertasi ini adalah: Ilmu Pemerintahan bukanlah ilmu epistemologi positivistik, dan bukan juga ilmu dengan epistemologi pragmatis instrumental, melainkan ilmu dengan epistemologi pragmatis kritis yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner.

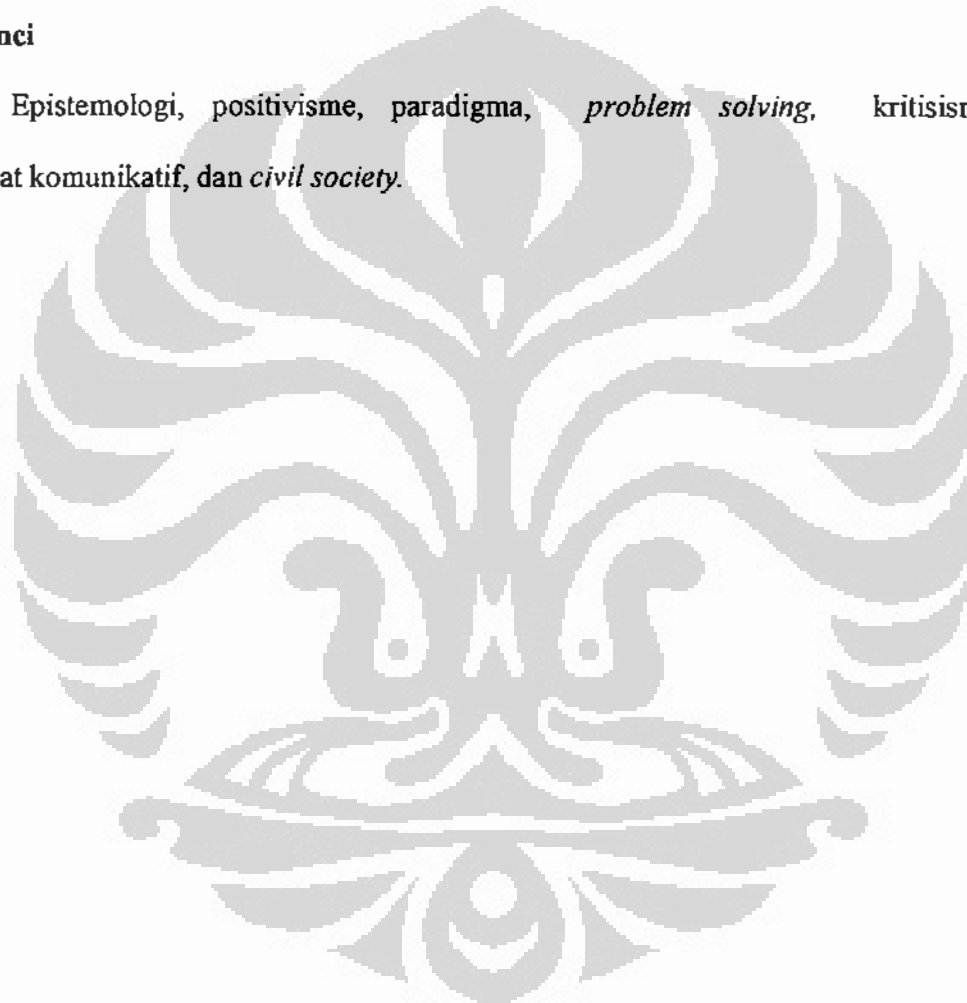
Kesimpulan:

Pengaruh positivisme logis dalam Ilmu Pemerintahan terlihat dengan sangat nyata pada proses kegiatan ilmu pengetahuan, seperti: paradigma, prinsip, metodologi dan analisa yang digunakan untuk melakukan respons dan *problem solving*. Cacat-cacat modernisasi seperti adanya paradigma tunggal dengan rasio, positivisme yang menjadi ideologi adalah bukti bahwa modernisasi belum berjalan dengan sempurna dan perlu diperbaiki serta dicerahkan lebih lanjut dengan wawasan rasio komunikatif. Artinya bukan lagi paradigma tunggal yang berlaku tetapi paradigma timbal balik yaitu

menciptakan komunikasi melalui intersubjektivitas dalam menentukan kepentingan dan kebenaran bersama. Kerangka pemikiran penulis adalah menjelaskan secara kronologis perkembangan epistemologi berdasarkan teori-teori dari: Moritz Schlick, dkk., Karl R. Popper, dkk., Thomas S. Kuhn dan Habermas.

Kata Kunci

Epistemologi, positivisme, paradigma, *problem solving*, kritisisme, masyarakat komunikatif, dan *civil society*.



DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
A B S T R A K	vii
DAFTAR ISI	ix
EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN TINJAUAN KRITIS TENTANG KARAKTERISTIK DAN IDENTITAS KEILMUAN	
Ringkasan Disertasi	1
KERANGKA PEMIKIRAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
CURRICULUM VITAE	30

EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

TINJAUAN KRITIS TENTANG KARAKTERISTIK DAN IDENTITAS KEILMUAN

Ringkasan Disertasi

Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga saat sekarang ini mengalami proses *anomaly* yang ditandai oleh pemikiran tentang Ilmu Pemerintahan oleh para sarjana dari berbagai bidang kompetensi, seperti: hukum, sosiologi administrasi, dan bahkan ilmu teknik. Semua berkontribusi dan memberi karakter terhadap Ilmu Pemerintahan yang berakibat timbulnya polemik dan kontroversi.

Disertasi ini merupakan suatu upaya penelitian dari penulis untuk memahami Ilmu Pemerintahan secara epistemologis, dengan menggunakan metodologi hermeneutika yaitu untuk memahami (*verstehen*) dan menjelaskan (*erklären*) tentang paradigma, metodologi, ruang lingkup dan batas-batas pengetahuan tentang ilmu itu sendiri.

Thesis Statement, penulis dalam disertasi ini adalah: Ilmu Pemerintahan bukanlah ilmu epistemologi positivistik, dan bukan juga ilmu dengan epistemologi pragmatis instrumental, melainkan ilmu dengan epistemologi kritis yang berkarakter interdisipliner dan multidisipliner. Bertolak dari *Thesis Statement* tersebut, penulis menjelaskan tahapan perkembangan epistemologi berdasarkan teori-teori dari: Moritz Schlick, dkk., Karl R. Popper, dkk., Thomas Kuhn dan Habermas, sebagai kerangka pemikiran.

Berpusat pada Universitas Wina dan kemudian dikenal dengan nama *der Wiener Kreis* atau Lingkaran Wina dengan tokohnya Ernst Mach (1838-1916) dan

Moritz Schlick (1882-1936) mereka membentuk kelompok sarjana dengan berbagai latar belakang keahlian dengan tujuan untuk mendiskusikan masalah-masalah filosofis yang berhubungan dengan metode-metode dan landasan ilmu pengetahuan, fokusnya adalah membangun ilmu pengetahuan yang universal dan *unified science*. Ernst Mach dan Schlick berlatar belakang keahlian di bidang fisika memperkuat dan mengembangkan tradisi empirisme ilmu pengetahuan dari positivisme klasik menjadi positivisme logis. Lingkaran Wina mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial dan politik.

Schlick, dkk. melalui Lingkaran Wina mengemukakan konsep demarkasi ilmu pengetahuan. Artinya, garis batas antara wilayah ilmu pengetahuan dan bukan wilayah ilmu pengetahuan. Lingkaran Wina, membagi antara pernyataan yang bermakna (*meaningful*) dan pernyataan yang tidak bermakna (*meaningless*) dengan menggunakan metode verifikasi. Suatu pernyataan yang dapat diverifikasi dan terbukti kebenarannya, maka pernyataan tersebut adalah ilmiah dan sekaligus menunjukkan kebenaran korespondensi. Untuk hal-hal yang tidak bermakna, seperti: Tuhan, jiwa, abadi, dan norma dengan menggunakan metode verifikasi menghasilkan kebenaran yang tidak dapat dibuktikan, karenanya dimasukkan ke dalam wilayah bukan ilmu pengetahuan.

Pengaruh positivisme logis dalam Ilmu Pemerintahan terlihat dengan sangat nyata pada objek yang ditentukan dari Ilmu Pemerintahan, baik itu berwujud organisasi, kekuasaan, kelembagaan dan manajemen yang secara keseluruhan dapat diverifikasi dan diukur cermat dengan menggunakan metode kuantifikasi.

Popper, dalam bukunya *The Logic of Scientific Discovery* lebih menitikberatkan kepada cara kerja ilmu-ilmu pengetahuan alam dan kemudian dikembangkan lebih jauh mengenai ilmu pengetahuan yang objektif dalam bukunya

Objective Knowledge atau dikenal dengan konsep 'tiga (3) dunia'. Pemikiran Popper mengenai demarkasi ilmu pengetahuan, adalah: suatu pernyataan dapat diuji, apakah ada dalam wilayah ilmu pengetahuan atau bukan? Tidak melalui metode verifikasi melainkan menggunakan metode falsifikasi. Artinya, suatu teori yang dapat disangkal dengan pengalaman. Alfons Taryadi dalam bukunya *Epistemologi Pemecahan Masalah*, memberikan contoh sebagai berikut: pernyataan, "esok akan hujan atau tak akan hujan" tidak empiris karena tidak dapat dibantah. Sedangkan, pernyataan "esok akan hujan" akan dianggap empiris, karena bisa disangkal.

Pemikiran Popper mengenai konsep 'tiga dunia', dalam bukunya *Objective Knowledge*, dunia pertama (1) adalah dunia materi atau dunia yang terdiri dari benda-benda fisik. Dunia kedua (2) adalah dunia mental atau proses pemikiran dan dunia ketiga (3) adalah dunia pemahaman atau dunia pengetahuan objektif, dunia teori. Memahami sesuatu berarti mengajukan suatu solusi (*theory tentative*) terhadap suatu problem. Ini semua dengan maksud menemukan kesalahan dan dibuang, tetapi proses ini akan membawa kita kepada problem baru. Skema *Problem Solving* Popper, P1 – TT – EE – P2, arti P1 adalah problem yang menantang pemecahan, TT adalah *Theory Tentative* yang diajukan, EE adalah *Error Elimination* yaitu upaya untuk menemukan dan membuang kesalahan dan P2 adalah problem baru yang muncul setelah proses itu. Ini adalah proses pembuatan teori baru (*theory making*) atau pertumbuhan pengetahuan dengan metode *problem solving*. Perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan dunia tiga dari Popper, yaitu dunia pengetahuan obyektif atau dunia teori. Proses menemukan dan membuang kesalahan adalah proses yang erat hubungannya dengan dunia ke tiga. Dunia 1 dan dunia 2 saling berinteraksi, dunia 2 dan dunia 3 saling berinteraksi, sementara dunia 1 dan dunia 3 tidak berinteraksi secara langsung, melainkan lewat perantara dunia 2. (Karl R. Popper, *Objective*

Knowledge, Oxford, Clarendon Press, reprinted 1974, pages 155). Oleh sebab itu proses menemukan dan membuang kesalahan pada ilmu pengetahuan adalah proses yang berlangsung secara intens di dunia 3 dan tidak berkaitan langsung dengan dunia 1. dalam pengertian dunia materi atau manusia subjeknya.

Komunitas Ilmu Pemerintahan baik yang ada di universitas maupun di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang menyelenggarakan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) belum memahami dengan baik dan benar hakekat penyelenggaraan pendidikan tinggi. Program Studi Ilmu Pemerintahan yang diselenggarakan oleh dua departemen, yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Dalam Negeri menimbulkan dualisme kepentingan. Untuk kepentingan murni ilmu pengetahuan, Program Studi Ilmu Pemerintahan berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang ada di universitas-universitas, sedangkan dengan nama yang sama Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk kepentingan praktis berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan diselenggarakan di STPDN Bandung dan dalam rencana juga akan diadakan di daerah-daerah lain serta Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP Jakarta.

Proses pendidikan untuk program studi Ilmu Pemerintahan yang ada di universitas masih sangat menekankan pada interaksi dunia fisik (dunia 1) dan dunia mental atau proses pemikiran dalam arti sebatas mengetahui dan mengenal (dunia 2). Belum sampai pada tingkat pemahaman yang sesungguhnya, karena tidak menghasilkan *theory tentative* untuk *problem solving* terhadap realitas pemerintahan yang ada. Program Studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri masih sangat menekankan dunia fisik (1) saja, hal ini terbukti dengan sering munculnya tindakan-tindakan kekerasan baik terhadap mahasiswa baru oleh kakak

kelasnya maupun Lembaga Penyelenggara Pendidikannya terhadap beberapa dosen yang mengajar di lingkungan tersebut.

Thomas S. Kuhn, dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* menolak pandangan Popper yang dianggapnya tidak sesuai dengan fakta. Menurut Kuhn tidak pernah terjadi upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi melalui satu perubahan yang sangat mendasar atau melalui suatu revolusi ilmiah. Rumus perkembangan ilmu pengetahuannya, adalah : Paradigma 1, Ilmu Pengetahuan Normal, Anomali, Krisis dan Paradigma 2. Revolusi ilmiah merupakan pergantian paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma ilmiah adalah sebuah model untuk pengembangan ilmu pengetahuan normal dan dirasakan memuaskan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Paradigma Kuhn, memiliki kepentingan pragmatis dan bersifat instrumental, dalam pengertian memberi tuntunan model untuk merespons dan melakukan *problem solving* serta mengembangkan ilmu pengetahuannya

Ilmu Pemerintahan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan paradigma ilmiah yang memiliki kepentingan pragmatis, karena sifat dari Ilmu Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya paradigma ilmiah yang digunakan dalam Ilmu Pemerintahan memiliki kepentingan instrumental sebagai alat untuk dijadikan model dalam mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan ilmu pengetahuannya.

Jürgen Habermas, berpendapat kebenaran pernyataan dengan mencari kesesuaian dengan realitas (*the correspondence theory of truth*) dan kebenaran yang diperoleh dengan melihat hubungan, keteguhan, dan konsistensi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain (*the coherence theory of truth*) yang kesemuanya amat ditentukan oleh paradigma berpikir tunggal subjek rasio. Inilah

yang oleh Habermas, dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*, dikatakan ada kekuasaan lain yang disembunyikan, dan kekuasaan itu adalah paradigma pemahaman timbal balik melalui kebenaran intersubjektivitas.

Cacat – cacat modernisasi seperti paradigma tunggal dengan rasio, positivisme yang menjadi ideologi adalah bukti bahwa modernisasi belum sempurna dan perlu diperbaiki serta dicerahkan lebih lanjut dengan wawasan rasio komunikatif. Artinya bukan lagi paradigma tunggal tetapi paradigma timbal balik. Artinya, terjadi komunikasi, intersubjektivitas dalam menentukan kebenaran.

Habermas mengatakan untuk mencapai masyarakat komunikatif yaitu masyarakat yang komunikasinya terbuka dan berkedudukan sejajar, dapat mempertahankan dan memiliki sebuah ruang bebas dari diktatur dan pemaksaan, yang anggota – anggota masyarakatnya toleran, menghormati martabat semua anggotanya sebagai manusia serta bersama – sama mewujudkan kemampuan berkomunikasi dengan sejajar yang disertai bebas dari tekanan – tekanan.

Menurut Habermas tindakan komunikasi (*communicative action*) adalah jalan yang dapat diterima sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang komunikatif. Paradigma timbal balik atau masyarakat komunikasi, dapat terwujud jika semua agen yaitu Ilmu Pengetahuan, Pemerintah, ilmuwan, tokoh – tokoh ekonomi, sosial dan budaya serta semua elemen masyarakat sebagai peserta dalam melakukan tindakan komunikasi untuk tidak mengejar kepentingan – kepentingan individual (seperti dalam masyarakat kapitalis) tetapi berupaya untuk menyeimbangkan dengan kepentingan serta keadaan umumnya.

Proses penyeimbangan kepentingan antara individu dan masyarakat dapat dibicarakan atau dirundingkan bersama – sama yang kemudian dapat dijadikan referensi bersama untuk melakukan tindakan komunikasi. Proses untuk mewujudkan

masyarakat komunikatif ternyata melalui tahapan – tahapan untuk sampai pada tahapan memiliki “kompetensi komunikatif”. Artinya klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim kejujuran, dan klaim komprehensibilitas dilakukan oleh para agen komunikasi melalui pemerintah, masyarakat dan lain – lain yang mengutamakan komunikasi dua arah (*dialog*) jadi bukan satu arah (*monolog*). Syarat terjadinya perubahan itu dapat terwujud jika negara dan masyarakat memahami keberadaannya masing – masing dan secara sadar mempertanggungjawabkan Perjanjian Sosial yang telah disepakati bersama melalui konstitusi.

Habermas melihat dalam masyarakat terdapat dua tindakan, yaitu Tindakan Instrumental (*instrumental action*) yaitu tindakan individu untuk menaklukkan alam dan menguasainya serta untuk membebaskan diri dari kendala – kendala alam serta untuk mewujudkan dirinya dan Tindakan Komunikasi (*Communicative Action*) yaitu tindakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan dengan memerhatikan kepentingan bersama, pemahaman bersama guna mewujudkan kesadaran bersama.

Instrumental action adalah sikap dan tindakan yang selama ini memperoleh pembenaran baik secara kemanusiaan maupun ilmu pengetahuan melalui positivisme. Didasarkan kepada tujuan yang sangat pragmatis untuk menaklukkan alam dan menguasainya serta untuk mewujudkan dirinya, dan ini adalah kesuksesan yang dinilai positif secara tradisional dan modern berdasarkan ukuran materialisme sekaligus juga mengemban nilai – nilai transendental karena adanya keyakinan terhadap perintah Tuhan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya.

Habermas mengemukakan, *communicative action* yaitu tindakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan dengan memerhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini tidak ada objek yang dieksplorasi habis oleh subjek manusia yang merasakan dirinya berpredikat “sebagai

mahluk tertinggi”. Pandangan Habermas jelas dan membuka selubung tersembunyi “kekuasaan subjek atas objek”, bahwa hubungan antara subjek dan objek adalah hubungan yang setara, saling memengaruhi dan saling membutuhkan untuk kesejahteraan, kepentingan bersama, serta kelangsungan hidup bersama.

Dalam epistemologi Ilmu Pemerintahan terjadi proses untuk memahami secara substansi tentang prinsip, sumber – sumber, ruang lingkup dan batas – batas dari pengetahuan. Paradigma Ilmu Pemerintahan yang positivistik berada dalam arus ilmu pengetahuan modern yang berkecenderungan untuk dapat mempersatukan ilmu – ilmu di bawah satu metodologi, yaitu metodologi empiris – analitis ilmu – ilmu tentang alam, dengan karakteristik bebas nilai dan netral.

Habermas, memberikan kritik terhadap ilmu pengetahuan atas paradigma ilmu pengetahuan yang positivistik dengan teori kepentingan – kepentingan kognitif. Manusia itu diarahkan oleh berbagai kepentingan pengetahuan (teknis, praktis dan emansipatoris) inilah teori kepentingan kognitif Habermas yang mengkritik paradigma ilmu pengetahuan yang modern dan positivistik. Berbagai kepentingan pengetahuan dalam kenyataannya tidak dapat direduksikan satu sama lain dan menjadi suatu *unified science* ke dalam ilmu yang disebut empiris analitis serta menjadikan semua realitas seperti benda – benda alamiah.

Paradigma Ilmu Pemerintahan melalui Teori Kritis Habermas mengalami perubahan substansi, yakni dari rasionalitas instrumental (yang selalu ada dalam posisi ingin menguasai dan menaklukkan) melalui rasionalitas strategis (interaksinya dilakukan secara terbuka dan menghindari tindakan tersembunyi agar tidak terdistorsi dan menimbulkan manipulasi) menuju rasionalitas komunikatif (yang membebaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan sosial).

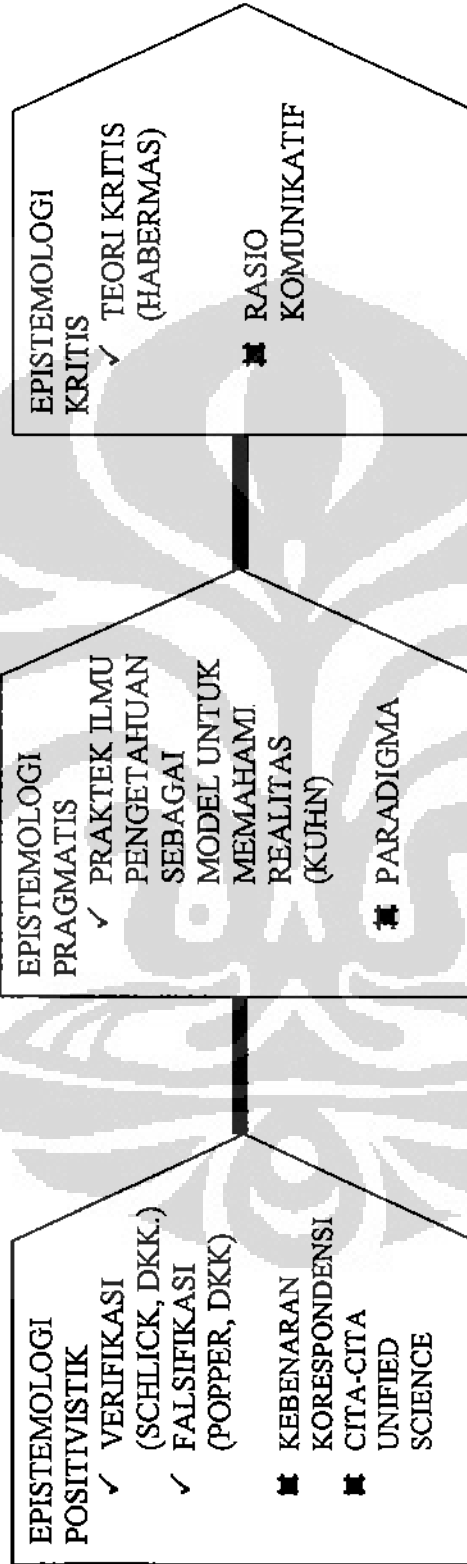
Perubahan paradigma Ilmu Pemerintahan ditandakan dengan adanya perubahan dari titik tolak rasionalitas instrumental menjadi rasionalitas komunikatif, dan proses perubahan berjalan seiring dengan krisis yang terjadi. Sebagai agen perubahan sosial, Ilmu Pemerintahan dapat memberikan landasan ke arah "*civil society*".

Salah satu program studi yang diatur kurikulumnya oleh pemerintah adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0223/U/1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) bidang Ilmu Sosial dan Politik. Penulis mengusulkan sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH UMUM	SKS	USULAN PENULIS	SKS	KETERANGAN
01	PENDIDIKAN PANCASILA	2	PENDIDIKAN PANCASILA	2	TETAP
02	PENDIDIKAN AGAMA	2	PENDIDIKAN AGAMA	2	TETAP
03	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAAN	2	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN	2	TETAP
04	ILMU ALAMIAH DASAR	2	-	-	DIHILANGKAN
05	ILMU BUDAYA DASAR	2	ILMU BUDAYA DASAR	2	TETAP
06	-	-	FILSAFAT MORAL	2	BARU
JUMLAH		10	JUMLAH	10	

Untuk kelompok Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) dan kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK) untuk saat ini masih relevan dan memadai. Meskipun untuk lima tahun ke depan perlu ada evaluasi kembali secara menyeluruh seiring dengan perkembangan keadaan yang tak terduga. Peningkatan yang mendesak dan diperlukan saat ini adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana kurikulum di lapangan agar memiliki kompetensi yang memadai.

**KERANGKA PEMIKIRAN
EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN**



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfian, Hidayat Mukmin (editor), *Perkembangan Ilmu Politik Di Indonesia serta Peranannya Dalam Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Appignanesi, Lisa (Edited by), *Postmodernism*, Free Association Books, London, 1989.
- _____, *Mengenal Posmodernisme*, penerjemah Ziauddin Sardar dan Patrick Curry, Mizan, Bandung, cetakan ke IV 1999.
- Apter, David E., *Analisa Politik*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- _____, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Arbib, Michael A., *The Construction of Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
- Arendt, Hannah, *Asal Usul Totalitarisme*, penerjemah A. Agus Nugroho dan J.M. Soebijanta, 3 jilid, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Awuy, Tommy F., *Problem Filsafat Moderen dan Dekonstruksi*, Lembaga Studi Filsafat, Jakarta, 1993.
- Bagus, Lorens, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Baird, Forrest E. and Walter Kaufmann, *Medieval Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1994.
- _____, *Nineteenth Century Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1997.

- _____, *Twentieth Century Philosophy*, Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 1997.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubain, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Barker, Chris, *Cultural Studies*, Penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan ke dua Februari 2005.
- Bergmann, Gustav, *Realism*, The University of Wisconsin Press, Madison – Milwaukee – London, 1967.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- _____, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- _____, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kesepuluh 1993.
- _____, *Perspektif Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Black, Algernon D., *Etika*, terjemahan staf Yayasan Cipta Loka Caraka, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1990.
- Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer*, Alih Bahasa Ahmad Norma Permata, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, Juli 2003.
- Bochenski, I.M. , *Contemporary European Philosophy*, translated from the German by Donald Nicholl and Karl Aschenbrenner, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1956.
- Budi Hardiman, F., *Kritik Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- _____, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

- Budianto, Irmayanti M., *Realitas dan Obyektivitas*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan ke tiga 1991.
- Budiardjo, Miriam dan Maswadi Rauf, *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Cahn, Steven M., *Classics of Political and Moral Philosophy*, Oxford University Press, New York – Oxford, 1994.
- Chilcote, Ronald H., *Theories of Comparative Politics*, westview press, Boulder – San Francisco – Oxford, 1994.
- Cohen, I. Bernard, *A History of Science*, Cambridge University Press, Cambridge, reprinted 1989.
- Collins, James, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 4th printing 1961.
- Dahl, Robert, et. al. (edited by), *The Democracy Sourcebook*, The MIT Press, Cambridge – Massachusetts – London, 2003.
- Dampier, Sir William Cecil. *A History of Science*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- De Crespigny, Anthony and Jeremy Cronin, (edited by), *Ideologies of Politics*, Oxford University Press, South Africa, 1975.
- De Tocqueville, Alexis, *Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*, penerjemah Yusi A. Pareanom, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

- Driyarkara, N., *Filsafat Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kesebelas 1992.
- Edman, Irwin, (Edited), *The Philosophy of Plato*, The Modern Library, New York, 1956.
- Faulks, Keith, *Political Sociology*, Edinburg University Press, Great Britain, 1999.
- Finer, Herman, *Modern Government*, Methuen, London, 1956.
- Flew, Antony, *Western Philosophy*, Thames and Hudson, New York, reprinted 1994.
- Fontana, Biancamaria, (edited), *The Invention of The Modern Republic*, Cambridge University Press, Great Britain, 1994.
- Fukuyama, Francis, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Memperkuat Negara*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- _____, *Guncangan Besar*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Gadamer, Hans-Georg, *Truth and Method*, Crossroad, New York, 1992.
- Gaffar Karim, Abdul, (editor) *Persoalan Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Gensler, Harry J., *Ethics*, Routledge, London – New York, reprint 2003.
- Geuss, Raymond, *The Idea of a Critical Theory*, Cambridge University Press, Cambridge – New York, reprinted 1989.
- Guba, Egon G., *The Paradigm Dialog*, Sage Publications, Newbury Park – London – New Delhi, 1990.
- Gunawan, Jamil dkk., *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.

Habermas, Jürgen, *Teori Kritis Jürgen Habermas, The Critical Theory of Jürgen Habermas*, penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan pertama September 2006.

_____, *The Theory of Communicative Action*, volume 1, translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1984.

_____, *Kritik atas Rasio Fungsionalis, Theorie des Kommunikativen Handelns, band II*, penerjemah Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, cetakan pertama Maret 2007.

Hadi, P. Hardono, *Epistemologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

_____, *Jati Diri Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid 1 s/d 4, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, jilid 1 dan 2, Kanisius, Yogyakarta, cetakan kedelapan 1992.

Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Hawgood, John A., *The Citizen and Government*, Nicholson & Watson, London, 1947.

Heidegger, Martin., *Discourse on Thinking*, Harper Torchbooks, New York, 1966.

_____, *Being and Time*, Oxford, Great Britain, reprinted 1973.

Heraty, Toeti, *Aku Dalam Budaya*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1984.

Heriyanto, Husain, *Paradigma Holistik*, Teraju, Jakarta, 2003.

Heryanto, Ariel dan Sumit K. Mandal, *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004.

- Hindess, Barry, *Philosophy and Methodology in the Social Sciences*, The Harvester Press, Great Britain, 1977.
- Hobbes, Thomas., *Leviathan*, Collins Fontana, Great Britain, Seventh Impression 1974.
- Hoefnagels, Harry, *Wat Heet Sociaal*, Amboboeken/Baarn, Westland nv – Schoten, 1983.
- Hoogerwerf, A., *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- _____, *Politikologi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Hoover, Kenneth and Todd Donovan, *The Elements of Social Scientific Thinking*, Thomson Wadsworth, Canada, 2004.
- Horgan, John, *The End of Science*, (*Senjakala Ilmu Pengetahuan*), Penerjemah Djejen Zainuddin, Teraju, Jakarta, Cetakan ke I, September 2005.
- Howard, Roy J., *Hermeneutika*, penerjemah Kusmana dan M.S. Nasrullah, Nuansa, Bandung, cetakan ke 2 April 2001.
- Huntington, Samuel P., et.al. *Amerika dan Dunia*, penerjemah Yusi A. Pareanom dan A. Zaim Rofiqi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
- Hutten, Ernest H., *The Origins of Science*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1962.
- Johnson, Terence J., *Profesi dan Kekuasaan*, Grafiti, Jakarta, 1991.
- Kebung Beoang, Konrad, *Plato Jalan Menuju Pengetahuan Yang Benar*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende – Flores, cetakan ke ix 1993.

- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, London, 1962.
- Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Bentang, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, Mizan, Bandung, 2002.
- Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy*, Oxford University Press, Great Britain, 2002.
- Langer, Susanne K., *Philosophy in a New Key*, Harvard University Press, New York, eleventh printing 1961.
- Laski, Harold J., *A Grammar of Politics*, George Allen & UNWIM LTD, London, 1957.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri*, Gramedia, Jakarta, edisi yang disempurnakan 1989.
- Leakey, Richard, *Asal Usul Manusia*, penerjemah Andya Primanda, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Lee, HDP., *Plato The Republic*, Penguin Books, London, reprinted 1960.
- Leech, Geoffrey, *Principles of Pragmatics*, Longman, London – New York – Singapore, eighth impression 1991.
- Lévi – Strauss, Claude, *Mitos dan Makna*, Marjin Kiri, Serpong – Tangerang, 2005.

Lindsay, A.D., *The Modern Democratic State*, Oxford University Press, London - New York - Toronto, 1955.

Lubis, Akhyar Yusuf, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Akademia, Bogor, 2004.

_____, *Metodologi Posmodernis*, Akademia, Bogor, 2004.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott (Penyunting), *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Lyotard, Jean Franqois, *The Differend Phrases in Dispute*, University of Minnesota Press, Minneapolis, second printing 1992.

_____, *The Postmodern Explained*, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1992.

Machiavelli, Niccolo, *The Prince and The Discourses*, Modern Library College Editions, New York, 1950.

_____, *Sang Penguasa (Il Principe)*, penerjemah C. Woekirsari, Gramedia, Jakarta, cetakan keenam 2002.

MacIver, R.M., *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1941.

_____, *The Web of Government*, The Macmillan Company, New York, 1963.

Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991.

_____, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

_____, *Filsafat Kebudayaan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.

Malaka, Tan, *MADILOG (Materialisme Dialektika Logika)*, Pusat Data Indikator, Jakarta, 1999.

- Mangunhardjana, A., *Isme – Isme Dari A sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Mannheim, Karl, *Ideologia dan Utopia*, terjemahan F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Mayo, Henry B., *Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- McClelland, J.S., *A History of Western Political Thought*, London and New York, Routledge, 1996.
- Melling, David, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002.
- Merriam, Charles E., *Systematic Politics*, University of Chicago, 1957.
- Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan*, alih bahasa J.R. Sunaryo, Gramedia, Jakarta, Juli 1993.
- Muhaimin, Yahya dan Colin MacAndrews, *Masalah – Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kedua 1981.
- Musa, Mohammad dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Fajar Agung, Jakarta, 1988.
- Myerson, George, *Heidegger, Habermas and the Mobile Phone*, Icon Books, Cambridge, UK, 2001.
- Nasroen, M., *Asal Mula Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke dua, Maret 1983.
- _____, *Kybernology*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan pertama Mei 2003.

Norris, Christopher, *The Truth about Postmodernism*, Blackwell Publishers, UK – USA, 1993.

_____, *Minding the Gap*, University of Massachusetts Press, USA, 2000.

Paul, Leslie, *The English Philosophers*, Faber and Faber, London, 1952.

Paz, Octavio, *Lévi – Strauss Empu Antropologi Struktural*, LKIS, Yogyakarta, 1997.

Plato, *The Republic*, Penguin Books, Great Britain, 1960.

Plato, , *Republik*, G. Sukur, Sylvester (Penerjemah) Bentang Budaya, Yogyakarta, 2002.

Piaget, Jean, *Psychology and Epistemology, Towards a Theory of Knowledge*, Penguin Books, Singapore, 1972.

Piliang, Indra J., dkk. (editor), *Otonomi Daerah*, Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Jakarta, 2003.

Poespoprodjo, W., *Logika Scientifika*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Poespowardojo, Soerjanto, *Strategi Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas*, penerjemah F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Popper, Karl R., *Conjectures and Refutations*, Harper & Row, New York London, 1968.

_____, *Objective Knowledge, an evolutionary approach*, London, Oxford University Press, 1972.

_____, *The Logic of Scientific Discovery*, Routledge, New York, Reprinted 1992.

Porter, J.M., (edited by), *Sophia and Praxis*, Chatham House Publishers, Inc.,

Chatham, New Jersey, 1984.

Qadir, C.A., *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

1988.

Rand, Ayn, *Epistemologi Obyektif*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.

Rapar, Jan Hendrik, *Filsafat Politik Augustinus*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

_____, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

_____, *Filsafat Politik Machiavelli*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

_____, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Reichenbach, Hans, *The Rise of Scientific Philosophy*, University of California Press,
Berkeley and Los Angeles, 1968.

Reinsch, Paul S., *The Fundamental Principles of Government*, Commercial Press,
LTD, Shanghai, 1921.

Ricoeur, Paul, *Interpretation Theory*, Texas Christian University Press, For Worth,
1976.

_____, *Filsafat Wacana*, penerjemah Musnur Hery, Institut for Religion and
Civil Society Development, Yogyakarta, cetakan ke II 2003.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, penerjemah
Alimandan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga 2002.

_____, *Teori Sosial Postmodern*, Penerjemah Muhammad Taufik, Kreasi
Wacana, Yogyakarta, cetakan ke tiga September 2005.

- Roberts, David, *Reconstructing Theory*, Melbourne University Press, Malaysia, 1995.
- Rooijakkers, Ad., *Mengajar dengan Sukses*, penerjemah Soenoro, Grasindo, Jakarta, cetakan kedelapan 1991.
- Rorty, Richard, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1979.
- Rosen, Michael and Jonathan Wolff (edited), *Political Thought*, Oxford University Press, Great Britain, 1999.
- Ross, Alf, *Why Democracy*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1952.
- Runua, Nung (editor), *Dinamika Politik Indonesia*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994.
- Russell, Bertrand, *Dampak Ilmu Pengetahuan Atas Masyarakat*, penerjemah Irwanto dan Robert Haryono Imam, Gramedia, Jakarta, 1992.
- _____, *Our Knowledge of the External World*, Routledge, London – New York, reprinted 1993.
- _____, *Sejarah Filsafat Barat*, penerjemah Sigit Jatmiko dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sabine, George H. and Thomas L. Thorson, *A History of Political Theory*, Harcourt Brace College Publishers, USA, 1989.
- Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies*, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, seventh edition, 1987.

- Seidman, Steven, and Wagner, David G., *Postmodernism and Social Theory*, Blackwell Publishers, Great Britain, reprinted 1992.
- Shah, A.B., *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Shapiro, Ian, *Asas Moral Politik*, penerjemah Theresia Wurjantari dan Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Simon, Yves R., *Philosophy of Democratic Government*, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1951.
- Simpson, George Gaylord, *The Meaning of Evolution*, Oxford University Press, New York, ninth printing 1959.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Solomon, Robert C. & Kathleen M. Higgins, *Sejarah Filsafat*, penerjemah Saut Pasaribu, Benteng Budaya, Yogyakarta, Cetakan ke 2, Juni 2003.
- Sorensen, Roy, *A Brief History of the Paradox*, Oxford University Press, Oxford – New York, 2003.
- Skinner, Quentin, *The Return of Grand Theory in The Human Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
- Smith, T.V. and Marjorie Grene (edited by), *From Descartes to Locke*, the University of Chicago Press, Chicago – London, tenth impression 1974.
- Spencer, Herbert, *The Man versus The State*, Watts & Co., London, 1950.
- Stoker, Gerry, *The Politics of Local Government*, Macmillan, London, 1991.
- Strathern, Paul, *90 Menit Bersama Plato*, penerjemah Frans Kowa, Erlangga, Jakarta, 2001.

- _____, *90 Menit Bersama Aristoteles*, penerjemah Frans Kowa, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Strauss, Claude Le'vi, *Mitos dan Makna*, Alih bahasa LP Hok, Marjin Kiri, Tangerang, 2005.
- Subangun, Emmanuel, *Syuga Derrida*, CRI Alocita, Yogyakarta, 1994.
- Sugiharto, I. Bambang, *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Susanto, Budi, dan Praptadiharja Sudiarta (editor), *Nilai – Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1992.
- Susanto, Hary, PS., *Mitos*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Sutrisno, Mudji dan F. Budi Hardiman (editor), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan pertama Mei 1995.
- Syafrudin, Ateng (saduran), *Pemerintah dan yang Diperintah*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan ke VI 2005
- Taryadi, Alfons, *Epistemologi Pemecahan Masalah*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1981.
- Thoha, Mahmud, *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial & Humaniora*, Teraju, Jakarta, 2004.

- Thoyibi, M. (editor), *Filsafat Ilmu*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999.
- Tim Redaksi Driyarkara, *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu – Ilmu*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Tower Sargent, Lyman, *Contemporary Political Ideologies*, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1987.
- Tsanoff, Radoslav A., *The Great Philosophers*, Harper & Brothers Publishers, New York, 1953.
- Utomo, Tjipto dan Kees Ruijter, *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Van der Meulen, W.J., *Ilmu Sejarah dan Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan ke 2, 1991.
- Van Laer, Henry, *Filsafat Sain*, Lembaga Penterjemah & Penulis Muslim Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Van Melsen, A.G.M., *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Van Peursen, C.A., Beerling, Kwee, dan Mooij, *Filsafat Ilmu*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.
- _____, *Susunan Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Verhaak, C. dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Verhaar, John W.M., *Identitas Manusia*, Kanisius – BPK, Yogyakarta – Jakarta, cetakan kedua 1991.

Watloly, Aholiab, *Tanggung Jawab Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan & Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Whitehead, Alfred North, *Fungsi Rasio*, diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Wit, Daniel, *Comparative Political Institutions*, Henry Holt and Company, New York, 1953.

Wrong, Dennis (editor), *Max Weber*, penerjemah A. Asnawi, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2003.

Wuthnow, Robert, et.al., *Cultural Analysis*, Routhledge & Kegan Paul, Boston – London, 1984.

B. KAMUS BAHASA, KAMUS FILSAFAT DAN ENSIKLOPEDIA

Angeles, Peter A., *Dictionary of Philosophy*, Barnes & Noble Books, USA, 1981.

Agnes, Michael (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Wiley Publishing, Inc., USA, fourth edition 2004.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975.

Ehrlich, Eugene, Stuart Berg Flexner, Gorton Carruth, Joyce M. Hawkins, *Oxford American Dictionary*, Avon Books, New York, 1986.

Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.

- Hawkesworth, Mary and Maurice Kogan, *Encyclopedia of Government and Politics*, volume 1 and 2, Routledge, London – New York, 1992.
- Hawkins, Joyce M., *The Oxford Paperback Dictionary*, Oxford University Press, Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, Seventh edition, 2005.
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, Seventh edition, 2005.
- Martin, Robert M., *The Philosopher's Dictionary*, Broadview Press, Canada – USA, 1991.
- Marwoto, BJ dan Witdarmono, H., *Proverbia Latina*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Mish, Frederick C., (editor in chief), *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, USA, Philippines, tenth edition, 2000.
- Neufeldt, Victoria, (editor in chief), *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, USA, Third Edition, 1996.
- Prent, K., Adisubrata, J., Poerwadarminta, WJS., *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Sinclair, John, *Cobuild English Dictionary for Advanced Learners*, Harper Collins Publishers, Spain, third edition 2001.
- Stevens, Mark. A. (editor), *Merriam – Webster's Collegiate Encyclopedia*, Merriam – Webster Incorporated, Springfield – Massachusetts, USA, 2000.
- Treffry, Diana, *Collins Paperback English Dictionary*, Harper Collins Publishers, Great Britain, 2003.

Webster's, Merriam, *Collegiate Thesaurus*, Merriam – Webster Incorporated, USA, 1988.

Wehmeier, Sally (chief editor), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, China, seventh edition 2005.

C. JURNAL DAN TESIS

Driyarkara, Tahun XIX No. 4, *Kritik Ilmu dan Ilmu Kritis*, STF Driyarkara, Jakarta, 1992/1993.

_____, Tahun XX No. 2, *Kekuasaan Negara dan Legitimasinya*, STF Driyarkara, Jakarta, 1993/1994.

_____, Tahun XX No. 4, *Menggali Perspektif Baru Post Modernisme*, STF Driyarkara, Jakarta, 1993/1994.

_____, Tahun XXVI No. 2, *Pemikiran Filosofis Negara*, STF Driyarkara Jakarta, tanpa tahun.

Jurnal Filsafat, Tahun I No. 1, *Postmodernisme*, Lembaga Studi Filsafat dan Institute for Philosophy and the Future of Humanity, Jakarta, tanpa tahun.

Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial, No. 2, *Dari Otonomi ke Disintegrasi*, Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu – Ilmu Sosial Universitas Indonesia dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Jurnal Ilmu Politik, No. 1, *Perkembangan Teori dan Analisis Situasi Sosial Politik*, AIPI – LIPI – Gramedia, Jakarta, 1989.

_____, No. 14, *Hubungan Negara dengan Masyarakat*, AIPI – LIPI – Gramedia, Jakarta, 1993.

Melintas, Tahun 19 No. 60, *Konflik Sebagai Wacana Afirmatif*, Jurnal Filsafat dan Teologi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Agustus 2003.

Van Ylst, Franciscus, *Hakekat Ilmu Pemerintahan*, Tesis S2 Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Filsafat, Jakarta, 1998.

D. SURAT KABAR

Kompas, *Taruhan Jalan Desentralisasi*, hal. 7, 27 Maret 2007.

_____, *Eksistensi Ilmu Murni Terancam*, edisi Jawa Barat, 30 Mei 2007.

_____, *Kurikulum Beridentitas Kerakyatan*, hal. 14, 31 Mei 2007.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

N a m a : Franciscus van Ylst

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 September 1953

A g a m a : Kristen Protestan

A l a m a t : Taman Kopo Indah I Blok F No. 75
RT 07 RW 15 Bandung 40226
Jawa Barat

Pekerjaan : Dosen tetap pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran Bandung

N I P : 131122442

Pangkat/golongan/jabatan : Penata TK. I/III/d/Lektor Madya

Nama ayah kandung : Willem van Ylst (alm.)

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama ibu kandung : Griet Charlotte de Haas (alm.)

Nama isteri : Marthina Hehakaya

Pekerjaan : Badan Urusan Logistik (BULOG)
Divisi Regional Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta No. 711 A Bandung
40286

Nama anak : Margrieta Christina

Pekerjaan : Siswa SMAK 1 Bina Bakti

B. PENDIDIKAN

1. Lulus Sekolah Dasar dari Lembaga Pendidikan Sosial Kristen Bandung tahun 1966.
2. Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Yayasan Badan Pendidikan Umum Bandung tahun 1973.
3. Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Yayasan Badan Pendidikan Umum Bandung tahun 1975.
4. Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1981, dengan judul skripsi: Suatu Tinjauan tentang Peranan Walikotaamadya Sebagai Kepala Wilayah Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Sarjana S2 Ilmu Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Jakarta tahun 1998, dengan judul tesis: Hakekat Ilmu Pemerintahan.
6. Studi S3 Ilmu Filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok tahun 2008, dengan judul disertasi: Epistemologi Ilmu Pemerintahan: Tinjauan Kritis tentang karakteristik dan Identitas keilmuan.

C. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Guru SMP Katolik Pandu Bandung tahun 1981 – 1983.
2. Guru SMP Katolik Yos Sudarso Bandung 1981 – 1983.
3. Guru SMA Ampera Bandung 1984.

4. Dosen tetap pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung 1982 – sekarang.
5. Dosen tidak tetap pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Bandung 1995 – 1997.
6. Dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung 1995 – 1997.
7. Dosen tidak tetap pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Yayasan Kartika Eka Paksi Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi tahun 2003 – sekarang.

D. ORGANISASI

1. Ketua OSIS SMA Yayasan Badan Pendidikan Umum Jl. Lombok Bandung tahun 1975.
2. Anggota Paduan Suara Gereja Sidang Jemaat Allah Jl. Merdeka No. 32 Bandung 1976 – 1979.
3. Ketua Kaum Muda Gereja Sidang Jemaat Allah Jl. Merdeka No. 32 Bandung 1979 – 1980.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung 1976 – 1981.
5. Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia tahun 1998 – 2000.
6. Anggota *National Geographic Society* tahun 2003.
7. Ketua Panitia Kredit Koperasi Kredit Bahagia Jl. Moh. Toha No. 19 Bandung tahun 1997 – 1999.
8. Ketua Umum Koperasi Bahagia Jl. Moh. Toha No. 19 Bandung tahun 2000 - sekarang.

E. PENELITIAN DAN PUBLIKASI

1. Anggota team pelaksana *Sociological Survey* DAS Cikaso Sukabumi tahun 1981.
2. Anggota team peneliti kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 1983 dan tahun 2000.
3. Supervisor peneliti untuk penataan kembali wilayah administrasi dan otonomi DT II Propinsi DT I Jawa Barat tahun 1986.
4. Anggota team peneliti penyusunan Rencana Kerangka Sumber Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi di daerah asal Propinsi Jawa Barat tahun 1986.
5. Anggota team Penyusunan Tipologi Lingkungan dalam Pengembangan DAS Arso Propinsi Irian Jaya tahun 1991.
6. Makalah seminar intern FISIP UNPAD Otonomi yang Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab tahun 1985.
7. Laporan Penelitian, Ketransmigrasian dan Pengembangan Wilayah tahun 1986.
8. Makalah dengan judul: Ilmu Pemerintahan, disampaikan dalam acara seminar bulanan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD tanggal 10 Mei 2001.
9. Makalah dengan judul: Implementasi Otonomi Daerah Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Perundang-undangan, disampaikan pada acara semiloka dengan judul: Pengaruh Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Bapeda Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga

Penelitian UNPAD pada tanggal 11 Juli 2005.

F. SEMINAR YANG DIKUTI

1. Peserta Kegiatan Semiloka Jurusan Ilmu Pemerintahan bagi PTN – PTS se-Jawa Barat dengan tema “Profesionalisasi Studi Ilmu Pemerintahan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD tanggal 14 – 15 Agustus 2000 di Narapati Guest House Bandung.
2. Peserta dalam seminar Religiositas Masyarakat Perkotaan pada tanggal 16 Oktober 2003 di kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok.
3. Moderator dalam acara Forum Optimalisasi Peran Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d. 2 September 2004.

G. PIAGAM PENGHARGAAN

Satya Karya Bhakti Kelas II bagi tenaga edukatif yang telah memenuhi masa kerja minimal 15 tahun dan telah berjasa dan/ atau telah terbukti kesetiiaannya dan pengabdianya kepada Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Senat Universitas Padjadjaran Nomor 5042/J06/Kep/KP/2003 tanggal 28 Agustus 2003.